



RENCANA AKSI DAERAH

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) /
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025 - 2029



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	i
DAFTAR TABEL.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Keselarasan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Terhadap Asta Cita, RPJMN dan RPJMD ..	1
1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs.....	3
1.3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs	3
1.4. Pembiayaan TPB/SDGs.....	3
1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs.....	4
1.6. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs	4
BAB II KONDISI PENCAPAIAN TARGET SDGs.....	6
2.1. Tujuan 1: Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun	6
2.1.1. Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan.....	6
2.1.2. Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.....	7
2.1.3. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	7
2.1.4. Persentase Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas	8
2.1.5. Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan	9
2.1.6. Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	9
2.1.7. Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap	10
2.1.8. Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin	11
2.1.9. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan	12
2.1.10. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	13
2.1.11. Persentase Rumah Kumuh Perkotaan.....	14
2.1.12. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.....	14
2.1.13. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/ sederajat	15

2.1.14.	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran.....	16
2.1.15.	Jumlah Korban Meninggal, Hilang, dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang 17	
2.1.16.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial	17
2.1.17.	Pendampingan Psikososial Korban Bencana Sosial	18
2.2.	Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.....	19
2.2.1.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	19
2.2.2.	Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita	19
2.2.3.	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.....	20
2.2.4.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita	21
2.2.5.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Dua Tahun/Baduta	22
2.2.6.	Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak pada Usia Kurang dari 5 Tahun Berdasarkan Tipe	22
2.2.7.	Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil	23
2.2.8.	Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 (enam) Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif ...	24
2.2.9.	Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) .	24
2.3.	Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	25
2.3.1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	25
2.3.2.	Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	26
2.3.3.	Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	26
2.3.4.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 Kelahiran Hidup	27
2.3.5.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup	27
2.3.6.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	28
2.3.7.	Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa	29
2.3.8.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 Penduduk.....	30
2.3.9.	Kejadian Malaria per 1000 Orang	30
2.3.10.	Persentase Merokok pada Penduduk Umur ≤ 18 Tahun	31
2.3.11.	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	31

2.3.12.	Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) atau Pasangannya yang memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern	32
2.3.13.	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin.....	33
2.3.14.	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern	34
2.3.15.	Angka Kelahiran pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	35
2.3.16.	Total Fertility Rate (TFR)	35
2.3.17.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	36
2.3.18.	Persentase Merokok pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun	37
2.3.19.	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas.....	37
2.3.20.	Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan	38
2.4.	Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar sepanjang Hayat untuk Semua	39
2.4.1.	Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B	39
2.4.2.	Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B	39
2.4.3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sederajat.....	40
2.4.4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Sederajat	40
2.4.5.	Rata-Rata Lama Sekolah	41
2.4.6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	42
2.4.7.	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki pada SD-Sederajat.....	42
2.4.8.	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki pada SMP Sederajat	43
2.4.9.	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun	43
2.4.10.	Proporsi Sekolah dengan Akses Listrik	44
2.4.11.	Proporsi Sekolah dengan Akses Internet untuk Tujuan Pengajaran	45
2.4.12.	Persentase Sekolah dengan Akses Komputer untuk Tujuan Pengajaran	45
2.4.13.	Persentase Sekolah dengan Akses Air Minum Layak.....	46
2.4.14.	Persentase Sekolah dengan Akses Fasilitas Cuci Tangan Higienis.....	47
2.4.15.	Persentase Guru PAUD Tersertifikasi	47
2.4.16.	Persentase Guru SD Tersertifikasi	48
2.4.17.	Persentase Guru SMP Tersertifikasi	49
2.4.18.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	49
2.4.19.	Jumlah Pustakawan	50
2.5.	Tujuan 5: Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.....	51

2.5.1.	Jumlah Kebijakan yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan ...	51
2.5.2.	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	51
2.5.3.	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah, dan Pemerintah Daerah	52
2.5.4.	Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam.....	53
2.6.	Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua.....	54
2.6.1.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	54
2.6.2.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak	54
2.6.3.	Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja.....	55
2.6.4.	Kualitas Air Sungai sebagai Sumber Air Baku	56
2.7.	Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	57
2.7.1.	Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita	57
2.7.2.	PDRB Per Kapita.....	57
2.7.3.	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	58
2.7.4.	Persentase Tenaga Kerja Formal	59
2.7.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	59
2.7.6.	Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang Tidak Sedang Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET).....	60
2.7.7.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	61
2.7.8.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	61
2.8.	Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Kreatif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	62
2.8.1.	Jumlah Dermaga Penyeberangan	62
2.8.2.	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDRB	62
2.8.3.	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	63
2.8.4.	Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri	64
2.8.5.	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah terhadap PDRB	64
2.8.6.	Proporsi Individu yang Menguasai Telepon Genggam dan Menggunakan Internet.....	65
2.9.	Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	66
2.9.1.	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	66
2.9.2.	Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	67

2.9.3.	Jumlah Kota Pusaka di Kawasan Perkotaan Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil.....	67
2.9.4.	Jumlah Korban Meninggal, Hilang, dan Terkena Dampak Bencana per 100.000 Penduduk	68
2.10.	Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.....	69
2.10.1.	Jumlah Limbah B3 yang Terkelola dan Proporsi Limbah B3 yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan.....	69
2.10.2.	Jumlah Timbulan Sampah yang Didaur Ulang	70
2.10.3.	Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah	70
2.11.	Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.....	71
2.11.1.	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1–17 Tahun yang Mengalami Hukuman Fisik dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir	71
2.11.2.	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1–17 Tahun yang Mengalami Agresi Psikologis dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir	72
2.11.3.	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1–17 Tahun yang Mengalami Hukuman Fisik dan/atau Agresi Psikologis dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir	73
BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs.....		74
3.1.	Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan.....	74
3.2.	Tujuan 2: Tanpa Kelaparan	78
3.3.	Tujuan 3: Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera	80
3.4.	Tujuan 4: Pendidikan yang Berkualitas	85
3.5.	Tujuan 5: Kesetaraan Gender	89
3.6.	Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	92
3.7.	Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau	96
3.8.	Tujuan 8: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan serta Pekerjaan Layak untuk Semua.....	99
3.9.	Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi.....	104
3.10.	Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	108
3.12.	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	115
3.13.	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	119
3.14.	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, Kelembagaan yang Tangguh	121
3.15.	Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.....	125

BAB IV TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN RAD TPB/SDGS	129
4.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi.....	129
4.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS	132
4.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi.....	133
BAB V PENUTUP	134
LAMPIRAN.....	135
Matriks 1.....	135
Matriks 2B	153
Matriks 3.....	231

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Penyelarasan RAD TPB/SDGs dengan Dokumen Perencanaan Lain	2
Gambar 2. 1. Realisasi dan Target Tingkat Kemiskinan Kota Makassar Tahun 2021 – 2024	6
Gambar 2. 2. Realisasi dan Target Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Kota Makassar Tahun 2021 – 2024	7
Gambar 2. 3. Realisasi dan Target Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	8
Gambar 2. 4. Realisasi dan Target Persentase Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	9
Gambar 2. 5. Realisasi dan Target Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	9
Gambar 2. 6. Realisasi dan Target Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024	10
Gambar 2. 7. Realisasi dan Target Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	11
Gambar 2. 8. Realisasi dan Target Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 tahun yang Berstatus Kawin di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024	12
Gambar 2. 9. Realisasi dan Target Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	13
Gambar 2. 10. Realisasi dan Target Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	13
Gambar 2. 11. Realisasi dan Target Persentase Rumah Kumuh Perkotaan di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024	14
Gambar 2. 12. Realisasi dan Target Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	15
Gambar 2. 13. Realisasi dan Target Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Sederajat di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	16
Gambar 2. 14. Realisasi dan Target Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Makassar Tahun 2023 – 2024.....	16
Gambar 2. 15. Realisasi dan Target Jumlah Korban Meninggal, Hilang, dan Terkena Dampak Bencana per 100.000 Orang di Kota Makassar Tahun 2023 – 2024	17
Gambar 2. 16. Target dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	18
Gambar 2. 17. Target dan Realisasi Pendampingan Psikososial Korban Bencana Sosial di Kota Makassar Tahun 2022 – 2024.....	18
Gambar 2. 18. Realisasi Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024	19
Gambar 2. 19. Target dan Realisasi Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024	20
Gambar 2. 20. Target dan Realisasi Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024	21

Gambar 2. 21. Target dan Realisasi Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita di Kota Makassar Tahun 2021-2024	21
Gambar 2. 22. Target dan Realisasi Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Dua Tahun/Baduta di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024	22
Gambar 2. 23. Target dan Realisasi Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak pada Usia Kurang dari 5 Tahun Berdasarkan Tipe di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	23
Gambar 2. 24. Target dan Ralisasi Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	23
Gambar 2. 25. Target dan Ralisasi Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 (enam) Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024	24
Gambar 2. 26. Target dan Realisasi Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan Tingkat Konsumsi Ikan di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024	25
Gambar 2. 27. Target dan Realisasi Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.	25
Gambar 2. 28. Target dan Realisasi Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024	26
Gambar 2. 29. Target dan Realisasi Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	27
Gambar 2. 30. Target dan Realisasi Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	27
Gambar 2. 31. Target dan Realisasi Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	28
Gambar 2. 32. Target dan Realisasi Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	29
Gambar 2. 33. Target dan Ralisasi Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024	29
Gambar 2. 34. Target dan Realisasi Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 Penduduk di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	30
Gambar 2. 35. Target dan Realisasi Kejadian Malaria per 1000 Orang di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	31
Gambar 2. 36. Target dan Realisasi Persentase Merokok pada Penduduk Umur ≤18 Tahun di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	31
Gambar 2. 37. Target dan Realisasi Prevalensi Tekanan Darah Tinggi di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	32
Gambar 2. 38. Target dan Realisasi Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) atau Pasangannya yang memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024	33
Gambar 2. 39. Target dan Realisasi Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024	34
Gambar 2. 40. Target dan Realisasi Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	34
Gambar 2. 41. Target dan Realisasi Angka Kelahiran pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	35
Gambar 2. 42. Target dan Realisasi Total Fertility Rate (TFR) di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024 ...	36

Gambar 2. 43. Target dan Realisasi Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	36
Gambar 2. 44. Target dan Realisasi Persentase Merokok pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	37
Gambar 2. 45. Target dan Realisasi Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	38
Gambar 2. 46. Target dan Realisasi Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024.....	38
Gambar 2. 47. Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B	39
Gambar 2. 48. Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B	40
Gambar 2. 49. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sederajat.....	40
Gambar 2. 50. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Sederajat.....	41
Gambar 2. 51. Rata-Rata Lama Sekolah	41
Gambar 2. 52. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	42
Gambar 2. 53. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki pada SD-Sederajat.....	43
Gambar 2. 54. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki pada SMP Sederajat	43
Gambar 2. 55. Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun	44
Gambar 2. 56. Proporsi Sekolah dengan Akses Listrik	45
Gambar 2. 57. Proporsi Sekolah dengan Akses Internet untuk Tujuan Pengajaran	45
Gambar 2. 58. Persentase Sekolah dengan Akses Komputer untuk Tujuan Pengajaran	46
Gambar 2. 59. Persentase Sekolah dengan Akses Air Minum Layak.....	47
Gambar 2. 60. Persentase Sekolah dengan Akses Fasilitas Cuci Tangan Higienis.....	47
Gambar 2. 61. Persentase Guru PAUD Tertsertifikasi	48
Gambar 2. 62. Persentase Guru SD Tertsertifikasi	49
Gambar 2. 63. Persentase Guru SMP Tertsertifikasi	49
Gambar 2. 64. Jumlah Pengunjung Perpustakaan	50
Gambar 2. 65. Jumlah Pustakawan	51
Gambar 2. 66. Jumlah Kebijakan yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan ...	51
Gambar 2. 67. Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif.....	52
Gambar 2. 68. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah, dan Pemerintah Daerah	53
Gambar 2. 69. Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam.....	53
Gambar 2. 70. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	54
Gambar 2. 71. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak.....	55
Gambar 2. 72. Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja	56
Gambar 2. 73. Kualitas Air Sungai sebagai Sumber Air Baku	56
Gambar 2. 74. Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita	57
Gambar 2. 75. PDRB Per Kapita.....	58
Gambar 2. 76. Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	58
Gambar 2. 77. Persentase Tenaga Kerja Formal	59
Gambar 2. 78. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	60
Gambar 2. 79. Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang Tidak Sedang Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET)	60

Gambar 2. 80. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	61
Gambar 2. 81. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara.....	62
Gambar 2. 82. Jumlah Dermaga Penyeberangan	62
Gambar 2. 83. Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDRB	63
Gambar 2. 84. Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur.....	64
Gambar 2. 85. Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri	64
Gambar 2. 86. Proporsi Anggaran Riset Pemerintah terhadap PDRB	65
Gambar 2. 87. Proporsi Individu yang Menguasai Telepon Genggam dan Menggunakan Internet.....	66
Gambar 2. 88. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	66
Gambar 2. 89. Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	67
Gambar 2. 90. Jumlah Kota Pusaka di Kawasan Perkotaan Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang dan Kota Kecil	68
Gambar 2. 91. Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang	69
Gambar 2. 92. Jumlah Limbah B3 yang Terkelola dan Proporsi Limbah B3 yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (Sektor Industri)	69
Gambar 2. 93. Jumlah Timbulan Sampah yang Didaur Ulang	70
Gambar 2. 94. Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah..	71
Gambar 2. 95. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun yang Mengalami Hukuman Fisik dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir	72
Gambar 2. 96. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun yang Mengalami Agresi Psikologis dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir.....	72
Gambar 2. 97. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun yang Mengalami Hukuman Fisik dan/atau Agresi Psikologis dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir.....	73
Gambar 4. 1. Alur Informasi untuk Pemantauan RAD TPB/SDG	130

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan	76
Tabel 3.2. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 2: Tanpa Kelaparan	79
Tabel 3.3. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 3 Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera	82
Tabel 3.4. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 4 Pendidikan yang Berkualitas	87
Tabel 3.5. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 5 Kesetaraan Gender	91
Tabel 3.6. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 6 Air Minum dan Sanitasi Layak	94
Tabel 3.7. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau	98
Tabel 3.8. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	102
Tabel 3.9. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	106
Tabel 3.10. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	110
Tabel 3.11. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 11 Kota dan Komunitas Berkelanjutan	113
Tabel 3.12. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	117
Tabel 3.13. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	120
Tabel 3.14. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	122
Tabel 3.15. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	127
Tabel 4.1. Formulir Evaluasi RAD TPB/SDGs	132

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Asta Cita, RPJMN dan RPJMD

Pembangunan berkelanjutan merupakan isu global yang semakin penting diterapkan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian alam/lingkungan. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, *Sustainable Development Goals* (SDGs) disahkan pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. SDGs merupakan sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. SDGs merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan, dimulai pada tahun 2016 dan akan berakhir pada tahun 2030. Kesepakatan SDGs dituangkan di dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, sebuah dokumen setebal 35 halaman yang disepakati oleh lebih dari 190 negara, dengan berisikan 17 sasaran, 169 target, dan 241 indikator.

SDGs disusun berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), inklusivitas, dan non-diskriminasi. Agenda pembangunan ini tidak hanya menekankan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang. Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh manusia dapat hidup sejahtera, dengan kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi yang tetap selaras dengan kelestarian lingkungan. Selain itu, SDGs juga menekankan pentingnya menciptakan perdamaian demi terwujudnya masyarakat yang adil, inklusif, serta bebas dari rasa takut dan kekerasan. Seluruh proses pencapaiannya menuntut kolaborasi erat dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani kesepakatan global mengenai SDGs berkomitmen penuh untuk melaksanakan SDGs dan optimis mampu meraih hasil yang lebih baik dari MDGs. Untuk memastikan pelaksanaan SDGs secara nasional, pemerintah telah menyelaraskan SDGs dengan agenda prioritas pembangunan nasional (Asta Cita) dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Asta Cita sebagai acuan agenda pembangunan nasional yang diterjemahkan sebagai arah utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, dengan visi *Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045*. Tujuan ini sejatinya selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan TPB/SDGs karena tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan global saling menguatkan. Dengan kata lain, melaksanakan TPB/SDGs berarti melaksanakan agenda pembangunan nasional serta sekaligus memenuhi komitmen global. RPJMN Tahun 2025-2029 dengan sangat jelas telah mengarusutamakan TPB/SDGs ke dalam agenda

Pengarusutamaan TPB/SDGs tidak hanya dilakukan pada RPJMN, tetapi juga pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pentingnya menyelaraskan TPB/SDGs dengan RPJMD diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KLHS RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB/SDGs dan mengakomodir isu strategis TPB/SDGs yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

```
graph TD
    RPJPN[RPJPN] --> RPJMN[RPJMN]
    RPJPN --> RPJPD_Provinsi[RPJPD Provinsi]
    RPJPN --> RPJPD_KabKota[RPJPD Kab/Kota]
    RPJMN --> RPJPD_Provinsi
    RPJMN --> RPJPD_KabKota
    RPJPD_Provinsi --> RPJMD_Provinsi[RPJMD Provinsi]
    RPJPD_Provinsi --> RPJPD_KabKota
    RPJPD_KabKota --> RPJMD_KabKota[RPJMD Kab/Kota]
    RPJMD_Provinsi --> RPJMD_KabKota
    RAN_TPBSDGs[RAN TPB/SDGs] --> RPJPD_Provinsi
    RAN_TPBSDGs --> RPJPD_KabKota
    RAD_TPBSDGs_Provinsi[RAD TPB/SDGs Provinsi] --> RPJMD_Provinsi
    RAD_TPBSDGs_Provinsi --> RPJMD_KabKota
    RAD_TPBSDGs_KabKota[RAD TPB/SDGs Kab/Kota] --> RPJMD_KabKota
```

2

1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Komitmen tersebut pertama kali ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022. Kehadiran regulasi ini menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memimpin langsung pelaksanaan TPB/SDGs sebagai Ketua Dewan Pengarah, dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas bertindak sebagai Koordinator Pelaksana.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah menyelaraskan TPB/SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta menugaskan Bappenas untuk menyusun dan menetapkan Peta Jalan Nasional serta Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs. Di tingkat daerah, pemerintah mewajibkan provinsi dan kabupaten/kota menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs serta mengintegrasikannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam penyusunan baik RAN maupun RAD TPB/SDGs, pendekatan yang digunakan harus bersifat inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan—mulai dari organisasi masyarakat, dunia usaha, filantropi, akademisi, hingga media massa. Partisipasi dan kemitraan berbagai pihak menjadi kunci penting bagi keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

1.3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Sedikitnya ada tiga prinsip dasar yang melandasi pelaksanaan TPB/SDGs, yaitu:

- *Universal*, bahwa TPB/SDGs dilaksanakan oleh seluruh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang;
- *Integration*, bahwa TPB/SDGs dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan (saling terkait);
- *No-One Left Behind*, bahwa TPB/SDGs dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua terutama yang rentan.

1.4. Pembiayaan TPB/SDGs

Pembiayaan TPB/SDGs berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, dan berbagai sumber pembiayaan dari masyarakat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai pencapaian TPB/SDGs, maka pembiayaan yang bersumber dari non-pemerintah perlu terus diupayakan. Berbagai inovasi pembiayaan TPB/SDGs dan fasilitasi antar *stakeholder* perlu terus dilakukan untuk memobilisasi sumber-sumber pembiayaan alternatif bagi pencapaian TPB/SDGs, misalnya pembiayaan melalui Danantara (penerbitan obligasi

husus untuk mendanai proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan), PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal (misalnya, Kehati Index) dan pasar uang (*green bond*), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme *debt swap to* SDGs, mekanisme *impact investing*, *crowd financing*, serta pembiayaan inovatif melalui *blended finance* (pemerintah, swasta, filantropi).

1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs

Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs dilaksanakan melalui proses yang partisipatif dan inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Keterlibatan pihak non-pemerintah juga dioptimalkan, mencakup unsur filantropi dan dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta media, agar dapat berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam program maupun kegiatan yang dituangkan ke dalam RAD TPB/SDGs.

Untuk memastikan prinsip inklusivitas terwujud, mekanisme penyusunan tidak hanya dilakukan melalui pertemuan tatap muka (*luring*), tetapi juga difasilitasi secara daring (*online*) menggunakan berbagai saluran seperti laman (*Google Form*) dan surat elektronik (*email*). Dengan cara ini, Tim Penyusun RAD TPB/SDGs Kota Makassar secara resmi mengundang seluruh pihak terkait untuk turut serta dalam proses perumusan.

Seluruh data capaian indikator yang digunakan dalam dokumen ini bersumber dari perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Makassar, dengan deret waktu (*series*) selama lima tahun terakhir, yakni 2020 hingga 2024. Selain itu, untuk menggali informasi mengenai permasalahan serta tantangan dalam implementasi TPB/SDGs, akan dilaksanakan diskusi bersama berbagai *stakeholder* kunci. Adapun penetapan target dan arah kebijakan jangka menengah akan disusun secara teknokratik dengan dukungan Tenaga Ahli penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs.

1.6. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs

Dokumen Rencana Aksi TPB/SDGs terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mencakup keselarasan TPB/SDGs terhadap Asta Cita, RPJMN dan RPJMD, komitmen pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs, prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs, pembiayaan TPB/SDGs, metodologi penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs, dan sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs.

Bab II Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs, menguraikan status capaian, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 khususnya pada periode RPJMD sebelumnya, yang dituliskan secara terkonsolidasi.

Bab III Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs, menjelaskan target dan arah kebijakan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 yang dilakukan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs. Bab

ini juga akan menguraikan kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing Tujuan sebagai arah pelaksanaan kegiatan. Target setiap indikator ditampilkan dalam format matriks. Kebijakan dirumuskan dengan mengacu pada RPJMD yang berlaku.

Bab IV Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAD TPB/SDGs, menguraikan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk melihat capaian pelaksanaan Rencana Aksi TPB/SDGs untuk masing-masing Tujuan. Mekanisme pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi TPB/SDGs juga menggambarkan mekanisme pemantauan dan evaluasi, mekanisme pelaporan, dan waktu pelaksanaan.

Bab V Penutup, menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs, termasuk keterlibatan berbagai pihak dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip TPB/SDGs. Pada bagian ini juga diuraikan tentang kaidah pelaksanaan TPB/SDGs serta upaya untuk menguatkan sarana pelaksanaan.

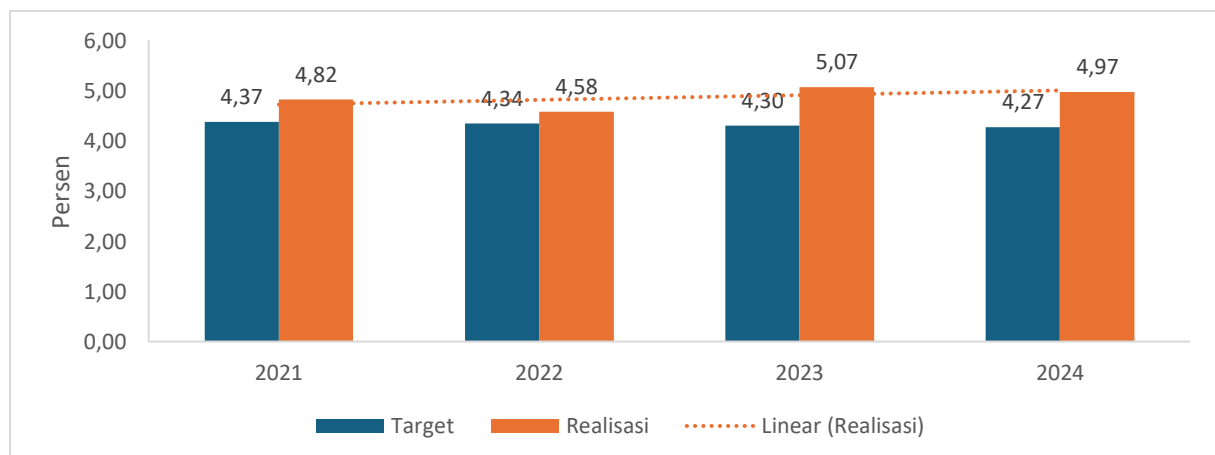
BAB II KONDISI PENCAPAIAN TARGET SDGs

2.1. Tujuan 1: Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

2.1.1. Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan agenda pertama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, yang menunjukkan urgensi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, mulai dari tingkat global hingga lokal. Data menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi tingkat kemiskinan di Kota Makassar selama periode 2021 hingga 2024 belum mencapai angka yang ditargetkan. Dalam keempat tahun tersebut, realisasi tingkat kemiskinan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan pemerintah daerah. Misalnya, pada tahun 2021, realisasi mencapai 4,82 persen, sementara targetnya sebesar 4,37 persen, dengan capaian 89,7 persen. Pola ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana target semakin rendah menjadi 4,27 persen, realisasi justru masih berada di angka 4,97 persen, dengan capaian yang menurun menjadi 83,61 persen. Ketidakesesuaian ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya efektif, dan menandakan perlunya peninjauan ulang terhadap strategi intervensi yang telah dilaksanakan.

Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun. Kegagalan untuk mencapai target penurunan kemiskinan bukan hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga dapat menghambat pencapaian indikator SDGs di tingkat nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, partisipatif, dan berbasis data untuk memastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar berjalan efektif, adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kelompok rentan.

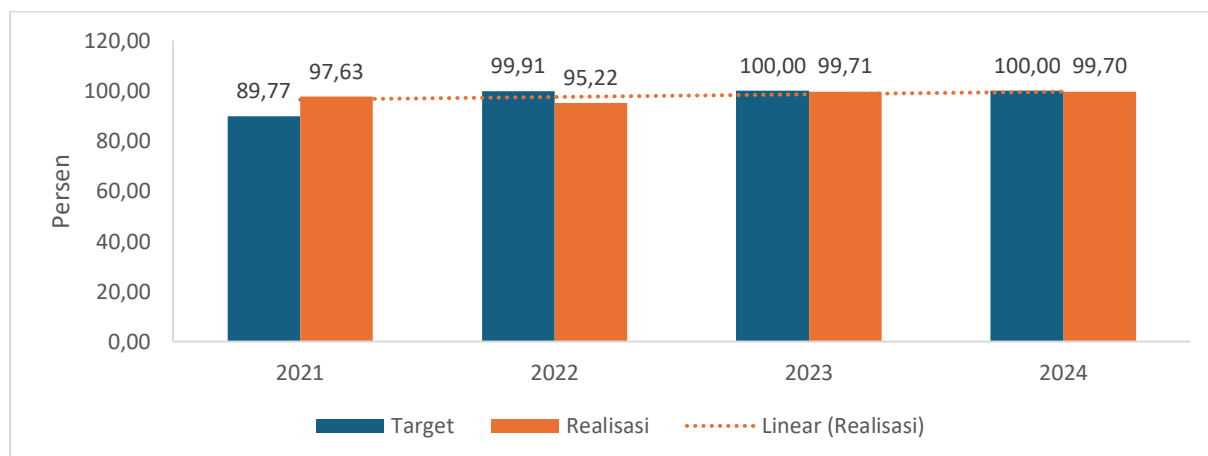


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 1. Realisasi dan Target Tingkat Kemiskinan Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.1.2. Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan

Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN di Kota Makassar menunjukkan tren yang sangat positif sepanjang periode 2021–2024. Pada tahun 2021, realisasi sebesar 97,63 persen telah melampaui target 89,77 persen. Pada 2022, target meningkat menjadi 99,91 persen dengan realisasi mencapai 95,22 persen. Selanjutnya, pada 2023 dan 2024, cakupan kepesertaan ditargetkan mencapai 100 persen, sementara realisasi masing-masing berada pada 99,71 persen dan 99,70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasinya sudah cukup tinggi, tetapi capaian kepesertaan belum memenuhi target yang ditentukan, yaitu sebesar 100 persen. Namun, pencapaian ini mengindikasikan keberhasilan Kota Makassar dalam memperluas akses jaminan kesehatan bagi seluruh penduduknya, mendukung tercapainya Universal Health Coverage (UHC). Keberhasilan ini juga mencerminkan efektivitas program pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat sistem pelayanan kesehatan, serta meningkatkan perlindungan sosial di bidang kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.



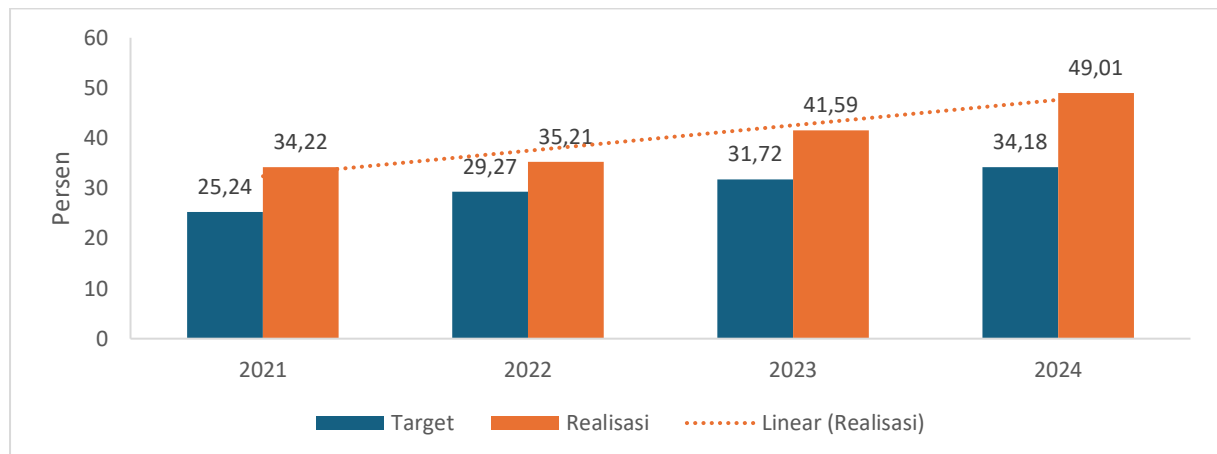
Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 2. Realisasi dan Target Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.1.3. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan di Kota Makassar menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2024. Pada 2021, realisasi tercatat sebesar 34,22 persen, lebih tinggi dari target 25,24 persen, dengan capaian sebesar 135,58 persen. Pada 2022, target meningkat menjadi 29,27 persen dengan realisasi 35,21 persen. Peningkatan signifikan terlihat pada 2023, di mana realisasi mencapai 41,59 persen dengan target 31,72 persen, dan pada 2024 realisasi naik lagi menjadi 49,01 persen sementara target sebesar 34,18 persen, sehingga capaiannya hingga 143,39 persen. Capaian yang secara konsisten melampaui target ini mengindikasikan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran pekerja dan pemberi kerja terhadap pentingnya

perlindungan sosial di dunia kerja, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja serta mengurangi kerentanan terhadap risiko sosial ekonomi.

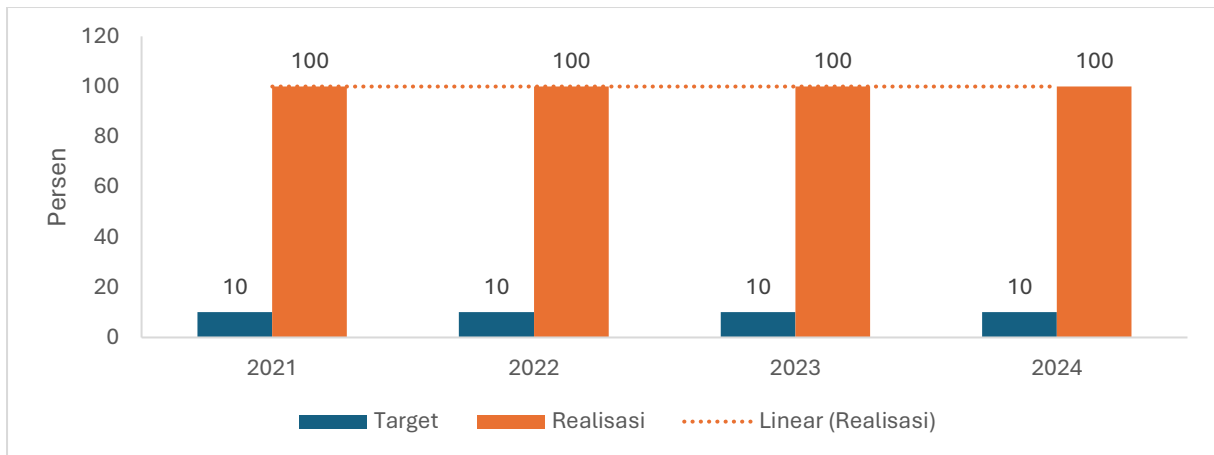


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 3. Realisasi dan Target Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.1.4. Persentase Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas

Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan di Kota Makassar yang terpenuhi hak dasarnya dan mendapatkan inklusivitas menunjukkan capaian realisasi sebesar 100 persen secara konsisten selama periode 2021–2024. Angka ini jauh melampaui target tahunan yang hanya ditetapkan sebesar 10 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh penyandang disabilitas miskin dan rentan di Kota Makassar telah memperoleh pemenuhan hak dasar, seperti akses layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara setara. Capaian maksimal ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendorong inklusivitas dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Keberhasilan tersebut juga menjadi indikator positif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek pengurangan ketidaksetaraan. Ke depan, tantangan yang perlu diantisipasi adalah menjaga keberlanjutan program dan memastikan kualitas layanan yang diterima tetap optimal, sehingga hak dan kesempatan penyandang disabilitas tidak hanya terpenuhi secara kuantitatif tetapi juga berkualitas.

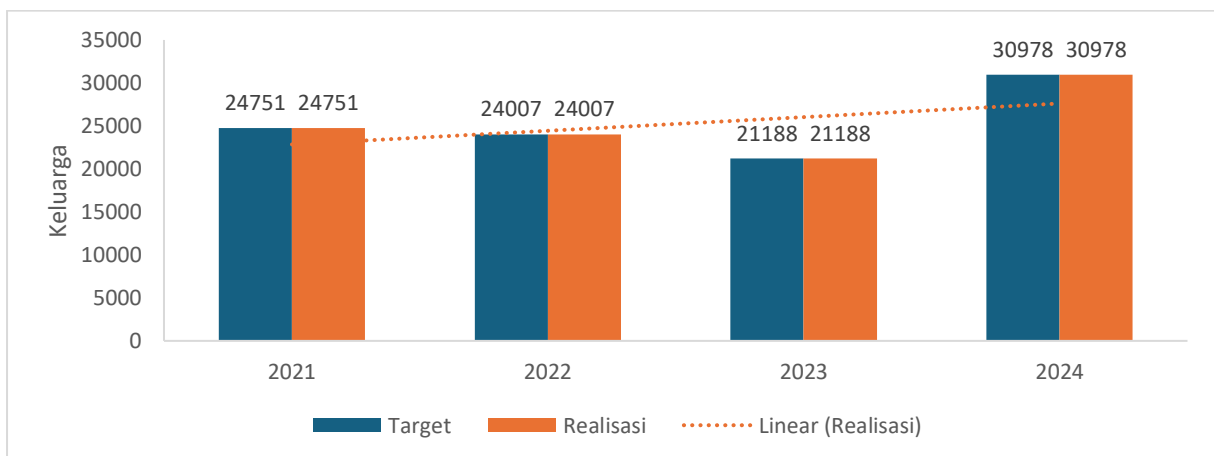


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 4. Realisasi dan Target Persentase Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.1.5. Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan

Jumlah rumah tangga penerima Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Makassar mengalami fluktuasi selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, jumlah penerima tercatat sebesar 24.751 keluarga dan menurun sedikit menjadi 24.007 keluarga pada 2022. Penurunan berlanjut pada 2023 dengan jumlah penerima 21.188 keluarga. Namun, pada 2024 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 30.978 keluarga, menjadi capaian tertinggi dalam periode pengamatan. Data menunjukkan bahwa realisasi jumlah rumah tangga penerima bantuan selalu sama dengan yang ditargetkan. Hal ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam mendistribusikan bantuan PKH kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat.

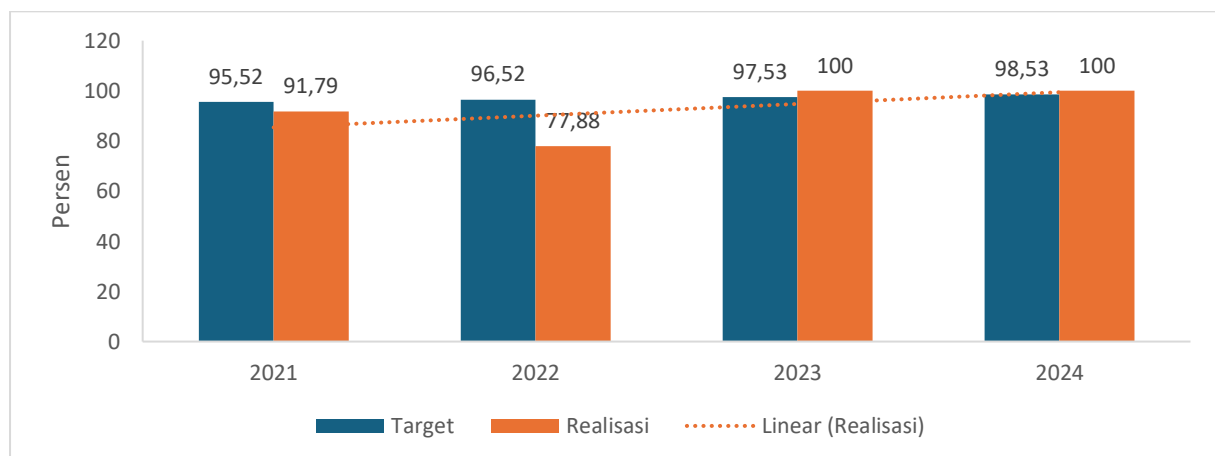


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 5. Realisasi dan Target Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.1.6. Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan

Persentase perempuan pernah kawin berusia 15–49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya dilakukan di fasilitas kesehatan di Kota Makassar mengalami fluktuasi selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 91,52 persen, sedikit lebih rendah dibanding target sebesar 95,52 persen. Namun, pada 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 76,88 persen, jauh di bawah target 96,92 persen. Capaian ini kembali meningkat drastis pada 2023 dan 2024 menjadi 100 persen, melampaui target masing-masing 97,53 persen dan 98,53 persen. Perubahan capaian ini menunjukkan adanya dinamika akses dan pemanfaatan layanan kesehatan ibu di Kota Makassar. Penurunan pada 2022 dapat mencerminkan adanya kendala dalam akses fasilitas kesehatan, baik karena faktor geografis, sosial-ekonomi, maupun kondisi eksternal seperti pandemi. Peningkatan tajam pada 2023–2024 menunjukkan keberhasilan intervensi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan maternal, yang berdampak positif pada keselamatan ibu dan bayi serta mendukung pencapaian target kesehatan nasional. Kinerja pada tahun 2023 dan 2024 yang mencapai 100 persen mencerminkan tingginya akses ibu hamil terhadap fasilitas kesehatan.



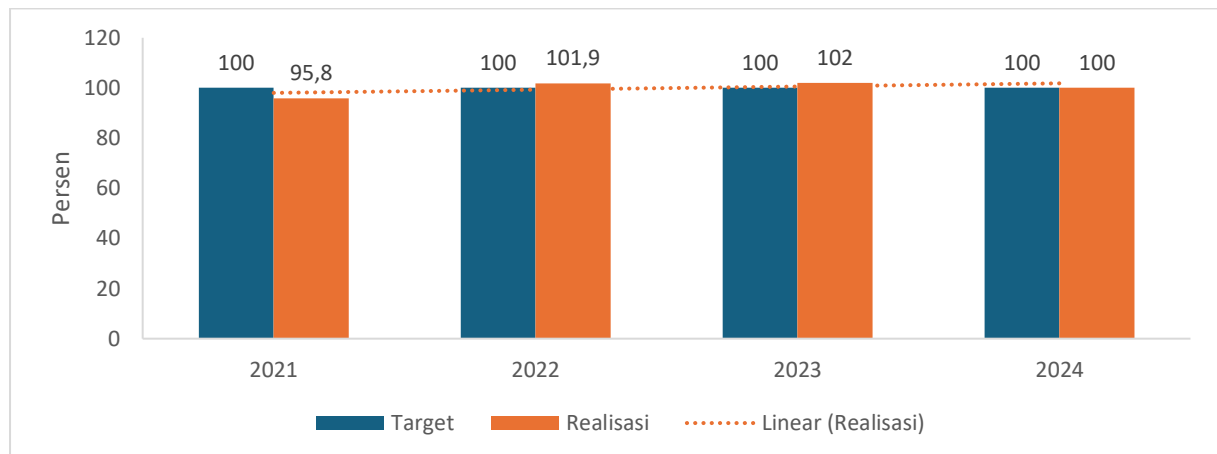
Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 6. Realisasi dan Target Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.1.7. Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap

Persentase anak usia 12–23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap di Kota Makassar menunjukkan capaian yang sangat baik pada periode 2021–2024. Pada tahun 2021 hingga 2024, realisasi sebesar 95,8 persen sedikit di bawah target 100 persen. Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024, capaian realisasi berhasil melampaui atau memenuhi target. Pada 2022, realisasi mencapai 101,9 persen, diikuti 102 persen pada 2023, dan 100 persen pada 2024 yang sejalan dengan target. Kinerja ini mengindikasikan bahwa cakupan imunisasi dasar di Kota Makassar telah optimal, bahkan sempat melebihi target, yang menunjukkan keberhasilan program imunisasi dalam menjangkau seluruh sasaran anak balita. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pelayanan

kesehatan anak, tetapi juga kontribusi penting terhadap pencegahan penyakit menular dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

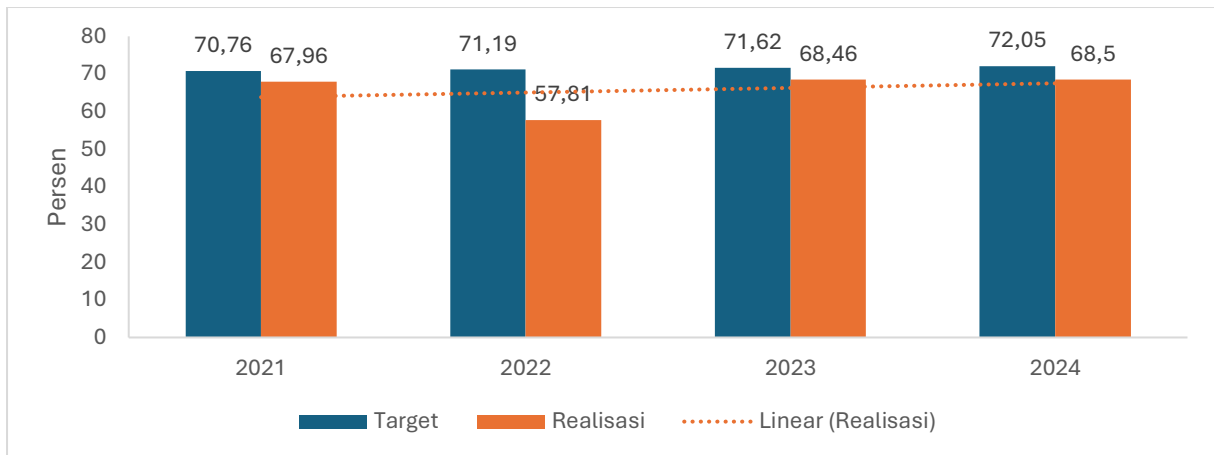


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 7. Realisasi dan Target Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.1.8. Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin

Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) berstatus kawin di Kota Makassar mengalami fluktuasi selama periode 2021–2024. Pada 2021, realisasi sebesar 68,76 persen telah melampaui target 67,96 persen. Namun, pada 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 57,89 persen, jauh di bawah target 71,19 persen. Capaian kembali meningkat pada 2023 menjadi 68,46 persen, dan sedikit naik lagi pada 2024 mencapai 68,5 persen, tetapi capaian pada dua tahun tersebut tetap berada di bawah target. Fluktuasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi penggunaan kontrasepsi di kalangan PUS. Penurunan tajam pada 2022 dapat dipengaruhi oleh faktor akses layanan kesehatan, ketersediaan alat kontrasepsi, atau perubahan preferensi pasangan usia subur. Peningkatan signifikan pada 2023–2024 menandakan keberhasilan intervensi pemerintah dan pihak terkait dalam memperluas jangkauan program keluarga berencana, yang pada akhirnya dapat membantu mengendalikan angka kelahiran dan mendukung perencanaan keluarga yang lebih baik.

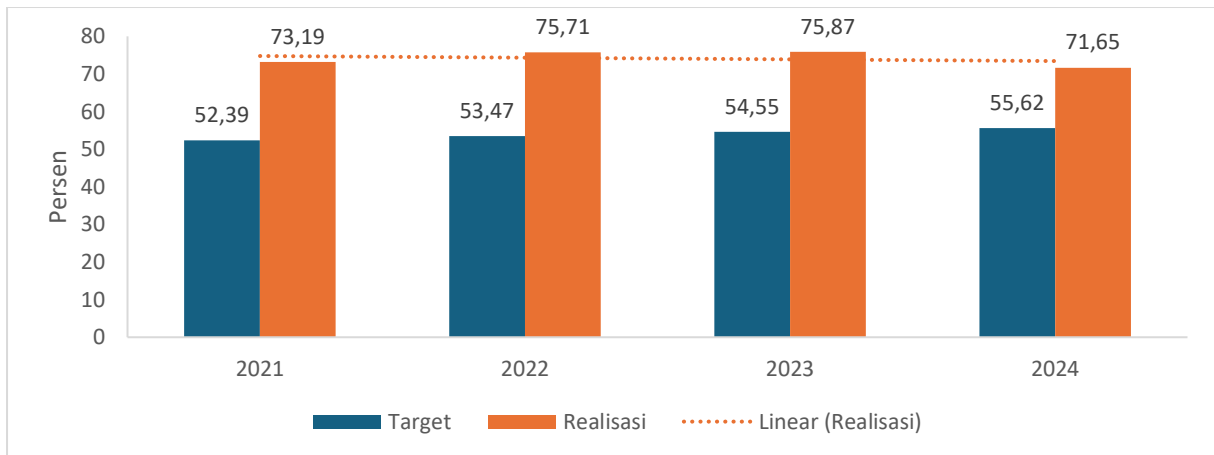


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 8. Realisasi dan Target Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 tahun yang Berstatus Kawin di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.1.9. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan

Persentase rumah tangga di Kota Makassar yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan menunjukkan tren yang relatif stabil sepanjang periode 2021–2024. Realisasi pada 2021 tercatat sebesar 73,19 persen dan meningkat menjadi 75,71 persen pada 2022, lalu sedikit naik ke 75,87 persen pada 2023 sebelum turun kembali menjadi 71,65 persen pada 2024. Sementara itu, target tahunan terus mengalami kenaikan dari 52,39 persen pada 2021 menjadi 55,62 persen pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi akses terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan selalu berada di atas target. Pada tahun 2024, persentase capaian sebesar 128,82, menandakan bahwa realisasi melebihi target yang ditentukan. Kinerja realisasi yang lebih tinggi dibanding target menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap air minum layak dan berkelanjutan sudah berada pada tingkat yang relatif tinggi. Namun, penurunan capaian pada 2024 perlu menjadi perhatian karena dapat mengindikasikan tantangan dalam keberlanjutan layanan, seperti kualitas infrastruktur, ketersediaan sumber air, atau faktor lingkungan. Mempertahankan dan meningkatkan capaian ini penting untuk mendukung kesehatan masyarakat dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait akses air bersih.

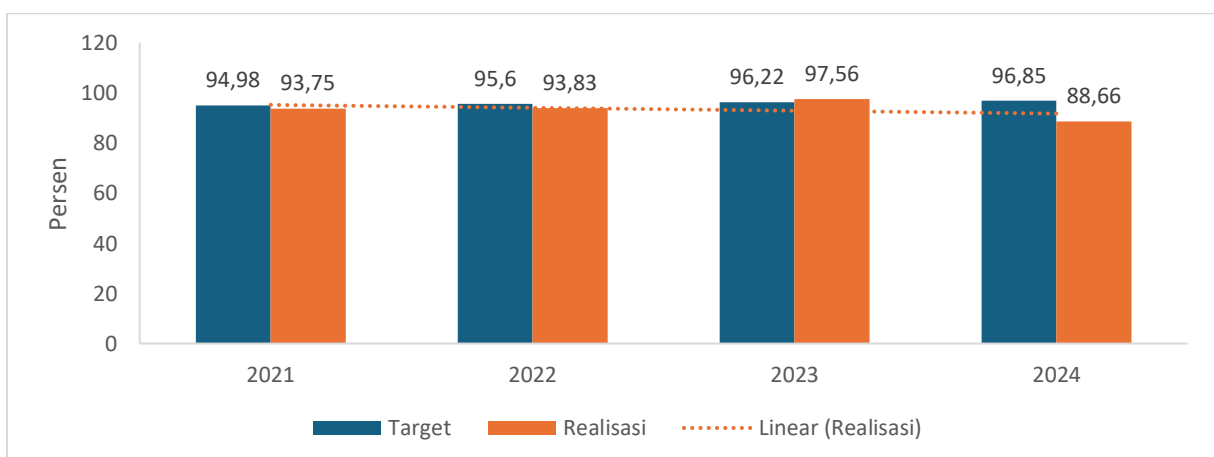


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 9. Realisasi dan Target Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.1.10. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

Persentase rumah tangga di Kota Makassar yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan menunjukkan capaian yang relatif tinggi sepanjang periode 2021–2024. Pada 2021, realisasi sebesar 93,75 persen, lalu meningkat menjadi 97,56 persen, tetapi menurun pada tahun 2024 menjadi 88,66 persen. Kondisi di tahun 2024 yang mengalami penurunan mengindikasikan adanya tantangan dalam pemenuhan infrastruktur sanitasi layak dan berkelanjutan, serta kesadaran dari masyarakat untuk menggunakan fasilitas sanitasi sesuai standar layak dan aman. Meski terjadi sedikit penurunan pada 2024, tingkat capaian yang tetap tinggi menjadi modal penting untuk mendukung kesehatan masyarakat, mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan, serta memenuhi target pembangunan berkelanjutan (SDGs) di bidang sanitasi.

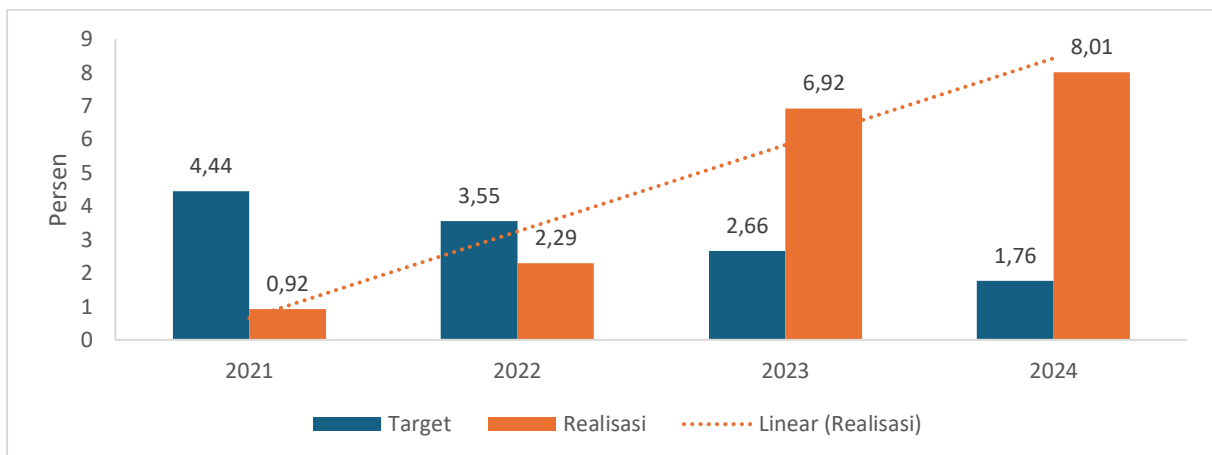


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 10. Realisasi dan Target Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.1.11. Persentase Rumah Kumuh Perkotaan

Persentase rumah kumuh perkotaan di Kota Makassar menunjukkan tren peningkatan signifikan pada realisasi selama periode 2021–2024, yang berbanding terbalik dengan tren target yang terus menurun. Pada 2021, realisasi hanya sebesar 0,92 persen, jauh di bawah target 4,44 persen, dengan persentase realisasi sebesar 179,28 persen. Namun, angka ini meningkat menjadi 2,29 persen pada 2022, lalu melonjak tajam menjadi 6,92 persen pada 2023, dan kembali naik hingga mencapai 8,01 persen pada 2024, jauh di atas target 1,76 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam pengendalian kawasan kumuh di perkotaan. Meningkatnya persentase rumah kumuh meski target penurunannya cukup ambisius mengindikasikan perlunya evaluasi kebijakan dan program penanganan kumuh, termasuk perbaikan infrastruktur, penataan permukiman, serta pengendalian urbanisasi. Tanpa intervensi yang efektif dan berkelanjutan, peningkatan kawasan kumuh dapat berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat, kesehatan lingkungan, dan daya saing kota.



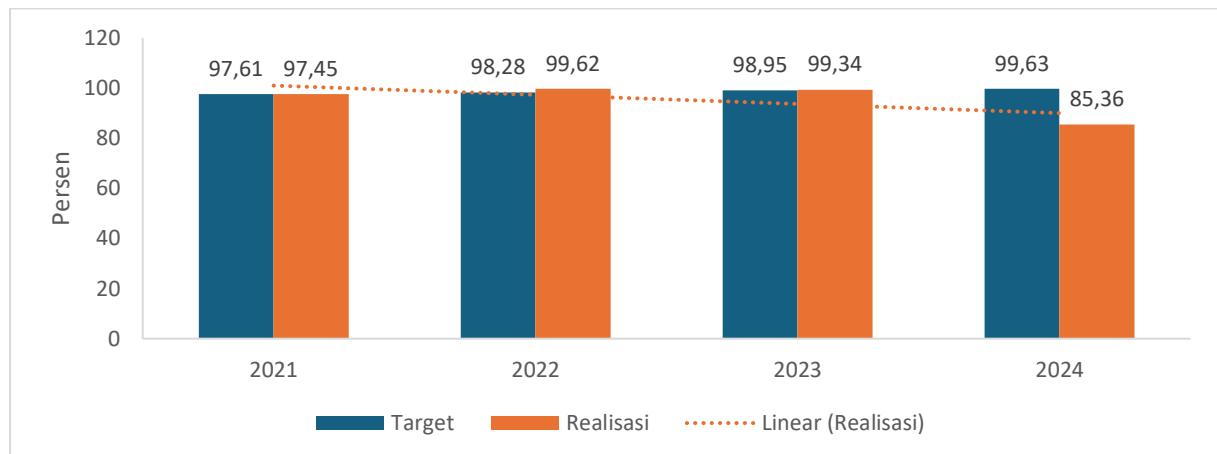
Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 11. Realisasi dan Target Persentase Rumah Kumuh Perkotaan di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.1.12. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat

Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ sederajat di Kota Makassar menunjukkan tren stabil pada periode 2021–2023, namun mengalami penurunan signifikan pada 2024. Pada 2021, realisasi sebesar 97,45 persen sedikit di bawah target 97,61 persen. Pada 2022 dan 2023, capaian realisasi masing-masing meningkat menjadi 99,62 persen dan 99,34 persen, berada di atas target yang juga meningkat bertahap. Namun, pada 2024 realisasi turun tajam menjadi 85,36 persen, jauh di bawah target 99,63 persen, dengan persentase realisasi hanya sebesar 85,68 persen. Penurunan drastis pada 2024 mengindikasikan adanya tantangan serius dalam mempertahankan tingkat partisipasi pendidikan dasar, yang dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, atau migrasi penduduk. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan intervensi kebijakan yang tepat,

seperti peningkatan aksesibilitas sekolah, program beasiswa, serta dukungan bagi keluarga berpenghasilan rendah agar anak-anak tetap dapat bersekolah sesuai jenjang usianya.

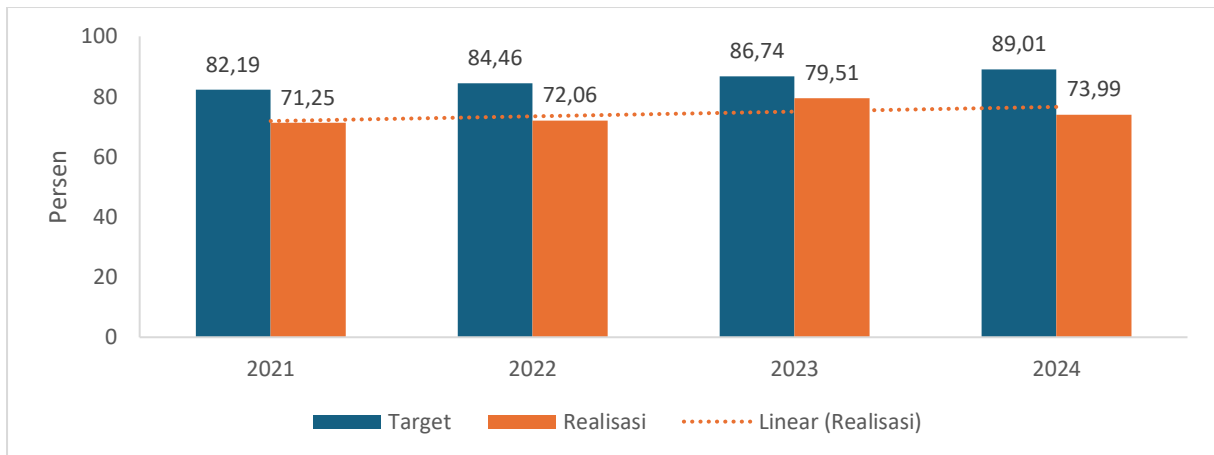


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 12. Realisasi dan Target Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.1.13. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/ sederajat

Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ sederajat di Kota Makassar menunjukkan tren yang sempat meningkat pada periode 2021–2023, namun menurun pada 2024. Pada 2021, realisasi sebesar 71,25 persen berada di bawah target 82,19 persen. Pada 2022, capaian meningkat menjadi 72,06 persen, tetapi masih lebih rendah dibanding target 84,46 persen. Realisasi terus naik pada 2023 mencapai 79,51 persen, tetapi kembali menurun menjadi 73,99 persen di tahun 2024, dengan persentase capaian hanya sebesar 83,13 persen. Peningkatan APM hingga 2023 menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan tingkat menengah pertama, baik melalui penyediaan sarana prasarana, program beasiswa, maupun intervensi kebijakan lainnya. Namun penurunan signifikan pada 2024 perlu menjadi perhatian, karena dapat dipengaruhi oleh faktor putus sekolah, perpindahan penduduk, atau kendala ekonomi yang menghambat keberlanjutan pendidikan. Upaya mitigasi perlu difokuskan pada program retensi siswa dan peningkatan motivasi belajar agar target partisipasi pendidikan dapat kembali tercapai.

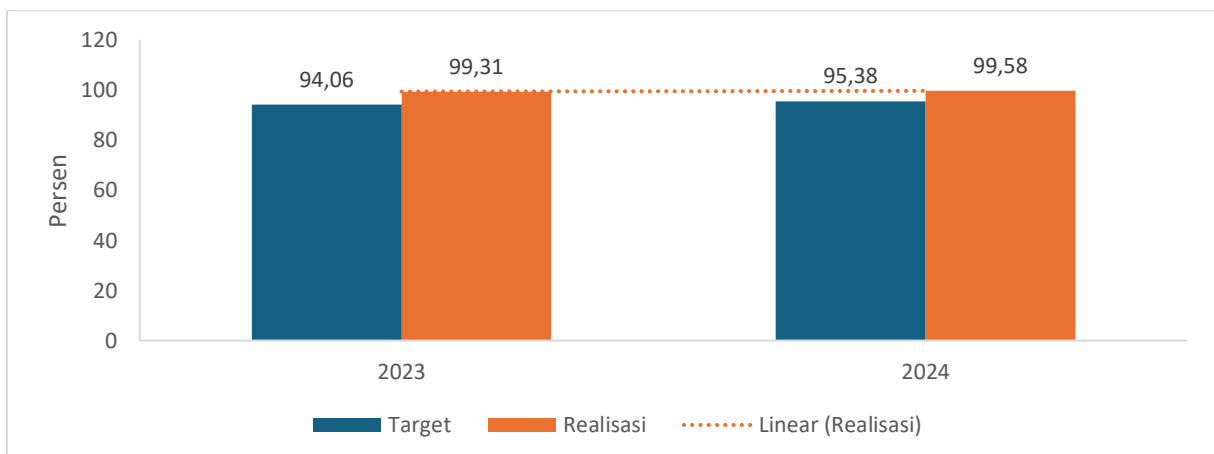


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 13. Realisasi dan Target Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Sederajat di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.1.14. Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran

Persentase penduduk usia 0–17 tahun di Kota Makassar yang memiliki akta kelahiran menunjukkan capaian yang sangat tinggi pada periode 2023–2024. Pada tahun 2023, realisasi mencapai 99,31 persen, jauh melampaui target 94,06 persen. Capaian ini meningkat tipis pada 2024 menjadi 99,58 persen, tetap berada di atas target 95,38 persen, dengan persentase capaian sebesar 104,4 persen. Pencapaian yang konsisten melampaui target ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memastikan hak identitas hukum bagi anak-anak terpenuhi. Kepemilikan akta kelahiran yang hampir menyentuh 100 persen juga menunjukkan efektivitas program administrasi kependudukan, yang berperan penting dalam menjamin akses anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Keberlanjutan capaian ini perlu dijaga untuk mendukung pemenuhan hak sipil dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

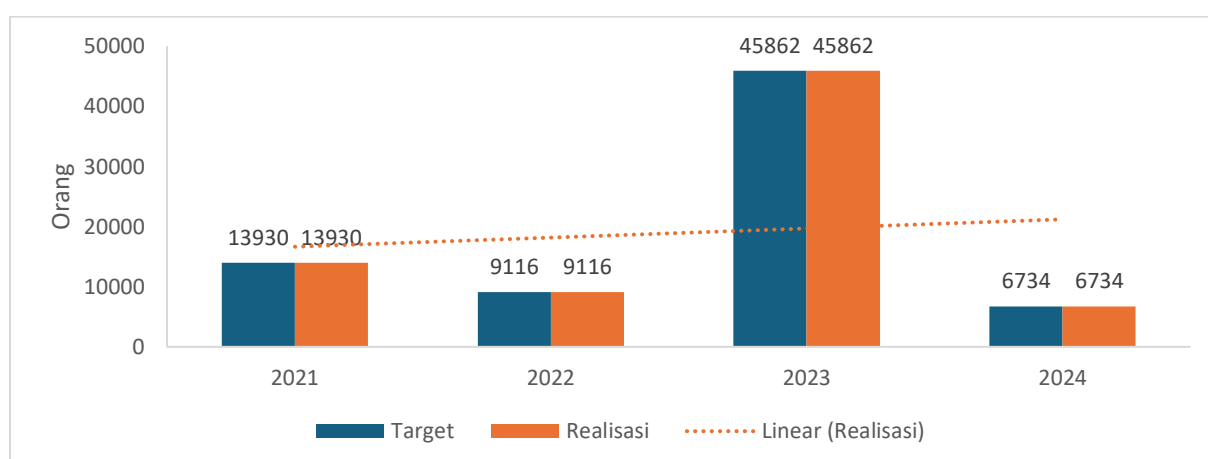


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 14. Realisasi dan Target Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Makassar Tahun 2023 – 2024

2.1.15. Jumlah Korban Meninggal, Hilang, dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang

Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang di Kota Makassar menunjukkan fluktuasi yang signifikan pada periode 2021–2024. Pada 2021, realisasi tercatat sebesar 13.930 orang, menurun pada 2022 menjadi 9.116 orang. Namun, pada 2023 terjadi lonjakan tajam hingga 45.862 orang, sebelum kembali turun drastis pada 2024 menjadi 6.734 orang. Target dan realisasi pada setiap tahun berada pada angka yang sama, menunjukkan pencatatan yang konsisten antara perencanaan dan capaian. Lonjakan pada 2023 menjadi catatan penting akan besarnya dampak bencana di tahun tersebut, sementara penurunan di 2024 mencerminkan adanya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang mulai menunjukkan hasil. Pencapaian ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan terkait pengurangan risiko bencana dan pembangunan kota yang berketahanan, sehingga penting untuk mempertahankan tren positif melalui penguatan sistem peringatan dini, tata kelola risiko bencana, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

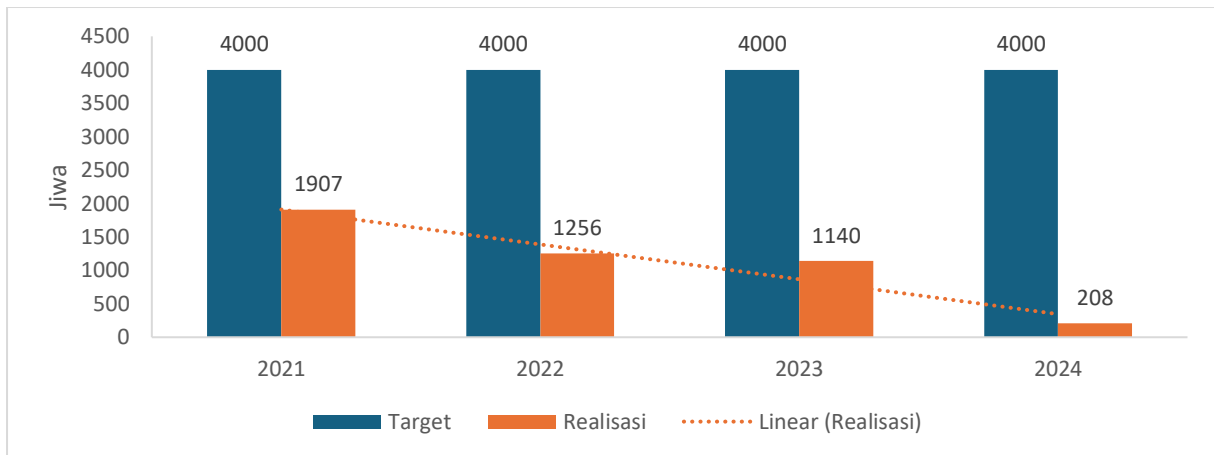


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 15. Realisasi dan Target Jumlah Korban Meninggal, Hilang, dan Terkena Dampak Bencana per 100.000 Orang di Kota Makassar Tahun 2023 – 2024

2.1.16. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial

Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial di Kota Makassar menunjukkan tren penurunan signifikan pada periode 2021–2024. Pada 2021, realisasi tercatat sebesar 1.907 jiwa, kemudian menurun menjadi 1.256 jiwa pada 2022, sedikit turun lagi menjadi 1.140 jiwa pada 2023, dan merosot tajam menjadi hanya 208 jiwa pada 2024. Sementara itu, target pemenuhan kebutuhan dasar setiap tahun tetap berada pada angka 4.000 jiwa. Penurunan realisasi ini dapat mencerminkan berkurangnya jumlah korban bencana sosial yang membutuhkan bantuan atau adanya tantangan dalam penyaluran bantuan sesuai target. Meskipun menurunnya jumlah penerima bantuan dapat dianggap positif dari sisi berkurangnya insiden bencana sosial, kesenjangan yang besar antara target dan realisasi perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa seluruh korban yang memerlukan bantuan benar-benar terlayani secara optimal.

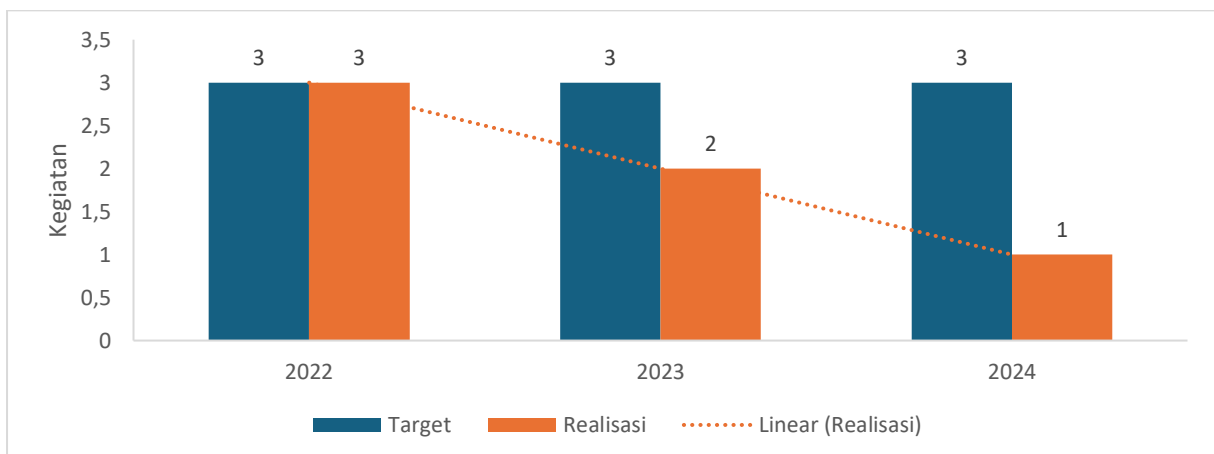


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 16. Target dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.1.17. Pendampingan Psikososial Korban Bencana Sosial

Realisasi pendampingan psikososial korban bencana sosial di Kota Makassar mengalami penurunan dalam periode 2022–2024. Pada 2022, realisasi kegiatan mencapai target penuh yaitu 3 kegiatan. Namun, pada 2023 realisasi turun menjadi 2 kegiatan, dan pada 2024 kembali menurun signifikan menjadi hanya 1 kegiatan, jauh di bawah target yang tetap dipertahankan sebesar 3 kegiatan setiap tahun. Penurunan jumlah kegiatan pendampingan psikososial ini berpotensi berdampak pada kualitas pemulihan mental dan sosial korban bencana. Meskipun penurunan bisa disebabkan oleh menurunnya jumlah kejadian bencana sosial, perbedaan yang konsisten antara target dan realisasi pada 2023–2024 mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap alokasi sumber daya, koordinasi lintas instansi, dan keberlanjutan program pendampingan untuk memastikan korban mendapatkan dukungan yang memadai.



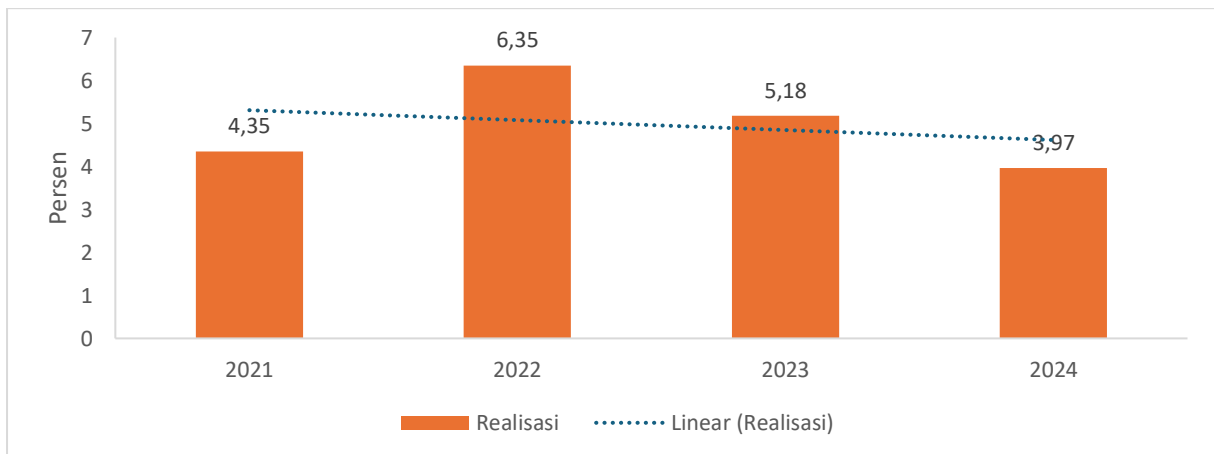
Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 17. Target dan Realisasi Pendampingan Psikososial Korban Bencana Sosial di Kota Makassar Tahun 2022 – 2024

2.2. Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

2.2.1. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment*) di Kota Makassar menunjukkan fluktuasi pada periode 2021–2024. Pada 2021, angka prevalensi tercatat sebesar 4,35 persen, kemudian meningkat signifikan menjadi 6,35 persen pada 2022. Setelah itu, prevalensi mulai menurun menjadi 5,18 persen pada 2023 dan mencapai titik terendah sebesar 3,97 persen pada 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan kecukupan konsumsi pangan pada dua tahun terakhir, meskipun sempat terjadi lonjakan pada 2022. Penurunan prevalensi di 2023 dan 2024 dapat mencerminkan efektivitas program ketahanan pangan, peningkatan daya beli masyarakat, dan distribusi pangan yang lebih merata. Keberlanjutan tren positif ini penting untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman, sehingga mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan penduduk.



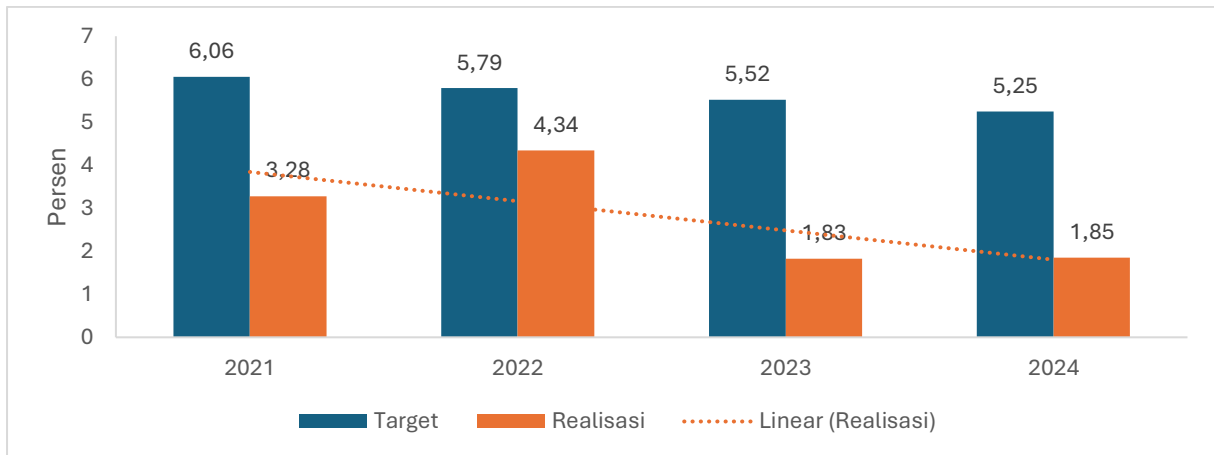
Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 18. Realisasi Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.2.2. Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita

Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita di Kota Makassar mengalami fluktuasi pada periode 2021–2024. Pada 2021, realisasi tercatat sebesar 3,28 persen, kemudian meningkat menjadi 4,34 persen pada 2022. Setelah itu, prevalensi turun tajam menjadi 1,83 persen pada 2023 dan relatif stabil di 1,85 persen pada 2024. Sementara itu, target penurunan prevalensi kekurangan gizi setiap tahun berada pada kisaran 6,06 persen di 2021 hingga 5,25 persen di 2024, sehingga capaian realisasi berada jauh di bawah target sepanjang periode tersebut, dengan persentase capaian realisasi sebesar 164,76 persen pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa prevalensi kekurangan gizi balita di Kota Makassar sudah berada pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan target, terutama pada 2023–2024. Penurunan yang signifikan ini dapat mencerminkan keberhasilan

program intervensi gizi, peningkatan akses pangan bergizi, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait pola makan sehat. Meski demikian, pemantauan berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan prevalensi tetap rendah dan mencegah potensi kenaikan kembali di masa mendatang.

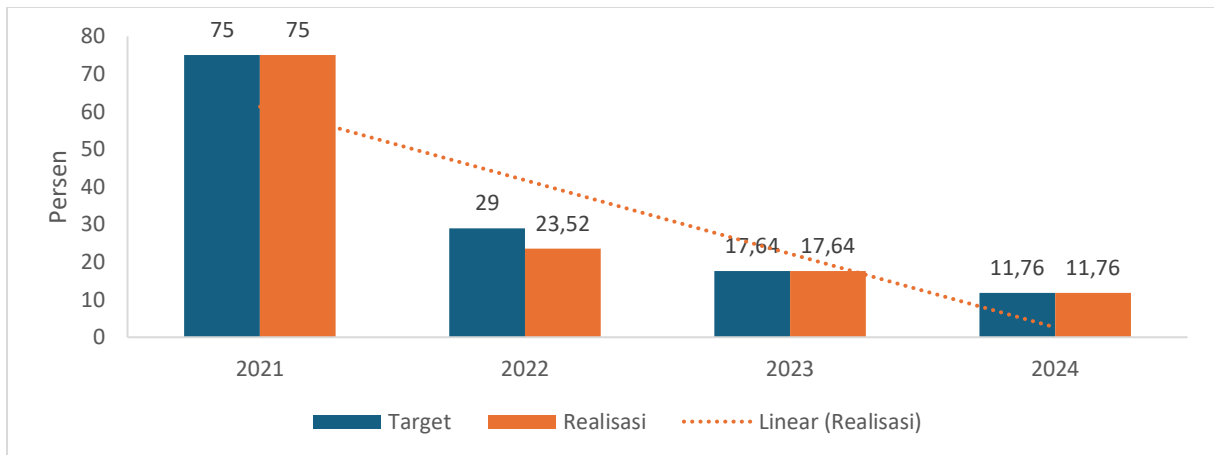


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 19. Target dan Realisasi Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.2.3. Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan

Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat di Kota Makassar menunjukkan penurunan yang sangat signifikan pada periode 2021–2024. Pada 2021, baik target maupun realisasi tercatat sebesar 75 persen. Angka ini kemudian turun tajam menjadi 29 persen (target) dan 23,92 persen (realisasi) pada 2022, lalu kembali menurun menjadi 17,64 persen pada 2023, serta mencapai 11,76 persen pada 2024, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa penanganan kerawanan pangan di Kota Makassar berjalan dengan efektif, dengan realisasi yang konsisten lebih baik atau setara dengan target pada setiap tahunnya. Keberhasilan ini kemungkinan dipengaruhi oleh perbaikan distribusi pangan, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan, serta pelaksanaan program intervensi yang tepat sasaran bagi kelompok rentan.

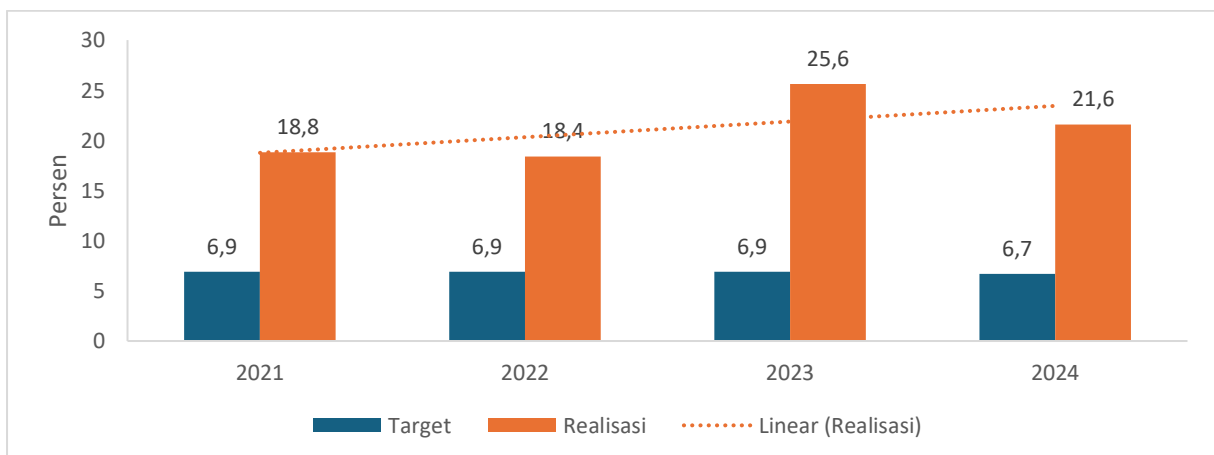


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 20. Target dan Realisasi Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.2.4. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun di Kota Makassar pada periode 2021–2024 menunjukkan realisasi yang secara konsisten jauh di atas target yang telah ditetapkan. Pada 2021, realisasi mencapai 18,8 persen dibanding target 6,9 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 18,4 persen pada 2022. Namun, pada 2023 terjadi kenaikan signifikan menjadi 25,6 persen sebelum kembali menurun pada 2024 menjadi 21,6 persen. Sementara itu, target prevalensi stunting tetap berada di kisaran 6,7–6,9 persen setiap tahunnya, menunjukkan kesenjangan yang besar antara target dan capaian aktual. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan penurunan stunting di Kota Makassar masih sangat besar dan memerlukan intervensi yang lebih terintegrasi. Peningkatan signifikan pada 2023 dapat mencerminkan pengaruh faktor gizi, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, maupun dampak sosial ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi. Diperlukan penguatan program gizi, layanan kesehatan, edukasi keluarga, serta perbaikan sanitasi lingkungan untuk mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan.

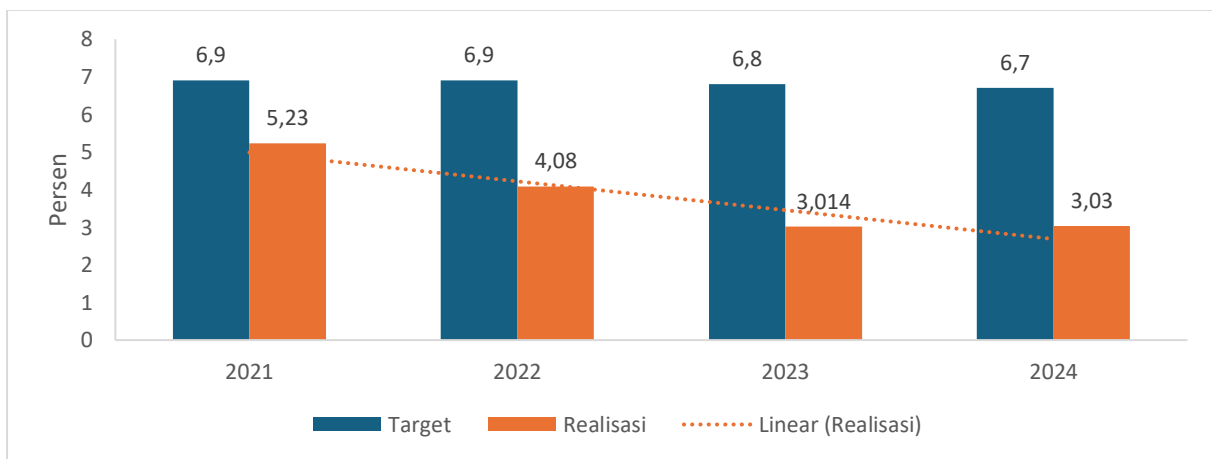


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 21. Target dan Realisasi Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita di Kota Makassar Tahun 2021-2024

2.2.5. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Dua Tahun/Baduta

Prevalensi stunting pada anak di bawah dua tahun (baduta) di Kota Makassar menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan sepanjang periode 2021–2023, meskipun sedikit meningkat pada 2024. Realisasi prevalensi turun dari 5,23 persen pada 2021 menjadi 3,014 persen pada 2023, sebelum sedikit naik menjadi 3,03 persen pada 2024. Sementara itu, target prevalensi relatif stabil dengan penurunan tipis dari 6,9 persen pada 2021 menjadi 6,7 persen pada 2024. Pada tahun 2024, persentase realisasi capaian sudah mencapai 154,78 persen. Capaian realisasi yang secara konsisten berada di atas target menunjukkan keberhasilan program intervensi gizi dan kesehatan anak di Kota Makassar. Namun, kenaikan tipis pada 2024 perlu menjadi perhatian agar tren penurunan prevalensi stunting dapat dipertahankan secara berkelanjutan melalui penguatan program pencegahan, peningkatan akses gizi, dan perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak.



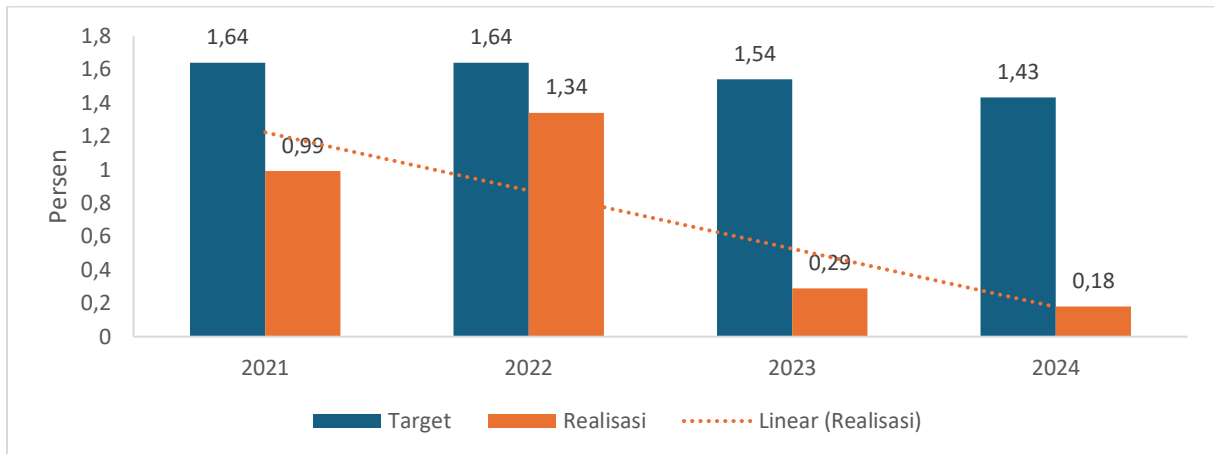
Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 22. Target dan Realisasi Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Dua Tahun/Baduta di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.2.6. Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak pada Usia Kurang dari 5 Tahun Berdasarkan Tipe

Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) pada anak usia kurang dari lima tahun di Kota Makassar pada periode 2021–2024 menunjukkan tren penurunan yang signifikan dan konsisten berada di bawah target. Pada 2021, realisasi tercatat sebesar 0,99 persen dibandingkan target 1,64 persen, kemudian meningkat sedikit pada 2022 menjadi 1,34 persen namun tetap lebih rendah dari target yang sama sebesar 1,64 persen. Penurunan tajam terjadi pada 2023 dengan realisasi hanya 0,29 persen dan kembali turun menjadi 0,18 persen pada 2024, jauh di bawah target masing-masing 1,54 persen dan 1,43 persen. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan angka malnutrisi pada balita melalui program intervensi gizi, peningkatan akses pelayanan kesehatan, serta edukasi gizi bagi orang tua. Keberlanjutan tren penurunan ini menjadi kunci untuk memastikan

tumbuh kembang anak yang optimal dan menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

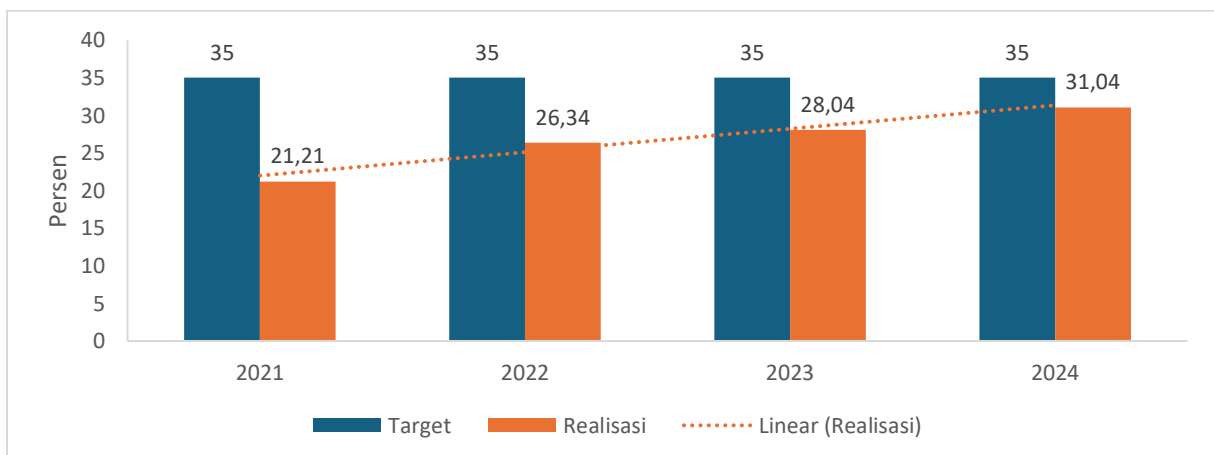


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 23. Target dan Realisasi Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak pada Usia Kurang dari 5 Tahun Berdasarkan Tipe di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.2.7. Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil

Prevalensi anemia pada ibu hamil di Kota Makassar mengalami tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024. Realisasi prevalensi anemia tercatat sebesar 21,21 persen pada tahun 2021, meningkat menjadi 26,34 persen pada 2022, 28,04 persen pada 2023, dan mencapai 31,04 persen pada 2024. Sementara itu, target prevalensi anemia pada ibu hamil tetap konstan di angka 35 persen sepanjang periode tersebut, yang mengindikasikan kinerja yang lebih baik, dengan persentase capaian sebesar 111,31 persen pada tahun 2024. Meskipun persentase capaian realisasi prevalensi anemia sudah di atas target, tren kenaikannya mengindikasikan adanya tantangan dalam penanggulangan anemia pada ibu hamil. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pola konsumsi yang kurang beragam, rendahnya kepatuhan mengonsumsi suplemen zat besi, atau kondisi kesehatan yang memengaruhi penyerapan nutrisi.

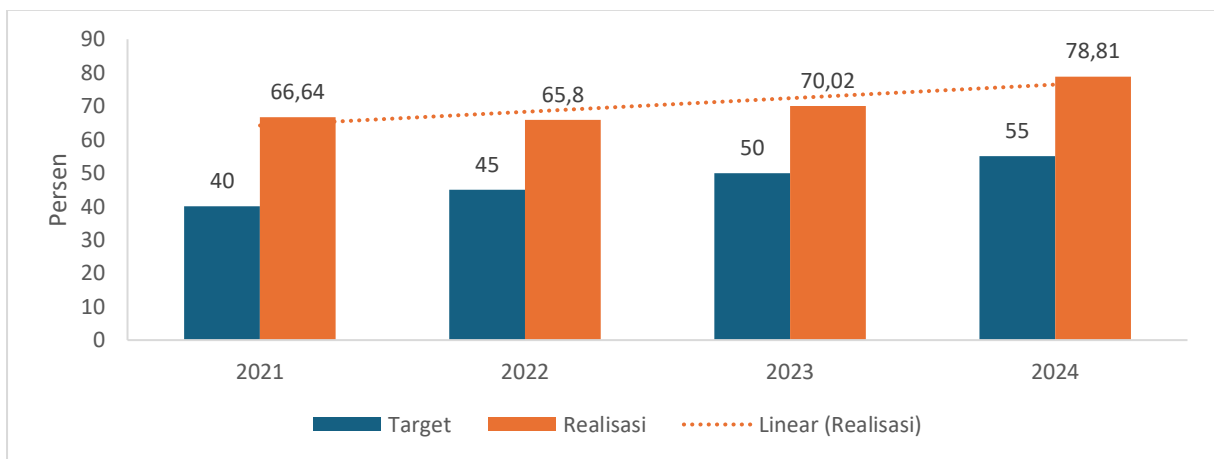


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 24. Target dan Ralisasi Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.2.8. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 (enam) Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif

Persentase bayi usia kurang dari enam bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di Kota Makassar menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024. Realisasi pada tahun 2021 tercatat sebesar 66,64 persen, relatif stabil pada 65,8 persen di tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 70,02 persen pada 2023, dan mencapai 78,81 persen pada 2024. Sementara itu, target capaian juga menunjukkan tren naik dari 40 persen pada 2021 menjadi 55 persen pada 2024, dengan persentase capaian sebesar 143,29 persen di tahun akhir. Capaian realisasi setiap tahun berada jauh di atas target yang ditetapkan, mencerminkan keberhasilan program promosi dan edukasi ASI eksklusif di Kota Makassar. Peningkatan signifikan pada 2023 dan 2024 dapat mengindikasikan efektivitas intervensi kesehatan ibu dan anak, dukungan fasilitas pelayanan kesehatan, serta peran aktif masyarakat dalam mendukung pemberian ASI eksklusif.

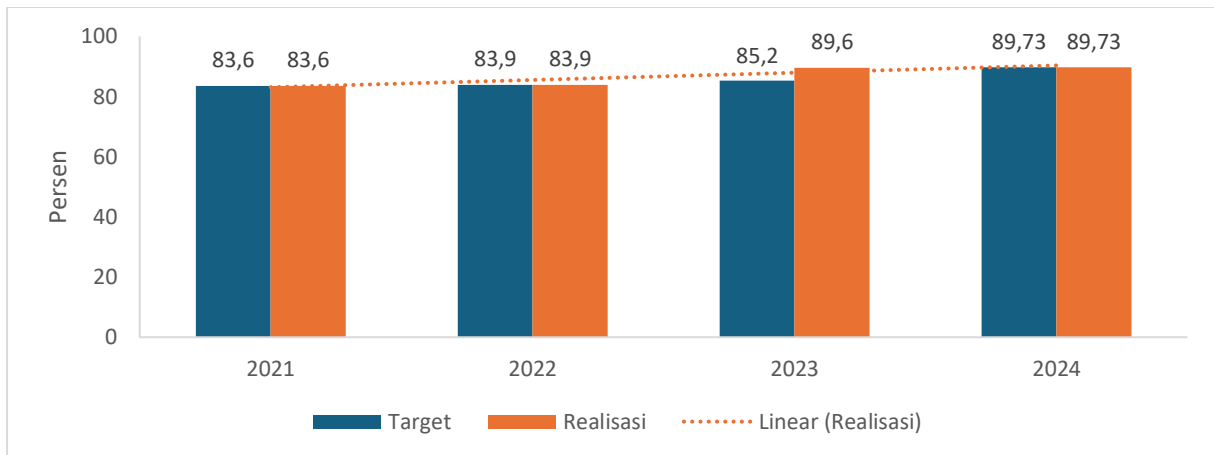


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 25. Target dan Ralisasi Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 (enam) Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.2.9. Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Makassar menunjukkan tren positif dari tahun 2021 hingga 2024. Realisasi pada tahun 2021 tercatat sebesar 83,6 persen dan relatif stabil di 83,5 persen pada 2022, kemudian meningkat menjadi 89,6 persen pada 2023, dan mencapai 89,73 persen pada 2024. Target capaian juga meningkat secara bertahap dari 83,6 persen pada 2021 menjadi 89,73 persen pada 2024. Realisasi setiap tahun cenderung melampaui target yang telah ditetapkan, menandakan perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Peningkatan signifikan pada 2023 dan konsistensi hingga 2024 mencerminkan keberhasilan berbagai program peningkatan gizi dan konsumsi pangan seimbang, termasuk promosi konsumsi ikan dan pangan bergizi lainnya, yang berkontribusi pada peningkatan skor PPH di Kota Makassar.



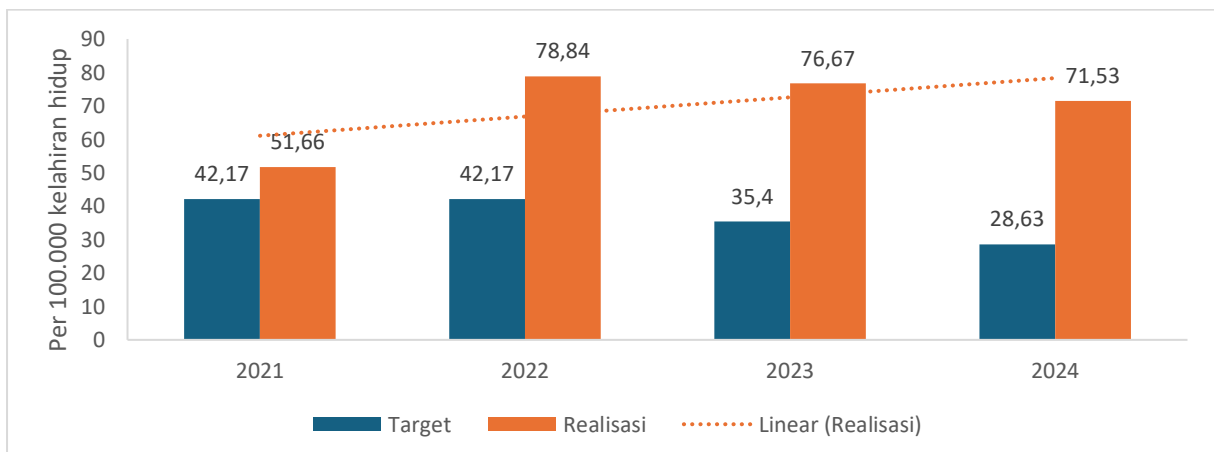
Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 26. Target dan Realisasi Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan Tingkat Konsumsi Ikan di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.3. Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

2.3.1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu (AKI) di Kota Makassar menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2021–2024. Pada 2021, realisasi AKI tercatat sebesar 51,66 per 100.000 kelahiran hidup, lebih tinggi dibandingkan target 42,17. Angka ini meningkat tajam pada 2022 hingga mencapai 78,84, jauh di atas target yang tetap berada di angka 42,17. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada 2023 menjadi 76,67, capaian tersebut masih cukup tinggi dibanding target 35,4. Pada 2024, realisasi AKI turun menjadi 71,53, namun selisihnya dengan target sebesar 28,63 masih signifikan. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya penurunan, target penurunan AKI belum tercapai, sehingga diperlukan strategi yang lebih efektif, terutama dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta deteksi dini risiko kehamilan untuk mengurangi angka kematian ibu di Kota Makassar.

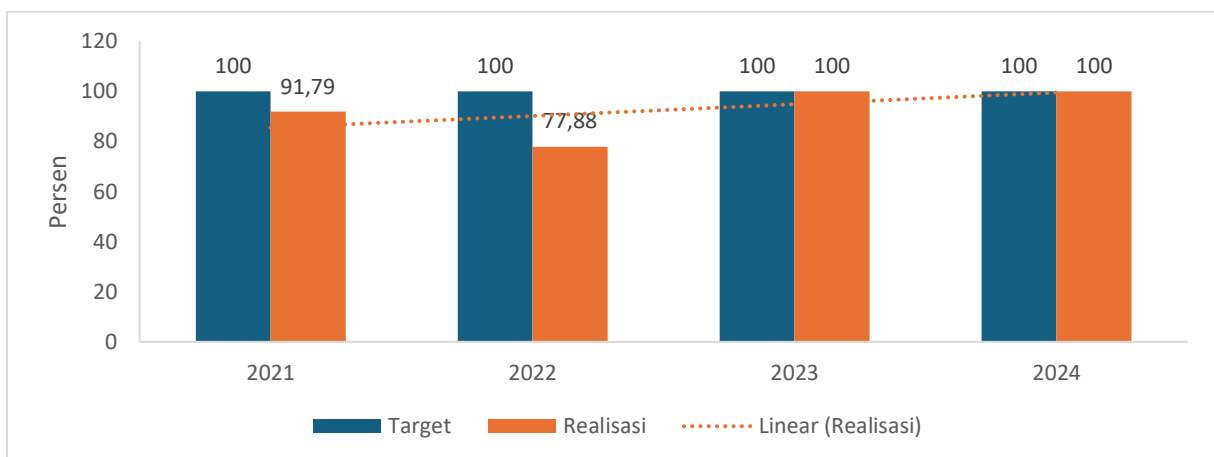


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 27. Target dan Realisasi Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.3.2. Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih

Proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di Kota Makassar menunjukkan tren yang fluktuatif pada periode 2021–2024. Pada 2021, realisasi sebesar 91,79 persen, sedikit di bawah target 100 persen. Namun, pada 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 77,88 persen, yang menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan seluruh persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih. Meskipun demikian, kinerja indikator ini membaik pada 2023, dengan realisasi yang mencapai target 100 persen, dan kondisi ini berhasil dipertahankan hingga 2024. Capaian tersebut menandakan adanya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan maternal, meskipun perlu evaluasi atas penyebab penurunan tajam di 2022 agar keberhasilan ini dapat dipertahankan secara konsisten di masa mendatang.

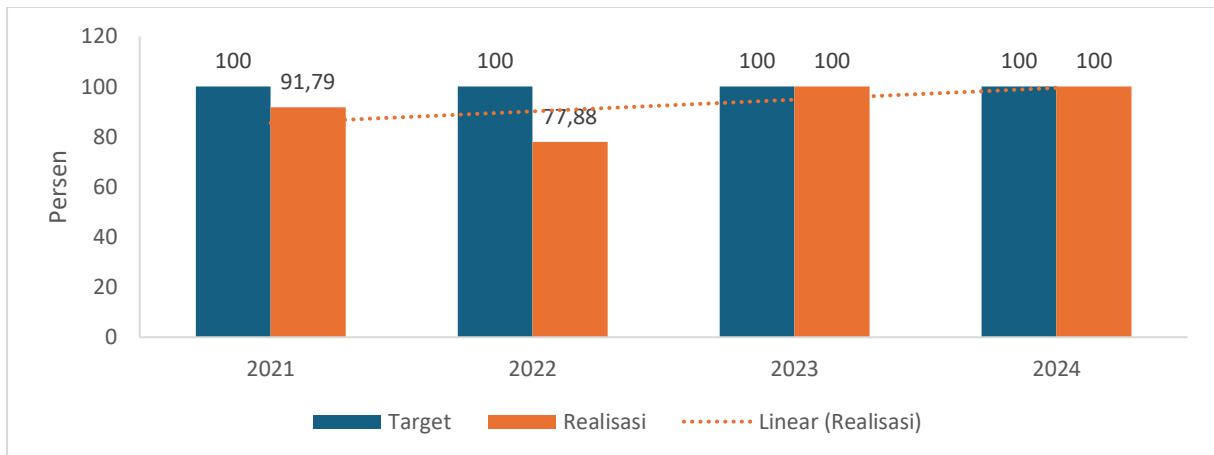


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 28. Target dan Realisasi Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.3.3. Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan

Proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya dilakukan di fasilitas kesehatan di Kota Makassar menunjukkan tren yang fluktuatif pada periode 2021–2024. Pada 2021, realisasi sebesar 91,79 persen, sedikit di bawah target 100 persen. Namun, pada 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 77,88 persen, yang mengindikasikan adanya hambatan dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk proses persalinan. Meskipun demikian, kinerja indikator ini membaik pada 2023, dengan realisasi yang mencapai target 100 persen, dan capaian ini berhasil dipertahankan hingga 2024. Keberhasilan tersebut mencerminkan peningkatan akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh ibu bersalin, meskipun evaluasi terhadap penyebab penurunan pada 2022 tetap diperlukan agar capaian ini dapat dijaga secara berkelanjutan di masa mendatang.

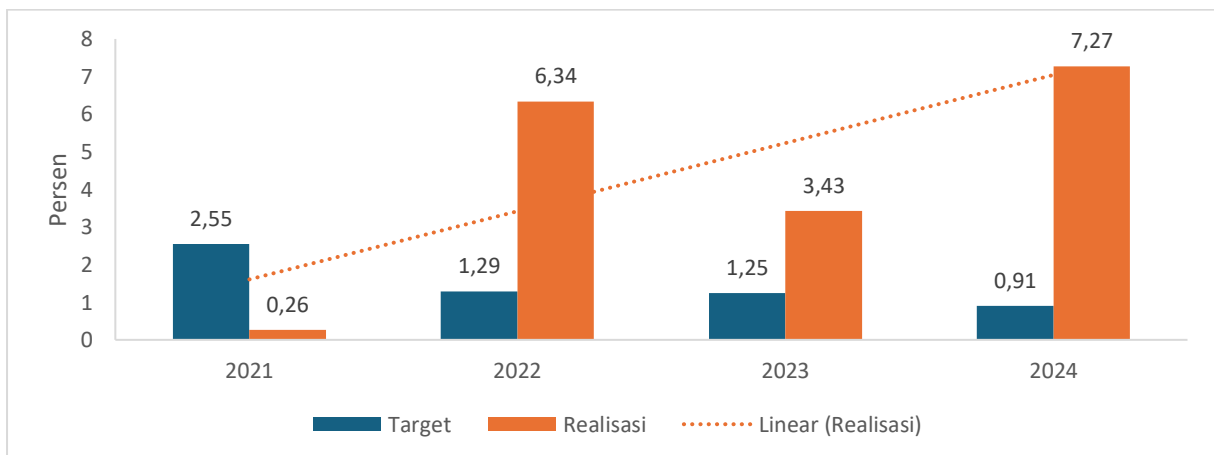


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 29. Target dan Realisasi Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.3.4. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup di Kota Makassar menunjukkan tren yang berfluktuasi cukup tajam pada periode 2021–2024. Pada 2021, realisasi berada di level rendah sebesar 0,26 persen, jauh di atas target 2,55 persen. Namun, pada 2022 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 6,34 persen, menunjukkan adanya peningkatan kasus kematian balita yang cukup mengkhawatirkan. Meskipun pada 2023 angka tersebut menurun menjadi 3,43 persen, capaian ini masih jauh di atas target 1,25 persen. Pada 2024, kembali terjadi kenaikan menjadi 7,27 persen, yang memperlebar kesenjangan terhadap target 0,91 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam upaya menurunkan angka kematian balita, sehingga diperlukan langkah strategis dan intervensi kesehatan yang lebih efektif untuk mengatasi faktor-faktor penyebabnya.

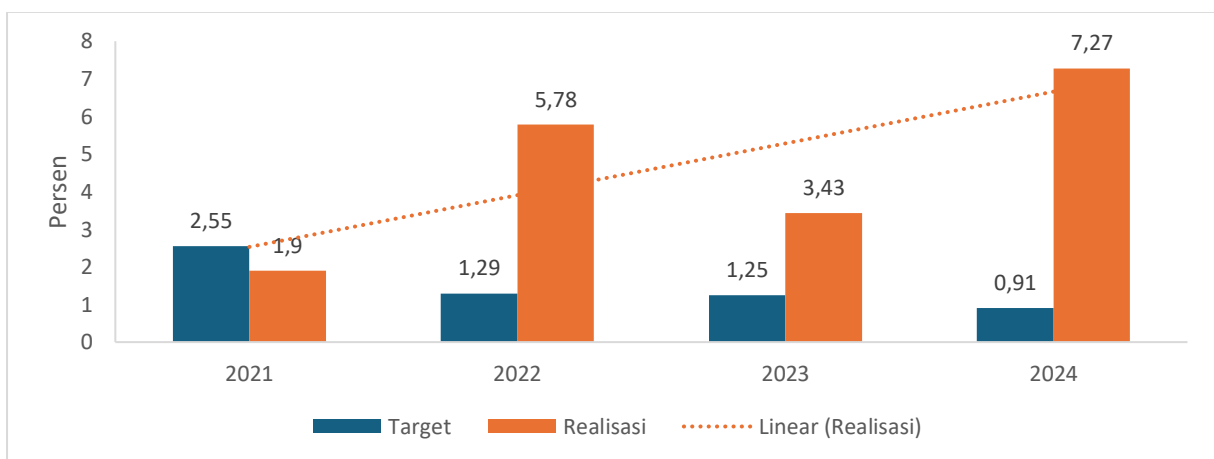


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 30. Target dan Realisasi Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.3.5. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup di Kota Makassar menunjukkan tren yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada periode 2021–2024. Pada 2021, realisasi AKN tercatat sebesar 1,9 persen, lebih rendah dari target 2,55 persen. Namun, pada 2022 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 5,78 persen, jauh di atas target 1,29 persen, yang mengindikasikan adanya peningkatan risiko kematian pada bayi baru lahir. Pada 2023, realisasi AKN menurun menjadi 3,43 persen, namun angka ini masih hampir tiga kali lipat dari target yang ditetapkan sebesar 1,25 persen. Kondisi ini kembali memburuk pada 2024 dengan kenaikan tajam menjadi 7,27 persen, meninggalkan kesenjangan yang besar terhadap target 0,91 persen. Data ini menunjukkan bahwa upaya penurunan AKN masih menghadapi tantangan besar, sehingga diperlukan intervensi yang lebih efektif, termasuk perbaikan layanan kesehatan ibu dan bayi, serta peningkatan deteksi dini komplikasi kehamilan dan persalinan.

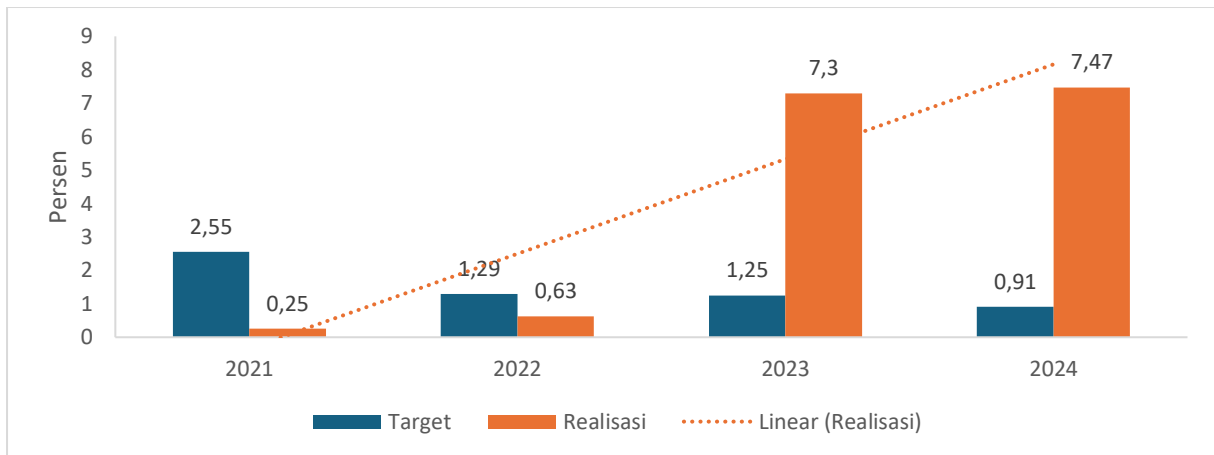


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 31. Target dan Realisasi Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.3.6. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kota Makassar mengalami peningkatan yang signifikan pada periode 2021–2024. Pada 2021, realisasi AKB tercatat sebesar 0,25 persen, jauh di bawah target 2,55 persen. Pada 2022, angka ini naik menjadi 0,63 persen, namun masih berada di bawah target 1,29 persen. Kondisi berubah drastis pada 2023, di mana realisasi AKB melonjak tajam menjadi 7,3 persen, jauh melampaui target 1,25 persen, dan tren ini sedikit meningkat pada 2024 menjadi 7,47 persen, sementara target terus menurun menjadi 0,91 persen. Peningkatan signifikan ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam kesehatan bayi baru lahir dan pelayanan neonatal, sehingga diperlukan langkah strategis untuk menekan angka kematian bayi, termasuk peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan sistem rujukan medis yang cepat dan efektif.

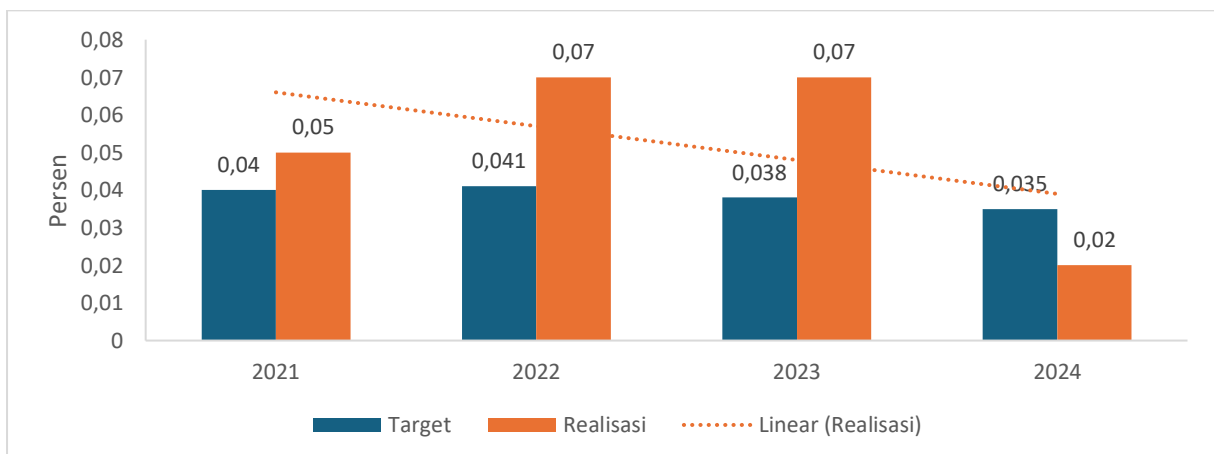


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 32. Target dan Realisasi Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.3.7. Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa

Prevalensi HIV pada populasi dewasa di Kota Makassar menunjukkan tren yang berfluktuasi pada periode 2021–2024. Pada 2021, realisasi tercatat sebesar 0,05 persen, sedikit di atas target 0,04 persen. Angka ini terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 2022 sebesar 0,07 persen, yang menunjukkan adanya tantangan dalam pengendalian penularan HIV pada periode tersebut. Pada 2023, prevalensi tetap tinggi di angka 0,07 persen sebelum mengalami penurunan signifikan pada 2024 menjadi 0,02 persen, lebih rendah dari target 0,035 persen, dengan persentase capaian sebesar 142,86 persen. Penurunan ini mencerminkan adanya kemajuan signifikan dalam upaya pencegahan dan penanganan HIV, yang dapat dikaitkan dengan peningkatan kesadaran masyarakat, perluasan akses layanan kesehatan, dan program intervensi yang efektif. Upaya mempertahankan tren penurunan ini menjadi penting untuk mencegah kebangkitan kembali kasus di masa mendatang.

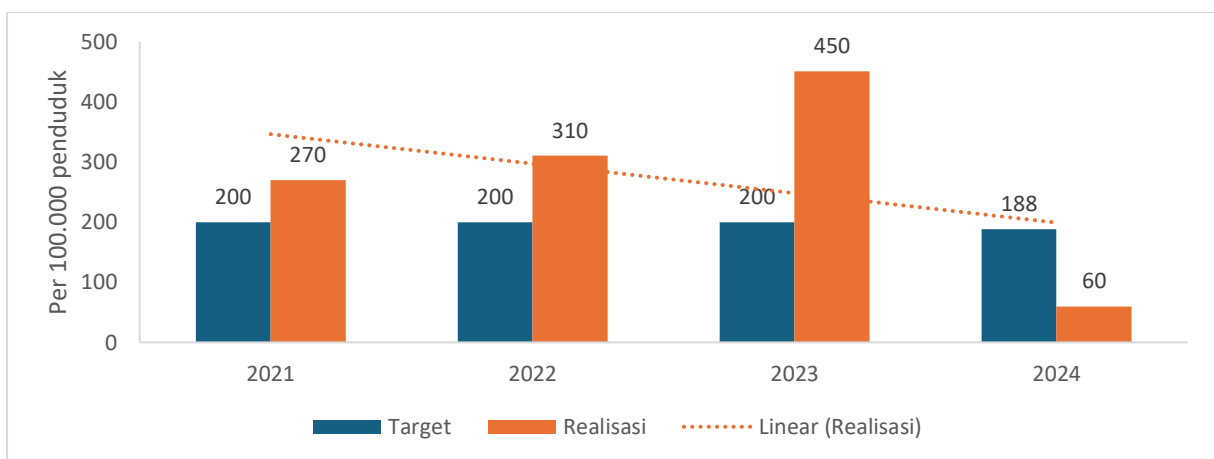


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 33. Target dan Ralisasi Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.3.8. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 Penduduk

Insiden tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk di Kota Makassar menunjukkan tren fluktuatif sepanjang 2021–2024. Pada 2021, realisasi tercatat sebesar 270 kasus per 100.000 penduduk, lebih tinggi dari target 200 kasus. Angka ini meningkat menjadi 310 kasus pada 2022 dan mencapai puncaknya pada 2023 dengan 450 kasus, jauh melampaui target yang tetap berada di kisaran 200 kasus per tahun. Namun, pada 2024 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi 60 kasus per 100.000 penduduk, bahkan berada jauh di bawah target 188 kasus. Penurunan drastis ini mengindikasikan adanya perbaikan yang cukup besar dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan tuberkulosis. Meski demikian, lonjakan kasus pada 2022–2023 menunjukkan perlunya strategi berkelanjutan agar penurunan yang dicapai dapat dipertahankan di masa mendatang.

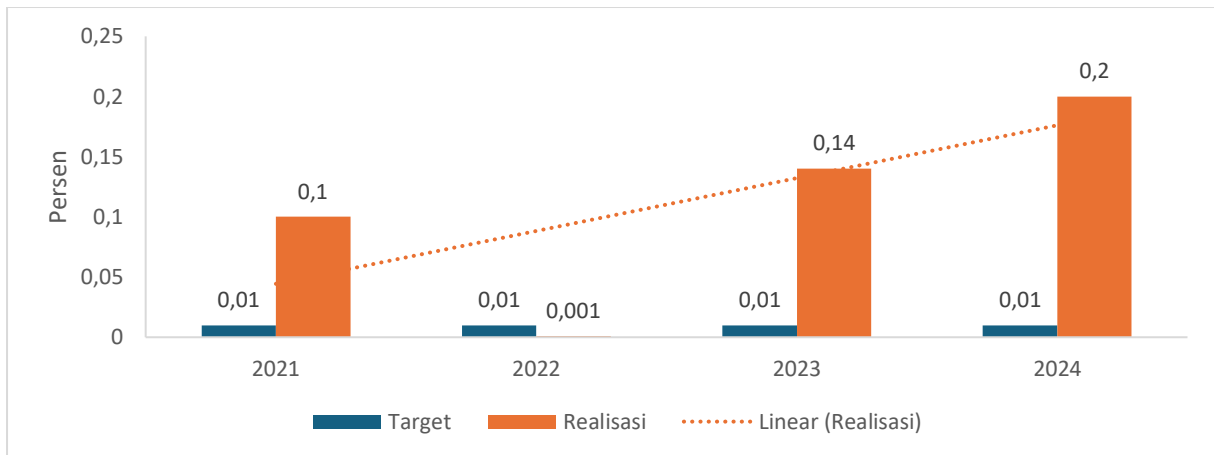


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 34. Target dan Realisasi Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 Penduduk di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.3.9. Kejadian Malaria per 1000 Orang

Kejadian malaria per 1.000 orang di Kota Makassar mengalami perubahan signifikan selama periode 2021–2024. Pada 2021, realisasi tercatat sebesar 0,1 persen, jauh di atas target 0,01 persen. Angka ini kemudian menurun drastis pada 2022 menjadi 0,001 persen, sejalan dengan target yang tetap pada 0,01 persen. Namun, tren ini berbalik pada 2023 dengan peningkatan kasus menjadi 0,14 persen, dan kembali naik menjadi 0,2 persen pada 2024, keduanya jauh melebihi target yang konstan di angka 0,01 persen. Peningkatan tajam ini menunjukkan adanya tantangan baru dalam pengendalian malaria, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor pemicu dan penguatan strategi pencegahan agar target dapat tercapai secara konsisten.

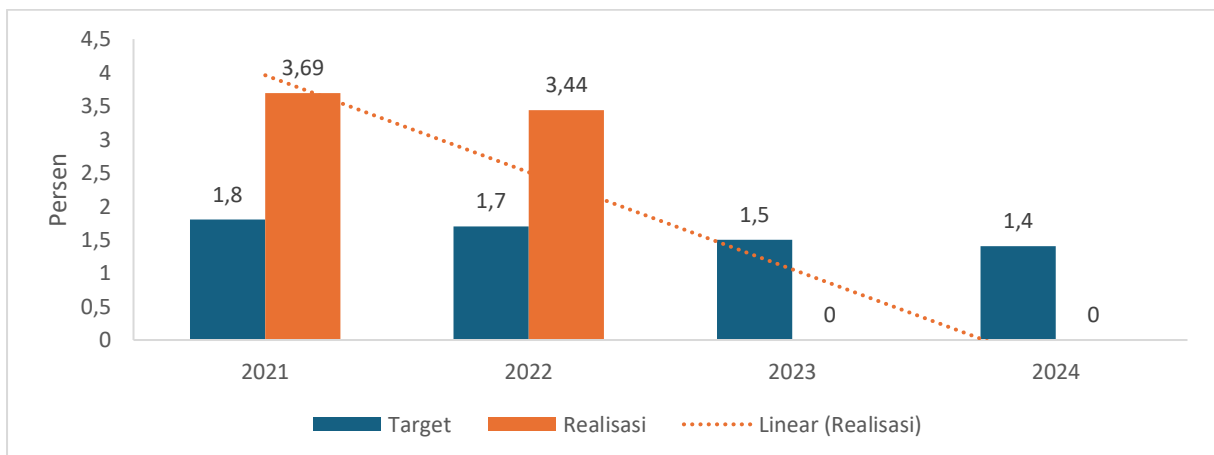


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 35. Target dan Realisasi Kejadian Malaria per 1000 Orang di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.3.10. Persentase Merokok pada Penduduk Umur ≤ 18 Tahun

Persentase merokok pada penduduk berusia ≤ 18 tahun di Kota Makassar mengalami penurunan signifikan dari 3,69 persen pada tahun 2021 menjadi 3,44 persen pada tahun 2022. Capaian ini masih jauh di bawah target yang diharapkan menurun secara bertahap dari 1,8 persen pada tahun 2021 menjadi 1,7 persen pada tahun 2022. Namun data realisasi pada tahun 2023 dan 2024 belum dapat ditampilkan karena ketidaktersediaan data.



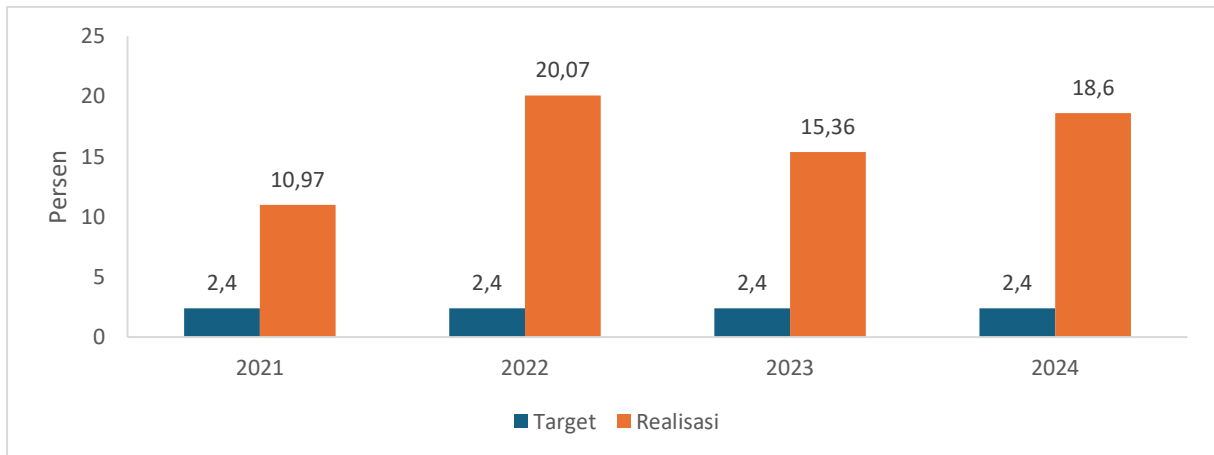
Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 36. Target dan Realisasi Persentase Merokok pada Penduduk Umur ≤ 18 Tahun di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.3.11. Prevalensi Tekanan Darah Tinggi

Prevalensi tekanan darah tinggi di Kota Makassar menunjukkan fluktuasi signifikan sepanjang periode 2021–2024. Pada tahun 2021, angka prevalensi tercatat sebesar 10,97 persen, kemudian meningkat tajam menjadi 20,07 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, prevalensi menurun menjadi 15,36 persen pada tahun 2023, sebelum kembali naik menjadi 18,6 persen pada tahun 2024. Realisasi prevalensi tekanan darah tinggi selama periode tersebut tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan target

yang konsisten dipatok pada angka 2,4 persen setiap tahunnya. Perbedaan signifikan ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian hipertensi belum berjalan optimal, sehingga diperlukan intervensi kesehatan masyarakat yang lebih intensif, seperti promosi gaya hidup sehat, deteksi dini, serta peningkatan akses layanan kesehatan preventif.

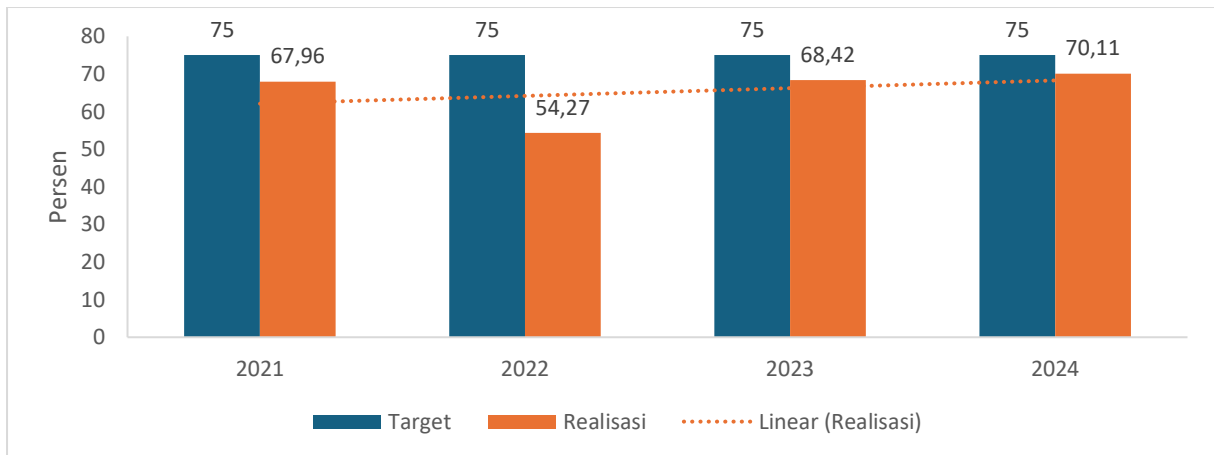


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 37. Target dan Realisasi Prevalensi Tekanan Darah Tinggi di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.3.12. Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) atau Pasangannya yang memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern

Proporsi perempuan usia reproduksi (15–49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern di Kota Makassar pada periode 2021–2024 belum mencapai target sebesar 75 persen. Realisasi mengalami penurunan signifikan dari 67,96 persen pada tahun 2021 menjadi 54,27 persen pada tahun 2022, sebelum kembali meningkat menjadi 68,42 persen pada tahun 2023 dan 70,11 persen pada tahun 2024, dengan persentase capaian hanya sebesar 93,48 persen. Meskipun terjadi perbaikan dalam dua tahun terakhir, capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan akses, sosialisasi, dan edukasi terkait penggunaan alat kontrasepsi modern, khususnya untuk mengatasi hambatan kultural, ekonomi, maupun ketersediaan layanan kesehatan reproduksi yang memadai.

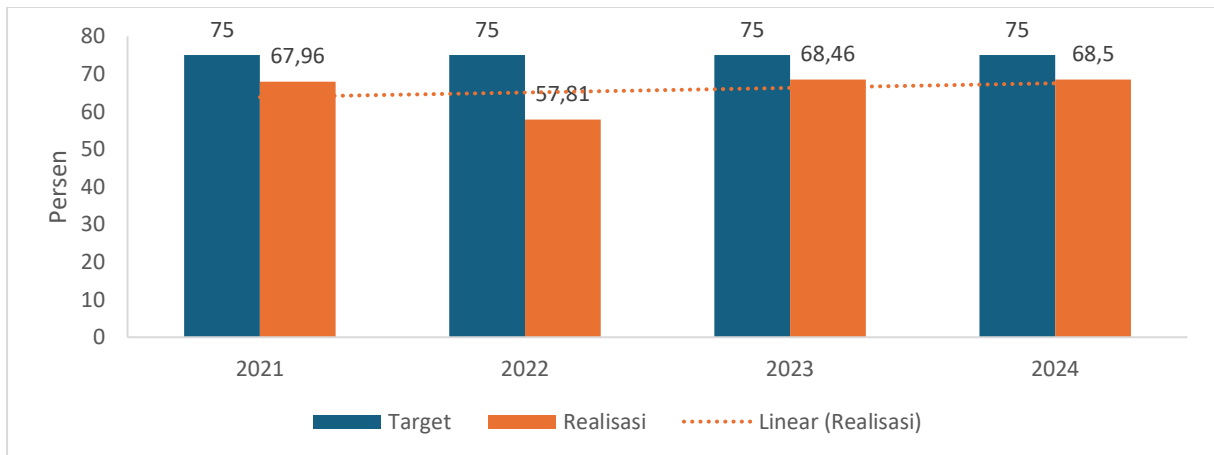


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 38. Target dan Realisasi Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) atau Pasangannya yang memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.3.13. Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin

Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) berusia 15–49 tahun yang berstatus kawin di Kota Makassar periode 2021–2024 belum mencapai target yang konsisten ditetapkan sebesar 75 persen. Realisasi pada tahun 2021 sebesar 67,96 persen menurun menjadi 57,81 persen pada tahun 2022, kemudian kembali meningkat menjadi 68,46 persen di tahun 2023 dan sedikit naik ke 68,50 persen pada tahun 2024, dengan persentase capaian hanya sebesar 91,33 persen. Kendati tren pada dua tahun terakhir menunjukkan perbaikan, capaian ini masih terpaut cukup jauh dari target. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mendorong partisipasi pasangan usia subur untuk menggunakan metode kontrasepsi, yang dapat disebabkan oleh faktor pengetahuan, akses layanan kesehatan, maupun preferensi metode kontrasepsi yang digunakan.

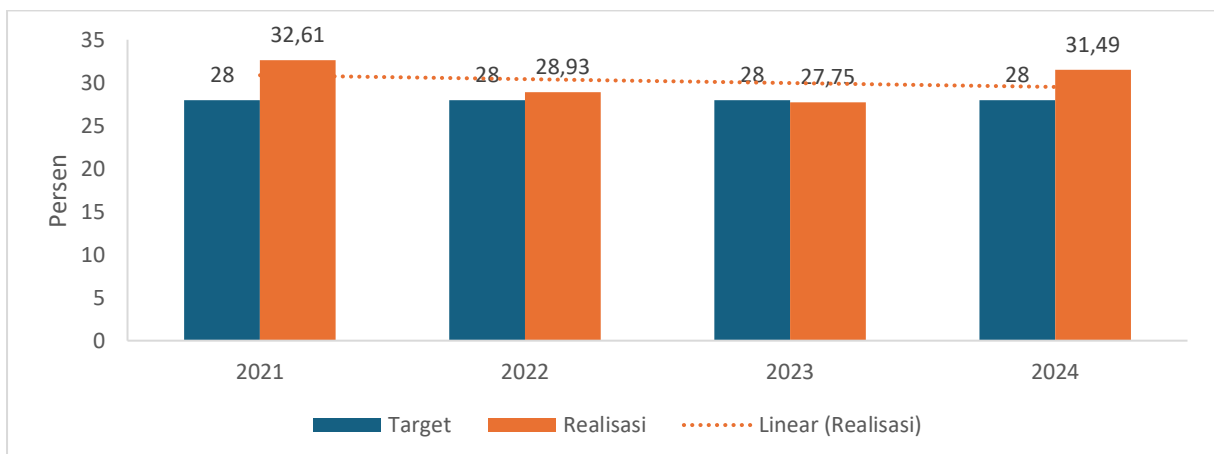


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 39. Target dan Realisasi Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.3.14. Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern

Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern di Kota Makassar periode 2021–2024 cenderung berfluktuasi. Target yang ditetapkan secara konsisten sebesar 28 persen setiap tahun, sementara realisasi pada 2021 mencapai 32,61 persen, menurun menjadi 28,93 persen pada 2022, dan sedikit turun lagi menjadi 27,75 persen pada 2023. Pada 2024, capaian kembali meningkat menjadi 31,49 persen, melampaui target yang ditetapkan, dengan persentase capaian sebesar 112,46 persen. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan capaian pada 2022–2023, tren pada 2024 kembali positif. Capaian di atas target pada dua tahun (2021 dan 2024) mengindikasikan adanya potensi peningkatan keberhasilan program MKJP jika upaya sosialisasi, akses pelayanan, dan pendampingan pengguna dapat diperkuat secara konsisten.

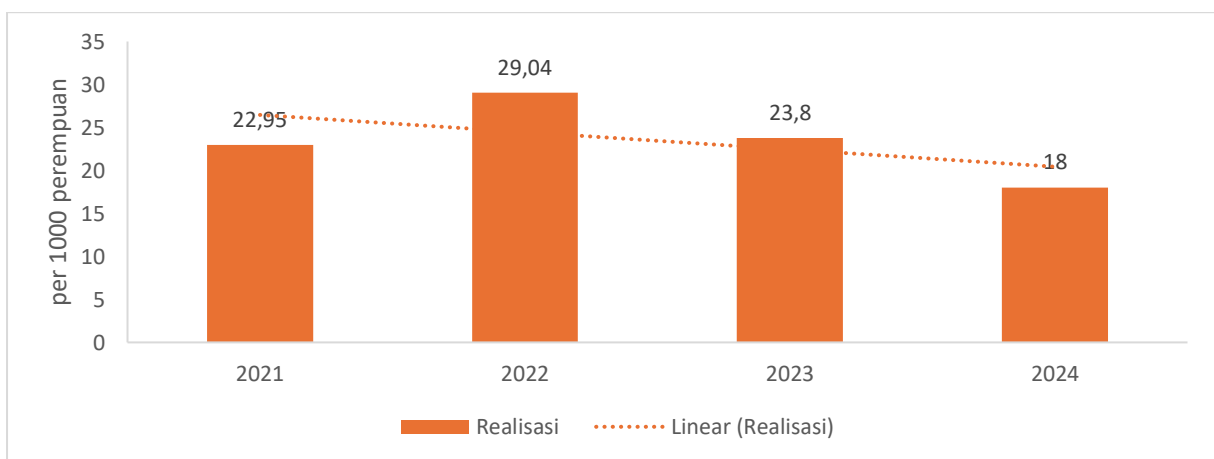


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 40. Target dan Realisasi Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.3.15. Angka Kelahiran pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR)

Angka kelahiran pada perempuan usia 15–19 tahun (ASFR) di Kota Makassar pada periode 2021–2024 menunjukkan tren menurun. Realisasi pada tahun 2021 tercatat sebesar 22,95, meningkat menjadi 29,04 pada 2022, kemudian menurun kembali menjadi 23,8 pada 2023, dan mencapai titik terendah sebesar 18 pada 2024. Kesenjangan yang signifikan antara target dan realisasi ini dapat mencerminkan keberhasilan program pengendalian kelahiran pada kelompok usia remaja, meskipun target yang ditetapkan terlihat tidak realistis karena terlalu tinggi dibandingkan kondisi aktual. Penurunan angka kelahiran di kelompok usia ini, khususnya pada 2024, menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi.

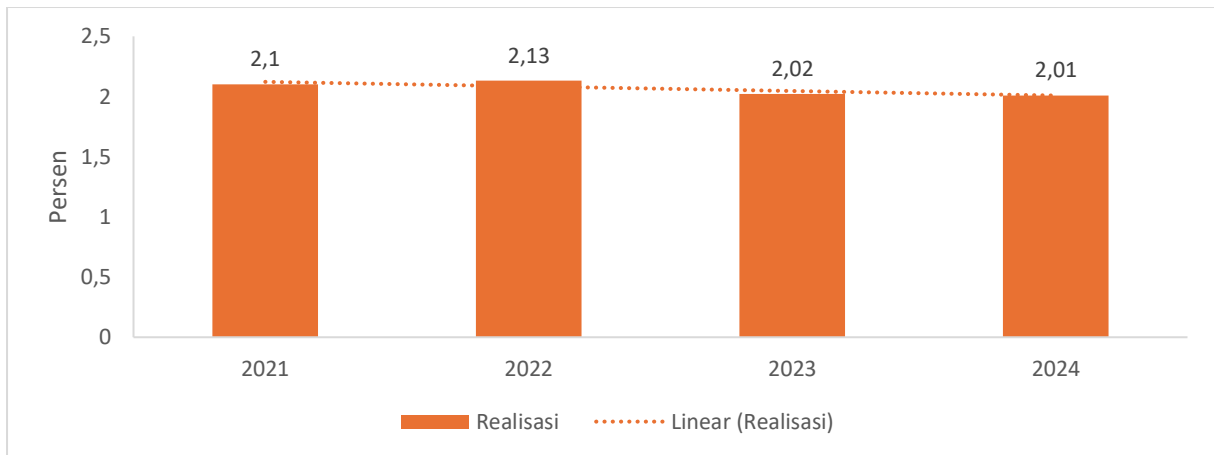


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 41. Target dan Realisasi Angka Kelahiran pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.3.16. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) di Kota Makassar selama periode 2021–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan realisasi berkisar antara 2,01 hingga 2,13 anak per perempuan usia subur. Pada tahun 2021, TFR tercatat sebesar 2,1, sedikit meningkat menjadi 2,13 pada 2022, lalu menurun ke 2,02 pada 2023, dan kembali turun tipis ke 2,01 pada 2024. Stabilitasnya angka TFR pada kisaran dua anak per perempuan mencerminkan bahwa Kota Makassar telah berada pada tingkat fertilitas pengganti (replacement level fertility), yang sejalan dengan tujuan program pengendalian penduduk. Meskipun target numeriknya tidak sebanding dengan indikator realisasi yang sebenarnya, capaian ini menunjukkan keberhasilan relatif dalam menjaga pertumbuhan penduduk pada tingkat yang terkendali.

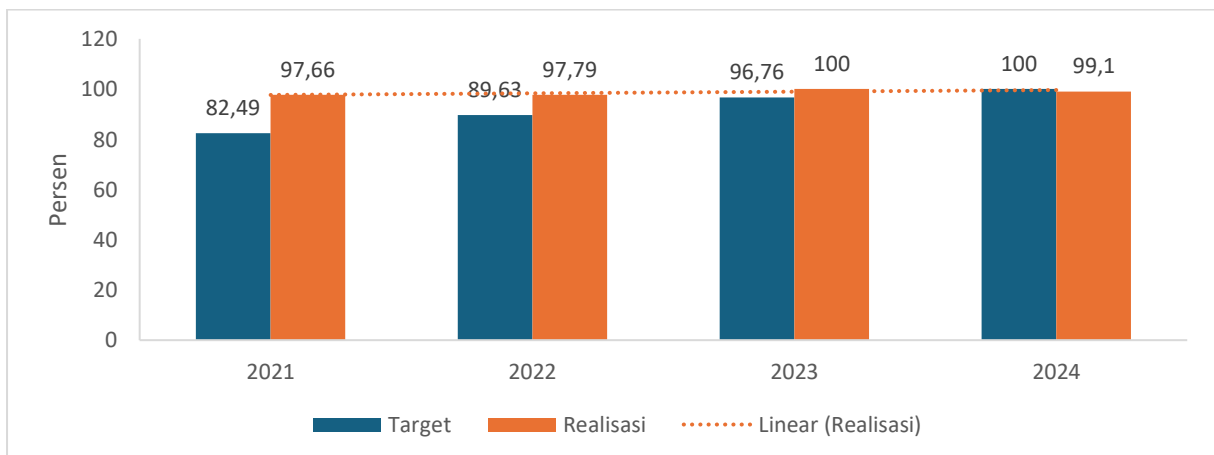


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 42. Target dan Realisasi Total Fertility Rate (TFR) di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.3.17. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Makassar menunjukkan tren yang konsisten tinggi sepanjang periode 2021–2024. Realisasi cakupan berada pada tingkat di atas 97 persen sejak tahun 2021 dan terus mengalami peningkatan, dari 97,66 persen pada 2021 menjadi 100 persen pada 2023, kemudian sedikit menurun ke 99,1 persen pada 2024. Sementara itu, target yang ditetapkan meningkat secara bertahap dari 82,49 persen pada 2021 hingga mencapai 100 persen pada 2024. Kinerja ini mencerminkan keberhasilan dalam memperluas kepesertaan JKN, di mana realisasi cakupan hampir selalu melampaui target. Hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan daerah dalam mendorong masyarakat untuk memiliki perlindungan kesehatan yang terintegrasi dengan program nasional, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan yang merata dan berkelanjutan.

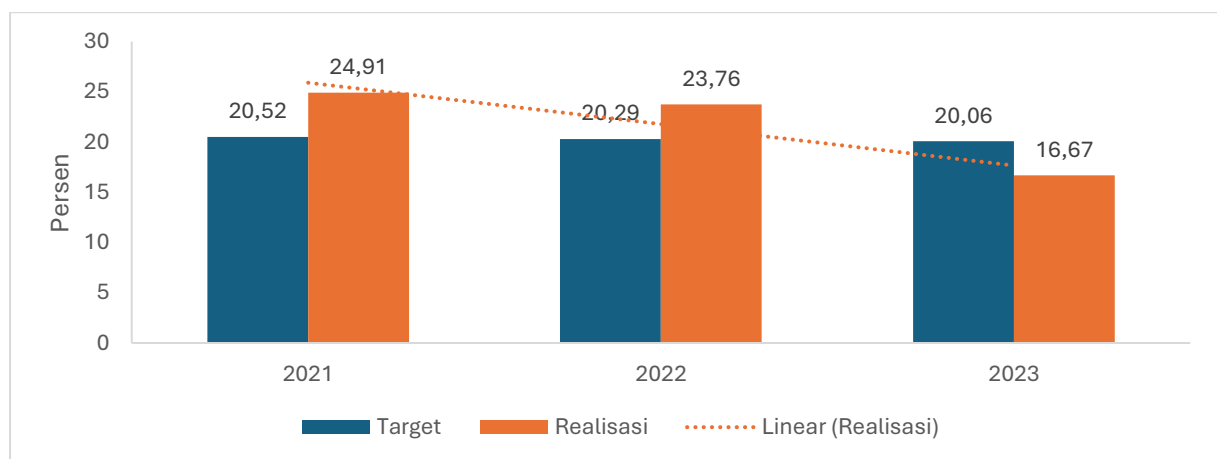


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 43. Target dan Realisasi Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.3.18. Persentase Merokok pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun

Persentase merokok pada penduduk berusia ≥ 15 tahun di Kota Makassar menunjukkan tren penurunan signifikan sepanjang periode 2021–2024. Realisasi pada 2021 tercatat sebesar 24,91 persen, menurun menjadi 23,76 persen di 2022, lalu turun tajam menjadi 16,67 persen pada 2023. Sementara itu, target yang ditetapkan mengalami penurunan perlahan dari 20,52 persen pada 2021 menjadi 20,06 persen pada 2023. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan yang jauh melampaui target. Hal ini mengindikasikan efektivitas kebijakan pengendalian tembakau, kampanye kesehatan, dan regulasi terkait pembatasan konsumsi rokok di Kota Makassar. Penurunan ini juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat, pengurangan beban penyakit, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

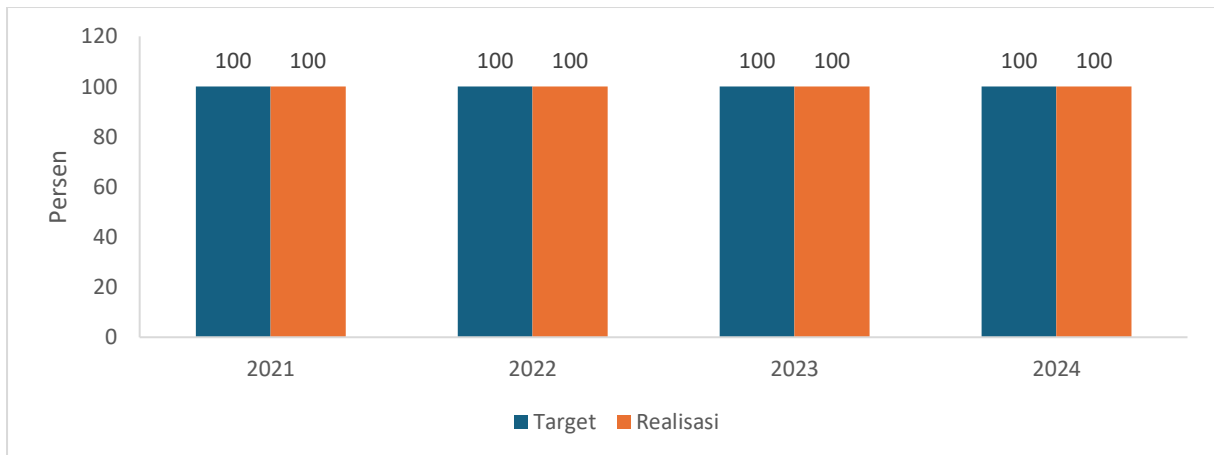


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 44. Target dan Realisasi Persentase Merokok pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun di Kota Makassar Tahun 2021 – 2023

2.3.19. Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas Kota Makassar pada periode 2021–2024 menunjukkan capaian yang konsisten sempurna. Baik target maupun realisasi berada pada angka 100 persen di setiap tahunnya, yang menandakan bahwa seluruh puskesmas selalu mampu memenuhi kebutuhan obat dan vaksin sesuai standar yang ditetapkan. Konsistensi ini mencerminkan efektivitas manajemen rantai pasok dan distribusi obat serta vaksin di Kota Makassar. Ketersediaan yang terjaga secara penuh juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, termasuk kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi wabah penyakit dan kebutuhan kesehatan rutin.

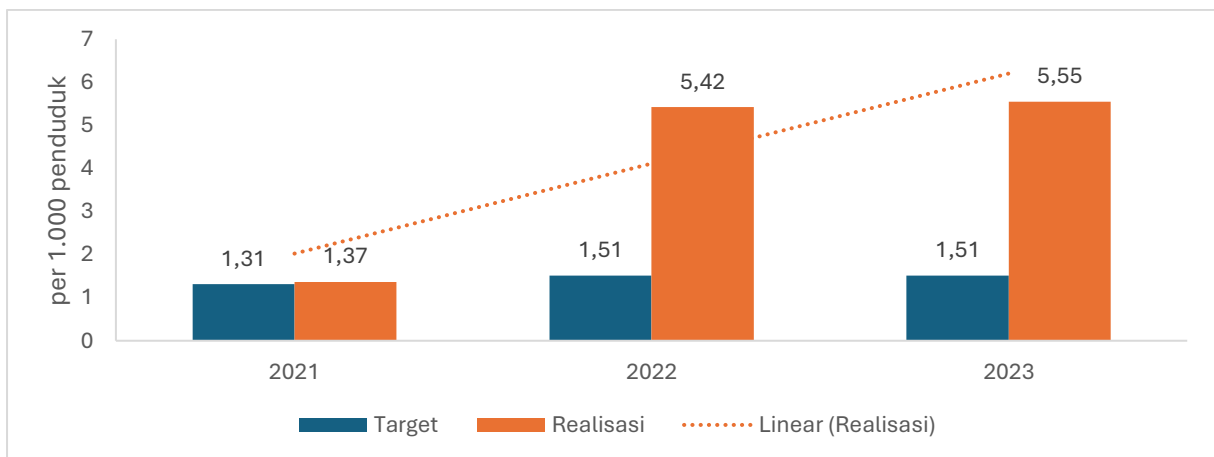


Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 45. Target dan Realisasi Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.3.20. Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan

Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan di Kota Makassar pada periode 2021–2023 menunjukkan tren realisasi yang sangat fluktuatif dan berbeda signifikan dibandingkan target. Target cenderung stabil pada kisaran 1,31–1,51 per 1.000 penduduk, sedangkan realisasi meningkat tajam dari 1,37 per 1.000 penduduk pada 2021 menjadi 5,42 per 1.000 penduduk pada 2022 dan 5,55 per 1.000 penduduk pada 2023. Perbedaan ini mengindikasikan adanya dinamika besar dalam penempatan tenaga kesehatan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh rekrutmen besar-besaran pada 2022–2023. Fluktuasi yang tinggi ini menunjukkan perlunya strategi perencanaan yang lebih konsisten untuk memastikan pemerataan dan keberlanjutan distribusi tenaga kesehatan di seluruh wilayah kota.



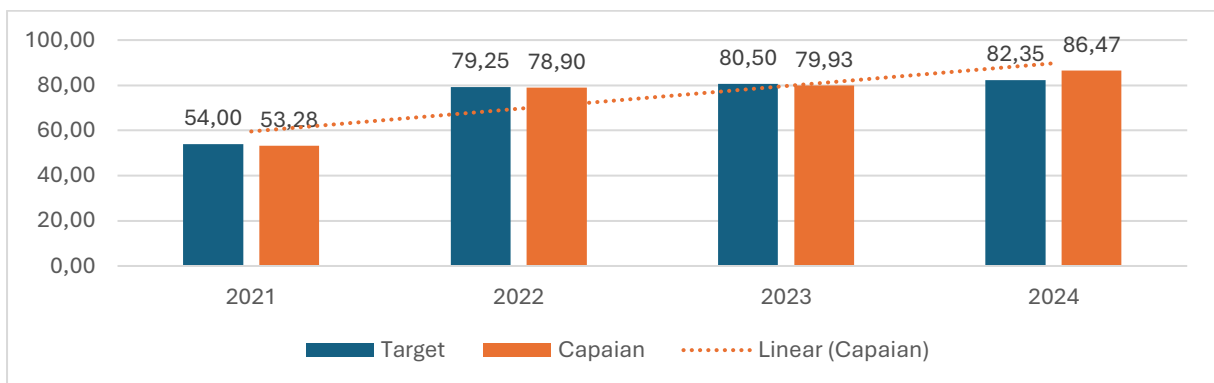
Sumber: BPS dan Bappeda Kota Makassar, 2025

Gambar 2. 46. Target dan Realisasi Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan di Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

2.4. Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar sepanjang Hayat untuk Semua

2.4.1. Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B

Persentase institusi pendidikan dasar di Kota Makassar yang sudah mendapatkan akreditasi minimal B telah memperlihatkan peningkatan secara konsisten dalam kurun empat tahun terakhir. Per Tahun 2024, persentase SD/MI yang berakreditasi B telah mencapai 86,47%, meningkat cukup jauh jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2021 yang sebesar 53,28%. Jika dibandingkan dengan target pencapaian tiap tahunnya, capaian di Tahun 2024 telah berhasil melampaui ekspektasi sebesar 82,35%, dan menjadi yang pertama kalinya melampaui target tahunan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan yang cukup akseleratif dari sisi manajemen kualitas pendidikan dasar di Kota Makassar. Hal ini akan mendukung terciptanya kualitas SDM yang mumpuni di Kota Makassar.

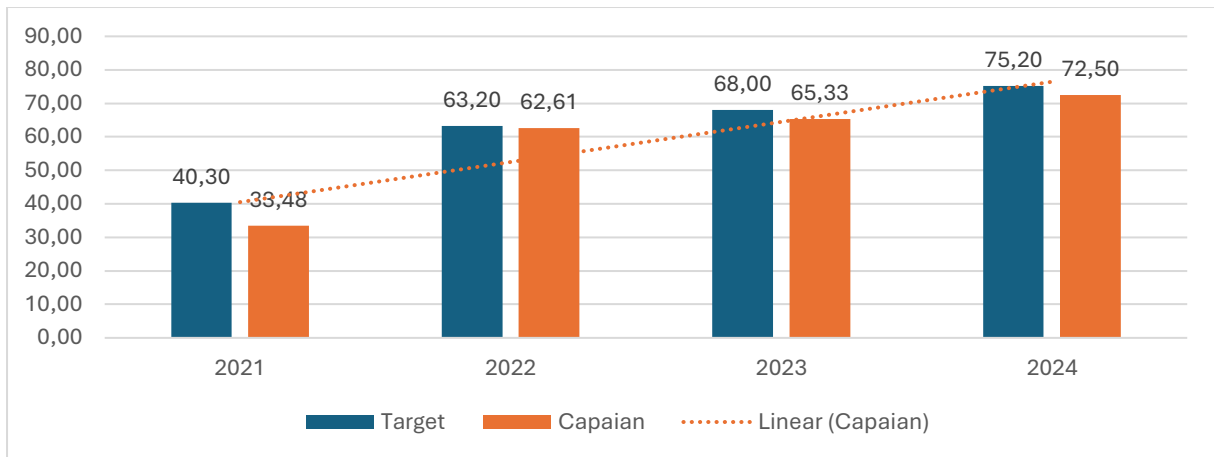


Sumber: BPS.

Gambar 2. 47. Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B

2.4.2. Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B

Kinerja manajemen mutu pada jenjang pendidikan menengah pertama dan sederajat juga menunjukkan tren positif. Meskipun belum berhasil mencapai target kinerja tahunan, persentase SMP sederajat di Kota Makassar yang memperoleh akreditasi minimal B konsisten meningkat sepanjang periode 2021–2024. Pada tahun 2024, capaian tersebut mencapai lebih dari 72%, menjadi yang tertinggi sepanjang periode pengukuran. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang masih di bawah 70%, dan bahkan melonjak signifikan dari capaian awal tahun 2021 yang hanya 33,48%. Peningkatan ini mencerminkan adanya komitmen untuk terus memperkuat kualitas pendidikan menengah pertama secara berkelanjutan. Upaya tersebut penting untuk menjaga kesinambungan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari jenjang dasar hingga menengah.

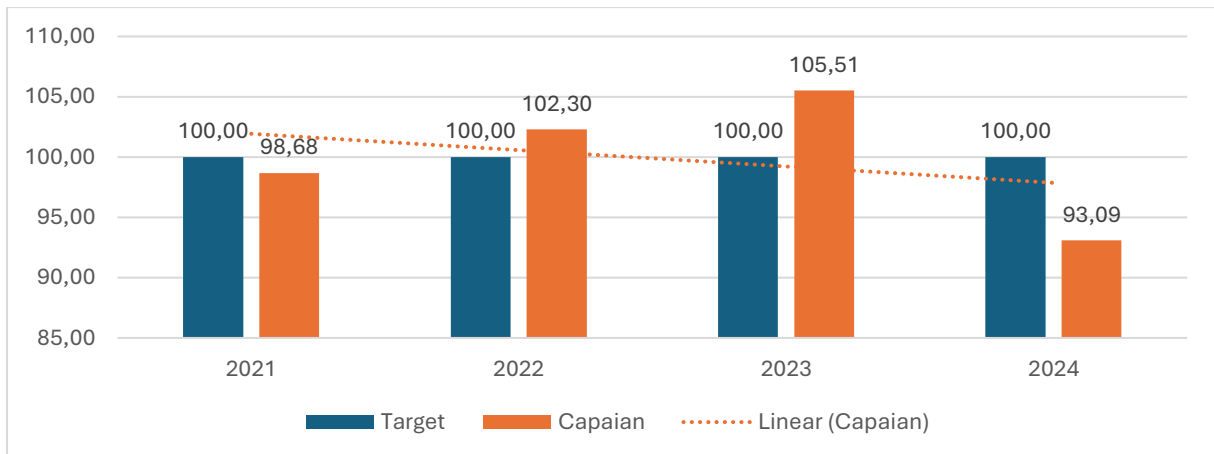


Sumber: BPS

Gambar 2. 48. Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B

2.4.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/MI sederajat di Kota Makassar mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024. Setelah mencapai 105,31% pada 2023, APK turun menjadi hanya 93,09% di tahun berikutnya. Penurunan ini mengindikasikan adanya anak usia sekolah dasar (7–12 tahun) yang tidak melanjutkan pendidikan atau menghadapi hambatan akses pada jenjang tersebut. Padahal, dalam tiga tahun sebelumnya, tren APK menunjukkan peningkatan yang konsisten. Kondisi ini mencerminkan masih adanya kerentanan di kalangan keluarga dalam memastikan akses pendidikan dasar bagi anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat berdampak terhadap kualitas dan produktivitas sumber daya manusia (SDM) di masa mendatang.



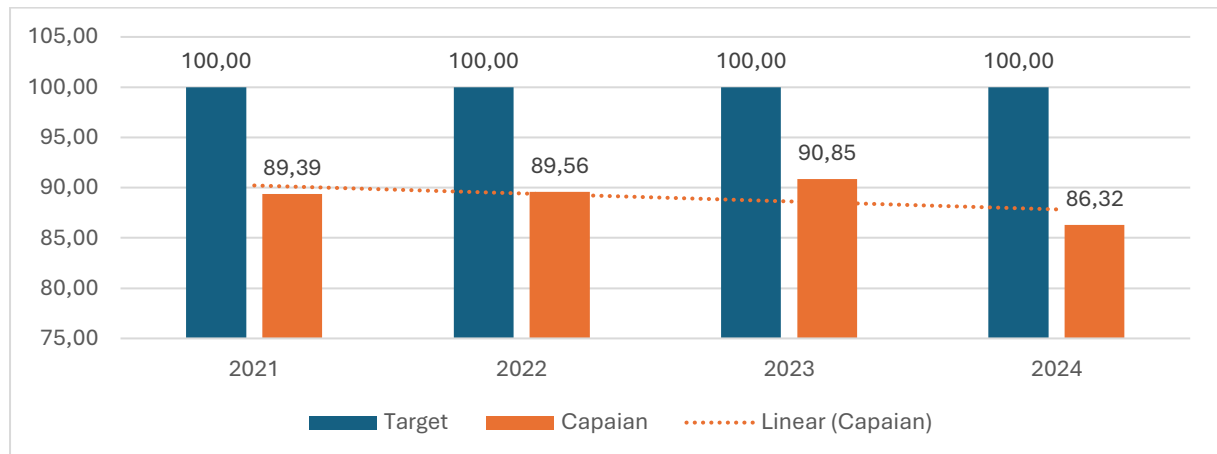
Sumber: BPS

Gambar 2. 49. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sederajat

2.4.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Sederajat

Pada jenjang SMP/MTs sederajat, Angka Partisipasi Kasar (APK) juga menunjukkan kecenderungan menurun dalam empat tahun terakhir dan masih jauh dari capaian ideal 100% setiap tahunnya. Sejak 2021, realisasi APK SMP/MTs hanya berada pada kisaran 86–89%, yang berarti masih banyak anak usia sekolah menengah pertama di Kota Makassar yang belum mengenyam pendidikan

formal pada jenjang tersebut. Kondisi ini kembali menegaskan adanya kerentanan bagi anak-anak untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan dari level dasar hingga menengah. Jika dibiarkan, situasi ini dapat menjadi hambatan serius dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama bagi Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia yang sangat membutuhkan SDM unggul untuk mendukung pembangunan dan daya saing.

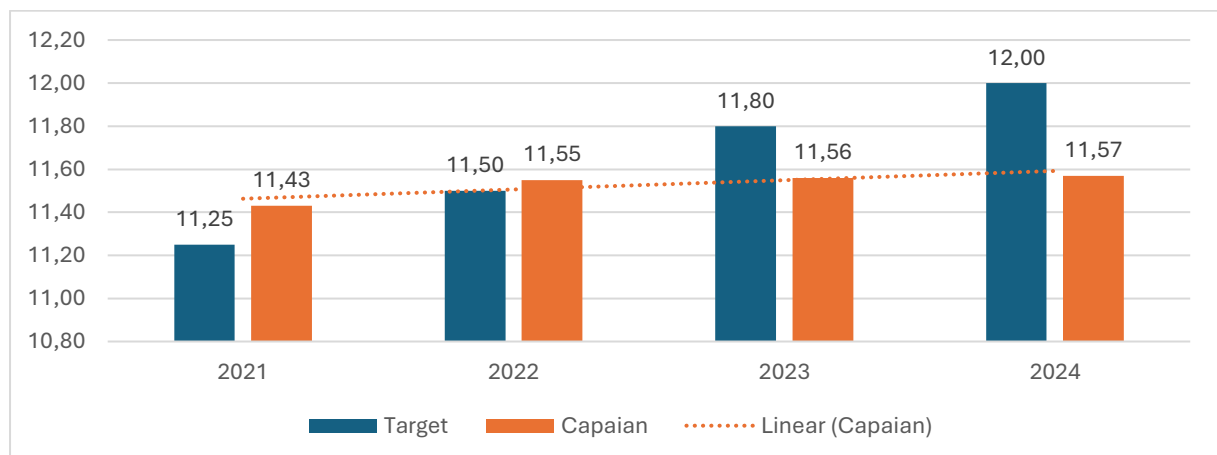


Sumber: BPS

Gambar 2. 50. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Sederajat

2.4.5. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Makassar menunjukkan peningkatan dalam empat tahun terakhir, meskipun lajunya belum cukup progresif. Pada 2024, RLS tercatat sebesar 11,57 tahun, naik tipis dibandingkan 11,43 tahun pada 2021. Walaupun peningkatan terjadi setiap tahun, capaian ini masih belum sesuai dengan target yang bersifat lebih akseleratif. Kota Makassar diekspektasikan mampu mencapai rata-rata 12 tahun (setara dengan jenjang SMA/ sederajat) pada 2024, namun realisasi tersebut belum tercapai. Kondisi ini menandakan masih adanya tantangan dalam mempercepat pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan memperkuat daya saing kota.

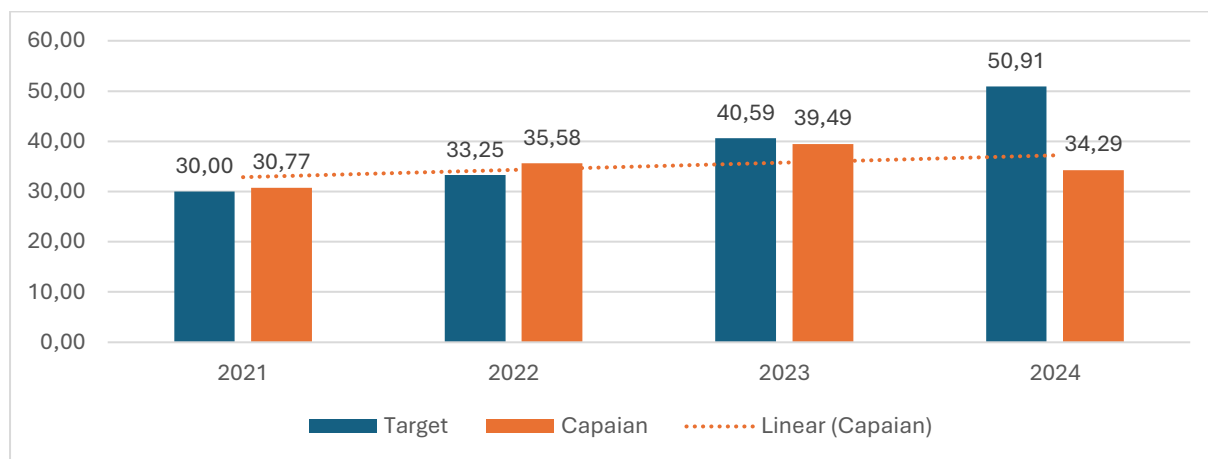


Sumber: BPS

Gambar 2. 51. Rata-Rata Lama Sekolah

2.4.6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

APK di level pendidikan anak usia dini (PAUD) memperlihatkan penurunan di Tahun 2024, meskipun dalam tiga tahun sebelumnya secara konsisten mengalami perkembangan positif. Per Tahun 2024, APK PAUD tercatat berada pada angka 34,29%, dari sebelumnya yang sebesar 39,49% di Tahun 2023. Secara historis, angka ini menunjukkan bahwa mayoritas anak-anak yang berada di usia PAUD tidak mengenyam pendidikan di bangku sekolah sebelum memulai pendidikan formal di level dasar. Hal ini masih menunjukkan adanya kecenderungan akses PAUD yang hanya dimiliki oleh sejumlah orang atau keluarga di Kota Makassar, yang menandakan kesenjangan dari segi kemampuan finansial untuk investasi pendidikan anak.

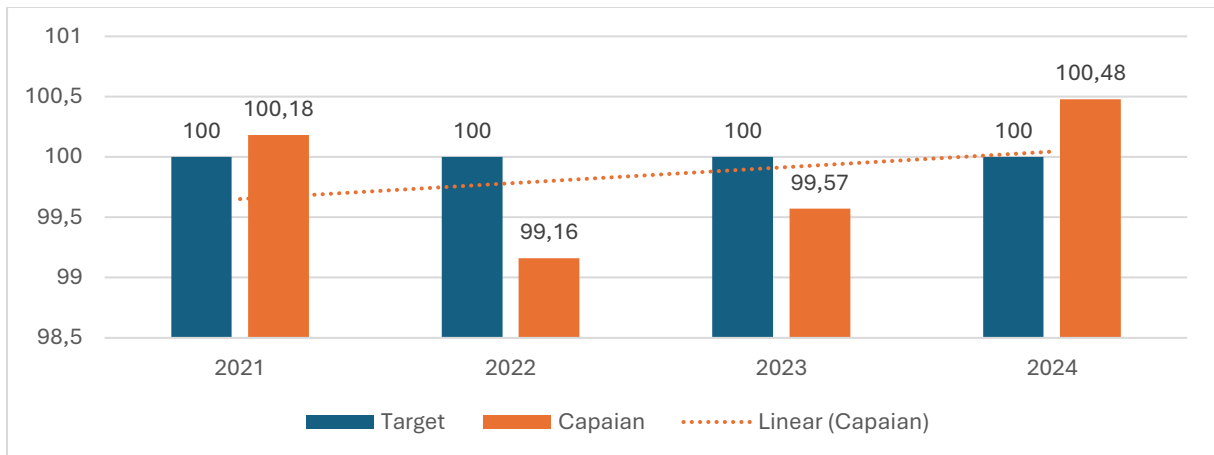


Sumber: BPS

Gambar 2. 52. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2.4.7. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki pada SD-Sederajat

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SD/ sederajat di Kota Makassar menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024, rasio tersebut mencapai 100,48%, menandakan tingkat partisipasi perempuan di pendidikan dasar telah melampaui laki-laki. Sebelumnya, pada 2022–2023, rasio masih tercatat di bawah 100%. Perkembangan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pemberdayaan perempuan untuk memperoleh akses pendidikan dasar secara formal.

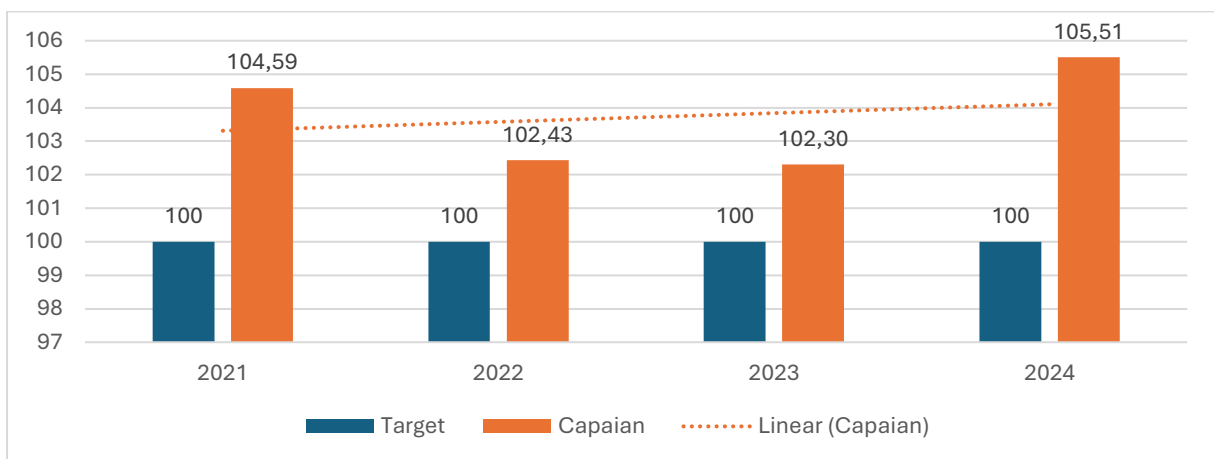


Sumber: BPS

Gambar 2. 53. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki pada SD-Sederajat

2.4.8. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki pada SMP Sederajat

Tren serupa terlihat pada rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat antara perempuan dan laki-laki. Sepanjang 2021–2024, rasio ini konsisten berada di atas 100%, menandakan partisipasi perempuan pada jenjang menengah pertama selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada 2024, rasio tersebut mencapai 105,31%. Capaian ini mencerminkan adanya penguatan akses pendidikan formal bagi perempuan. Namun, kecenderungan meningkatnya gap juga mengindikasikan adanya penurunan relatif dalam partisipasi laki-laki pada jenjang SMP/ sederajat, yang perlu mendapat perhatian dalam upaya menjaga keseimbangan akses pendidikan bagi seluruh kelompok.



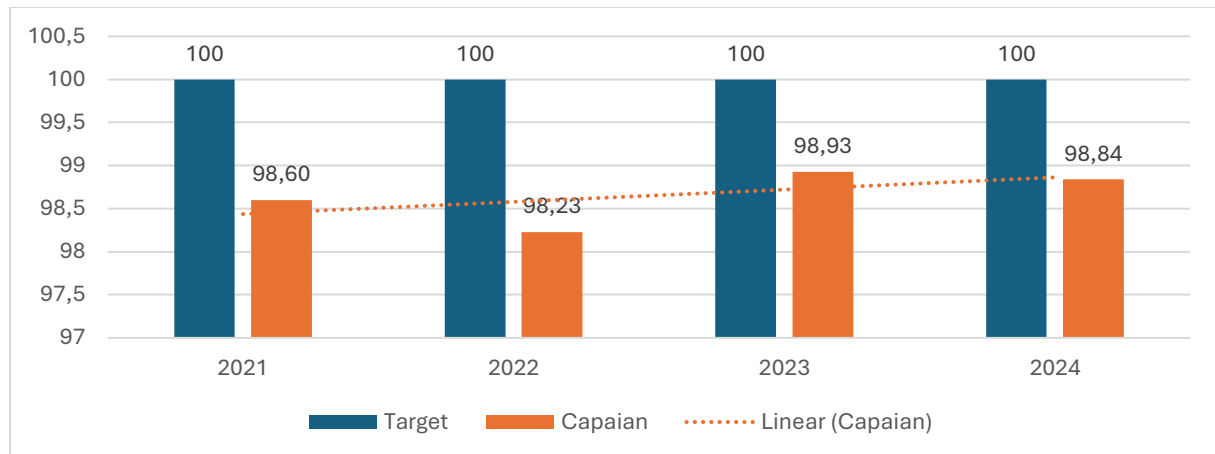
Sumber: BPS

Gambar 2. 54. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki pada SMP Sederajat

2.4.9. Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun

Persentase angka melek aksara di Kota Makassar tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam empat tahun terakhir. Sejak 2021 hingga 2024, capaian tetap stabil di kisaran 98%. Artinya, masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum menguasai literasi dasar, yang kemungkinan besar berasal dari kelompok usia lanjut atau generasi baby boomers. Meskipun persentasenya relatif kecil, potensi efek antargenerasi dari keterbatasan literasi pada kelompok usia lanjut terhadap generasi

muda tetap perlu diantisipasi. Stagnasi angka melek aksara di kisaran 98% berisiko menghambat agenda pencapaian SDGs, khususnya pada aspek pendidikan inklusif dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun proporsinya kecil, keberadaan kelompok usia lanjut yang tidak melek huruf dapat memperkuat siklus kerentanan, terutama jika keterbatasan literasi ini berdampak pada pola asuh dan transfer pengetahuan dalam keluarga. Jika tidak diantisipasi melalui program literasi lintas generasi, kondisi ini berpotensi menahan laju peningkatan kualitas SDM dan memperlebar kesenjangan sosial di Kota Makassar.

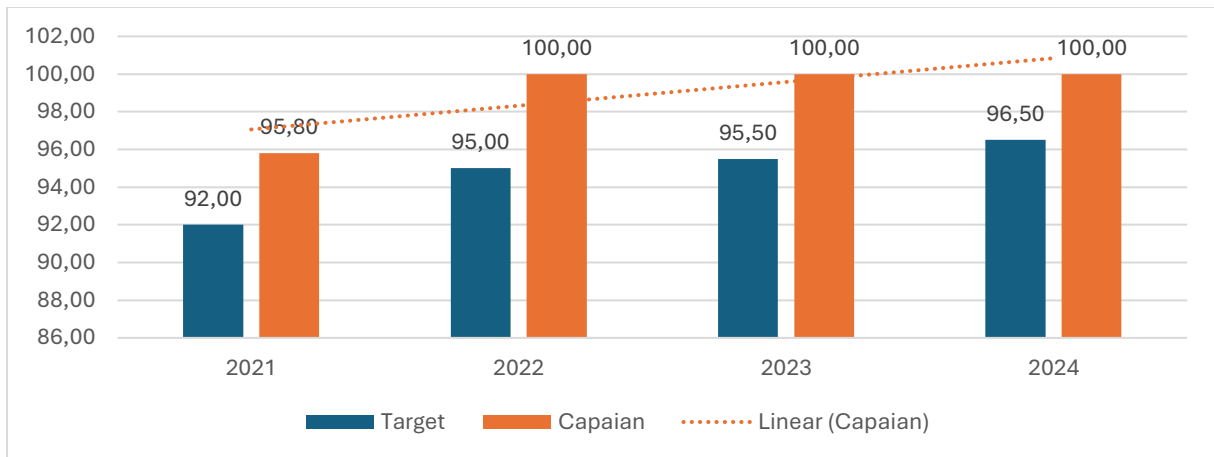


Sumber: BPS

Gambar 2. 55. Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun

2.4.10. Proporsi Sekolah dengan Akses Listrik

Proporsi sekolah dengan akses listrik di Kota Makassar telah mencapai 100% dalam tiga tahun terakhir. Capaian ini menandakan bahwa seluruh sekolah di berbagai jenjang pendidikan sudah terjamin suplai listriknya. Elektrifikasi penuh merupakan prasyarat penting bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang berkualitas, sekaligus membuka peluang bagi pemanfaatan teknologi pendidikan secara lebih optimal. Dampaknya diharapkan terlihat pada luaran pembelajaran, yakni peserta didik yang memperoleh akses pengetahuan secara lebih utuh. Meskipun capaian elektrifikasi sekolah telah penuh, tantangan ke depan terletak pada menjaga konsistensi pasokan listrik serta memastikan pemanfaatannya secara merata untuk mendukung teknologi pembelajaran.

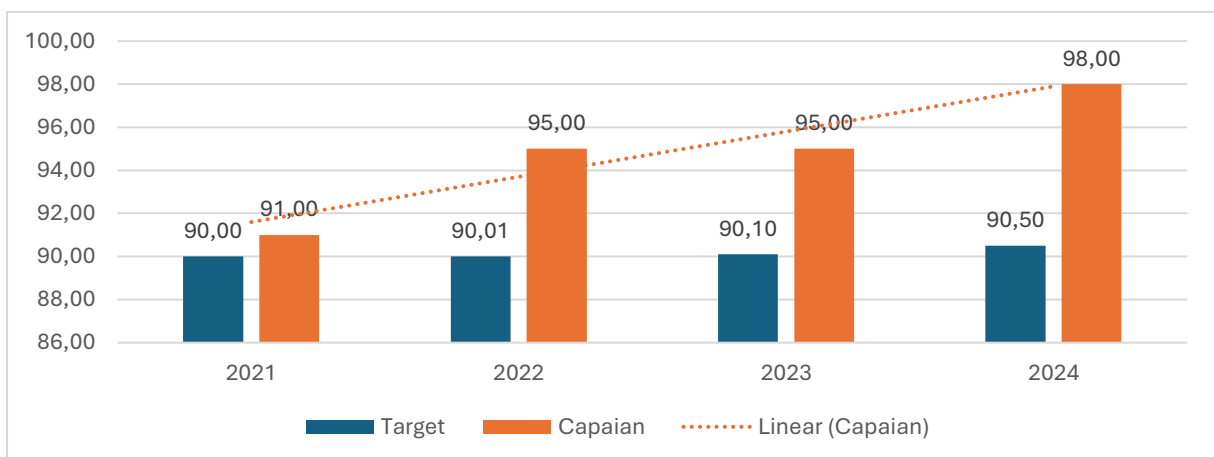


Sumber: BPS

Gambar 2. 56. Proporsi Sekolah dengan Akses Listrik

2.4.11. Proporsi Sekolah dengan Akses Internet untuk Tujuan Pengajaran

Seperti halnya akses listrik, proporsi sekolah dengan akses internet di Kota Makassar juga menunjukkan peningkatan progresif. Pada 2024, cakupan telah mencapai 98%, naik 7 persen poin dibandingkan 2021. Capaian ini menandakan semakin luasnya peluang bagi sekolah untuk mengakses materi pembelajaran daring yang dapat memperkuat kualitas proses belajar mengajar. Meski demikian, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa ketersediaan internet dimanfaatkan secara optimal, sehingga benar-benar mendukung transformasi digital pendidikan, bukan sekadar menjadi fasilitas yang belum termanfaatkan secara penuh. Selain itu, perlu diantisipasi adanya potensi kesenjangan kualitas pemanfaatan antar sekolah, baik antara negeri dan swasta maupun antara wilayah pusat dan pinggiran kota.



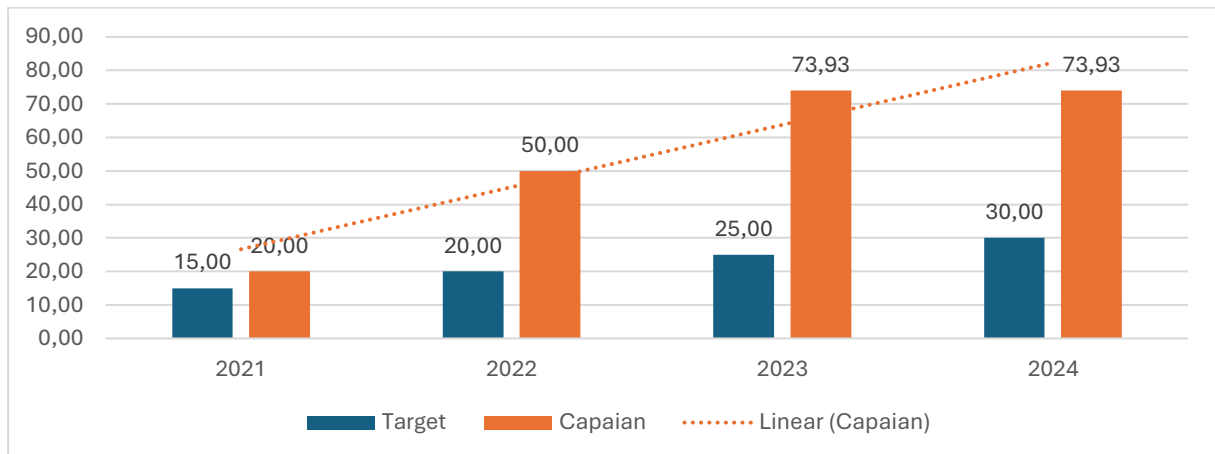
Sumber: BPS

Gambar 2. 57. Proporsi Sekolah dengan Akses Internet untuk Tujuan Pengajaran

2.4.12. Persentase Sekolah dengan Akses Komputer untuk Tujuan Pengajaran

Persentase sekolah yang memiliki komputer untuk mendukung kegiatan pembelajaran di Kota Makassar terus meningkat secara konsisten. Pada 2024, cakupannya telah mencapai 73%, melonjak tajam dari hanya 20% pada 2021. Peningkatan signifikan ini menjadi landasan penting bagi

terbentuknya ekosistem pembelajaran digital serta penguatan arus informasi di sekolah. Kehadiran komputer juga berpotensi memperkaya metode pengajaran dan memfasilitasi peserta didik dalam mengakses pengetahuan, sehingga menciptakan proses belajar mengajar yang lebih kondusif. Ke depan, tantangan utama terletak pada pemerataan kualitas perangkat serta peningkatan kapasitas guru dalam memanfaatkan teknologi agar pemanfaatannya benar-benar optimal.

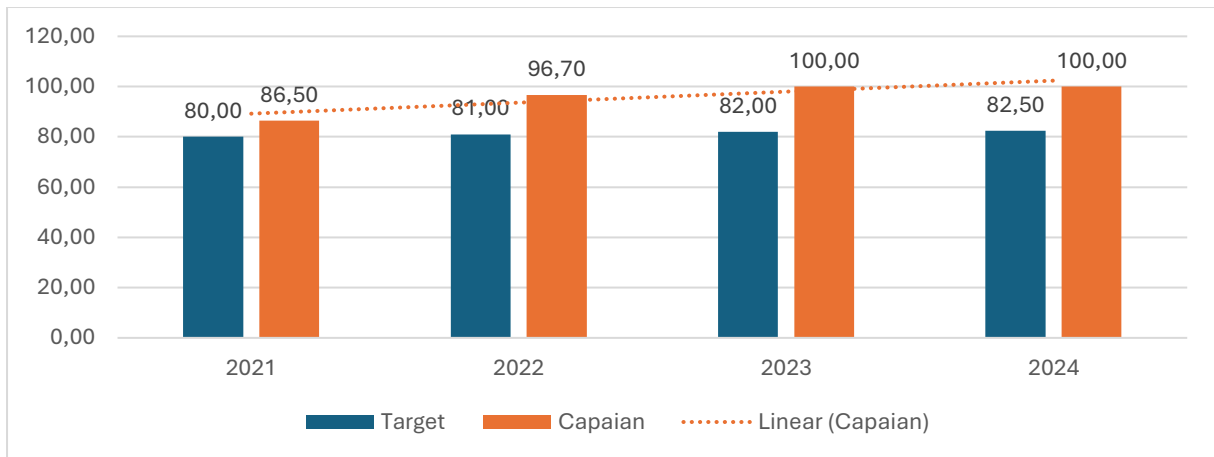


Sumber: BPS

Gambar 2. 58. Persentase Sekolah dengan Akses Komputer untuk Tujuan Pengajaran

2.4.13. Persentase Sekolah dengan Akses Air Minum Layak

Selain kemajuan infrastruktur digital, ketersediaan sarana pendukung seperti sanitasi dan air minum di sekolah juga memegang peran penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Dalam empat tahun terakhir, cakupan sekolah dengan akses air minum layak di Kota Makassar telah mencapai 100%, yang berarti seluruh sekolah telah terjamin ketersediaannya. Capaian ini menjadi fondasi penting untuk menjaga kesehatan peserta didik dan tenaga pengajar, sehingga berkontribusi langsung pada efektivitas pembelajaran di kelas. Tantangan yang perlu diperhatikan kedepannya adalah memastikan kualitas layanan air minum tetap terjaga serta adanya sistem pemeliharaan yang berkelanjutan, agar capaian ini tidak hanya bersifat administratif tetapi benar-benar memberi dampak nyata bagi lingkungan sekolah.

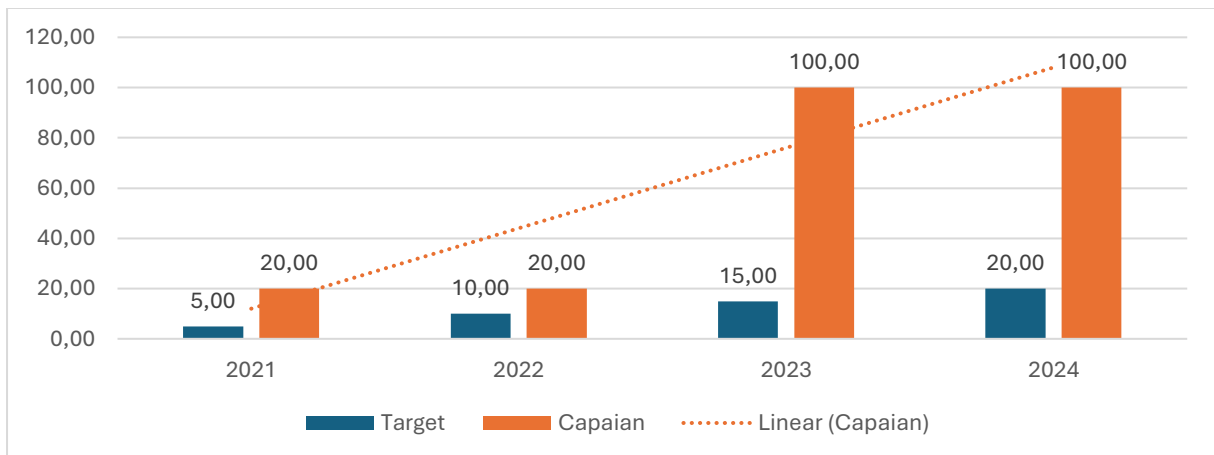


Sumber: BPS

Gambar 2. 59. Persentase Sekolah dengan Akses Air Minum Layak

2.4.14. Persentase Sekolah dengan Akses Fasilitas Cuci Tangan Higienis

Cakupan sekolah dengan fasilitas cuci tangan higienis di Kota Makassar mengalami peningkatan progresif dan dalam dua tahun terakhir telah mencapai 100%. Fasilitas ini penting untuk melindungi peserta didik dan tenaga pengajar dari risiko paparan virus maupun bakteri yang dapat mengganggu partisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Ke depan, yang perlu dipastikan bukan hanya pemerataan akses, tetapi juga keberlanjutan pemeliharaan fasilitas tersebut agar benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan lingkungan sekolah. Capaian ini juga relevan dalam memperkuat agenda pasca-pandemi, sekaligus menanamkan kebiasaan hidup bersih di lingkungan pendidikan.



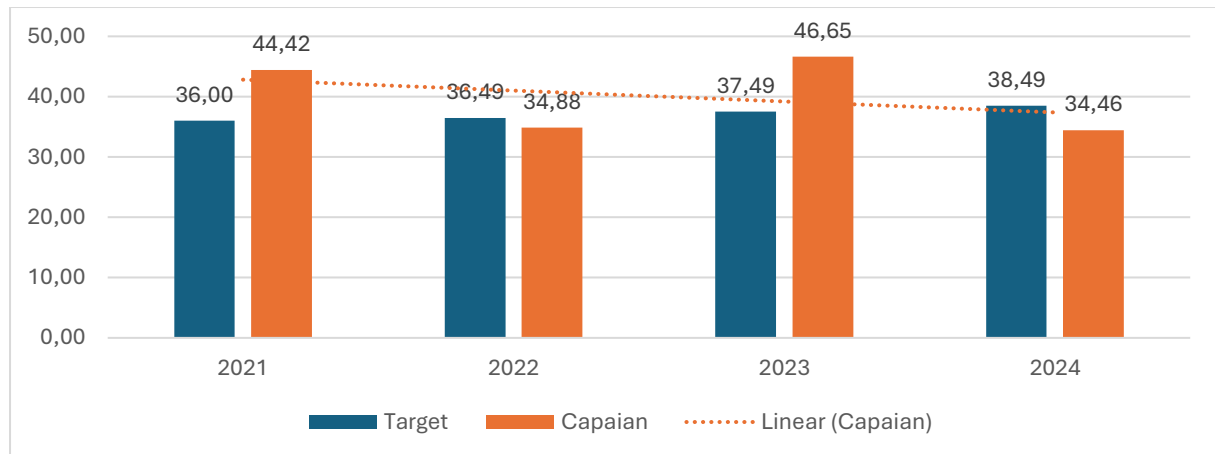
Sumber: BPS

Gambar 2. 60. Persentase Sekolah dengan Akses Fasilitas Cuci Tangan Higienis

2.4.15. Persentase Guru PAUD Tersertifikasi

Persentase guru PAUD tersertifikasi di Kota Makassar memperlihatkan fluktuasi yang cukup tajam dalam periode 2021–2024. Pada 2021, capaian mencapai 44,42%, melampaui target sebesar 36%. Namun, pada 2022 terjadi penurunan signifikan ke 34,88%, di bawah target 36,49%. Kondisi ini kembali membaik pada 2023, ketika capaian melonjak menjadi 46,65% dan berhasil melampaui target

37,49%. Akan tetapi, capaian 2024 kembali turun ke 34,46%, berada jauh di bawah target tahunan sebesar 38,49%. Tren yang tidak stabil ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan sertifikasi guru PAUD belum berjalan secara konsisten. Fluktuasi tersebut dapat mengindikasikan adanya kendala struktural, baik dari sisi ketersediaan program sertifikasi, kapasitas guru dalam memenuhi persyaratan, maupun dukungan kelembagaan. Kondisi ini penting untuk diantisipasi, mengingat kualitas guru PAUD yang tersertifikasi berperan krusial dalam memastikan mutu pendidikan anak usia dini sebagai fondasi pembangunan SDM di masa depan.

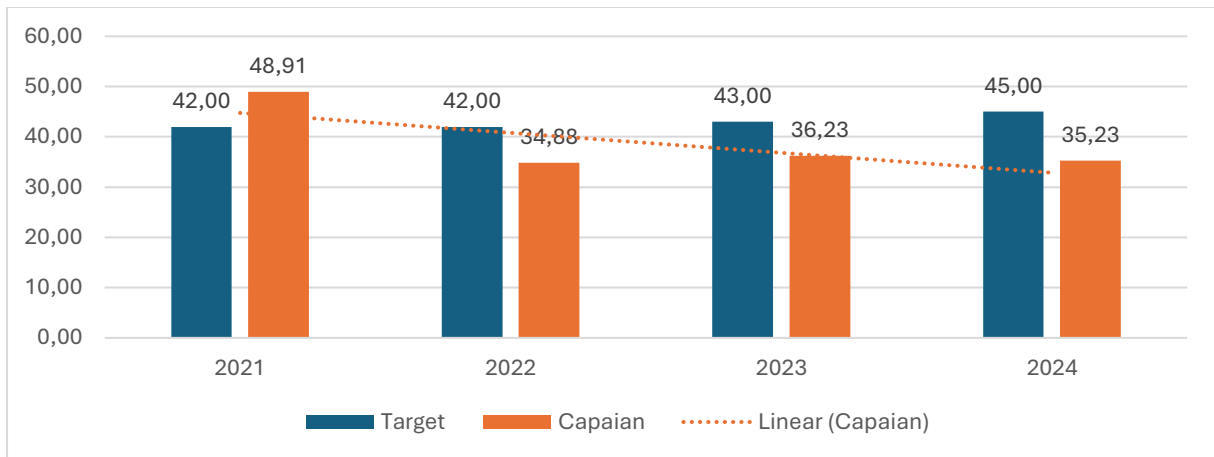


Sumber: BPS

Gambar 2. 61. Persentase Guru PAUD Tersertifikasi

2.4.16. Persentase Guru SD Tersertifikasi

Persentase guru SD tersertifikasi di Kota Makassar dalam periode 2021–2024 menunjukkan tren menurun dan tidak konsisten terhadap target tahunan. Pada 2021, capaian tercatat sebesar 48,91%, melampaui target 42%. Namun, pada 2022 terjadi penurunan drastis menjadi 34,88%, jauh di bawah target yang tetap sebesar 42%. Kondisi sedikit membaik di 2023 dengan capaian 36,23%, tetapi kembali belum mampu memenuhi target 43%. Pada 2024, capaian hanya naik tipis ke 35,23%, masih tertinggal dari target 45%. Pola ini menandakan adanya tantangan serius dalam keberlanjutan program sertifikasi guru SD. Penurunan yang konsisten setelah 2021 dapat mencerminkan terbatasnya kuota sertifikasi, kendala administratif, atau rendahnya partisipasi guru dalam proses sertifikasi. Situasi ini perlu mendapat perhatian, mengingat keberadaan guru bersertifikat menjadi kunci peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar, yang merupakan fondasi bagi penguatan kualitas pendidikan di jenjang selanjutnya.

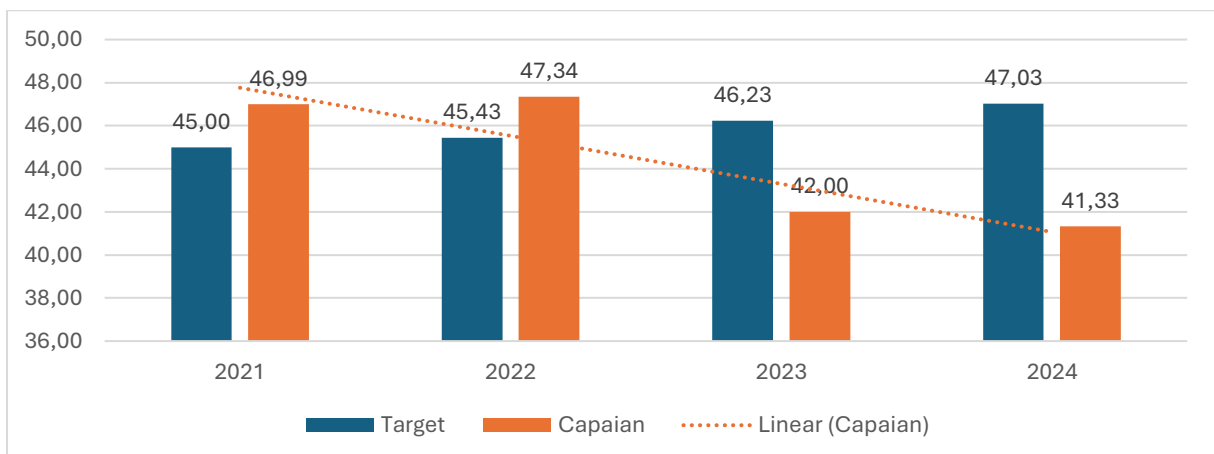


Sumber: BPS

Gambar 2. 62. Persentase Guru SD Tertsertifikasi

2.4.17. Persentase Guru SMP Tertsertifikasi

Persentase guru SMP tertsertifikasi di Kota Makassar menunjukkan pola yang tidak stabil sepanjang 2021–2024, dengan kecenderungan menurun pada tahun-tahun terakhir. Pada 2021, capaian mencapai 46,99%, melampaui target 45%, dan kembali meningkat pada 2022 menjadi 47,34%, sedikit di atas target 45,43%. Namun, tren positif ini terhenti di 2023 ketika capaian turun tajam ke 42,00%, lebih rendah dari target 46,23%. Penurunan berlanjut pada 2024 dengan capaian 41,33%, semakin jauh tertinggal dari target 47,03%. Tren menurun ini mengindikasikan adanya persoalan dalam konsistensi pelaksanaan sertifikasi guru SMP, baik dari sisi ketersediaan kuota, kesiapan guru dalam memenuhi persyaratan, maupun dukungan kelembagaan untuk percepatan sertifikasi. Mengingat peran guru SMP sangat penting dalam membekali peserta didik sebelum masuk jenjang pendidikan menengah atas, keberlanjutan tren penurunan ini berpotensi menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan dan kualitas SDM di Kota Makassar.

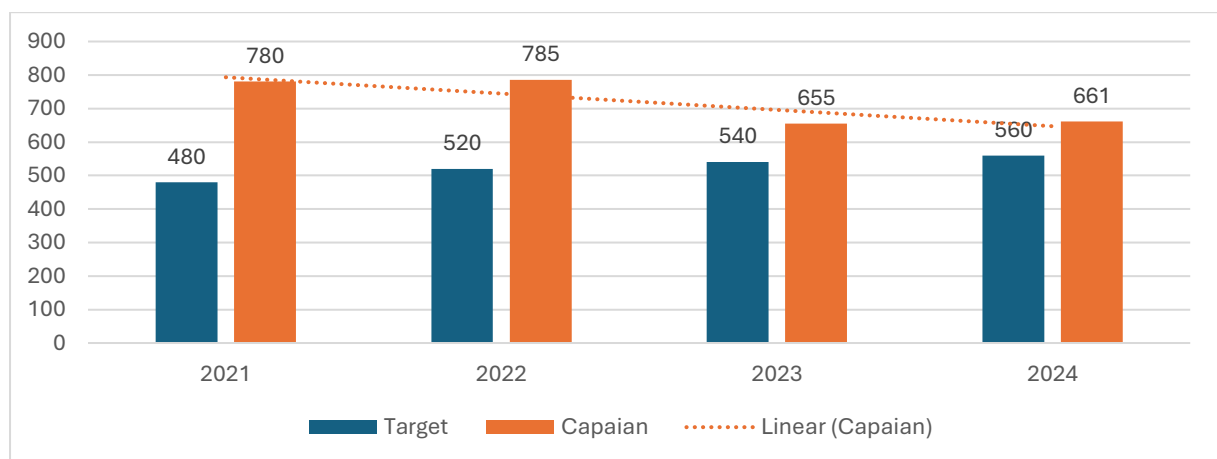


Sumber: BPS

Gambar 2. 63. Persentase Guru SMP Tertsertifikasi

2.4.18. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Makassar sepanjang 2021–2024 menunjukkan tren menurun meskipun secara konsisten tetap melampaui target tahunan. Pada 2021, capaian mencapai 780 pengunjung, jauh di atas target 480, dan meningkat tipis menjadi 785 pada 2022, melampaui target 520. Namun, sejak 2023 terjadi penurunan signifikan dengan capaian 655, meskipun masih lebih tinggi dari target 540. Tren penurunan berlanjut pada 2024 dengan capaian 661, tetap di atas target 560 tetapi jauh lebih rendah dibanding capaian puncak pada 2021–2022. Pola ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga minat kunjungan masyarakat ke perpustakaan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya akses alternatif sumber bacaan digital atau menurunnya relevansi layanan perpustakaan konvensional. Meskipun target formal berhasil dicapai, tren penurunan ini perlu diantisipasi karena berpotensi melemahkan peran perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat.

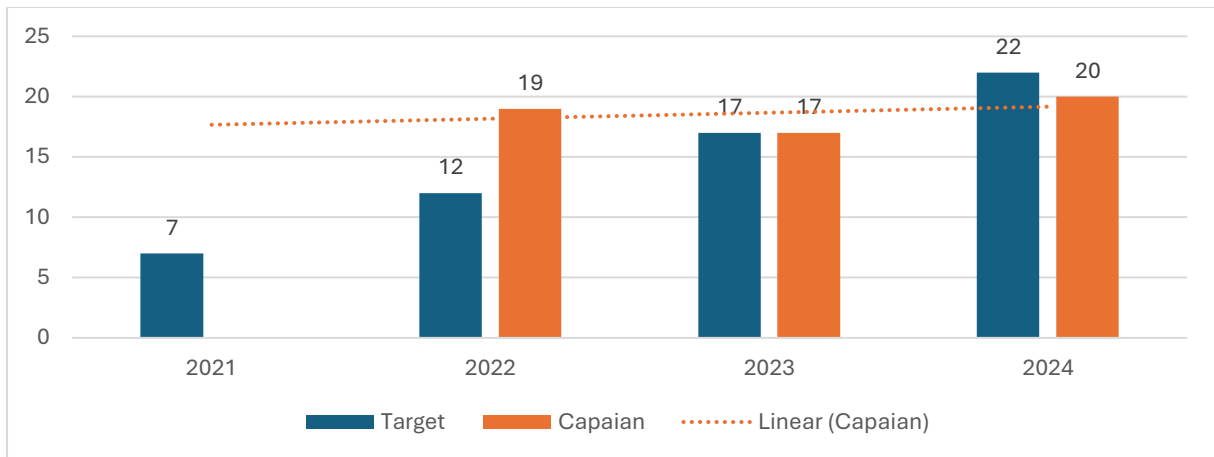


Sumber: BPS

Gambar 2. 64. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

2.4.19. Jumlah Pustakawan

Jumlah pustakawan di Kota Makassar menunjukkan tren peningkatan sepanjang 2021–2024, meskipun capaian di akhir periode sedikit di bawah target. Pada 2021, tidak terdapat capaian tercatat, sementara target hanya 7 orang. Perbaikan signifikan terlihat di 2022 dengan capaian 19 orang, jauh melampaui target 12. Namun, pada 2023, capaian stagnan di 17 orang, hanya setara dengan target. Pada 2024, jumlah pustakawan meningkat menjadi 20, meskipun belum mampu memenuhi target yang ditetapkan sebesar 22. Secara umum, perkembangan jumlah pustakawan ini memperlihatkan adanya upaya nyata dalam memperkuat kapasitas kelembagaan perpustakaan. Meski demikian, tantangan tetap ada pada konsistensi peningkatan dan pemenuhan kebutuhan tenaga profesional, terutama untuk mendukung adaptasi perpustakaan terhadap transformasi digital dan peningkatan layanan literasi masyarakat.



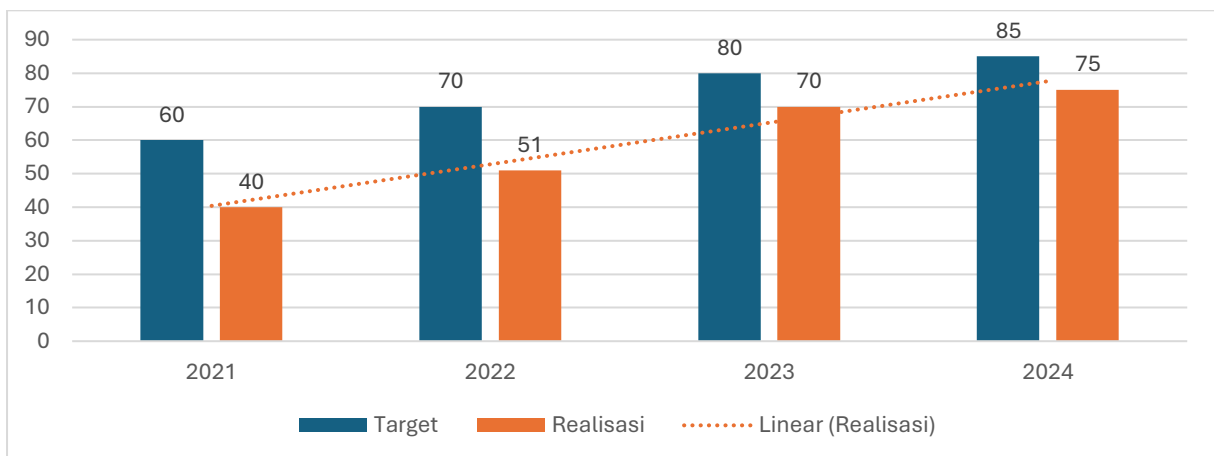
Sumber: BPS

Gambar 2. 65. Jumlah Pustakawan

2.5. Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

2.5.1. Jumlah Kebijakan yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan

Capaian jumlah kebijakan responsif gender di Kota Makassar menunjukkan tren positif meski belum sepenuhnya memenuhi target. Pada 2021 realisasi masih jauh tertinggal (40 dari target 60), namun peningkatan yang cukup signifikan terjadi di 2022 dan 2023, di mana kesenjangan dengan target semakin menyempit. Bahkan pada 2023 realisasi mencapai 70, atau hanya terpaut 10 poin dari target, menandakan adanya akselerasi kebijakan yang lebih inklusif terhadap isu gender. Tahun 2024 realisasi kembali naik menjadi 75, meski belum menutup sepenuhnya gap terhadap target 85. Secara keseluruhan, tren linier realisasi memperlihatkan arah capaian yang konsisten membaik, namun kesenjangan yang masih tersisa menandakan perlunya penguatan kelembagaan dan komitmen lintas sektor agar kebijakan responsif gender dapat benar-benar terarusutamakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

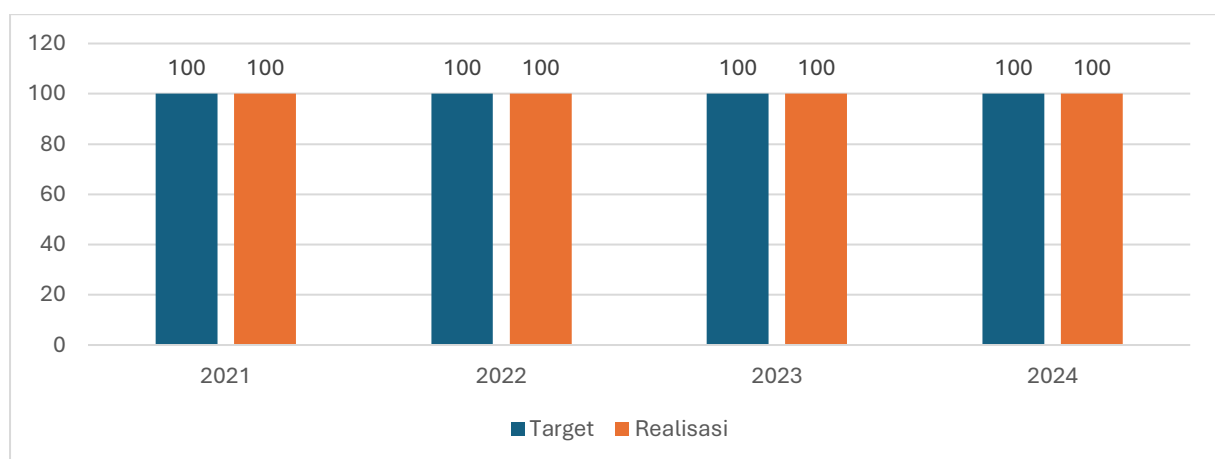


Sumber: Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan

Gambar 2. 66. Jumlah Kebijakan yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan

2.5.2. Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif

Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif di Kota Makassar menunjukkan capaian yang konsisten sempurna selama periode 2021–2024, dengan realisasi selalu mencapai 100 persen sesuai target. Konsistensi ini menandakan bahwa sistem pelayanan yang tersedia—baik berupa layanan kesehatan, hukum, maupun pendampingan psikososial—telah berjalan secara efektif dan mampu menjangkau seluruh korban yang membutuhkan. Meskipun angka ini mencerminkan keberhasilan dalam pemenuhan layanan, perlu diingat bahwa indikator ini hanya mengukur aspek penanganan, bukan pencegahan. Dengan demikian, tantangan ke depan terletak pada bagaimana memastikan kualitas layanan tetap terjaga di tengah kemungkinan meningkatnya kasus, sekaligus memperkuat strategi preventif untuk menekan jumlah kejadian kekerasan terhadap perempuan di Kota Makassar.

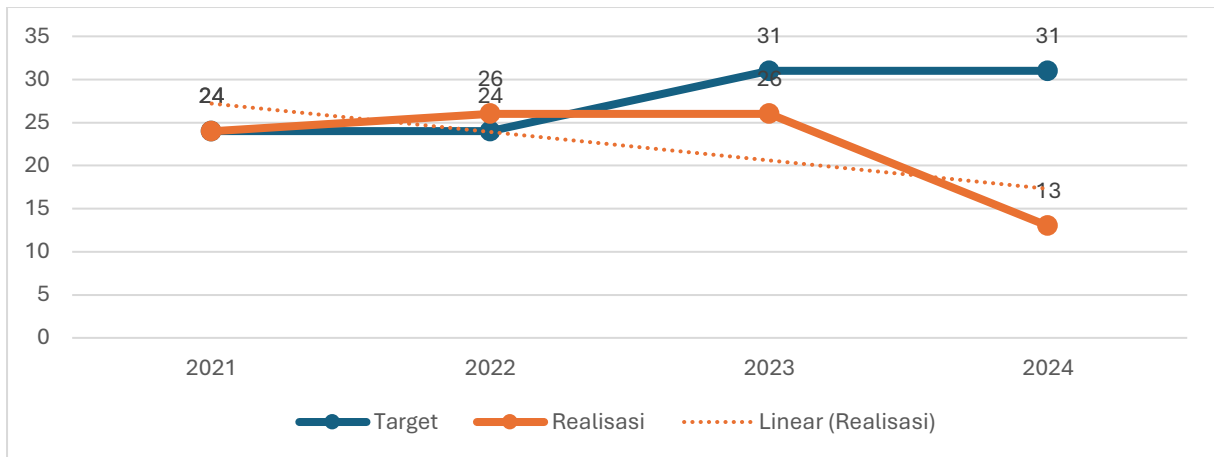


Sumber: Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan

Gambar 2. 67. Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif

2.5.3. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah, dan Pemerintah Daerah

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen dan pemerintahan daerah Kota Makassar memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan. Pada awal periode (2021–2022), capaian relatif sejalan dengan target, bahkan sempat melampaui target di 2022. Namun setelah 2023, kesenjangan semakin melebar, dengan realisasi stagnan di angka 26 sementara target meningkat menjadi 31. Tahun 2024 terjadi penurunan drastis ke 13, jauh di bawah target yang tetap 31, sehingga tren linier realisasi bergerak menurun tajam. Hal ini menandakan lemahnya keberlanjutan upaya afirmasi politik dan representasi perempuan, baik dalam proses rekrutmen partai politik maupun penguatan kapasitas kader perempuan. Kesenjangan yang semakin besar ini menjadi alarm penting bahwa pencapaian indikator kesetaraan gender di ranah politik belum kokoh, sehingga ke depan perlu intervensi yang lebih kuat, baik berupa regulasi afirmatif, dukungan institusional, maupun peningkatan partisipasi publik dalam mendorong keterwakilan perempuan di posisi pengambilan keputusan.

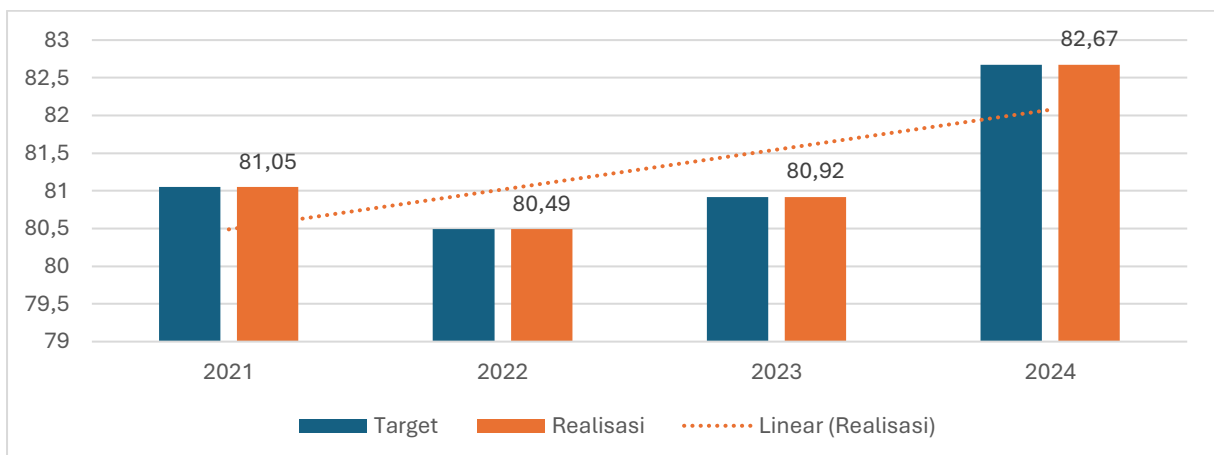


Sumber: Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan

Gambar 2. 68. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah, dan Pemerintah Daerah

2.5.4. Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam

Proporsi individu yang memiliki atau menguasai telepon genggam di Kota Makassar menunjukkan capaian yang relatif stabil sekaligus mendekati target selama periode 2021–2023, sebelum akhirnya melampaui target pada 2024. Pada awal periode, capaian realisasi bahkan sedikit lebih tinggi dibanding target (2021), namun kemudian terjadi sedikit penurunan di 2022. Meski demikian, tren perbaikan kembali terlihat pada 2023 dan mencapai puncak di 2024 dengan realisasi 82,67 persen, melampaui target yang ditetapkan. Pola ini mengindikasikan bahwa penetrasi kepemilikan telepon genggam semakin merata di masyarakat, yang juga mencerminkan membaiknya akses terhadap teknologi digital. Capaian ini penting karena akses terhadap telepon genggam merupakan pintu masuk bagi literasi digital, akses informasi, serta pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi. Tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan kepemilikan, tetapi juga memastikan pemanfaatan telepon genggam untuk tujuan produktif, termasuk pendidikan, kewirausahaan, dan partisipasi warga dalam pembangunan berbasis digital.



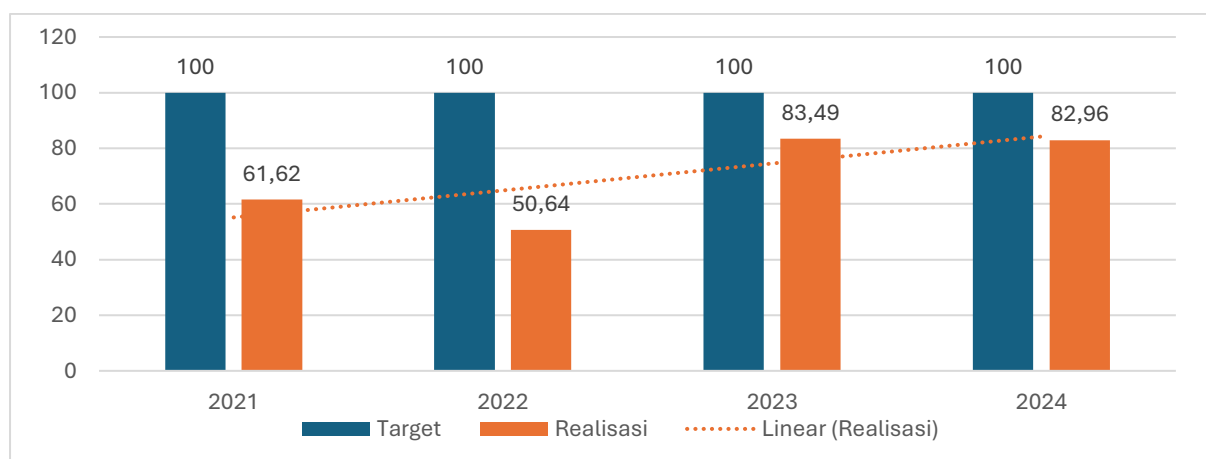
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Gambar 2. 69. Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam

2.6. Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

2.6.1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak

Akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak di Kota Makassar memperlihatkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada 2021, realisasi baru mencapai 61,62 persen, jauh di bawah target universal 100 persen. Kondisi ini bahkan memburuk pada 2022 ketika capaian turun menjadi 50,64 persen, yang menandakan adanya persoalan serius baik dalam infrastruktur maupun keberlanjutan layanan air minum. Meski demikian, lonjakan signifikan terjadi pada 2023 dengan capaian 83,49 persen, diikuti stabilisasi di 2024 pada 82,96 persen. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan sistemik, kemungkinan terkait intervensi program penyediaan air bersih dan perluasan jaringan layanan. Walaupun peningkatan tersebut patut diapresiasi, capaian yang masih di bawah target 100 persen mengindikasikan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur air minum layak, penguatan kelembagaan pengelolaan air, serta jaminan keterjangkauan akses, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.



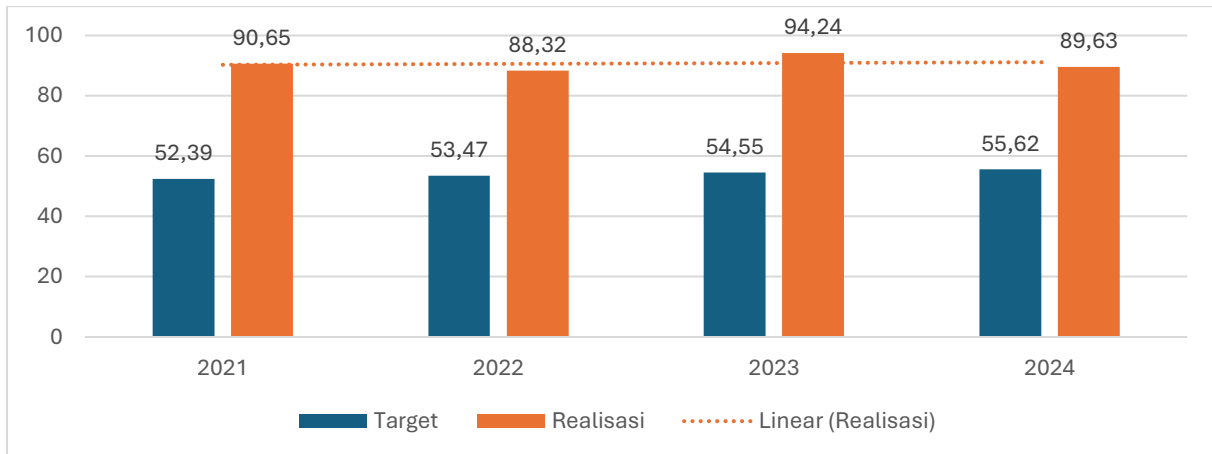
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Gambar 2. 70. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak

2.6.2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak

Akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak di Kota Makassar memperlihatkan capaian yang konsisten jauh melampaui target selama periode 2021–2024. Realisasi selalu berada di kisaran 88–94 persen, sementara target yang ditetapkan relatif rendah, hanya sekitar 52–56 persen. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa target yang dipasang terlalu rendah dibanding kondisi riil di lapangan, sehingga tidak lagi relevan untuk mengukur tantangan aktual pembangunan sanitasi di Kota Makassar. Meski demikian, capaian tinggi ini tidak boleh diartikan bahwa permasalahan sanitasi sudah sepenuhnya selesai, sebab angka agregat bisa menyembunyikan ketimpangan akses antarwilayah dan kelompok penduduk, terutama di kawasan padat dan permukiman informal. Dengan capaian yang

sudah melampaui target, arah kebijakan ke depan sebaiknya difokuskan pada peningkatan kualitas layanan sanitasi, keberlanjutan infrastruktur, serta upaya mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat agar akses sanitasi yang layak benar-benar universal dan merata.

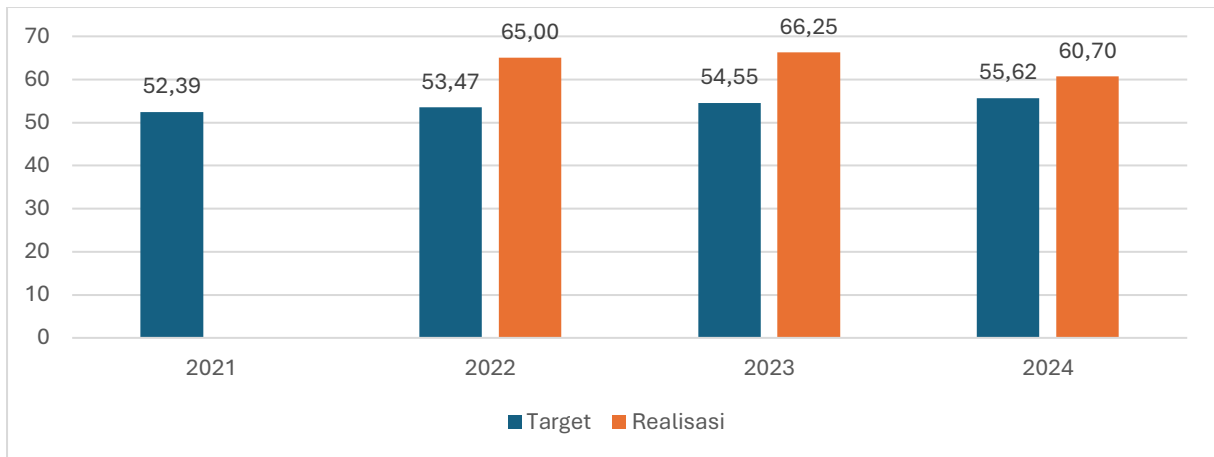


Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Gambar 2. 71. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak

2.6.3. Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja

Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja di Kota Makassar menunjukkan capaian yang secara konsisten melampaui target sepanjang periode 2022–2024. Jika pada 2021 belum tersedia data realisasi, maka mulai 2022 terlihat capaian sebesar 65 persen, jauh di atas target 53,47 persen, dan terus meningkat hingga 66,25 persen pada 2023. Meski pada 2024 terjadi sedikit penurunan ke 60,70 persen, angka ini tetap lebih tinggi dibanding target yang hanya 55,62 persen. Tren ini menandakan adanya kemajuan signifikan dalam perluasan layanan pengelolaan lumpur tinja, seiring dengan meningkatnya kesadaran pentingnya sanitasi aman dan intervensi pemerintah daerah. Namun demikian, capaian yang lebih tinggi dari target juga mengindikasikan bahwa penetapan target masih terlalu konservatif dan belum mencerminkan kebutuhan nyata pembangunan sanitasi perkotaan. Ke depan, tantangan utama terletak pada perluasan cakupan hingga ke wilayah padat penduduk dan informal, serta memastikan keberlanjutan layanan melalui peningkatan infrastruktur, kelembagaan, dan sistem pembiayaan yang berkelanjutan.

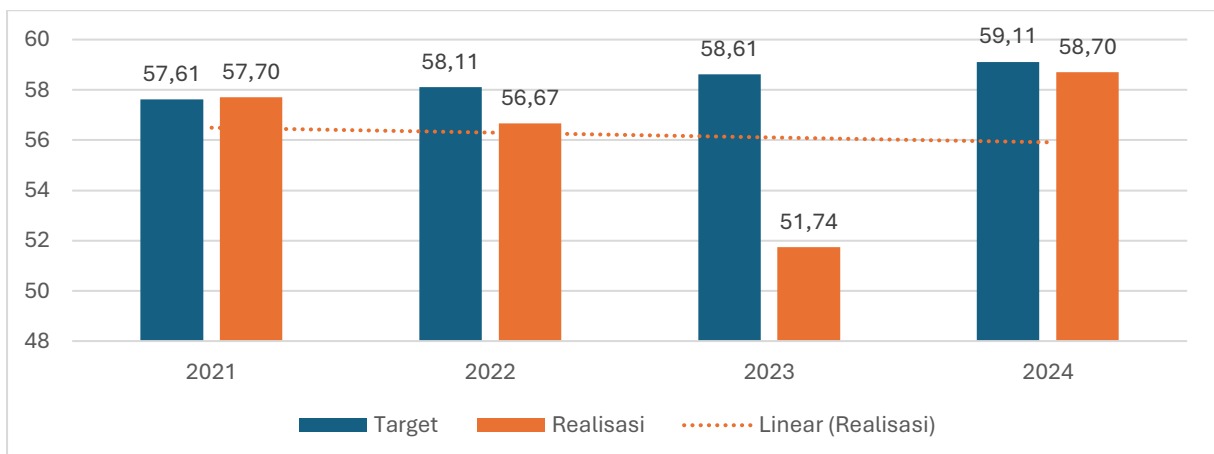


Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Gambar 2. 72. Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja

2.6.4. Kualitas Air Sungai sebagai Sumber Air Baku

Kualitas air sungai sebagai sumber air baku di Kota Makassar memperlihatkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada 2021 kondisi masih sesuai target (57,70 poin dibanding target 57,61), namun kemudian menurun pada 2022 dan semakin tajam pada 2023 ketika realisasi merosot ke 51,74, jauh di bawah target 58,61. Meski pada 2024 kualitas kembali membaik hingga 58,70, atau hampir sejajar dengan target, tren linier realisasi justru menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas air sungai sangat rentan terhadap tekanan lingkungan, baik dari pencemaran domestik, limbah industri, maupun alih fungsi lahan di sekitar daerah aliran sungai. Dengan capaian yang fluktuatif, tantangan utama bukan hanya menjaga kualitas air di titik tertentu, tetapi juga memastikan keberlanjutan melalui pengendalian sumber pencemar, penegakan regulasi lingkungan, serta integrasi pengelolaan DAS secara lintas wilayah. Tanpa langkah preventif yang kuat, risiko penurunan kualitas air baku dapat mengganggu ketahanan air bersih perkotaan di masa depan.



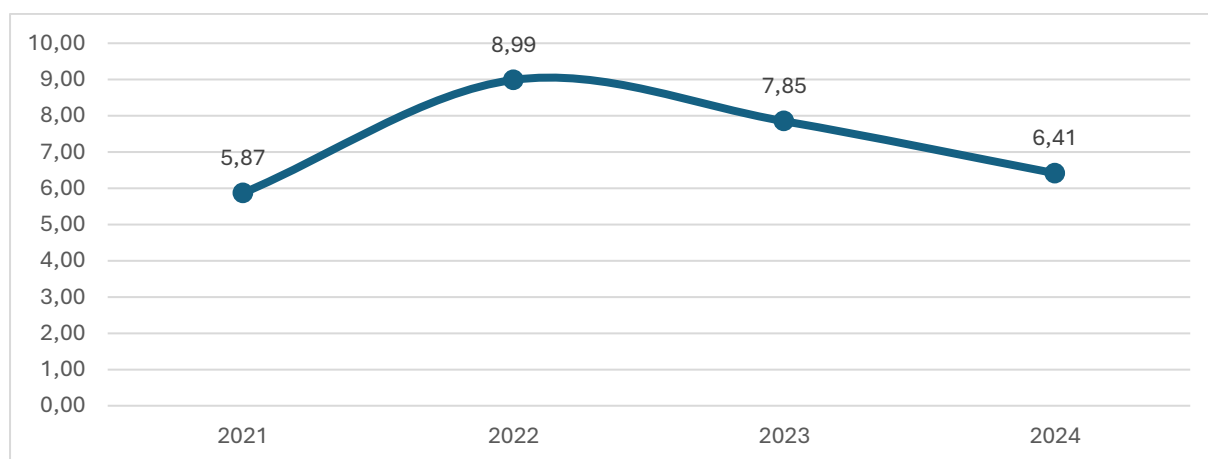
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Gambar 2. 73. Kualitas Air Sungai sebagai Sumber Air Baku

2.7. Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

2.7.1. Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita

Laju pertumbuhan PDRB per kapita Kota Makassar menunjukkan pola yang fluktuatif dalam periode 2021–2024. Setelah tumbuh moderat sebesar 5,87% pada tahun 2021, laju pertumbuhan melonjak tajam hingga mencapai puncaknya pada 2022 sebesar 8,99%. Lonjakan ini kemungkinan dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang mendorong aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat. Namun, setelah itu tren melandai: turun ke 7,85% pada 2023 dan kembali melemah menjadi 6,41% pada 2024. Meskipun pertumbuhan masih berada pada level positif dan relatif cukup tinggi, pola penurunan dua tahun terakhir memberi sinyal adanya perlambatan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global maupun faktor internal berupa keterbatasan daya dorong sektor-sektor utama. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga momentum pertumbuhan agar tidak semakin melambat, sekaligus memastikan kualitas pertumbuhan ini inklusif sehingga benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



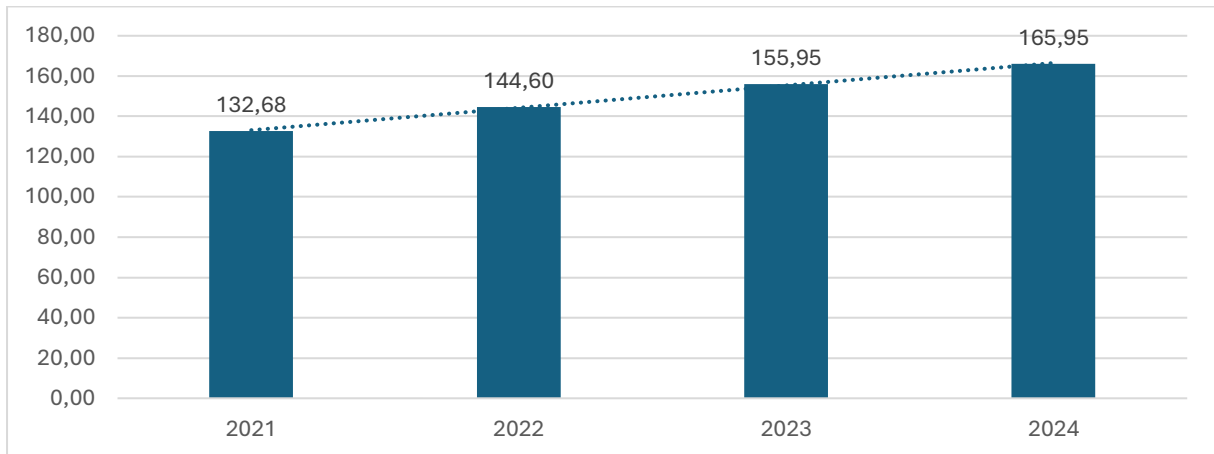
Sumber: BPS

Gambar 2. 74. Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita

2.7.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Kota Makassar menunjukkan tren peningkatan konsisten sepanjang periode 2021–2024. Nilai PDRB per kapita naik dari Rp132,68 juta pada 2021 menjadi Rp165,95 juta pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 7,7% per tahun. Kenaikan yang stabil ini menandakan adanya perbaikan kapasitas produksi dan peningkatan nilai tambah ekonomi yang relatif terjaga, meskipun sebelumnya laju pertumbuhan sempat mengalami perlambatan. Secara struktural, tren ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tetap memberikan dampak positif terhadap pendapatan rata-rata masyarakat. Namun demikian, kenaikan PDRB per kapita tidak serta-merta menggambarkan distribusi yang merata, karena bisa saja terdapat kesenjangan antar kelompok sosial maupun antarwilayah. Oleh karena itu, selain menjaga kesinambungan peningkatan PDRB per

kapita, tantangan strategisnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut inklusif, sejalan dengan target SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

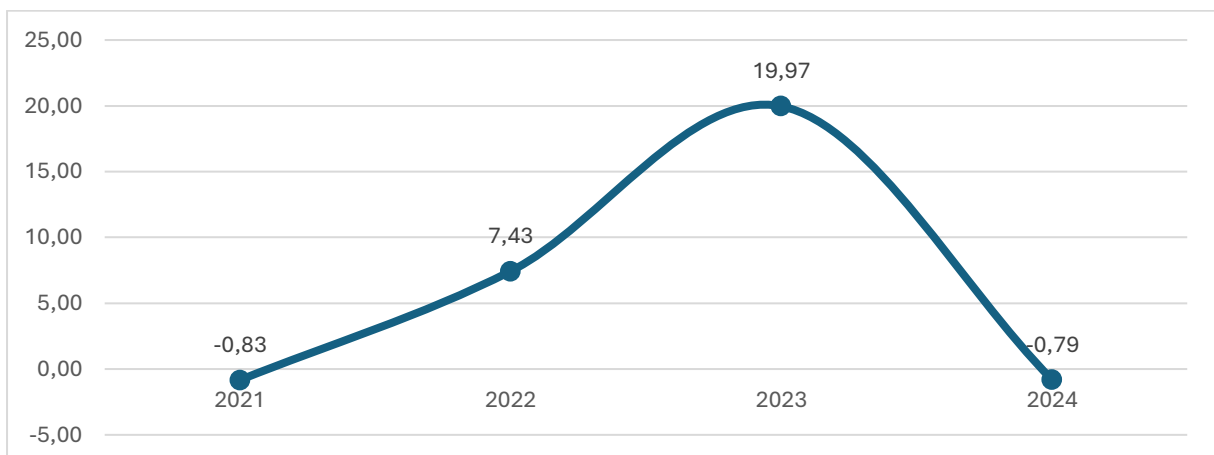


Sumber: BPS

Gambar 2. 75. PDRB Per Kapita

2.7.3. Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di Kota Makassar menunjukkan gejala yang cukup ekstrem selama periode 2021–2024. Setelah mengalami kontraksi sebesar -0,83% pada 2021, produktivitas tenaga kerja pulih dengan cepat pada 2022 (7,43%) dan melonjak tajam pada 2023 hingga 19,97%, mencerminkan peningkatan efisiensi serta pemanfaatan tenaga kerja pasca-pandemi. Namun, capaian ini tidak berkelanjutan karena pada 2024 pertumbuhan anjlok tajam menjadi hanya 0,79%, yang mengindikasikan lemahnya konsistensi dalam peningkatan produktivitas. Fluktuasi ini menegaskan bahwa struktur ekonomi Makassar masih rentan terhadap guncangan eksternal dan belum sepenuhnya mampu menjaga kesinambungan pertumbuhan berbasis produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, strategi ke depan perlu menekankan peningkatan kualitas SDM, inovasi, dan diversifikasi sektor unggulan agar pertumbuhan ekonomi lebih stabil dan selaras dengan agenda SDG 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan berkelanjutan.

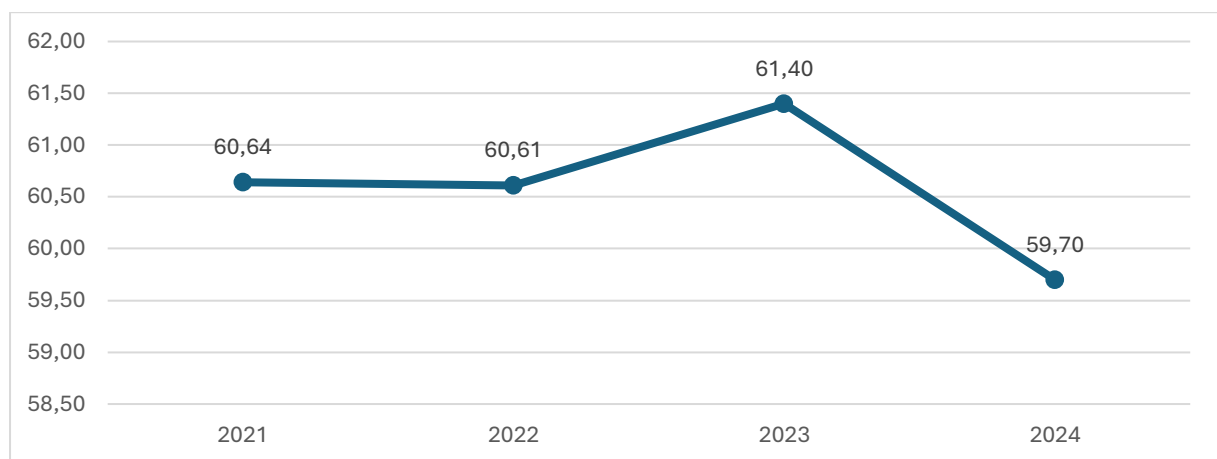


Sumber: BPS

Gambar 2. 76. Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

2.7.4. Persentase Tenaga Kerja Formal

Persentase tenaga kerja formal di Kota Makassar relatif stabil pada kisaran 60–61% sepanjang 2021–2023, dengan sedikit kenaikan pada 2023 mencapai 61,40% sebelum menurun tajam ke 59,70% pada 2024. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun struktur ketenagakerjaan di Makassar masih cukup didominasi sektor formal, namun kapasitas penyerapan tenaga kerja formal belum cukup kuat untuk mempertahankan tren positif. Penurunan di 2024 mengindikasikan adanya tantangan dalam penciptaan lapangan kerja layak, khususnya di sektor-sektor formal yang lebih produktif, sementara sektor informal berpotensi kembali menyerap tenaga kerja dalam jumlah lebih besar. Hal ini menjadi perhatian penting dalam konteks SDG 8, karena keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada peningkatan PDRB tetapi juga pada kualitas kesempatan kerja yang ditawarkan.

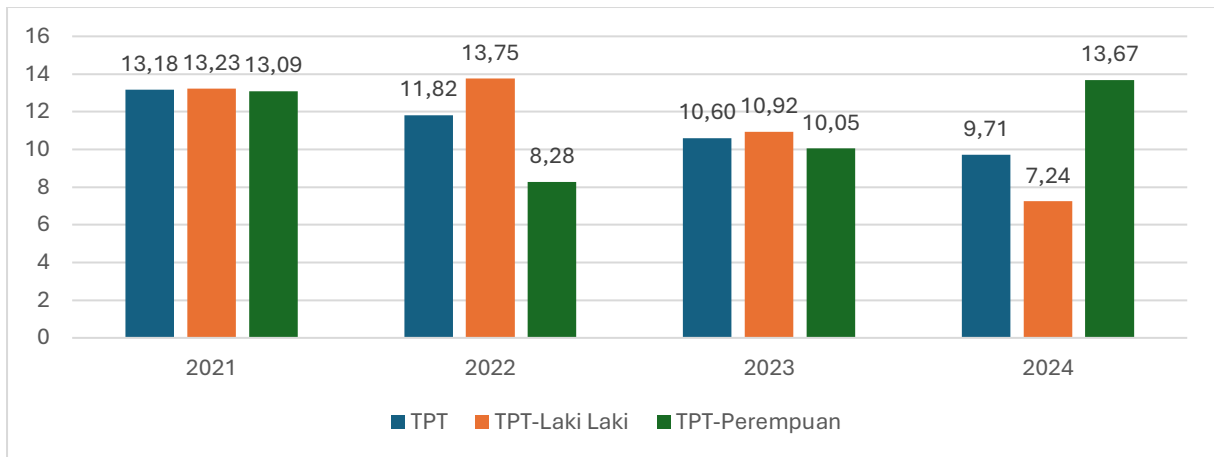


Sumber: BPS

Gambar 2. 77. Persentase Tenaga Kerja Formal

2.7.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar memperlihatkan tren menurun dari 13,18% pada 2021 menjadi 9,71% pada 2024, yang mengindikasikan perbaikan daya serap pasar kerja. Namun, jika dilihat lebih rinci berdasarkan gender, terdapat ketimpangan yang cukup mencolok. Pada 2022, pengangguran laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, tetapi situasi ini berbalik tajam di 2024 ketika pengangguran perempuan melonjak hingga 13,67% sementara laki-laki turun signifikan ke 7,24%. Dinamika ini mencerminkan kerentanan perempuan dalam mengakses pekerjaan yang stabil dan layak, sekaligus menunjukkan masih adanya hambatan struktural di pasar tenaga kerja. Dengan demikian, meski secara agregat pengangguran menurun, tantangan utama ke depan adalah memastikan penurunan ini dapat dirasakan merata oleh semua kelompok masyarakat.

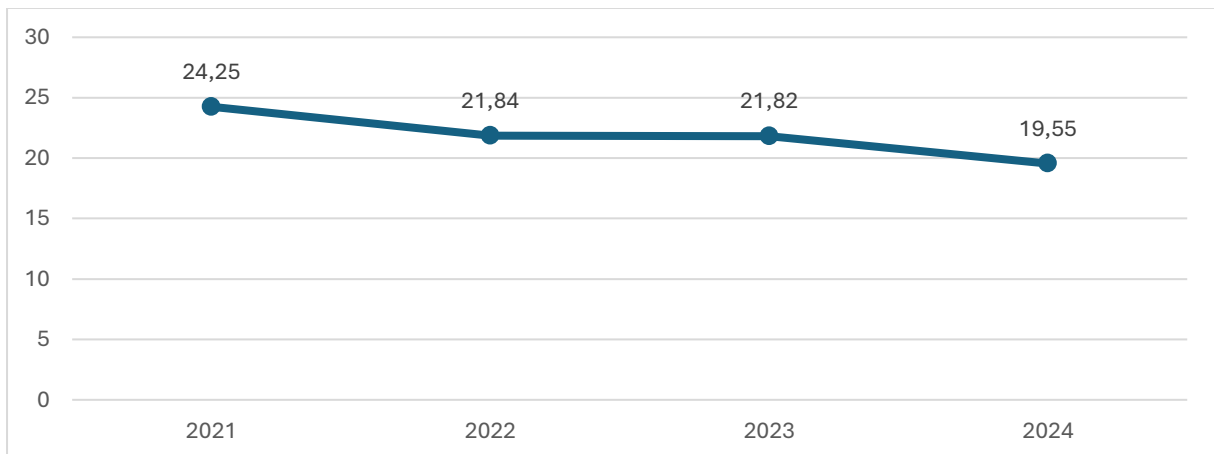


Sumber: BPS

Gambar 2. 78. Tingkat Pengangguran Terbuka

2.7.6. Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang Tidak Sedang Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET)

Persentase usia muda (15–24 tahun) yang tidak sedang sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan di Kota Makassar menunjukkan tren penurunan dalam periode 2021–2024. Dari level yang cukup tinggi sebesar 24,25% pada 2021, angkanya turun menjadi 21,84% pada 2022 dan relatif stagnan di 2023 (21,82%), sebelum kembali menurun lebih tajam menjadi 19,55% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam partisipasi pemuda pada kegiatan produktif, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun dunia kerja. Namun, dengan hampir satu dari lima pemuda masih berada dalam kategori NEET pada 2024, tantangan besar tetap ada, khususnya dalam memastikan transisi yang lebih mulus dari pendidikan ke pasar kerja. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan akses pendidikan berkualitas, peningkatan kesempatan pelatihan keterampilan, serta perluasan lapangan kerja yang ramah pemuda agar potensi generasi muda dapat lebih optimal berkontribusi pada pembangunan.

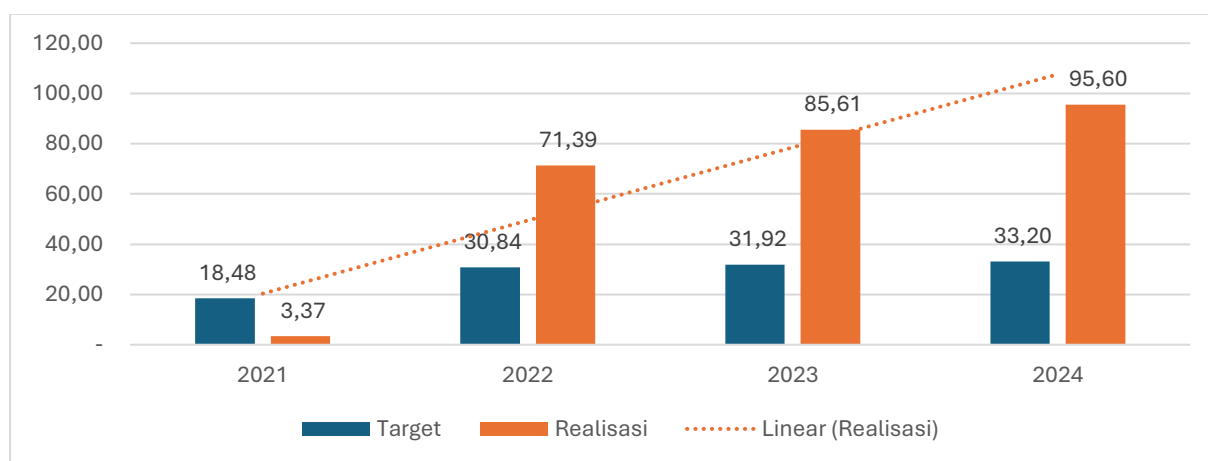


Sumber: BPS

Gambar 2. 79. Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang Tidak Sedang Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET)

2.7.7. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Makassar mengalami peningkatan yang sangat signifikan sepanjang periode 2021–2024, jauh melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya. Dari capaian awal yang masih rendah pada 2021 sebesar 3,37 ribu kunjungan, angkanya melonjak tajam menjadi 71,39 ribu pada 2022 dan terus meningkat ke 85,61 ribu pada 2023 hingga mencapai 95,60 ribu pada 2024. Sementara itu, target tahunan yang ditetapkan pemerintah hanya berada di kisaran 18–33 ribu kunjungan, sehingga realisasi yang jauh melampaui target mencerminkan percepatan pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi serta keberhasilan promosi dan penguatan daya tarik wisata. Meski demikian, lonjakan yang tinggi ini juga menuntut kesiapan infrastruktur, layanan, serta manajemen destinasi agar pertumbuhan jumlah kunjungan dapat terjaga kualitasnya dan memberikan dampak ekonomi yang merata bagi masyarakat lokal.

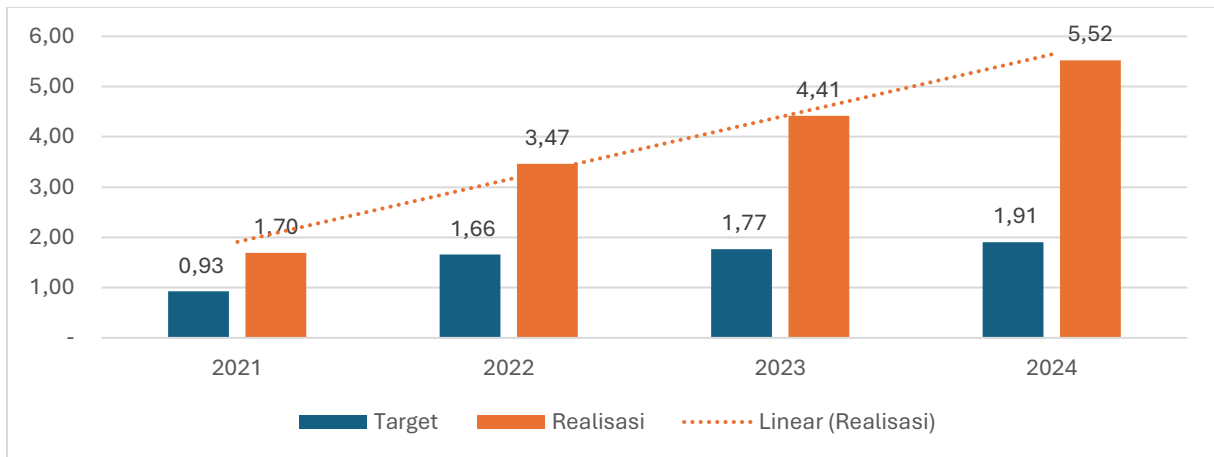


Sumber: Dinas Pariwisata

Gambar 2. 80. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

2.7.8. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Kota Makassar menunjukkan peningkatan yang konsisten dan jauh melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya. Pada 2021 jumlah kunjungan tercatat 1,70 juta, hampir dua kali lipat dari target 0,93 juta, dan terus naik menjadi 3,47 juta pada 2022, 4,41 juta pada 2023, hingga mencapai 5,52 juta pada 2024. Sementara itu, target kunjungan hanya meningkat secara gradual dari 0,93 juta menjadi 1,91 juta, sehingga capaian aktual memperlihatkan keunggulan signifikan dibanding perencanaan. Tren ini menandakan daya tarik wisata Makassar yang semakin kuat bagi wisatawan domestik, didorong oleh membaiknya mobilitas, meningkatnya promosi destinasi, dan berkembangnya infrastruktur pendukung. Meski capaian tinggi ini menggembirakan, peningkatan jumlah kunjungan juga perlu diimbangi dengan penguatan kualitas layanan, keberlanjutan lingkungan, dan distribusi manfaat ekonomi agar pariwisata tidak hanya tumbuh secara kuantitatif tetapi juga memberi dampak positif yang luas.



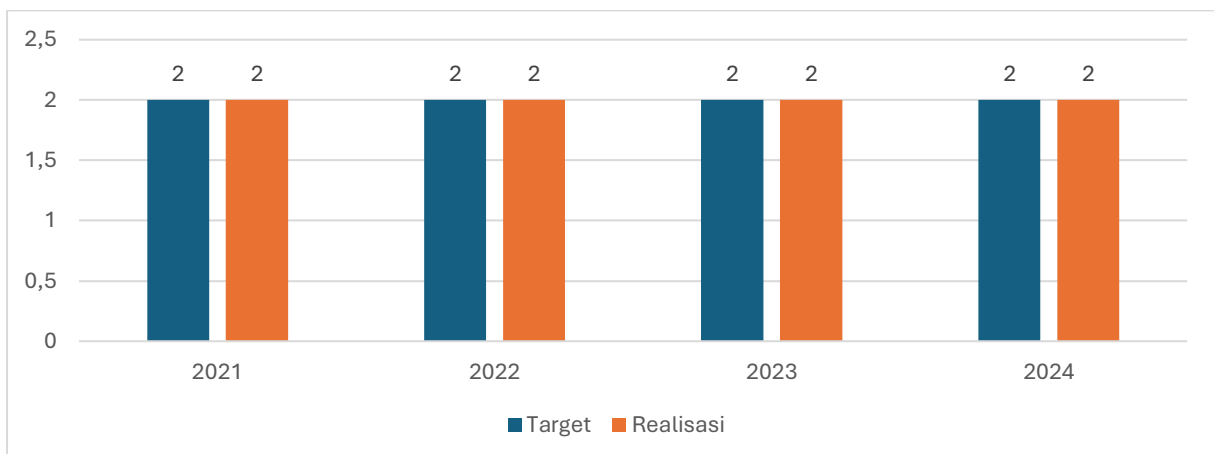
Sumber: Dinas Pariwisata

Gambar 2. 81. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

2.8.Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Kreatif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

2.8.1. Jumlah Dermaga Penyeberangan

Jumlah dermaga penyeberangan di Kota Makassar tercatat konstan pada angka 2 unit sepanjang periode 2021–2024, baik dari sisi target maupun realisasi. Stabilitas ini menunjukkan belum adanya penambahan kapasitas infrastruktur penyeberangan dalam beberapa tahun terakhir, yang di satu sisi mencerminkan konsistensi pencapaian target, tetapi di sisi lain juga mengindikasikan terbatasnya ekspansi untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan mobilitas laut. Kondisi ini penting dicermati karena dermaga penyeberangan berperan strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah, kelancaran distribusi barang, serta aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat aktivitas ekonomi.



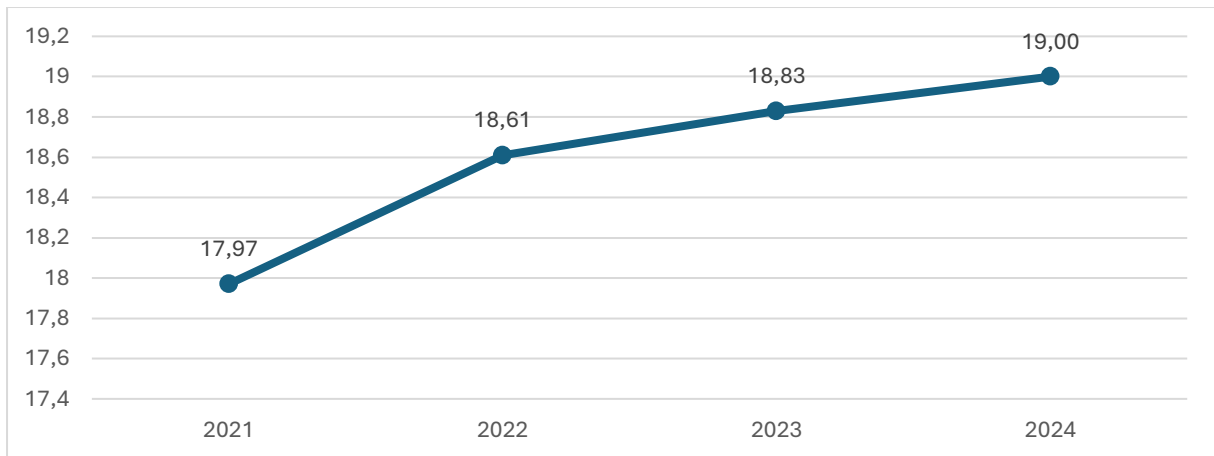
Sumber: Dinas Perhubungan

Gambar 2. 82. Jumlah Dermaga Penyeberangan

2.8.2. Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDRB

Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB Kota Makassar menunjukkan tren peningkatan bertahap selama 2021–2024. Dari posisi 17,97% pada 2021, kontribusi manufaktur

naik menjadi 18,61% pada 2022, terus menguat ke 18,83% pada 2023, dan mencapai 19,00% pada 2024. Kenaikan yang relatif konsisten ini mencerminkan peran sektor manufaktur yang semakin penting dalam menopang struktur ekonomi kota, terutama sebagai motor diversifikasi dan penggerak nilai tambah. Meski peningkatannya tidak terlalu besar, tren positif ini mengindikasikan adanya penguatan kapasitas produksi dan potensi pengembangan lebih lanjut di sektor ini. Ke depan, menjaga momentum ini penting agar industri manufaktur tidak hanya menyumbang pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah.

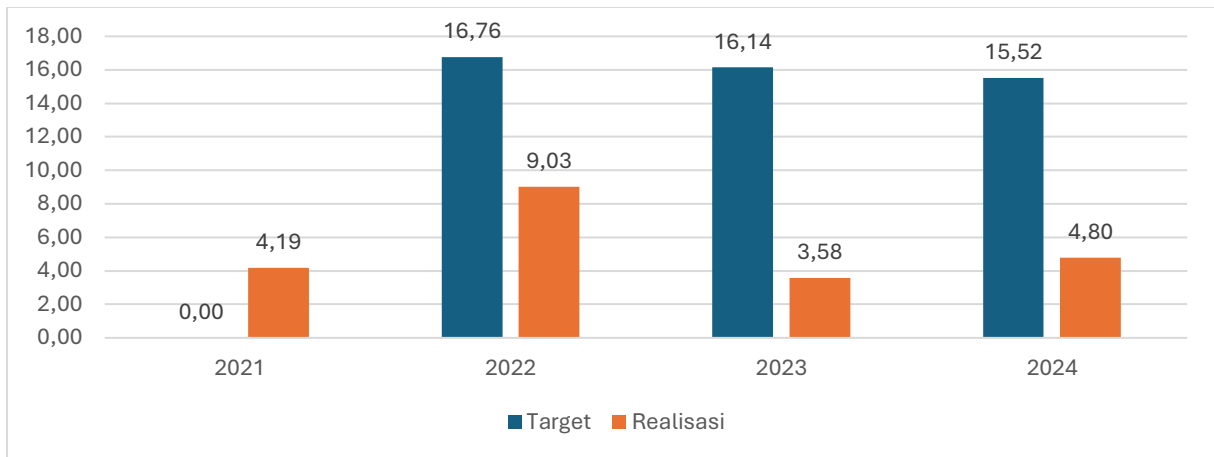


Sumber: BPS

Gambar 2. 83. Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDRB

2.8.3. Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur

Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur Kota Makassar menunjukkan kinerja yang berfluktuasi dan cenderung belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Pada 2021, realisasi pertumbuhan tercatat 4,19% meskipun target awal 0%, lalu meningkat ke 9,03% pada 2022 tetapi masih jauh di bawah target 16,76%. Kondisi memburuk pada 2023 dengan realisasi turun tajam menjadi 3,58% dibanding target 16,14%, dan pada 2024 hanya sedikit membaik ke 4,80% sementara target tetap tinggi di 15,52%. Pola ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara perencanaan dan capaian, yang mengindikasikan tantangan struktural dalam pengembangan sektor manufaktur, baik dari sisi kapasitas produksi, daya saing, maupun dukungan ekosistem industri. Dengan kontribusi manufaktur yang semakin penting dalam PDRB, perbaikan kebijakan dan strategi penguatan sektor ini menjadi krusial agar pertumbuhan yang ditargetkan lebih realistis dan dapat dicapai secara berkelanjutan.

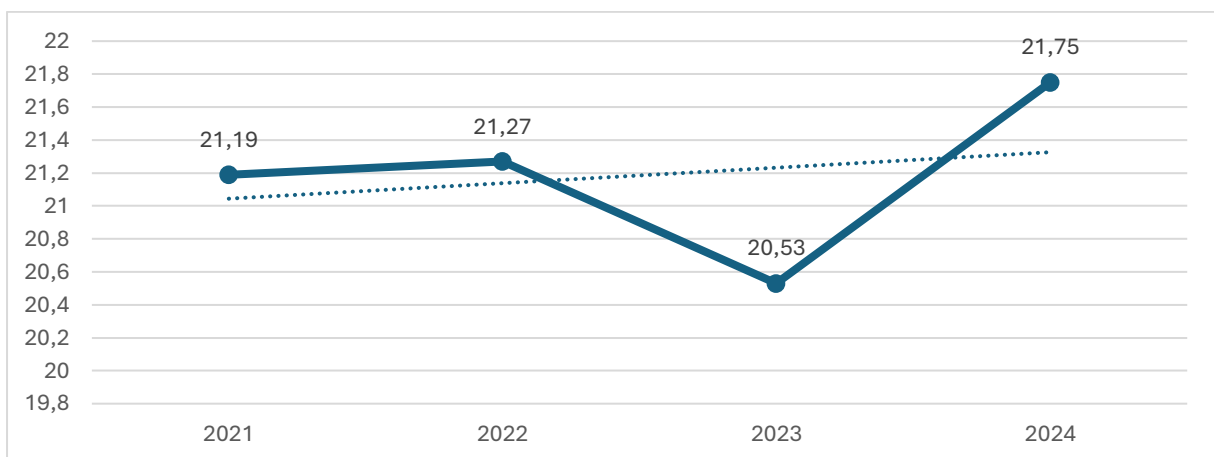


Sumber: BPS

Gambar 2. 84. Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur

2.8.4. Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri

Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur di Kota Makassar cenderung stabil namun mengalami fluktuasi kecil sepanjang 2021–2024. Dari 21,19% pada 2021, angkanya naik tipis menjadi 21,27% pada 2022 sebelum menurun ke titik terendah 20,53% pada 2023, lalu kembali meningkat cukup signifikan menjadi 21,75% pada 2024. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun sektor manufaktur tetap menyerap lebih dari seperlima total tenaga kerja, kapasitas penyerapan tenaga kerja masih rentan terhadap dinamika pertumbuhan industrinya. Kenaikan tajam di 2024 memberikan sinyal positif, namun untuk menjaga keberlanjutan peran sektor ini, diperlukan penguatan iklim usaha dan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar industri tidak hanya mampu mempertahankan proporsinya, tetapi juga mendorong kualitas pekerjaan yang lebih baik.



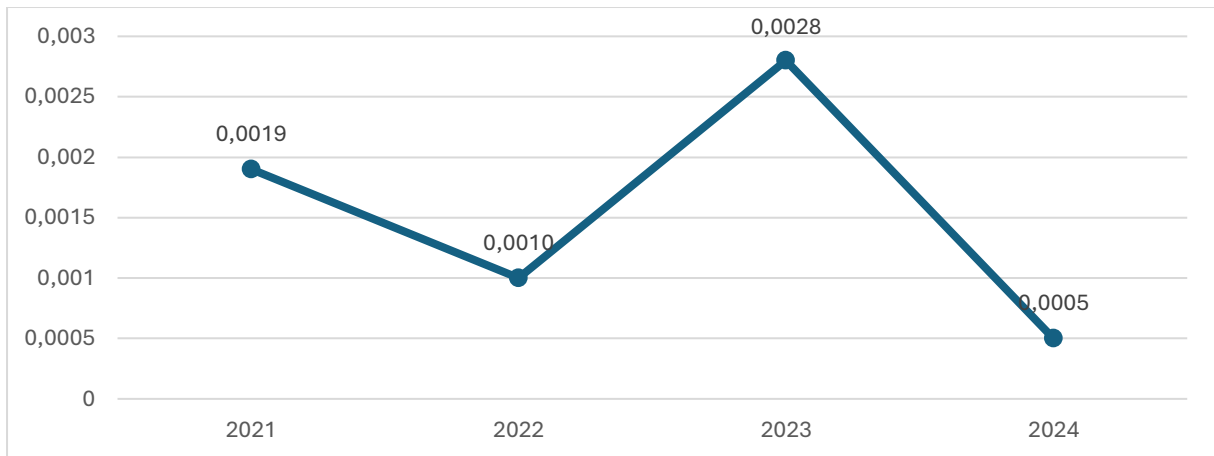
Sumber: BPS

Gambar 2. 85. Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri

2.8.5. Proporsi Anggaran Riset Pemerintah terhadap PDRB

Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB di Kota Makassar selama periode 2021–2024 terlihat sangat kecil dan berfluktuasi tajam. Pada 2021 tercatat sebesar 0,0019%, turun menjadi 0,0010% pada 2022, kemudian melonjak ke titik tertinggi 0,0028% pada 2023, sebelum anjlok drastis

ke 0,0005% pada 2024. Angka yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa riset belum menjadi prioritas utama dalam struktur belanja daerah, padahal kontribusinya penting untuk mendukung inovasi, daya saing, dan pengembangan sektor strategis. Fluktuasi yang lebar juga mengindikasikan belum adanya konsistensi dalam kebijakan pendanaan riset. Minimnya alokasi ini menjadi tantangan dalam membangun fondasi ekonomi berbasis pengetahuan, sehingga ke depan diperlukan kebijakan yang lebih terarah untuk memperkuat riset dan inovasi sebagai pendorong pertumbuhan jangka panjang.

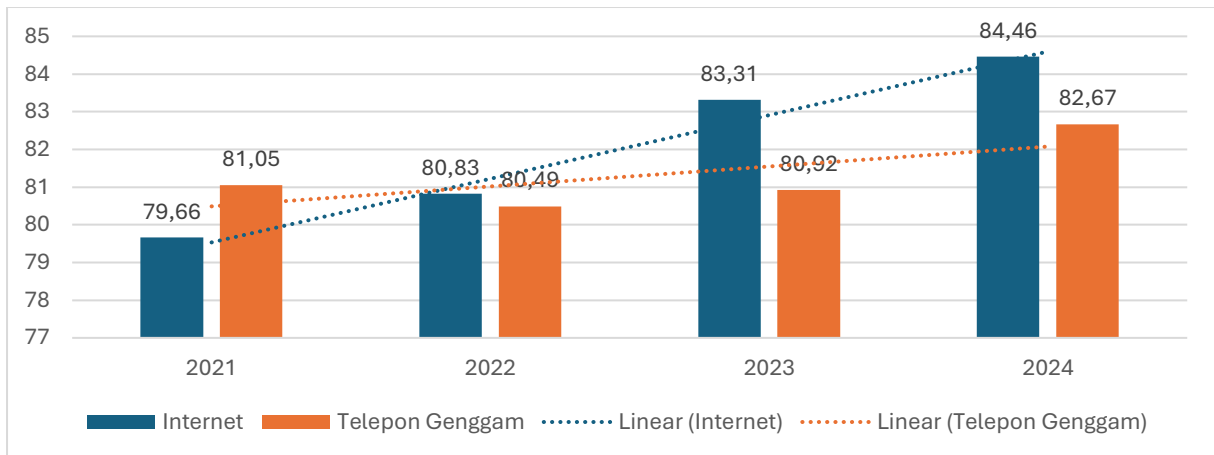


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Gambar 2. 86. Proporsi Anggaran Riset Pemerintah terhadap PDRB

2.8.6. Proporsi Individu yang Menguasai Telepon Genggam dan Menggunakan Internet

Proporsi individu di Kota Makassar yang memiliki telepon genggam dan menggunakan internet menunjukkan tren yang relatif tinggi dengan kecenderungan meningkat sepanjang 2021–2024. Pada 2021, kepemilikan telepon genggam (81,05%) sedikit lebih tinggi dibanding penggunaan internet (79,66%), tetapi sejak 2022 pola ini berbalik, di mana proporsi pengguna internet terus melampaui kepemilikan telepon genggam. Pada 2024, penggunaan internet mencapai 84,46% sementara kepemilikan telepon genggam 82,67%. Perkembangan ini menunjukkan penetrasi digital yang semakin kuat, ditopang oleh akses internet yang semakin luas dan meningkatnya kebutuhan aktivitas berbasis daring. Namun, kesenjangan tipis antara kepemilikan perangkat dan penggunaan internet mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat sudah mampu mengakses internet melalui berbagai saluran, tidak hanya kepemilikan pribadi. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk memastikan pemanfaatan teknologi digital yang lebih produktif dan merata.



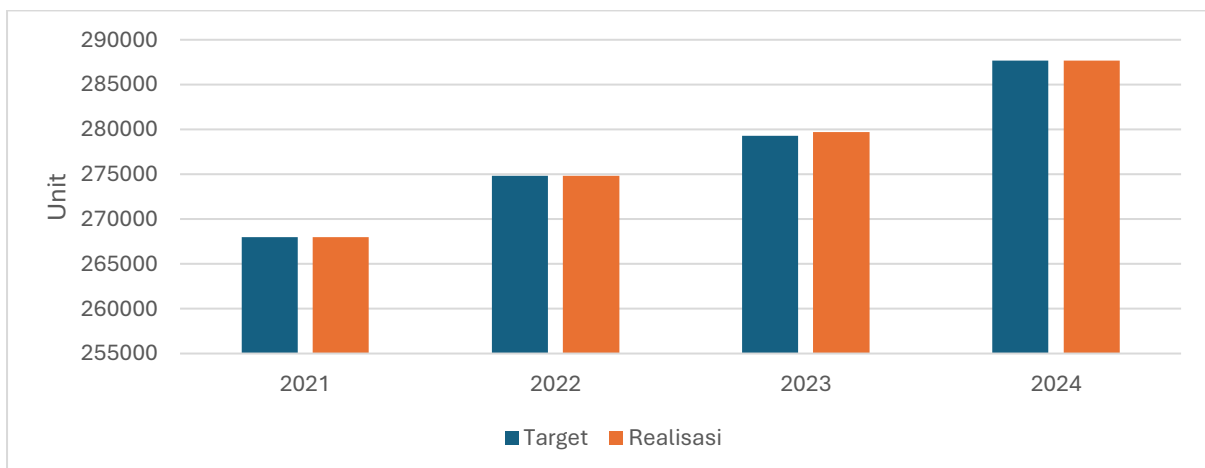
Sumber: BPS

Gambar 2. 87. Proporsi Individu yang Menguasai Telepon Genggam dan Menggunakan Internet

2.9. Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

2.9.1. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Proporsi rumah tangga di Kota Makassar yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau menunjukkan tren peningkatan bertahap sepanjang periode 2021–2024, dengan tingkat ketercapaian yang relatif stabil pada kisaran 100,00% pada 2021 dan 2022, sedikit meningkat menjadi 100,14% pada 2023, lalu kembali berada pada 100,00% pada 2024. Kinerja ini mencerminkan konsistensi pencapaian target pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas perumahan dan mengurangi ketimpangan akses terhadap hunian yang memadai. Meski hasilnya menunjukkan capaian yang sangat tinggi, laju peningkatan masih terbatas, mengindikasikan bahwa tantangan dalam penyediaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, masih cukup besar. Penguatan kebijakan perumahan berkelanjutan, penyediaan fasilitas dasar permukiman, serta pengendalian harga tanah di kawasan perkotaan perlu menjadi fokus agar pencapaian indikator ini tidak hanya terjaga secara kuantitatif, tetapi juga merata dan berkeadilan di seluruh wilayah kota.

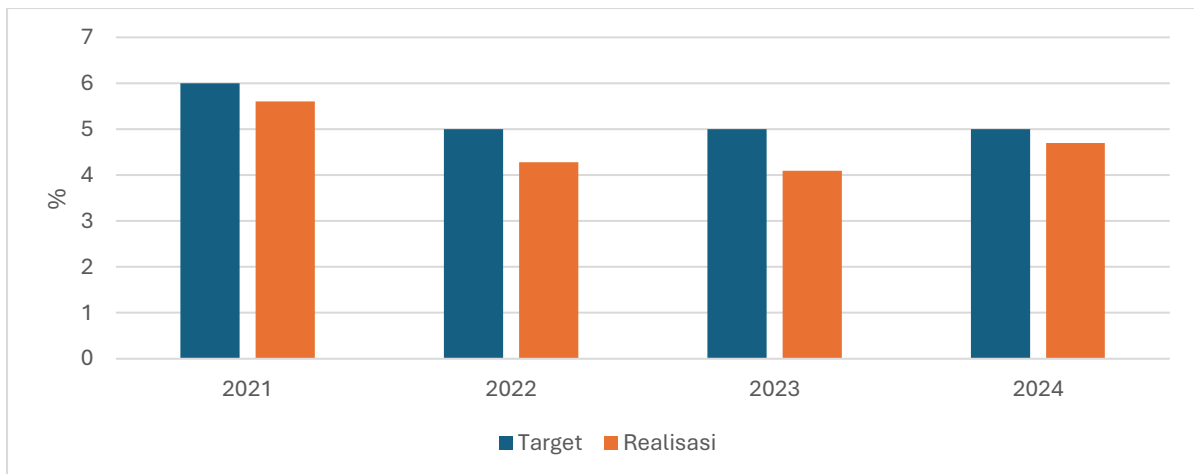


Sumber : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Gambar 2. 88. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

2.9.2. Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan

Persentase pengguna moda transportasi umum di wilayah perkotaan Makassar menunjukkan fluktuasi moderat selama periode 2021–2024. Berdasarkan data, tingkat penggunaan transportasi umum tercatat sebesar 93,33% pada 2021, menurun menjadi 85,60% pada 2022 dan 82,00% pada 2023, sebelum kembali meningkat signifikan menjadi 94,00% pada 2024. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi sempat mengalami penurunan di tengah periode, terdapat pemulihan kuat pada akhir tahun pengamatan. Fluktuasi tersebut mencerminkan dinamika mobilitas masyarakat pascapandemi dan upaya pemerintah dalam meningkatkan keandalan moda publik, seperti bus kota dan layanan angkutan massal berbasis digital. Meskipun tren akhir menunjukkan capaian yang positif, tingkat penggunaannya masih relatif rendah dibandingkan potensi total perjalanan harian, menandakan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi masih tinggi. Untuk memperkuat pergeseran menuju sistem transportasi berkelanjutan, diperlukan peningkatan kualitas layanan, keterpaduan antar moda, serta perluasan jaringan transportasi publik yang ramah lingkungan di kawasan pusat maupun pinggiran kota.



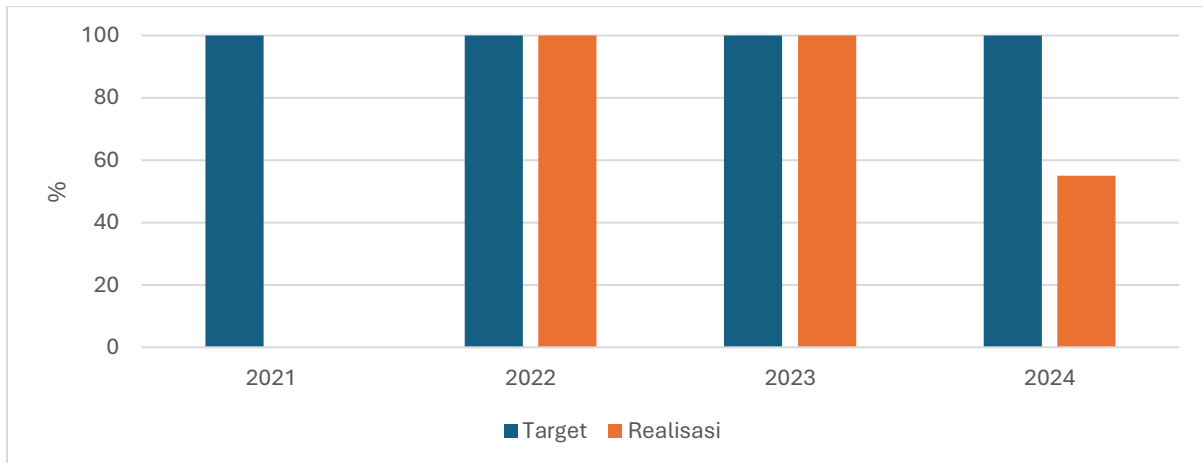
Sumber: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Gambar 2. 89. Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan

2.9.3. Jumlah Kota Pusaka di Kawasan Perkotaan Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil

Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan Makassar menunjukkan stabilitas dengan capaian yang beragam selama periode 2021–2024. Data menunjukkan bahwa pada 2021 tidak terdapat data realisasi yang tercatat, sementara pada 2022 dan 2023 capaian tercatat masing-masing sebesar 100,00%, kemudian menurun signifikan menjadi 55,00% pada 2024. Pola ini menggambarkan adanya konsistensi pelestarian nilai-nilai sejarah kota pada awal periode, namun diikuti oleh penurunan kinerja pada tahun terakhir yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Keberadaan kota pusaka berperan penting dalam menjaga identitas dan karakter budaya Makassar sekaligus mendukung pariwisata berbasis warisan sejarah. Penurunan capaian di tahun terakhir menandakan perlunya

revitalisasi kebijakan pelestarian, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor agar potensi kota pusaka dapat terus memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan.

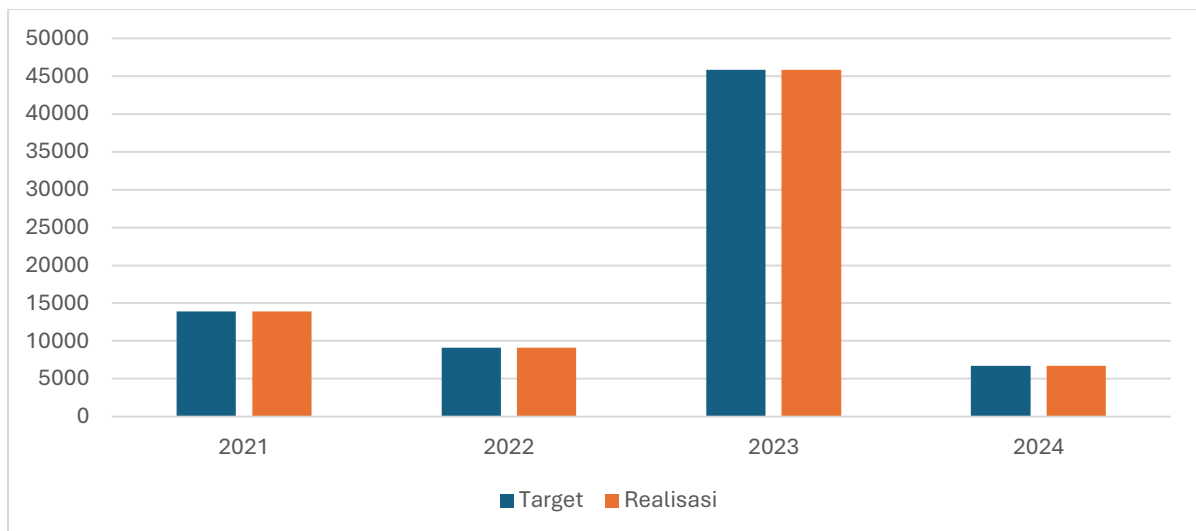


Sumber: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Gambar 2. 90. Jumlah Kota Pusaka di Kawasan Perkotaan Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang dan Kota Kecil

2.9.4. Jumlah Korban Meninggal, Hilang, dan Terkena Dampak Bencana per 100.000 Penduduk

Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 penduduk di Kota Makassar menunjukkan kinerja yang stabil dengan tingkat ketercapaian 100,00% secara konsisten selama periode 2021–2024. Capaian penuh ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan telah terpenuhi secara optimal setiap tahunnya, sejalan dengan meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana di tingkat daerah. Stabilitas capaian ini juga mencerminkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat yang semakin baik dalam menghadapi risiko bencana alam seperti banjir, abrasi pesisir, dan cuaca ekstrem. Meski hasilnya positif, upaya peningkatan sistem peringatan dini, penguatan koordinasi antarinstansi, dan edukasi publik tetap diperlukan agar tren keberhasilan ini berkelanjutan dan mampu menekan potensi korban pada masa mendatang.



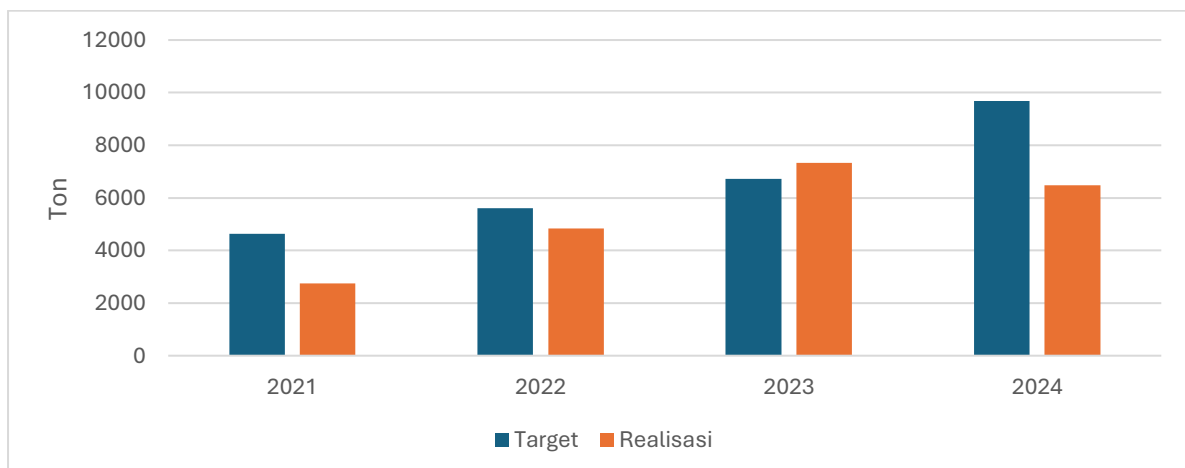
Sumber : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Gambar 2. 91. Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang

2.10. Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

2.10.1. Jumlah Limbah B3 yang Terkelola dan Proporsi Limbah B3 yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan

Kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kota Makassar menunjukkan fluktuasi ketercapaian selama 2021–2024. Berdasarkan data, tingkat ketercapaian tercatat sebesar 59,34% pada 2021, meningkat signifikan menjadi 86,37% pada 2022, mencapai puncak 108,98% pada 2023, dan kembali turun menjadi 66,83% pada 2024. Pola ini mencerminkan dinamika kapasitas pengelolaan limbah industri serta efektivitas pengawasan lingkungan yang bervariasi setiap tahun. Meskipun capaian tertinggi sempat melampaui target, penurunan pada akhir periode menunjukkan perlunya konsistensi kebijakan dalam pengelolaan limbah industri. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan fasilitas pengolahan limbah, serta kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha agar capaian pengelolaan B3 dapat lebih stabil dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

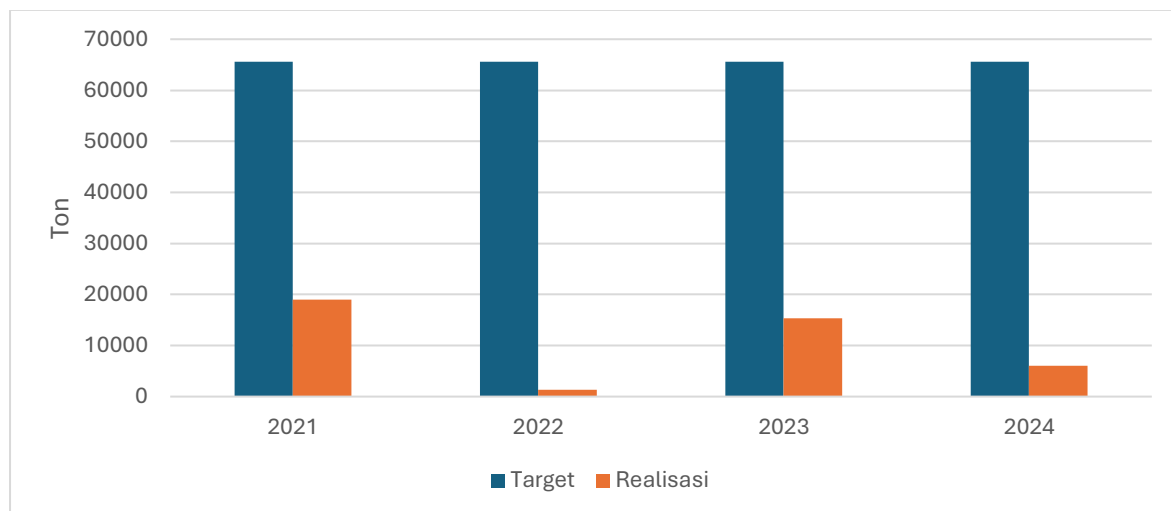


Sumber: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Gambar 2. 92. Jumlah Limbah B3 yang Terkelola dan Proporsi Limbah B3 yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (Sektor Industri)

2.10.2. Jumlah Timbulan Sampah yang Didaur Ulang

Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang di Kota Makassar menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi tajam sepanjang 2021–2024. Persentase ketercapaian terhadap target tercatat 29,04% pada 2021, menurun drastis menjadi 2,00% pada 2022, kemudian meningkat signifikan menjadi 23,44% pada 2023, dan 9,23% pada 2024. Fluktuasi ini menggambarkan masih rendahnya efisiensi sistem daur ulang sampah perkotaan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur pengolahan dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, diperlukan pendekatan berbasis ekonomi sirkular, penguatan kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas, serta peningkatan fasilitas pengolahan modern. Upaya tersebut penting untuk memperbesar proporsi sampah yang dapat didaur ulang secara berkelanjutan dan mendukung pencapaian target SDGs terkait konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

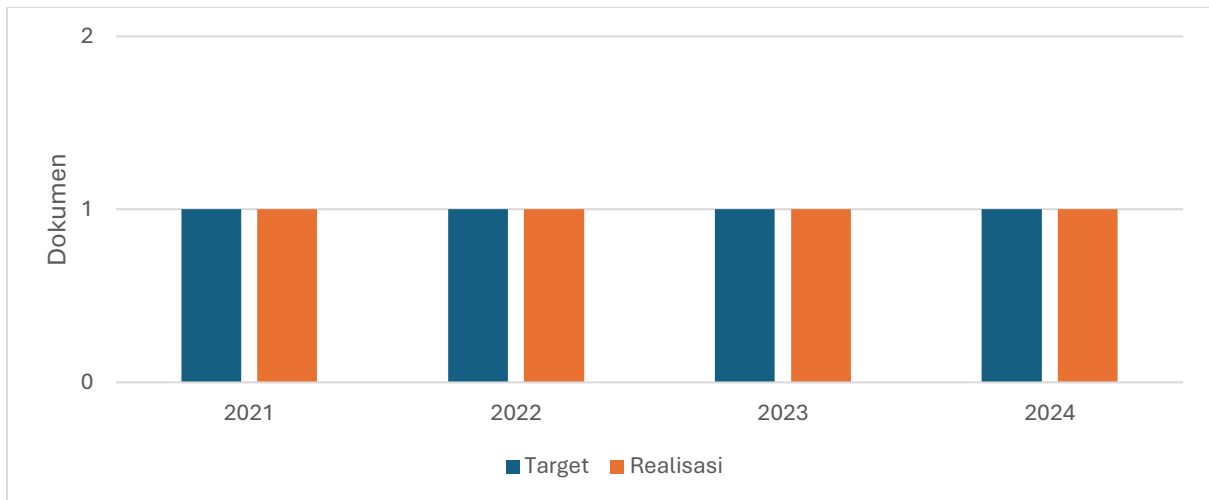


Sumber: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Gambar 2. 93. Jumlah Timbulan Sampah yang Didaur Ulang

2.10.3. Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah

Ketersediaan dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) di Kota Makassar menunjukkan capaian maksimal sepanjang 2021–2024, dengan tingkat ketercapaian 100,00% setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target penyusunan dan pembaruan dokumen PRB telah terpenuhi sesuai rencana. Konsistensi capaian ini menandakan kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola risiko bencana. Keberadaan dokumen PRB menjadi acuan penting bagi integrasi kebijakan mitigasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Meski secara administratif capaian sudah optimal, efektivitas pelaksanaannya tetap perlu diperkuat melalui pemantauan implementasi di lapangan dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.



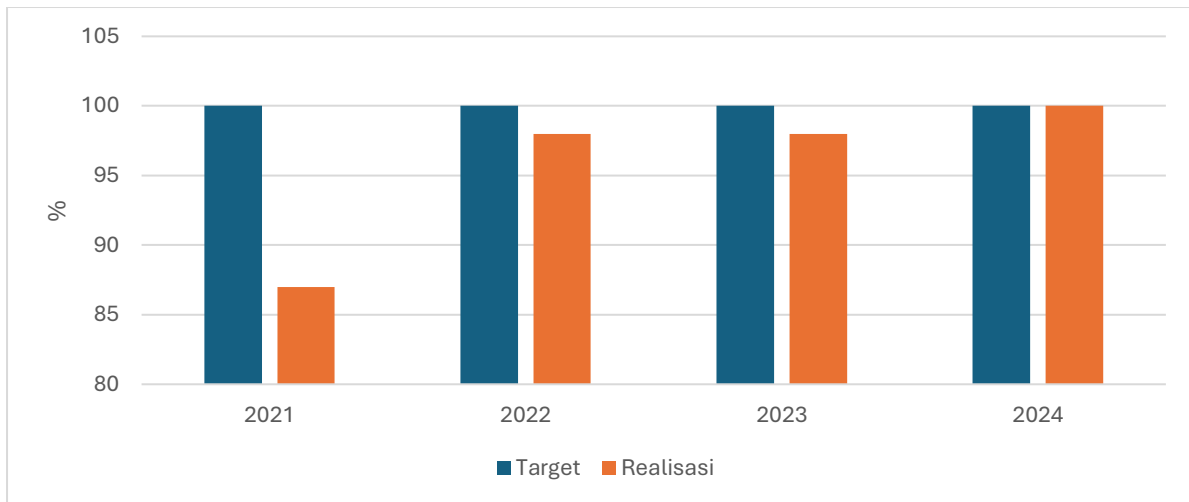
Sumber : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Gambar 2. 94. Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah

2.11. Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

2.11.1. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1–17 Tahun yang Mengalami Hukuman Fisik dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir

Proporsi rumah tangga yang memiliki anak usia 1–17 tahun dan mengalami hukuman fisik dari pengasuh menunjukkan tren membaik selama periode 2021–2024. Berdasarkan data, tingkat ketercapaian terhadap target tercatat 87,00% pada 2021, meningkat menjadi 98,00% pada 2022 dan 2023, serta mencapai 100,00% pada 2024. Kenaikan yang konsisten ini mencerminkan penurunan praktik kekerasan fisik terhadap anak serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengasuhan positif. Meskipun capaian sudah mencapai target maksimal pada tahun terakhir, diperlukan langkah berkelanjutan berupa peningkatan edukasi publik, advokasi keluarga, dan penegakan hukum terhadap kekerasan anak agar tren positif ini dapat dipertahankan dan diperluas ke seluruh wilayah kota.



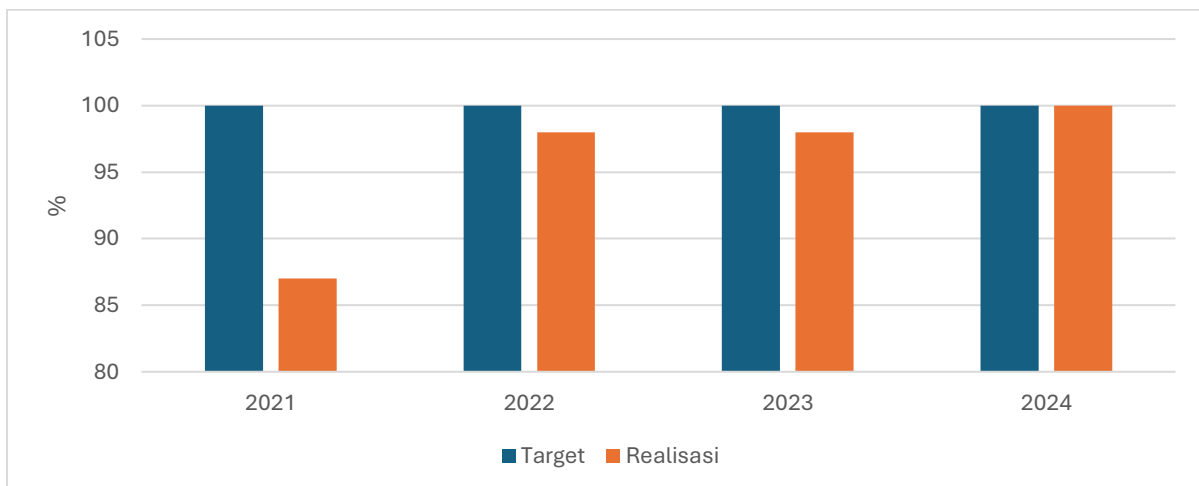
Sumber : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Gambar 2. 95. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun yang Mengalami Hukuman Fisik dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir

2.11.2. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1–17 Tahun yang Mengalami Agresi Psikologis dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir

Indikator proporsi rumah tangga yang memiliki anak usia 1–17 tahun dan mengalami agresi psikologis dari pengasuh juga menunjukkan perbaikan nyata sepanjang periode 2021–2024. Tingkat ketercapaian tercatat 87,00% pada 2021, meningkat menjadi 98,00% pada 2022 dan 2023, dan mencapai 100,00% pada 2024. Capaian ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif kekerasan verbal maupun emosional terhadap anak semakin tinggi.

Meskipun sudah mencapai target penuh, masih dibutuhkan upaya penguatan sistem perlindungan anak berbasis komunitas, peningkatan kapasitas guru dan orang tua dalam pengasuhan non-kekerasan, serta sosialisasi berkelanjutan agar lingkungan sosial anak semakin aman dan mendukung tumbuh kembang optimal.



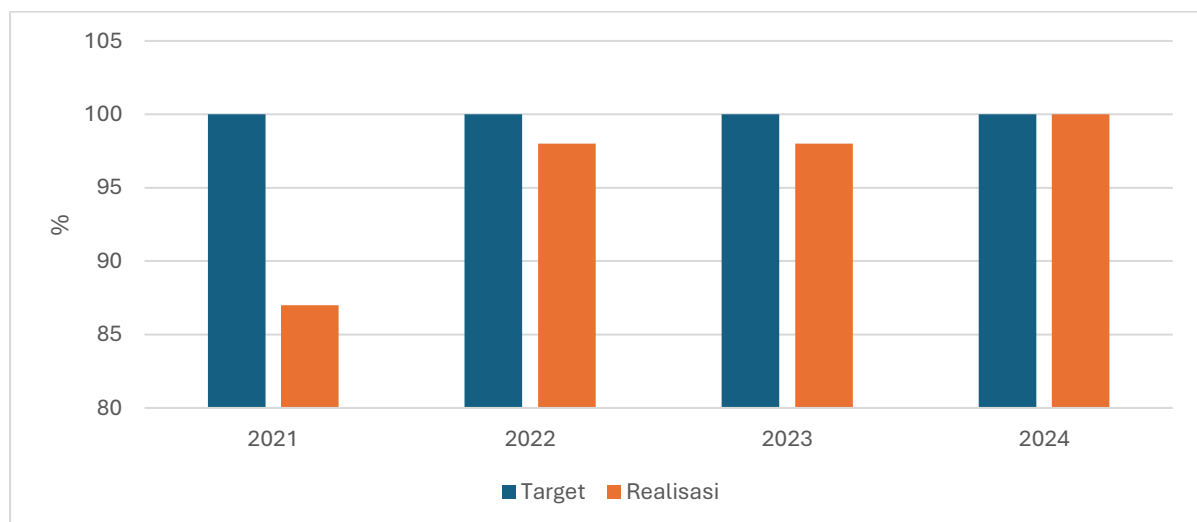
Sumber: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Gambar 2. 96. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun yang Mengalami Agresi Psikologis dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir

2.11.3. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1–17 Tahun yang Mengalami Hukuman Fisik dan/atau Agresi Psikologis dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir

Proporsi rumah tangga yang memiliki anak usia 1–17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis secara gabungan menunjukkan tren perbaikan berkelanjutan selama 2021–2024. Tingkat ketercapaian indikator ini sama dengan dua komponen sebelumnya, yaitu 87,00% pada 2021, meningkat menjadi 98,00% pada 2022 dan 2023, dan mencapai 100,00% pada 2024. Capaian tersebut mengindikasikan penguatan kebijakan perlindungan anak yang berjalan efektif di tingkat kota dan dukungan masyarakat yang semakin baik terhadap praktik pengasuhan positif.

Ke depan, penguatan koordinasi antar lembaga perlindungan anak, optimalisasi layanan pengaduan, dan pemberdayaan keluarga menjadi kunci untuk memastikan penurunan kekerasan terhadap anak dapat dipertahankan secara jangka panjang dan berkontribusi pada tercapainya tujuan SDGs 16.2, yaitu mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak.



Sumber: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Gambar 2. 97. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun yang Mengalami Hukuman Fisik dan/atau Agresi Psikologis dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

3.1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Dalam upaya menghapus kemiskinan dan mengurangi kerentanan masyarakat di perkotaan, pencapaian Tujuan 1 TPB di Kota Makassar dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. **Memperkuat perlindungan sosial adaptif** melalui penyaluran jaminan sosial dan bantuan sosial tepat sasaran, berbasis pemutakhiran data kemiskinan perkotaan, untuk melindungi rumah tangga miskin dan rentan dari guncangan ekonomi.
2. **Peningkatan kapasitas ekonomi keluarga miskin** melalui pemberdayaan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, kewirausahaan digital, serta peningkatan keterampilan kerja bagi pemuda dan pekerja sektor informal.
3. **Meningkatkan kualitas permukiman dan layanan dasar** yang difokuskan pada penataan kawasan kumuh, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta dukungan rumah layak huni di lingkungan padat dan pesisir.
4. **Memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan**, termasuk pencegahan stunting, jaminan kesehatan masyarakat miskin, serta beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.
5. **Menguatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana perkotaan**, khususnya di wilayah rawan banjir, rob, dan abrasi, melalui upaya mitigasi serta pemulihan cepat yang mencegah kerentanan semakin memburuk.

Untuk mencapai visi Kota Makassar bebas kemiskinan, Pemerintah Kota Makassar menetapkan lima target utama dalam pelaksanaan Tujuan 1 TPB, yaitu: 1). Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari; 2). Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional; 3). Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan; 4). Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro; 5). Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi

rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

Tabel 3.1. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Target 1.1. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.										
1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrem	BPS, Susenas Modul Konsumsi, dipadukan dengan data World Bank untuk Purchasing Power Parity	Persen	0,59 (2023)	0,4	0,3	0,2	0,1	0,05	0
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional										
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS, Susenas (KOR & KP)	Persen	4,27	4,24	4,2	3,7	3,4	3,1	2,8
1.2.2	Persentase laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi sesuai dengan definisi nasional	BPS, Susenas (KOR & KP), Sakernas	Persen	4,27	4,24	4,2	3,7	3,4	3,1	2,8
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.										
1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	BPS, Susenas (KOR)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.3.1[a]	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	BPS & BPJS Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.1[b]	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPS & BPJS Ketenagakerjaan	Persen	49,01	61,81	67,99	70,78	82,26	90,49	100
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.										
1.4.1	Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar	BPS, Susenas & Podes	Persen	90	90	90	90	90	90	90
1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelampin dan tipe kepemilikan	BPS, Susenas	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.										
1.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BNPB, BPBD	Kejadian	150	12	12	12	12	12	12

3.2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 TPB di Kota Makassar diarahkan untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, terjangkau, dan bergizi, serta memperkuat ketahanan pangan perkotaan melalui pengelolaan rantai pasok yang efisien dan pengembangan usaha pangan produktif. Arah kebijakan yang ditempuh adalah:

1. **Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan** melalui penguatan distribusi logistik antarwilayah, operasi pasar, optimalisasi BUMD/BUMDes pangan, dan digitalisasi informasi harga untuk mencegah gejolak harga pangan strategis.
2. **Memperluas akses dan bantuan pangan bagi masyarakat rentan** melalui dukungan program pangan bersubsidi, peningkatan status gizi keluarga miskin, serta pelayanan penyediaan pangan sehat untuk ibu hamil/menyusui, anak balita, dan lansia.
3. **Mengembangkan urban farming dan pertanian perkotaan berkelanjutan** dengan mendorong hidroponik, akuaponik, kebun vertikal, pemanfaatan lahan pekarangan, serta *community garden* di lorong dan kawasan padat penduduk sebagai sumber pangan keluarga.
4. **Meningkatkan kualitas gizi masyarakat** melalui edukasi gizi seimbang, kampanye konsumsi pangan lokal bergizi tinggi (ikan, sayur, buah), dan intervensi percepatan penurunan stunting berbasis komunitas kesehatan.
5. **Penguatan rantai pasok pangan daerah dan UMKM kuliner** melalui kemitraan produsen–supplier–ritel modern, dukungan sertifikasi keamanan pangan, dan transformasi digital bagi UMKM makanan untuk memperluas pemasaran dan efisiensi usaha.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu membawa Pemerintah Kota Makassar mencapai tiga target, yaitu: 1). Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana; 2). Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula; 3). Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrem.

Tabel 3.2. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										
2.1.1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernoursihment)	BPS	Persen	3,97	3,83	3,68	3,54	3,4	3,25	3,11
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Kemenkes, Survei Status Gizi Indonesia	Persen	19,8	18,8	17,9	17,5	16,9	16,2	15,5
2.2.2	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Kemenkes, Survei Status Gizi Indonesia	Persen	2,05	2,15	2,41	2,7	3,02	3,39	3,79
2.2.2[a]	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	Badan Pangan Nasional (Bapanas)	Skor	89,73	89,91	90,09	90,27	90,45	90,63	90,81
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrem.										
2.c.1	Indikator anomali harga pangan	BPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3.3. Tujuan 3: Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan memiliki akses yang merata terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Implementasi upaya pencapaian Tujuan 3 dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. **Memperluas akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas** melalui penguatan kapasitas puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer, pemanfaatan telemedicine dan *mobile clinic*, pemerataan distribusi tenaga kesehatan, serta peningkatan kualitas layanan ibu-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
2. **Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perilaku hidup sehat** melalui program promotif dan preventif yang berkelanjutan seperti GERMAS, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta penguatan layanan kesehatan mental dan peningkatan gizi masyarakat.
3. **Memperluas cakupan perlindungan sosial dan pembiayaan kesehatan yang berkeadilan** melalui perluasan kepesertaan jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, pekerja informal, dan kelompok rentan, serta digitalisasi sistem pembiayaan kesehatan untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas layanan publik.
4. **Penguatan sistem surveilans dan kesiapsiagaan terhadap kedaruratan kesehatan** melalui peningkatan kapasitas deteksi dini, respons cepat terhadap wabah dan krisis kesehatan, serta peningkatan ketahanan fasilitas kesehatan menghadapi situasi darurat.
5. **Kolaborasi multipihak dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan** melalui kemitraan dengan akademisi, swasta, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil dalam pemberdayaan masyarakat, inovasi layanan kesehatan, serta pemanfaatan data dan teknologi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Kebijakan tersebut diharapkan mampu membawa Pemerintah Kota Makassar mencapai enam target, yaitu: 1). Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup; 2). Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya; 3). Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan; 4). Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang; 5). Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat; 6). Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen,

pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

Tabel 3.3. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 3 Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.1	Angka kematian ibu	BPS: Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS)	Persen	71,53	69,09	66,65	64,21	61,77	59,33	56,89
3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya									
	(a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih;		Persen	98,53	99	100	100	100	100	100
	(b) di fasilitas kesehatan		Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										
3.3.3	Kejadian malaria per 1.000 orang	Laporan Kementerian Kesehatan	Persen	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
3.3.4	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Kementerian Kesehatan; Laporan Program Subdit Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis, dan (b) Kusta	Kemenkes: Laporan Rutin RR Elektronik	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis	Pusat Data dan Informasi BPJS Kesehatan	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.5.2.(a)	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	BPS: Susenas Modul KOR	Liter per Kapita	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan essensial	Kementrian Kesehatan: Riskesdas	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.8.1.(a)	Unmeet need pelayanan kesehatan	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.8.2	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Kementrian Kesehatan, BPJS Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.										
3.a.1	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	19,82	19,59	19,36	24	23	22	20
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Kemenkes: Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan	Per 1.000 penduduk	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51

3.4. Tujuan 4: Pendidikan yang Berkualitas

Tujuan 4 TPB diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Makassar. Pencapaian Tujuan 4 dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. **Memperluas akses layanan pendidikan formal yang inklusif dan berkeadilan** melalui perluasan sarana dan prasarana pendidikan pada wilayah padat penduduk dan pinggiran kota, peningkatan akses pendidikan bagi kelompok difabel, masyarakat miskin, serta anak putus sekolah melalui beasiswa, sekolah ramah anak, dan layanan pendidikan alternatif.
2. **Meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan** melalui penguatan kurikulum berbasis kompetensi abad 21 (literasi, numerasi, digital skill), pengembangan sekolah vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri lokal, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran yang interaktif dan adaptif.
3. **Penguatan kapasitas dan profesionalisme pendidik serta tenaga kependidikan** melalui pelatihan pedagogik dan literasi digital berkelanjutan, penyebaran guru yang lebih merata, pemberian insentif berbasis kinerja, serta peningkatan kesejahteraan guru untuk mendukung kualitas pembelajaran.
4. **Peningkatan kualitas layanan PAUD dan kesiapan pendidikan dasar** melalui perluasan akses PAUD holistik-integratif, peningkatan peran keluarga dalam stimulasi dini, serta penguatan program transisi PAUD–SD yang memastikan kesiapan belajar anak dari aspek gizi, mental, dan sosial.
5. **Pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi multipihak dalam peningkatan kualitas pendidikan** melalui pelibatan komunitas, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil dalam pengembangan perpustakaan komunitas, beasiswa kolaboratif, program *upskilling-reskilling*, serta peningkatan literasi sepanjang hayat (*lifelong learning*).

Kebijakan tersebut diharapkan mampu membawa Pemerintah Kota Makassar mencapai enam target, yaitu: 1). Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif; 2). Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar; 3). Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas; 4). Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan

teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan; 5). Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan; 6). Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Tabel 3.4. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 4 Pendidikan yang Berkualitas

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan anak lai-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
4.1.2	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjasng SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	BPS: Susenas Modul KOR								
	SD/ Sederajat		Persen	99,38	99,5	99,75	100	100	100	100
	SMP/ Sederajat		Persen	99,01	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	99,5
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun; usia 13-15 thun; dan usia 16-18 tahun	BPS: Susenas Modul KOR								
	usia 7-12 tahun		Persen	0,58	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0
	usia 13-15 tahun		Persen	3,02	2,5	2,25	2	1,5	1	0,5
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.										
4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) menurut jenis kelamin	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	82,65	84	86	88	90	92	95
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yan terjangkau dan berkualitas.										
4.3.1.(a)	Angka partisipasi kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	21,91	22,91	23,91	24,91	25,91	26,91	27,19
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.										
4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat dan (iii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) perdesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah / teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas	BPS: Susenas Modul KOR								
	rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/ laki-laki di SD/ MI/ Sederajat		Persen	100	100	100	100	100	100	100
	rasio angka partisipasi kasar (APK) perempuan/ laki-laki di SMP/ MTS/ Sederajat		Persen	104,55	104	103,5	103	102,5	102	101
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	100	100	100	100	100	100	100

3.5. Tujuan 5: Kesetaraan Gender

Isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender merupakan salah satu tantangan pembangunan yang masih perlu mendapat perhatian serius di Kota Makassar. Oleh karena itu, pencapaian Tujuan 5 TPB untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan agenda penting dan relevan bagi Pemerintah Kota Makassar. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut sebagai berikut:

1. **Memperluas akses dan kesempatan perempuan dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan** melalui penguatan layanan pendidikan formal dan non-formal bagi perempuan dari keluarga miskin, perempuan kepala keluarga, serta perempuan penyandang disabilitas; serta perluasan pelatihan vokasi yang mendukung peningkatan kompetensi dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
2. **Mendorong transformasi digital bagi pemberdayaan perempuan** melalui peningkatan literasi digital perempuan, perluasan akses teknologi informasi, serta dukungan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, kewirausahaan berbasis teknologi, dan kepemimpinan di era digital.
3. **Menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui upaya preventif dan responsif yang lebih kuat** melalui edukasi hak-hak perempuan dan perlindungan anak pada kelompok usia muda, pra-nikah, dan komunitas keluarga; penguatan layanan pendampingan korban; serta penguatan peran tokoh masyarakat dalam pencegahan kekerasan berbasis gender.
4. **Penguatan kelembagaan dan kolaborasi multipihak dalam perlindungan perempuan dan anak** melalui koordinasi antar-OPD, lembaga penegak hukum, layanan kesehatan, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan perwujudan kota ramah perempuan dan anak.
5. **Pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem pelaporan dan respon cepat terhadap kekerasan** melalui optimalisasi platform pengaduan berbasis digital yang mudah diakses, aman, dan terintegrasi, serta penguatan kapasitas aparat dan layanan rujukan untuk mempercepat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Kebijakan tersebut diharapkan mampu membawa Pemerintah Kota Makassar mencapai tiga target, yaitu: 1). Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan; 2). Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat; 3). Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme*

of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform
serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.

Tabel 3.5. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.										
5.3.1	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun	BPS: Susenas Modul KOR	Tahun	21	21	21	21	21	21	21
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah	KPU, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Daerah	Persen	16	16	16	18	20	21	25
5.5.2	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.										
5.6.2	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	BKKBN	Regulasi	4	4	4	4	4	4	4

3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Makassar. Berdasarkan baseline 2024, mayoritas rumah tangga telah memiliki akses terhadap layanan air minum aman dan sanitasi aman, serta akses fasilitas cuci tangan yang sangat tinggi. Meskipun demikian, tantangan masih terlihat pada kualitas pengolahan air limbah, cakupan layanan lumpur tinja, dan pengolahan limbah cair industri. Kota Makassar perlu memperkuat tata kelola sumber daya air, meningkatkan infrastruktur sanitasi dan persampahan, serta memastikan pengendalian pencemaran yang lebih terintegrasi. Sejumlah arah kebijakan berikut dapat ditempuh:

1. **Memperluas dan meningkatkan kualitas layanan air minum aman:** Meskipun cakupannya sudah mencapai lebih dari 99%, peningkatan kapasitas produksi dan keandalan jaringan distribusi tetap diperlukan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan meminimalkan risiko gangguan layanan.
2. **Penguatan layanan sanitasi aman dan sistem SPALD-T:** Peningkatan akses sanitasi aman dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)—yang kini berada pada baseline 98,70%, perlu ditunjang oleh perluasan jaringan, perbaikan kualitas instalasi, dan penyediaan layanan khusus bagi kawasan padat atau perumahan informal.
3. **Perluasan cakupan layanan pengelolaan lumpur tinja (LLTT):** Kota Makassar perlu memperkuat regulasi wajib LLTT, memperluas armada layanan, serta mengembangkan sistem pemantauan berkala untuk meminimalkan risiko pencemaran lingkungan dari septic tank yang tidak terkelola.
4. **Meningkatkan pengolahan limbah cair industri secara aman:** Baseline 2024 menunjukkan bahwa limbah cair industri yang diolah secara aman masih cukup rendah. Perlu pengawasan lebih ketat, penyediaan fasilitas pengolahan terpadu, serta pembinaan industri kecil menengah untuk mengadopsi sistem pengolahan limbah yang sesuai standar.
5. **Mendorong efisiensi penggunaan air di sektor rumah tangga dan industri:** Kota Makassar perlu mengembangkan kebijakan efisiensi pemakaian air, seperti kampanye hemat air, adopsi perangkat hemat air, serta manajemen permintaan di sektor usaha dan fasilitas publik, mengingat peningkatan kebutuhan air sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pengembangan kawasan.
6. **Perlindungan dan restorasi ekosistem terkait air:** Upaya restorasi kawasan pesisir, ruang terbuka hijau, dan daerah resapan perlu diperkuat untuk menjaga keberlanjutan sumber air tanah dan mengurangi potensi banjir di wilayah pesisir serta kawasan urban padat.

Secara keseluruhan, Kota Makassar memiliki landasan yang kuat untuk mencapai target Tujuan 6, mengingat capaian awal yang relatif tinggi pada akses air minum dan sanitasi. Namun, tantangan tetap signifikan pada aspek kualitas air, layanan lumpur tinja, dan pengolahan limbah industri. Dengan memperkuat kapasitas infrastruktur, tata kelola lingkungan, kolaborasi antara

pemerintah, swasta, dan komunitas, serta pengawasan berbasis data, Makassar dapat mencapai layanan air bersih dan sanitasi yang lebih aman, merata, dan berkelanjutan menuju 2030.

Tabel 3.6. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 6 Air Minum dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.1. Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua										
6.1.1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	99,25	99,30	99,35	99,40	99,45	99,50	99,55
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
6.2.1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan (a) layanan sanitasi yang dikelola secara aman	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	97,56	97,61	97,66	97,71	97,76	97,81	97,86
	Indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	99,50	99,55	99,60	99,65	99,70	99,75	99,80
	Indikator 6.2.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	98,70	98,75	98,80	98,85	98,90	98,95	99,00
	Indikator 6.2.1.(e) Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan lumpur tinja.	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	87,50	87,55	88,55	89,55	90,55	91,00	91,50
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.										
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang diolah secara aman	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	49,36	51,35	53,45	55,75	57,80	59,90	61,20

6.3.2.(a)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Angka Indeks	58,7	73,95	74,15	74,35	74,55	74,75	74,95
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.										
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	Kemen PUPR, BPS	%							
6.6. Pada Tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan lahan basah, sungai air tanah, dan danau										
6.6.1.(a)	Indeks Kualitas Lahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Angka Indeks	28,92	36,06	36,13	36,20	36,27	36,34	36,41

3.7. Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Isu akses energi modern, bersih, dan terjangkau merupakan salah satu prasyarat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Makassar. Pemerataan akses energi tidak hanya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mengurangi ketimpangan, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta memperkuat ketahanan energi kota. Oleh karena itu, pencapaian Tujuan 7 TPB menjadi agenda penting dan strategis bagi Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota berketahanan energi dan ramah lingkungan.

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut mencakup:

1. **Perluasan akses energi listrik bagi seluruh rumah tangga** melalui peningkatan rasio elektrifikasi terutama pada wilayah padat penduduk dan permukiman informal. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dengan PLN untuk percepatan pemasangan sambungan listrik baru, peningkatan keandalan jaringan, serta subsidi sambungan listrik bagi rumah tangga miskin dan rentan.
2. **Perluasan akses dan pemanfaatan jaringan gas kota** dengan meningkatkan jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga, khususnya di kawasan perkotaan yang padat dan memiliki potensi efisiensi energi tinggi. Pemerintah Kota Makassar berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan operator jaringan gas untuk memperluas pembangunan infrastruktur gas rumah tangga serta memastikan keterjangkauan biaya sambungan bagi masyarakat.
3. **Mendorong transisi energi bersih dalam sektor rumah tangga**, termasuk peningkatan proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan distribusi LPG yang stabil dan terjangkau, edukasi efisiensi energi, serta program konversi bagi rumah tangga yang masih menggunakan bahan bakar biomassa.
4. **Fasilitasi penggunaan listrik sebagai energi utama untuk memasak**, sejalan dengan perkembangan teknologi peralatan rumah tangga hemat energi. Pemerintah mendorong penggunaan kompor listrik dan kompor induksi melalui program demonstrasi teknologi, kerja sama dengan pelaku usaha untuk paket harga terjangkau, serta sosialisasi manfaat kesehatan, efisiensi, dan pengurangan emisi.
5. **Pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring, pelaporan, dan percepatan layanan energi**, termasuk sistem pelaporan gangguan listrik, pemutakhiran data penerima manfaat subsidi energi, serta integrasi data energi tingkat kelurahan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur dan tenaga teknis dilakukan untuk mendukung implementasi layanan energi bersih yang lebih responsif dan tepat sasaran.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu membawa Pemerintah Kota Makassar mencapai tiga target utama Tujuan 7, yaitu: (1) peningkatan Rasio Elektrifikasi hingga mencapai 100% sehingga

seluruh rumah tangga dapat menikmati layanan listrik yang layak dan berkelanjutan; (2) perluasan sambungan jaringan gas rumah tangga yang semakin merata dan terjangkau di seluruh wilayah perkotaan; dan (3) peningkatan proporsi rumah tangga pengguna gas/LPG dan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak sebagai bagian dari transisi energi bersih yang lebih sehat, efisien, dan ramah lingkungan bagi seluruh masyarakat.

Tabel 3.7. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.1 Menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.										
7.1.1	Rasio elektrifikasi	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Direktorat Jenderal Migas, Kemen ESDM	Jumlah sambungan							
7.1.2.(b)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	99,45						
7.1.2.(c)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	NA						

3.8. Tujuan 8: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan serta Pekerjaan Layak untuk Semua

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar. Tantangan terkait pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, kualitas pekerjaan, dan perluasan kesempatan kerja yang layak masih membutuhkan perhatian serius dalam kerangka pembangunan kota. Oleh karena itu, pencapaian Tujuan 8 TPB menjadi agenda strategis Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat daya saing ekonomi kota, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan ekonomi.

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut mencakup:

1. **Mendorong pertumbuhan ekonomi kota yang inklusif melalui penguatan struktur ekonomi unggulan.** Upaya ini dilakukan melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor prioritas, pengembangan industri berbasis UMKM dan ekonomi kreatif, serta peningkatan produktivitas sektor jasa modern. Pemerintah mendorong investasi berkualitas yang menciptakan lapangan kerja produktif, yang berkontribusi pada peningkatan laju pertumbuhan PDRB per kapita dan PDRB per kapita secara berkelanjutan.
2. **Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi dan transformasi ekonomi lokal.** Untuk meningkatkan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja, berbagai program pelatihan berbasis kompetensi, vokasi, dan sertifikasi profesi diperluas, terutama untuk sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, Balai Latihan Kerja (BLK), serta lembaga sertifikasi kompetensi.
3. **Mengurangi dominasi lapangan kerja informal dengan memperluas akses pekerjaan layak dan perlindungan sosial.** Pemerintah mendorong peningkatan kualitas pasar tenaga kerja dengan memperluas kesempatan pekerjaan formal, memberikan pendampingan usaha bagi pekerja informal, serta memperkuat jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya ini diarahkan untuk menurunkan proporsi lapangan kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin, serta meningkatkan akses pekerja terhadap kondisi kerja yang layak dan aman.
4. **Peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penguatan standar upah dan perlindungan ketenagakerjaan.** Melalui pengawasan ketenagakerjaan, dialog sosial, dan penyusunan kebijakan Upah Minimum yang berbasis data, Pemerintah Kota Makassar berupaya memastikan kenaikan upah rata-rata per jam kerja yang mencerminkan produktivitas dan kebutuhan hidup layak. Upaya ini dibarengi dengan penegakan regulasi ketenagakerjaan dan pencegahan praktik kerja eksploitatif.
5. **Penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi kelompok rentan.** Kebijakan ini difokuskan pada penurunan tingkat

pengangguran terbuka, terutama pada kelompok perempuan, pemuda, dan usia produktif. Pemerintah memperluas job fair, program linking and matching tenaga kerja–industri, inkubasi wirausaha muda, serta akses pembiayaan usaha bagi kelompok rentan dan calon wirausaha.

6. **Pencegahan peningkatan kelompok usia muda NEET (Not in Education, Employment, or Training).** Upaya ini meliputi perluasan akses pendidikan, program pelatihan vokasi bagi pemuda, layanan konseling karier, serta penyediaan ruang kreatif (creative hub) yang mendukung aktivitas kewirausahaan generasi muda. Intervensi ini diarahkan untuk menurunkan persentase usia muda (15–24 tahun) yang tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (NEET).
7. **Penghapusan pekerja anak melalui penguatan regulasi, edukasi keluarga, dan layanan perlindungan anak.** Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap praktik pekerja anak, memberikan bantuan sosial bagi keluarga rentan, serta menyediakan akses pendidikan yang lebih inklusif. Upaya ini diarahkan untuk menurunkan persentase dan jumlah anak usia 5–17 tahun yang bekerja, dibedakan menurut jenis kelamin dan kelompok umur sesuai standar International Conference of Labour Statisticians.
8. **Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah melalui penguatan destinasi dan promosi wisata.** Pengembangan pariwisata dilakukan melalui perbaikan infrastruktur layanan kepariwisataan, digitalisasi promosi wisata, pemberdayaan komunitas lokal, serta peningkatan kualitas layanan wisata. Upaya ini meningkatkan proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB, serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
9. **Penguatan UMKM melalui akses pembiayaan, digitalisasi, dan kemitraan usaha.** Pemerintah Kota Makassar meningkatkan akses pembiayaan melalui KUR, kredit mikro daerah, dan skema pembiayaan berbasis digital, sehingga mendorong peningkatan rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan. Program pendampingan dan inkubasi UMKM juga terus diperkuat agar mampu naik kelas dan berdaya saing.
10. **Peningkatan inklusi keuangan melalui perluasan akses layanan perbankan dan transaksi digital.** Upaya dilakukan dengan memperluas literasi keuangan, memperbanyak agen bank di tingkat kelurahan, serta memfasilitasi pembukaan rekening tabungan masyarakat berpendapatan rendah. Langkah ini meningkatkan jumlah rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) per 1.000 penduduk dewasa dan jumlah rekening uang elektronik per 1.000 penduduk dewasa, sehingga memperkuat ekosistem ekonomi digital dan inklusif.

Dengan implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat mencapai indikator-indikator utama Tujuan 8, yaitu: (1) meningkatkan laju pertumbuhan PDRB per kapita dan PDRB per kapita; (2) meningkatkan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja sebagai indikator produktivitas tenaga kerja; (3) menurunkan proporsi lapangan kerja informal menurut sektor

dan jenis kelamin; (4) meningkatkan upah rata-rata per jam kerja; (5) menurunkan TPT menurut jenis kelamin dan kelompok umur; (6) menurunkan persentase pemuda NEET; (7) menurunkan jumlah pekerja anak usia 5–17 tahun; (8) Meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PDRB dan jumlah wisman; (9) meningkatkan rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan; dan (10) Meningkatkan jumlah rekening DPK dan uang elektronik per 1.000 penduduk dewasa.

Tabel 3.8. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	Persen	5,56	5,73	6,43	7,43	7,73	8,13	8,20
8.1.1.(a)	PDB per kapita	BPS	Rp Juta	165,95	175,46	186,75	200,62	216,13	233,71	252,87
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.										
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS	Persen	-2,24	0,32	2,97	5,84	9,03	13,24	17,24
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.										
8.3.1.(a)	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	BPS	Persen	40,30	39,20	37,90	36,40	34,70	32,80	30,00
8.5 Mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.										
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Rp per jam							
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Persen	9,71	9,62	9,53	9,44	9,35	9,26	9,17
8.6 Secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.										
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Persen	19,55	18,78	17,64	16,49	15,35	14,20	13,06

8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.										
8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Persen							
8.9 Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
8.9.1	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	BPS	Persen	2,14	2,15	2,16	2,17	2,18	2,19	2,20
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS	Orang	95.632	95.852	96.128	96.468	96.767	95.632	97.120
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.										
8.10.1.(a)	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan								
8.10.2.(a)	Jumlah rekening DPK perbankan per 1.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan	Rekening							
8.10.2.(b)	Jumlah rekening uang elektronik per 1.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan	Rekening							

3.9. Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Pembangunan infrastruktur yang tangguh, penguatan sektor industri yang inklusif, dan peningkatan kapasitas inovasi merupakan fondasi penting bagi transformasi ekonomi Kota Makassar. Tantangan terkait kapasitas transportasi, daya saing industri manufaktur, pengembangan industri kecil, serta rendahnya belanja riset masih memerlukan perhatian serius agar Makassar dapat menjadi kota modern, inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pencapaian Tujuan 9 TPB menjadi agenda strategis Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan produktivitas industri, dan memperkuat ekosistem inovasi daerah.

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut mencakup:

1. **Penguatan infrastruktur transportasi untuk mendukung mobilitas manusia dan logistik** melalui perluasan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara, termasuk angkutan umum perkotaan, jaringan jalan, pelabuhan, dan terminal. Upaya ini bertujuan meningkatkan jumlah penumpang dan volume barang berdasarkan moda transportasi, sehingga mendukung aksesibilitas, kelancaran distribusi, dan efisiensi rantai pasok kota
2. **Peningkatan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian daerah** melalui pengembangan kawasan industri, fasilitas logistik, dan industri pendukung. Selain itu, peningkatan teknologi produksi, standardisasi, dan pendampingan industri menjadi fokus utama untuk memperkuat daya saing industri manufaktur.
3. **Mendorong pertumbuhan industri manufaktur melalui inovasi proses produksi dan perluasan pasar.** Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur melalui peningkatan produktivitas industri, adopsi teknologi berbasis digital, kemitraan industri–UMKM, serta ekspansi pasar nasional dan global. Fasilitas sertifikasi, perizinan usaha, dan standar mutu diperkuat untuk mendukung industri lokal agar mampu tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan.
4. **Meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri manufaktur melalui** perluasan pelatihan vokasi industri, penyelarasan kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja (link and match), serta penyediaan insentif bagi industri padat karya. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur, sehingga industri berperan lebih besar dalam menciptakan pekerjaan produktif.
5. **Penguatan industri kecil sebagai bagian penting dari rantai nilai industri daerah.** Industri kecil diposisikan sebagai pendorong utama industrialisasi inklusif. Melalui pendampingan produksi, digitalisasi pemasaran, fasilitasi pembiayaan, dan penyediaan sentra industri kecil, Pemerintah Kota Makassar berupaya meningkatkan proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai

tambah sektor industri. Strategi ini sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah berbasis UMKM.

6. **Peningkatan kapasitas riset, inovasi, dan teknologi untuk mendorong produktivitas daerah** melalui peningkatan kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga litbang, komunitas inovasi, dunia usaha dan pendanaan riset internasional. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan proporsi anggaran riset terhadap PDRB, serta mendorong inovasi teknologi yang mendukung industrialisasi hijau, efisiensi energi, dan digitalisasi layanan publik serta usaha.

Dengan implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat mencapai indikator-indikator utama Tujuan 9, antara lain: (1) meningkatkan jumlah penumpang dan barang lintas moda transportasi; (2) meningkatkan proporsi nilai tambah industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita; (3) meningkatkan laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur; (4) meningkatkan proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor industri manufaktur; (5) meningkatkan kontribusi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri; dan (6) meningkatkan proporsi anggaran riset terhadap PDRB sebagai fondasi inovasi daerah.

Tabel 3.9. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastrukturegional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
9.1.2.(a)	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Kemenhub, BPS	Penumpang							
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.2.1	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita	BPS	Persen	165.954	171.954	177.954	183.954	189.954	195.954	201.954
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	BPS	Persen	4.80	4,95	5.20	5.35	5.60	5.75	5.9
9.2.2	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	BPS	Persen	75312	77571	79899	82295	84764	87307	89926
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.										
9.3.1	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri	BPS	Persen	24.815	24.915	25.015	25.115	25.215	25.315	25.415

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.										
9.5.1	Proporsi anggaran riset terhadap PDRB	BRIDA	Persen	0,0005	0,0008	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010

3.10. Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Ketimpangan distribusi pendapatan, kerentanan kelompok miskin, dan risiko diskriminasi terhadap kelompok tertentu masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, pencapaian Tujuan 10 TPB menjadi agenda strategis Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali dapat menikmati manfaat pembangunan secara setara.

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut mencakup:

1. **Pengurangan ketimpangan pendapatan melalui inklusi ekonomi dan perluasan akses peluang ekonomi.** Pemerintah memperkuat program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah, serta fasilitasi peningkatan pendapatan melalui UMKM, padat karya, dan perluasan lapangan kerja. Upaya ini bertujuan menurunkan rasio gini, sebagai indikator utama menurunnya kesenjangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.
2. **Pengurangan jumlah penduduk miskin melalui bantuan sosial adaptif dan pemberdayaan ekonomi.** Untuk menurunkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut jenis kelamin dan kelompok umur, Pemerintah Kota Makassar memperluas program perlindungan sosial, bantuan pangan, beasiswa, intervensi gizi, serta program peningkatan pendapatan keluarga miskin. Kebijakan ini mempertimbangkan kelompok perempuan kepala keluarga, anak, lansia, dan kelompok usia produktif yang rentan secara ekonomi.
3. **Menurunkan proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pendapatan melalui penguatan inklusi sosial dan ekonomi.** Upaya pengurangan kerentanan ekonomi dilakukan melalui peningkatan akses pekerjaan layak, pelatihan vokasi, fasilitasi kewirausahaan, serta perluasan akses pendidikan dan layanan dasar. Intervensi ini diarahkan untuk menurunkan proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pendapatan, termasuk menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas, sehingga kesempatan ekonomi menjadi lebih merata.
4. **Penghapusan kebijakan diskriminatif dan peningkatan perlindungan hukum bagi seluruh kelompok masyarakat.** Pemerintah Kota Makassar memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap kebijakan yang berpotensi diskriminatif berdasarkan hukum HAM internasional. Upaya dilakukan melalui identifikasi dan evaluasi kebijakan diskriminatif, penyusunan kebijakan yang inklusif, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam perspektif HAM. Hal ini ditujukan untuk menurunkan jumlah kebijakan yang bersifat diskriminatif dalam 12 bulan terakhir, sekaligus meningkatkan iklim yang aman dan setara bagi seluruh kelompok rentan.
5. **Perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai perlindungan bagi pekerja rentan** melalui perluasan jangkauan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kampanye edukasi, penyederhanaan pendaftaran, dan kolaborasi dengan dunia usaha serta sektor informal.

Targetnya adalah meningkatkan proporsi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga seluruh pekerja, termasuk pekerja informal, pekerja perempuan, pekerja rentan, dan penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan sosial dan keamanan ekonomi.

Dengan implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat mencapai indikator-indikator utama Tujuan 10, yaitu (1) menurunnya rasio gini sebagai indikator berkurangnya ketimpangan pendapatan; (2) menurunnya persentase penduduk miskin menurut jenis kelamin dan kelompok umur; (3) menurunnya proporsi penduduk di bawah 50% median pendapatan menurut jenis kelamin dan disabilitas; (4) menurunnya jumlah kebijakan diskriminatif dalam 12 bulan terakhir; dan (5) meningkatnya proporsi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai perlindungan pekerja rentan.

Tabel 3.10. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.1 Secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10.1.1.(a)	Rasio gini	BPS	Poin	0,372	0,366	0,359	0,353	0,347	0,341	0,334
10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Persen	4,97	3,62	3,46	3,40	3,28	3,15	3,02
10.2 Memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.										
10.2.1	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Persen							
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.										
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Persen							
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.										
10.4.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja	%	49,01	61,81	67,99	70,78	82,26	90,49	100,00

3.11. Tujuan 11 Kota dan Komunitas Berkelanjutan

Sebagai salah satu pusat pertumbuhan utama di Kawasan Timur Indonesia, Kota Makassar menghadapi tantangan urbanisasi yang pesat, mulai dari kebutuhan hunian layak, peningkatan mobilitas penduduk, penanganan kawasan rawan bencana, hingga pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan. Berdasarkan baseline 2024, akses hunian layak belum sepenuhnya dirasakan secara kolektif oleh masyarakat, rasio perluasan lahan terbangun terhadap pertumbuhan penduduk masih tinggi, sementara kualitas layanan pengelolaan sampah dan udara perkotaan masih memerlukan peningkatan signifikan. Kondisi ini menegaskan pentingnya mengelola pembangunan kota dengan lebih terarah agar Makassar tumbuh sebagai kota yang aman, inklusif, sehat, dan berketahanan. Kota Makassar perlu mengambil langkah kebijakan yang fokus, realistis, dan selaras dengan kebutuhan perkotaan yang terus berkembang, yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau:** Kota Makassar perlu memperkuat penyediaan hunian yang memenuhi standar kelayakan, termasuk melalui pembangunan rumah susun, perbaikan kawasan permukiman padat, dan penyediaan bantuan peningkatan kualitas rumah.
2. **Mengendalikan ekspansi lahan terbangun melalui perencanaan tata ruang yang lebih adaptif:** Rasio lahan terbangun yang masih tinggi menandakan perlunya pengendalian pembangunan horizontal dan mendorong pembangunan vertikal di titik-titik strategis.
3. **Memperkuat kapasitas penanggulangan bencana dan perlindungan kelompok rentan:** Dengan jumlah penduduk terdampak bencana yang masih relatif besar, kapasitas mitigasi dan respons bencana di Makassar perlu diperkuat melalui sistem peringatan dini, tata kelola risiko di kawasan rawan banjir/rob, serta peningkatan ketahanan masyarakat rentan di wilayah pesisir dan bantaran sungai.
4. **Memperluas layanan pengelolaan sampah dan meningkatkan kualitas udara perkotaan:** Akses pengumpulan sampah rumah tangga (80%) dan sampah terkelola (60%) masih perlu ditingkatkan melalui optimasi layanan, perluasan bank sampah, serta integrasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
5. **Menambah dan mengamankan akses terhadap ruang terbuka hijau dan ruang publik inklusif:** Dengan proporsi RTH kota baru mencapai yang masih cukup kecil, perlu dilakukan melalui perlindungan kawasan hijau eksisting, revitalisasi taman kota, dan integrasi RTH dalam pengembangan kawasan baru. Langkah ini juga mendukung keamanan publik dengan menurunkan risiko kejahatan di ruang publik.

Dengan mengintegrasikan penguatan layanan dasar kota, pengendalian pertumbuhan ruang, peningkatan kualitas lingkungan, serta penyediaan ruang publik yang lebih aman dan inklusif, Kota

Makassar dapat bergerak menuju pembangunan wilayah yang lebih berkelanjutan. Pelaksanaan arah kebijakan ini menuntut sinergi lintas sektor, pelibatan masyarakat, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pertumbuhan kota tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan berkeadilan.

Tabel 3.11. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 11 Kota dan Komunitas Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta menata kawasan kumuh.										
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	80,50	81,6	82,7	83,7	84,6	85,4	86,1
11.3 Pada tahun 2030 meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas partisipasi, serta perencanaan dan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi.										
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Badan Informasi Geospasial, BRIN, BPS	Rasio	1,80	1,74	1,68	1,62	1,56	1,50	1,44
11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDRB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.										
11.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BNPB: Geoportal data bencana Indonesia BNPB	Jumlah	65	59	54	50	46	43	40
11.6. Pada Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah kota										
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	80	81,5	83,0	84,5	86,0	87,5	89,0
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional (kota) yang terkelola	Kemen LHK, Dir Pengelolaan Sampah, Dirjen PSLB3, SIPSN	%	60	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikular khusus PM 10	Kemen LHK, BMKG	Rata-Rata	11,87	11,7	11,5	11,3	11,1	10,9	10,7

11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Angka Indeks	75	75,22	75,52	75,82	76,12	76,42	76,72
11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.										
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	LAPAN: citra satelit, Kementerian PUPR, Kementerian LHK	%	15	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	0,04	0,038	0,036	0,034	0,032	0,031	0,030

3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Prooduksi yang Bertanggungjawab

Kota Makassar sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan menanggung beban lingkungan yang semakin meningkat, terutama terkait tingginya timbulan sampah, limbah B3, serta rendahnya efisiensi produksi dan konsumsi. Baseline 2024 menunjukkan persentase sisa makanan dan jumlah limbag B3 per kapita yang relatif masih berada pada angka tinggi, dan tingkat daur ulang sampah yang masih belum optimal. Kondisi ini menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat pola produksi dan konsumsi yang lebih efisien, rendah limbah, dan ramah lingkungan di seluruh sektor rumah tangga, dunia usaha, dan pemerintahan. Untuk memastikan transformasi menuju sistem konsumsi-produksi berkelanjutan Kota Makassar perlu mengarahkan kebijakan pada upaya strategis untuk menekan timbulan sampah, meningkatkan pengelolaan limbah, serta mendorong peran aktif sektor swasta dan masyarakat.

1. **Mengurangi timbulan sampah pangan melalui edukasi dan manajemen rantai pasok:** Persentase sisa makanan yang masih tinggi menuntut kebijakan edukasi konsumsi pangan rumah tangga, optimalisasi distribusi bahan pangan, serta pengembangan program pemanfaatan kembali makanan berlebih.
2. **Memperluas pengelolaan limbah B3 dan meningkatkan penanganan yang aman:** Dengan limbah B3 per kapita yang masih cukup tinggi dan target penurunan bertahap, kota perlu memperkuat fasilitas pengelolaan limbah B3, memperluas pengawasan industri kecil, menengah, serta mendorong kepatuhan terhadap standar penanganan limbah berbahaya.
3. **Mendorong peningkatan kapasitas daur ulang dan ekonomi sirkular:** Target kenaikan jumlah sampah yang didaur ulang mengharuskan penguatan ekosistem daur ulang, seperti perluasan bank sampah, fasilitas pengolahan material properti, dan kemitraan dengan sektor swasta dalam skema *waste-to-product*.
4. **Meningkatkan adopsi standar keberlanjutan oleh dunia usaha:** Jumlah perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutan serta yang tersertifikasi ISO 14001 terus ditargetkan meningkat hingga 2030. Pemerintah Kota Makassar perlu memperkuat insentif, pendampingan, dan kolaborasi dengan pelaku usaha agar standar produksi ramah lingkungan dapat diterapkan secara lebih luas.
5. **Memperluas pendidikan dan kampanye kesadaran lingkungan:** Peningkatan jumlah sekolah dan komunitas peduli lingkungan dari 95 menjadi 135 pada 2030 perlu dipercepat melalui integrasi materi lingkungan dalam pendidikan, kegiatan aksi lingkungan di sekolah, dan gerakan masyarakat peduli sampah sebagai bagian dari budaya urban Makassar.

Penguatan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan Kota Makassar tidak menghasilkan tekanan

lingkungan yang berlebihan. Melalui pengurangan timbulan sampah, peningkatan pengelolaan limbah, adopsi standar keberlanjutan oleh dunia usaha, serta peningkatan kesadaran masyarakat, Makassar dapat beralih menuju ekonomi yang lebih efisien dan berketahanan.

Tabel 3.12. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global per kapita pada tingkat retail dan konsumen serta mengurangi kerugian makananan sepanjang produksi dan rantai makanan, termasuk kerugian paska panen.										
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, PSLB3, KLHK	%	48	46,8	45,6	44,4	43,2	42,0	40,8
12.4 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	Kemen LHK	%							
12.4.2	(a) Jumlah limbah B3 per kapita;	Kemen LHK	Kg	4,4	4,29	4,18	4,08	3,98	3,88	3,78
	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	Kemen LHK	%	60	64,2	68,3	72,5	76,7	80,8	85,0
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.										
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Kemen LHK: SIPSN	Ton	130688	141890	153092	164294	175496	186697	197899
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.										

12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutan (Sustainability Report)	Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah	18	20	22	24	27	30	33
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Kemen LHK	Jumlah	28	30	32	35	38	41	44
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.										
12.8.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga / komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Kemen LHK	Jumlah	95	101	107	113	120	127	135
12.b. Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal.										
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development)	Kementerian Pariwisata	Jumlah	19	20	21	22	23	25	26

3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kota Makassar merupakan wilayah pesisir yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir rob, curah hujan ekstrem, angin kencang, dan gelombang tinggi. Baseline 2024 menunjukkan jumlah korban terdampak bencana hidrometeorologi masih berada pada angka tinggi. Meskipun ditargetkan menurun, tantangan adaptasi iklim di Makassar tetap besar karena kerentanan wilayah pesisir, urbanisasi padat, dan masih terbatasnya infrastruktur mitigasi yang terintegrasi. Untuk memastikan Kota Makassar mampu beradaptasi terhadap risiko iklim yang meningkat, kebijakan yang diambil perlu diarahkan pada penguatan ketahanan wilayah, peningkatan kapasitas sistem peringatan dini, serta pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

1. **Penguatan infrastruktur pengendalian banjir dan perlindungan kawasan pesisir:** Normalisasi kanal, peningkatan kapasitas drainase, serta penguatan tanggul dan sabuk hijau pesisir diperlukan untuk mengurangi potensi banjir dan dampak rob yang menjadi penyebab utama tingginya jumlah penduduk terdampak.
2. **Optimalisasi sistem peringatan dini dan respons cepat kebencanaan:** Pemanfaatan teknologi informasi untuk peringatan dini, disertai peningkatan koordinasi antarlembaga dan kapasitas respons kelurahan, akan membantu meminimalkan korban terdampak saat kejadian ekstrem.
3. **Penguatan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan:** Edukasi risiko, latihan evakuasi, dan pembentukan komunitas siaga bencana membantu mempercepat reaksi masyarakat ketika terjadi bencana hidrometeorologi.

Dengan fokus pada penguatan infrastruktur adaptif, sistem peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat, Kota Makassar dapat menurunkan dampak bencana secara signifikan menuju 2030. Upaya ini akan meningkatkan ketahanan kota sekaligus memastikan pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Tabel 3.13. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara										
13.1.1.(a)	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	BNPB: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI)	Jumlah	165	152	140	129	119	109	100

3.14. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, Kelembagaan yang Tangguh

Sebagai kota metropolitan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan mobilitas penduduk di kawasan timur Indonesia, Makassar membutuhkan sistem keamanan dan kelembagaan yang kuat untuk memastikan stabilitas sosial serta perlindungan bagi seluruh warganya. Berbagai isu seperti tindak kekerasan, kejahatan yang melibatkan kelompok rentan, akses yang belum merata terhadap bantuan hukum, serta kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan responsif, menuntut perhatian serius. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan publik menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjamin terciptanya lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan menjunjung tinggi keadilan. Dalam rangka memperkuat fondasi perdamaian, keamanan, dan tata kelola yang efektif, Kota Makassar perlu memfokuskan arah kebijakan pada upaya yang paling relevan dan berdampak langsung bagi masyarakat:

1. **Penguatan sistem pencegahan dan penanganan kejahatan kekerasan:** Makassar perlu meningkatkan kualitas pengawasan lingkungan melalui patroli terpadu, pemanfaatan teknologi seperti CCTV berbasis *smart city*, dan pelibatan masyarakat dalam forum keamanan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.
2. **Memperluas perlindungan terhadap perempuan dan anak dari TPPO dan kekerasan:** Peningkatan layanan perlindungan, penyediaan fasilitas aman seperti *shelter*, layanan psikososial, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku menjadi kunci untuk menurunkan risiko bagi kelompok rentan.
3. **Memperkuat akses masyarakat miskin terhadap layanan bantuan hukum:** Kemudahan akses, sosialisasi yang lebih aktif, serta kemitraan dengan lembaga bantuan hukum dan perguruan tinggi diperlukan untuk memastikan kelompok rentan memperoleh dukungan hukum yang memadai.
4. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif:** Digitalisasi layanan, penguatan kapasitas aparatur, dan monitoring berbasis data dibutuhkan untuk menjaga kualitas layanan publik serta memastikan lembaga pemerintah tetap transparan dan dapat dipercaya.
5. **Mendorong inklusivitas dalam pengambilan keputusan publik:** Kebijakan afirmatif, peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan, serta penyediaan ruang partisipasi publik yang lebih luas dapat memperkuat representasi kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan memperkuat keamanan, akses terhadap keadilan, dan tata kelola pemerintahan, Kota Makassar dapat menciptakan ekosistem sosial-politik yang lebih stabil dan inklusif. Implementasi arah kebijakan ini menjadi landasan penting untuk memastikan tercapainya Tujuan 16, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan yang adil, aman, dan berpihak pada seluruh warga hingga 2030.

Tabel 3.14. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
16. 1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun										
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kepolisian Daerah Republik Indonesia (Polda)	Jumlah	14	14	13	12	12	11	11
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Polda, BPS	Jumlah							
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	BPS: Susenas Modul KOR	%	0,04	0,038	0,036	0,034	0,032	0,031	0,030
16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak										
16.2.2.	Angka korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan jenis eksploitasi	Kemen PPPA: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI)	Jumlah	14	13	12	11	11	10	9
16.3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua										
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	BPS: Susenas Modul KOR	%	63	65	67	69	71	73	75
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Kemenkumham, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN): Sistem Informasi Database Bantuan Hukum	%	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28
16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat										

16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BPK	%	100	100	100	100	100	100	100
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) $\geq$ B	Kemenpan RB	%	100	100	100	100	100	100	100
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) $\geq$ B	Kemenpan RB	%	100	100	100	100	100	100	100
16.6.2.(a)	Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Ombudsman RI	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1
16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan										
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	KPU	%	16	16	16	16	16	16	20
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	%	22	22	22	22	22	22	25
16.9 Pada Tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran										
16.9.1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil	BPS: Susenas Modul KOR	%	92	93	94	95	96	97	98
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	BPS: Susenas Modul KOR	%	93,7	94,5	95,2	95,8	96,3	96,7	97,0

16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	BPS: Susenas Modul KOR	%	94,8	95,3	95,7	96,10	96,40	96,70	97,00
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasa, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional										
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif	Komisi Informasi Pusat: Monev Keterbukan Informasi Badan Publik	Jumlah							
16.b. Menggalakkan dan menegakkan undang undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan										
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0

3.15. Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar membutuhkan dukungan kemitraan yang kuat, baik melalui optimalisasi mobilisasi sumber daya domestik, peningkatan kapasitas fiskal, kolaborasi pemerintah–swasta, maupun pemanfaatan teknologi dan inovasi. Sebagai kota besar yang berperan dalam konektivitas ekonomi kawasan timur Indonesia, Makassar dihadapkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pendapatan daerah, memperluas kerja sama strategis lintas sektor, dan mempercepat adopsi teknologi digital yang mendukung layanan publik serta produktivitas masyarakat. Dengan memperkuat kolaborasi pada semua tingkatan, Makassar dapat menciptakan fondasi yang lebih solid untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk memastikan kemitraan yang efektif dan peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan, kebijakan perlu difokuskan pada penguatan sistem fiskal, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi multipihak yang lebih produktif.

1. **Memperkuat mobilisasi pendapatan daerah dan kapasitas fiskal:** Peningkatan efektivitas penerimaan pajak daerah dan optimalisasi sumber pendapatan lain perlu dilakukan untuk memperbesar ruang fiskal, termasuk melalui modernisasi sistem perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan integrasi data keuangan daerah.
2. **Mendorong pemanfaatan teknologi dan perluasan infrastruktur digital:** Cakupan jaringan serat optik yang sudah sangat luas perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong transformasi digital layanan publik, meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan memperkuat akses masyarakat terhadap layanan berbasis internet.
3. **Meningkatkan literasi dan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat:** Dengan tren peningkatan pengguna internet tiap tahun, pemerintah perlu memperkuat edukasi digital, mengembangkan pusat layanan teknologi di tingkat kecamatan/kelurahan, serta mendorong pemanfaatan teknologi untuk pendidikan, ekonomi kreatif, dan UMKM.
4. **Mendorong kemitraan pemerintah–swasta melalui skema KPBU:** Agar pembangunan infrastruktur berjalan lebih cepat dan efisien, Kota Makassar dapat memperluas penawaran proyek KPBU yang strategis, termasuk di bidang transportasi, air bersih, energi, dan layanan digital. Hal ini mendukung peningkatan jumlah proyek KPBU yang ditargetkan dalam RAD.
5. **Memperkuat kerja sama regional, nasional, dan internasional:** Kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, pemerintah daerah lain, serta organisasi internasional perlu ditingkatkan untuk memperluas pertukaran pengetahuan, inovasi, dan pendampingan teknis pada sektor-sektor prioritas pembangunan daerah.

Dengan memperkuat kapasitas fiskal, memanfaatkan teknologi secara lebih luas, serta membangun ekosistem kemitraan yang solid antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan mitra

internasional, Kota Makassar dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan dan mempercepat pencapaian target SDGs. Arah kebijakan ini menjadi pondasi penting untuk menggerakkan pembangunan yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan hingga tahun 2030.

Tabel 3.15. Target Pencapaian Indikator SDGs Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya										
17.1.1	Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	Badan Pendapatan Daerah, Badan Pusat Statistik	%	2,83	2,88	2,93	2,98	3,03	3,08	3,13
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	Badan Pendapatan Daerah, Badan Pusat Statistik	%	0,58	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75
17.1.2	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD)	%	37,48	37,90	38,30	38,70	39,10	39,50	40,00
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.										
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik	Kementrian Komunikasi dan Informatika	%	100	100	100	100	100	100	100
17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi										
17.8.1	Persentase pengguna internet	Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	84,0	85,5	86,9	88,2	89,2	90,1	91,0
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.										

17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementrian Keuangan, Kementrian PPN/Bappenas, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ESDM, Kominfo, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemda	Jumlah	2	2	2	3	3	4	4
-------------	---	--	--------	---	---	---	---	---	---	---

BAB IV

TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN RAD TPB/SDGS

4.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TPB/SDGs telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, Rencana Aksi TPB dan RAD TPB, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, Rencana Aksi TPB, dan RAD TPB yang telah selesai.

Dengan demikian, tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan. Selain itu, pemantauan juga bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

Pemantauan dan evaluasi akan difokuskan pada seluruh tujuan, target, dan indikator TPB/SDGs yang selaras dengan RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029. Selain itu, pemantauan dan evaluasi juga diarahkan pada upaya-upaya (program dan kegiatan) yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar untuk pencapaian TPB/SDGs, baik yang dibiayai oleh APBD maupun dari sumber lain (non pemerintah). Sedangkan untuk menilai proses implementasi program dan kegiatan untuk pencapaian TPB/SDGs, digunakan sejumlah indikator sebagai berikut:

- Tingkat keterlibatan dan partisipasi para pihak pada setiap tahapan pelaksanaan,
- Keterlibatan pengambil keputusan dalam proses perencanaan hingga evaluasi,
- Dukungan pemerintah daerah pada setiap tahapan pelaksanaan,
- Pemanfaatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan perangkat kerja secara efektif, efisien, dan produktif,
- Transparansi dalam pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, serta

-
- The diagram illustrates the organizational structure of the Kabupaten Bantul District Office, divided into Pusat (Central) and Daerah (Regional) levels. The hierarchy is as follows:
- Pusat (Central):**
 - Dewan Pengarah** (Supervisory Board) at the top.
 - Koordinator Pelaksana** (Executive Coordinator) reports to the Dewan Pengarah.
 - Tim Pelaksana (Ketua: Deputi KSDA)** (Implementation Team, Head: Deputy KSDA) reports to the Koordinator Pelaksana.
 - Sekretariat** (Secretariat) reports to the Tim Pelaksana.
 - Kelompok Kerja** (Working Group) reports to the Tim Pelaksana.
 - Kemendagri (Ditjen Bina Bangsa)** and **BAPPENAS (Deputi Monev Bappenas)** are functional units that coordinate with the Tim Pelaksana.
 - Daerah (Regional):**
 - Bupati/Walikota** (District Head) at the top of the regional level.
 - Gubernur WPP** (Regional Governor) reports to the Bupati/Walikota.
 - Pokja TPB Provinsi** (Provincial TPB Working Group) reports to the Gubernur WPP.
 - Sekretariat TPB Provinsi** (Provincial TPB Secretariat) reports to the Pokja TPB Provinsi.
- Legend:**
- Solid arrow: Pelaporan (Reporting)
 - Dashed arrow: Arahan/Penugasan (Direction/Assignment)
 - Double-headed dashed arrow: Koordinasi (Coordination)
- Flow Summary:**
- Reporting (Solid Arrows):** Bupati/Walikota → Gubernur WPP; Gubernur WPP → Pokja TPB Provinsi; Pokja TPB Provinsi → Sekretaris TPB Provinsi; Sekretaris TPB Provinsi → Sekretaris (Central); Sekretaris (Central) → Tim Pelaksana; Tim Pelaksana → Koordinator Pelaksana; Koordinator Pelaksana → Dewan Pengarah.
 - Direction/Assignment (Dashed Arrows):** Dewan Pengarah → Koordinator Pelaksana; Koordinator Pelaksana → Tim Pelaksana; Tim Pelaksana → Sekretaris; Tim Pelaksana → Kelompok Kerja; Tim Pelaksana → BAPPENAS; BAPPENAS → Gubernur WPP; Gubernur WPP → Pokja TPB Provinsi; Pokja TPB Provinsi → Sekretaris TPB Provinsi; Sekretaris TPB Provinsi → Sekretaris (Central).
 - Coordination (Double-headed Dashed Arrows):** Sekretaris (Central) ↔ Kelompok Kerja; Kelompok Kerja ↔ Tim Pelaksana; Tim Pelaksana ↔ BAPPENAS; BAPPENAS ↔ Gubernur WPP; Gubernur WPP ↔ Pokja TPB Provinsi; Pokja TPB Provinsi ↔ Sekretaris TPB Provinsi.

Gambar 4. 1. Alur Informasi untuk Pemantauan RAD TPB/SDG

1. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi bersama dengan nonpemerintah (termasuk tingkat kabupaten/kota bila ada) yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan/sub kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs

Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat Nasional TPB/SDGs (*Langkah 1*).

2. Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (*Langkah 2*).
3. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui Ketua Tim Pelaksana yang dalam hal ini Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas (*Langkah 3*).
4. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh Sekretariat SDGs (*Langkah 4*).
5. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 5*).
6. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional (*Langkah 6*).
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai Pasal 17 Ayat 3 Perpres Nomor 59 Tahun 2017 (*Langkah 7*).

Setiap akhir tahun pelaksanaan TPB/SDGs, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyusun laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs. Laporan pencapaian TPB/SDGs memuat sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Ringkasan Status Pencapaian TPB/SDGs

Ringkasan narasi dalam satu paragraf atas pencapaian setiap Tujuan, matriks status pencapaian indikator setiap Tujuan mengacu pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Formulir Evaluasi RAD TPB/SDGs

Nama Tujuan SDGs (1)							
Nama Target SDGs (2)							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (Baseline) (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (9)	Status (10)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), Edisi II, 2020

3. Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs Per Tujuan

1. Keadaan dan Kecenderungan (tren)
2. Tantangan dan pembelajaran
3. Kebijakan dan strategi
4. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

4. Penutup

4.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGs

Sesuai dengan arahan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden tersebut ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menyatakan bahwa kegiatan pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Sedangkan kegiatan evaluasi akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Laporan pemantauan disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan. Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilaporkan pada tanggal 15 bulan Juli. Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilaporkan pada tanggal 15 Januari. Laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs disampaikan satu bulan setelah tahun berjalan.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan TPB/SDGs, dilakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi TPB/SDGs ini, meliputi:

Pertama, pemantauan pada saat pelaksanaan. Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan efektifitas pelaksanaan Rencana Aksi TPB/SDGs. Pemantauan

diperlukan dalam rangka *review* kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat di dalam Rencana Aksi TPB/SDGs dengan apa yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan pihak terkait untuk pencapaian tujuan TPB/SDGs. Hasil pemantauan ini digunakan untuk melakukan penyesuaian program dan kegiatan terhadap indikator TPB/SDGs yang akan dilaksanakan sampai pada sisa tahun pelaksanaan Rencana Aksi TPB/SDGs.

Kedua, evaluasi akhir tahun pelaksanaan. Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian TPB/SDGs, sekaligus dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs periode berikutnya. Hasil evaluasi ini juga diharapkan dapat memberikan refleksi pembelajaran bagi pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian TPB/SDGs untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan TPB/SDGs di masa depan.

4.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap RAD TPB/SDGs sebaiknya dipublikasikan secara luas melalui berbagai saluran media, baik *online* maupun *offline*, untuk menjadi pemahaman bersama dan guna mendapatkan respon publik. Publikasi semacam ini penting untuk menyajikan capaian selama ini, masalah yang masih tersisa untuk diselesaikan, dan tantangan yang bakal dihadapi di masa depan untuk diantisipasi.

BAB V

PENUTUP

Proses penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs dilakukan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk kelompok rentan dan kaum difabel. Proses penyusunan telah memaksimalkan keterlibatan pihak non-pemerintah yang terdiri atas dunia usaha, filantropi, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan media, agar mereka turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam program dan kegiatan yang tertuang pada RAD TPB/SDGs.

Rencana Aksi TPB/SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemitraan TPB/SDGs antar pemangku kepentingan dalam bentuk membangun kepercayaan (*trust building*), mengembangkan kemitraan yang setara, bersifat partisipasi dan akuntabel, serta saling menguntungkan.

Penanggung jawab pelaksanaan Rencana Aksi TPB/SDGs ini adalah Walikota Makassar Periode 2025-2029. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Rencana Aksi TPB/SDGs, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar berkewajiban untuk mengkoordinasikan dengan seluruh Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kota Makassar dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Lebih lanjut, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi TPB/SDGs, dikoordinasikan oleh BAPPEDA Kota Makassar.

LAMPIRAN

Matriks 1

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Pencapaian					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan SDGs 1: Tanpa Kemiskinan										
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.										
1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrem	BPS, Susenas Modul Konsumsi, dipadukan dengan data World Bank untuk Purchasing Power Parity		0,59 (2023)	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional										
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS, Susenas Modul Inti (Kor) dan Konsumsi & Pengeluaran (KP)	Persen	4.27	3.62	3.46	3.4	3.28	3.15	3.02
1.2.2	Persentase laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi sesuai dengan definisi nasional	BPS, Susenas (KOR & KP), Sakernas	Persen	4.27	3.62	3.46	3.4	3.28	3.15	3.02
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.										

1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	BPS, Susenas (KOR)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.3.1[a]	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	BPS & BPJS Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.3.1[b]	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPS & BPJS Ketenagakerjaan	Persen	49.01	61.81	67.99	70.78	82.26	90.49	100
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.										
1.4.1	Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar	BPS, Susenas & Podes	Persen	90	90	90	90	90	90	90
1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelampin dan tipe kepemilikan	BPS, Susenas	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.										
1.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BNPB, BPBD	Kejadian	150	12	12	12	12	12	12
Tujuan SDGs 2: Tanpa Kelaparan										

2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.											
2.1.1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	BPS	Persen	3.97	3.83	3.68	3.54	3.4	3.25	3.11	
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.											
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Kemenkes, Survei Status Gizi Indonesia	Persen	19.8	18.8	17.9	17.5	16.9	16.2	15.5	
2.2.2	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Kemenkes, Survei Status Gizi Indonesia	Persen	2.05	2.15	2.41	2.7	3.02	3.39	3.79	
2.2.2[a]	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	Badan Pangan Nasional (Bapanas)	Skor	89.73	89.91	90.09	90.27	90.45	90.63	90.81	
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrem.											
2.c.1	Indikator anomali harga pangan	BPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Tujuan SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera											
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.											
3.1.1	Angka kematian ibu	BPS: Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS)	Persen	71.53	69.09	66.65	64.21	61.77	59.33	56.89	
3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan										

	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		Persen	98.53	99	100	100	100	100	100
	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih		Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										
3.3.3	Kejadian malaria per 1.000 orang	Laporan Kementerian Kesehatan	Persen	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
3.3.4	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Kementerian Kesehatan; Laporan Program Subdit Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis, dan (b) Kusta	Kemenkes: Laporan Rutin RR Elektronik	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis	Pusat Data dan Informasi BPJS Kesehatan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan										
3.5.2.(a)	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	Kementerian Kesehatan: Riskesdas	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3.8.1.(a)	Unmeet need pelayanan kesehatan	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.8.2	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Kementrian Kesehatan, BPJS Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.										
3.a.1	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	19.82	19.5 9	19.3 6	24	23	22	20
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.										
3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Kemenkes: Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan	Persen	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51
Tujuan SDGs 4: Pendidikan Berkualitas										
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
4.1.2	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	BPS: Susenas Modul KOR								
	SD/ Sederajat		Persen	99.38	99.5	99.7 5	100	100	100	100
	SMP/ Sederajat		Persen	99.01	99.1	99.2	99.3	99.4	99.5	99.5
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun	BPS: Susenas Modul KOR								

	usia 7-12 tahun		Persen	0.58	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0
	usia 13-15 tahun		Persen	3.02	2.5	2.25	2	1.5	1	0.5
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.										
4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) menurut jenis kelamin	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	82.65	84	86	88	90	92	95
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.										
4.3.1.(a)	Angka partisipasi kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	21.91	22.9 1	23.9 1	24.9 1	25.9 1	26.9 1	27.1 9
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.										
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.										

4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat dan (iii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) perdesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah /teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas	BPS: Susenas Modul KOR								
	Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/ laki-laki di SD/ MI/ Sederajat		Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Rasio angka partisipasi kasar (APK) perempuan/ laki-laki di SMP/ MTS/ Sederajat		Persen	104.55	104	103.5	103	102.5	102	101
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Tujuan SDGs 5: Kesetaraan Gender										
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.										
5.3.1	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun	BPS: Susenas Modul KOR	Tahun	21	21	21	21	21	21	21
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										

5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah	KPU, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Daerah	Persen	16	16	16	18	20	21	25
5.5.2	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.										
5.6.2	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	BKKBN	Regulasi	4	4	4	4	4	4	4
Tujuan SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak										
6.1. Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua										
6.1.1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Persen	99,25	99,30	99,35	99,40	99,45	99,50	99,55
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
6.2.1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan (a) layanan sanitasi yang dikelola secara aman	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Persen	97,56	97,61	97,66	97,71	97,76	97,81	97,86
	Indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Persen	99,50	99,55	99,60	99,65	99,70	99,75	99,80
	Indikator 6.2.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Persen	98,70	98,75	98,80	98,85	98,90	98,95	99,00

	Indikator 6.2.1.(e) Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan lumpur tinja.	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Persen	87,50	87,5 5	88,5 5	89,5 5	90,5 5	91,0 0	91,5 0
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.										
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang diolah secara aman	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persen	49,36	51,3 5	53,4 5	55,7 5	57,8 0	59,9 0	61,2 0
6.3.2.(a)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Angka Indeks	58,7	73,9 5	74,1 5	74,3 5	74,5 5	74,7 5	74,9 5
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.										
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	Kemen PUPR, BPS	Persen							
6.6. Pada Tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan lahan basah, sungai air tanah, dan danau										
6.6.1.(a)	Indeks Kualitas Lahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Angka Indeks	28,92	36,0 6	36,1 3	36,2 0	36,2 7	36,3 4	36,4 1
Tujuan SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau										
7.1 Menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.										
7.1.1	Rasio elektrifikasi	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Direktorat Jenderal Migas, Kemen ESDM	Jumlah Sambungan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7.1.2.(b)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	99,45						
7.1.2.(c)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	BPS: Susenas Modul KOR	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Tujuan SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										

8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	Persen	5,56	5,73	6,43	7,43	7,73	8,13	8,20
8.1.1.(a)	PDB per kapita	BPS	Rp Juta	165,95	175,46	186,75	200,62	216,13	233,71	252,87
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.										
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS	Persen	-2,24	0,32	2,97	5,84	9,03	13,24	17,24
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.										
8.3.1.(a)	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	BPS	Persen	40,30	39,20	37,90	36,40	34,70	32,80	30,00
8.5 Mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.										
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Rp per jam	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Persen	9,71	9,62	9,53	9,44	9,35	9,26	9,17
8.6 Secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.										
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Persen	19,55	18,78	17,64	16,49	15,35	14,20	13,06
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.										
8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

8.9 Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
8.9.1	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	BPS	Persen	2,14	2,15	2,16	2,17	2,18	2,19	2,20
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS	Orang	95.632	95.852	96.128	96.468	96.767	95.632	97.12
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.										
8.10.1.(a)	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8.10.2.(a)	Jumlah rekening DPK perbankan per 1.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan	Rekening	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8.10.2.(b)	Jumlah rekening uang elektronik per 1.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan	Rekening	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Tujuan SDGs 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi										
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
9.1.2.(a)	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Kemenhub, BPS	Penumpang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.2.1	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita	BPS	Persen	165.954	171.954	177.954	183.954	189.954	195.954	201.954
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	BPS	Persen	4.8	4,95	5.2	5.35	5.6	5.75	5.9
9.2.2	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	BPS	Persen	75312	77571	79899	82295	84764	87307	89926
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.										
9.3.1	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri	BPS	Persen	24.815	24.915	25.015	25.115	25.215	25.315	25.415

9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.										
9.5.1	Proporsi anggaran riset terhadap PDRB	BRIDA	Persen	0,0005	0,0008	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010
Tujuan SDGs 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara										
10.1 Secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10.1.1. (a)	Rasio gini	BPS	Poin	0,372	0,366	0,359	0,353	0,347	0,341	0,334
10.1.1. (b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Persen	4,97	3,62	3,46	3,40	3,28	3,15	3,02
10.2 Memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.										
10.2.1	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.										
10.3.1. (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.										
10.4.1. (b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja	%	49,01	61,81	67,99	70,78	82,26	90,49	100,00
Tujuan SDGs 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan										
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta menata kawasan kumuh.										
11.1.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	80,50	81,6	82,7	83,7	84,6	85,4	86,1
11.3 Pada tahun 2030 meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas partisipasi, serta perencanaan dan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi.										

11.3.1. (a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Badan Informasi Geospasial, BRIN, BPS	Rasio	1,80	1,74	1,68	1,62	1,56	1,50	1,44
11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDRB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.										
11.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BNPB: Geoportal data bencana Indonesia BNPB	Jumlah	65	59	54	50	46	43	40
11.6. Pada Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah kota										
11.6.1. (a)	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan pengumpulan sampah	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	80	81,5	83,0	84,5	86,0	87,5	89,0
11.6.1. (b)	Persentase sampah nasional (kota) yang terkelola	Kemen LHK, Dir Pengelolaan Sampah, Dirjen PSLB3, SIPSN	%	60	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0
11.6.2. (a)	Rata-rata tahunan materi partikular khusus PM 10	Kemen LHK, BMKG	Rata-Rata	11,87	11,7	11,5	11,3	11,1	10,9	10,7
11.6.2. (b)	Indeks Kualitas Udara	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Angka Indeks	75	75,2 2	75,5 2	75,8 2	76,1 2	76,4 2	76,7 2
11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.										
11.7.1. (a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	LAPAN: citra satelit, Kementerian PUPR, Kementerian LHK	%	15	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0
11.7.2. (a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	0,04	0,03 8	0,03 6	0,03 4	0,03 2	0,03 1	0,03 0
Tujuan SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab										
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global per kapita pada tingkat retail dan konsumen serta mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai makanan, termasuk kerugian paska panen.										

12.3.1. (a)	Persentase sisa makanan	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, PSLB3, KLHK	%	48	46,8	45,6	44,4	43,2	42,0	40,8
12.4 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										
12.4.1. (a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	Kemen LHK	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12.4.2	(a) Jumlah limbah B3 per kapita;	Kemen LHK	Kg	4,4	4,29	4,18	4,08	3,98	3,88	3,78
	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	Kemen LHK	%	60	64,2	68,3	72,5	76,7	80,8	85,0
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.										
12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Kemen LHK: SIPSN	Ton	130688	141890	153092	164294	175496	186697	197899
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.										
12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutan (Sustainability Report)	Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah	18	20	22	24	27	30	33
12.6.1. (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Kemen LHK	Jumlah	28	30	32	35	38	41	44
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.										
12.8.1. (a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga / komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Kemen LHK	Jumlah	95	101	107	113	120	127	135
12.b. Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal.										

12.b.1. (a)	Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development)	Kementerian Pariwisata	Jumlah	19	20	21	22	23	25	26
Tujuan SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim										
13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara										
13.1.1. (a)	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	BNPB: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI)	Jumlah	165	152	140	129	119	109	100
Tujuan SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh										
16. 1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun										
16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kepolisian Daerah Republik Indonesia (Polda)	Jumlah	14	14	13	12	12	11	11
16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Polda, BPS	Jumlah	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	BPS: Susenas Modul KOR	%	0,04	0,03 8	0,03 6	0,03 4	0,03 2	0,03 1	0,03 0
16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak										
16.2.2.	Angka korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan jenis eksploitasi	Kemen PPPA: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI)	Jumlah	14	13	12	11	11	10	9
16.3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua										
16.3.1. (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	BPS: Susenas Modul KOR	%	63	65	67	69	71	73	75

16.3.1. (b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Kemenkumham, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN): Sistem Informasi Database Bantuan Hukum	%	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28
16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat										
16.6.1. (a)	Persentase instansi pemerintah daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BPK	%	100	100	100	100	100	100	100
16.6.1. (b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) $\geq$ B	Kemenpan RB	%	100	100	100	100	100	100	100
16.6.1. (c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) $\geq$ B	Kemenpan RB	%	100	100	100	100	100	100	100
16.6.2. (a)	Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Ombudsman RI	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1
16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan										
16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	KPU	%	16	16	16	16	16	16	20
16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	%	22	22	22	22	22	22	25
16.9 Pada Tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran										
16.9.1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil	BPS: Susenas Modul KOR	%	92	93	94	95	96	97	98

16.9.1. (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	BPS: Susenas Modul KOR	%	93,7	94,5	95,2	95,8	96,3	96,7	97,0
16.9.1. (b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	BPS: Susenas Modul KOR	%	94,8	95,3	95,7	96,1 0	96,4 0	96,7 0	97,0 0
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasa, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional										
16.10. 2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif	Komisi Informasi Pusat: Monev Keterbukan Informasi Badan Publik	Jumlah	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16.b. Menggalakkan dan menegakkan undang undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan										
16.b.1. (a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0
Tujuan SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan										
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya										
17.1.1	Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	Badan Pendapatan Daerah, Badan Pusat Statistik	%	2,83	2,88	2,93	2,98	3,03	3,08	3,13
17.1.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	Badan Pendapatan Daerah, Badan Pusat Statistik	%	0,58	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75
17.1.2	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD)	%	37,48	37,9 0	38,3 0	38,7 0	39,1 0	39,5 0	40,0 0
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.										

17.6.1. (b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik	Kementrian Komunikasi dan Informatika	%	100	100	100	100	100	100	100
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi										
17.8.1	Persentase pengguna internet	Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	84,0	85,5	86,9	88,2	89,2	90,1	91,0
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.										
17.17. 1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementrian Keuangan, Kementrian PPN/Bappenas, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ESDM, Kominfo, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemda	Jumlah	2	2	2	3	3	4	4

Matriks 2B

Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan/Indikator Kinerja			Satuan	Baselin e (2024)	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumbe r Penda naan	Lokasi (Kecam atan)	Instansi Pelaksa na
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Tujuan SDGs 1: Tanpa Kemiskinan														
Kode dan nama indikator TPB/SDGs: 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan														
	Program:													
1.02.02.2.0 2.26	Kegiatan: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta gratis JKN/PBPU pemda	Peserta	281,17 8	281,1 78	281,1 78	281,1 78	281,1 78	281,1 78	281,1 78	606,130,25 2,000.00	APBD	RAPPO CINI	Dinas Kesehat an
		Jumlah pekerja bukan penerima upah (PBPU) kls 3 aktif		279,29 2	279,2 92	279,2 92	279,2 92	279,2 92	279,2 92	279,2 92		APBD	RAPPO CINI	Dinas Kesehat an
	Sub Kegiatan:													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.3.1.(b). Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan														
02.07.05	Program: Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS BIPARTIT, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	40.26	41.00	41.00	41.50	42.00	42.50	43.00	38,282,661, 300	APBD		Dinas Tenaga Kerja
02.07.05.2. 02	Kegiatan: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Perkara	264	200	200	200	200	200	200	38,282,661, 300	APBD		Dinas Tenaga Kerja

	Kabupaten/ Kota													
02.07.05.2. 02.0005	Sub Kegiatan: Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	34782	8146 6	8146 6	8146 6	8146 6	8146 6	8146 6	38,282,661, 300	APBD		Dinas Tenaga Kerja
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.4.1.(j). Persentase penduduk usia 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran														
2.12.03.2.0 1	Program: Pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	1,942,141,4 00	APBD	15 kecamatan	DUKCAP IL
2.12.03.2.0 1	Kegiatan: Pelayanan pencatatan sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil yang Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	1,942,141,4 00	APBD	15 kecamatan	DUKCAP IL
2.12.03.2.0 1.01	Sub Kegiatan: Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	1,942,141,4 00	APBD	15 kecamatan	DUKCAP IL
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang														
01.05.03	Program: Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana [SPM]	Orang	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4,972,839,0 00	APBD	15 Kecamatan Kota Makassar	BPBD
1.05.03.2.0 3	Kegiatan: Pelayanan	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	%	100	100	100	100	100	100	100	4,972,839,0 00	APBD	15 Kecamatan	BPBD

	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Korban Bencana Yang Terlaksana											tan Kota Makassar	
1.05.03.2.0 3.04	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4,972,839,000	APBD	15 Kecamatan Kota Makassar	BPBD
1.05.04.2.0 1.0002	Sub Kegiatan 2: Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	12	12	12	12	12		APBD	Kota Makassar	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.0 1.0003	Sub Kegiatan 3: Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12		APBD	Kota Makassar	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Tujuan SDGs 2: Tanpa Kelaparan														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 2.2.1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita														
02.08.06	Program: Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	80,250,000	PAD	Makassar	DPPPA
2.08.06.2.0 2	Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	80,250,000	PAD	Makassar	DPPPA

	n Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota												
2.08.06.2.0 2.0009	Sub Kegiatan: Pendampingan dan pengembangan n lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota yang mendapat pendampingan	Orang	100	100	100	100	100	100	100	80,250,000	PAD	Makassar	DPPPA
02.08.06	Program: Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran keluarga (puspaga) yang berspektif gender dan hak anak sesuai standart	Persen	100	100	100	100	100	100	100	259,535,000	PAD	Makassar	DPPPA
2.08.04.2.0 2	Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan n Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	259,535,000	PAD	Makassar	DPPPA

2.08.04.2.0 2.0005	Sub Kegiatan: Pendampingan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan kab/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat pendampingan	Orang	100	100	210	210	210	210	210	259,535,000	PAD	Makassar	DPPPA
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 2.2.2 Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														
	Program:													
	Kegiatan:													
1.02.02.2.0 2.15	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan Nasional	Persen	80	80	80	80	80	80	80	14,143,712,460.00	APBD	RAPPO CINI	Dinas Kesehatan
02.08.06	Program: Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	80,250,000	PAD	Makassar	DPPPA
2.08.06.2.0 2	Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	80,250,000	PAD	Makassar	DPPPA
2.08.06.2.0 2.0009	Sub Kegiatan: Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota yang mendapat pendampingan	Orang	100	100	100	100	100	100	100	80,250,000	PAD	Makassar	DPPPA

	penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota													
02.08.06	Program: Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran keluarga (puspaga) yang berspektif gender dan hak anak sesuai standart	Persen	100	100	100	100	100	100	100	259,535,000	PAD	Makassar	DPPPA
2.08.04.2.02	Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	259,535,000	PAD	Makassar	DPPPA
2.08.04.2.02.0005	Sub Kegiatan: Pendampingan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan kab/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat pendampingan	Orang	100	100	210	210	210	210	210	259,535,000	PAD	Makassar	DPPPA
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 2.2.2[a] Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).														
02.09.03	Program: Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan	Tingkat konsumsi energi berdasarkan Angka Kecukupan Energi	kkal/kapita	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	19,718,870,500	APBD	KOTA MAKASSAR	Dinas Ketahanan Pangan

	Pangan Masyarakat													
2 09 03 2 04	Kegiatan: Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan PerkapitaTahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Yang Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	15,826,938,500	APBD	KOTA MAKASSAR	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2 04 01	Sub Kegiatan: Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	11,183,511,500	APBD	KOTA MAKASSAR	Dinas Ketahanan Pangan
Kode dan nama indikator TPB/SDGs: 2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif														
	Program:													
	Kegiatan:													
1.02.02.2.0 2.15	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan Nasional	Persen	80	80	80	80	80	80	80	14,143,712,460.00	APBD	RAPPO CINI	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 2.c.1 Indikator anomali harga pangan														
3.27.02	Program: Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Ton	15614	15615	15616	15617	15618	15619	15620	25,041,678,800.00	PAD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua	Dinas Perikanan dan Pertanian
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Ton	5.4	7	8	9	10	11	12				
		Peningkatan Produksi Hortikultura	Ton	310.1	320.1	330.6	340.6	350	360	370				

													Kel/Des a	
3.27.02.2.0 1	Kegiatan: Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Bantuan Sarana Pertanian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	22,843,263, 900.00	PAD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Dinas Perikanan dan Pertanian
3.27.02.2.0 1.0002	Sub Kegiatan: Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Pemantauan Harga Informasi Pasar)	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	22	22	22	22	22	22	22	22,573,720, 400.00	PAD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Dinas Perikanan dan Pertanian
Tujuan SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.1.1 Angka Kematian Ibu														
	Program:													
	Kegiatan:													
1.02.02.2.0 2.01	Sub Kegiatan 1 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	14,966,430, 000.00	APBD	RAPPO CINI	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.0 2.02	Sub Kegiatan 2 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	10,115,179, 000.00	APBD	RAPPO CINI	Dinas Kesehatan
02.08.03	Program: Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persen	1.05%	1%	1%	0.90 %	0.80 %	0.70 %	0.60 %	225,000,00 0	PAD	Makassar	DPPPA

2.08.03.2.0 1	Kegiatan: Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ko ta	Persentase pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	225,000,00 0	PAD	Makass ar	DPPPA
2.08.03.2.0 1.0006	Sub Kegiatan: Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO kepada pengambilan kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan kab/kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Dokume n	3	3	3	3	3	3	3	225,000,00 0	PAD	Makass ar	DPPPA
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.1.2 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan														
02.08.03	Program: Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persen	1.05%	1%	1%	0.90 %	0.80 %	0.70 %	0.60 %	225,000,00 0	PAD	Makass ar	DPPPA
2.08.03.2.0 1	Kegiatan: Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ko ta	Persentase pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	225,000,00 0	PAD	Makass ar	DPPPA

2.08.03.2.0 1.0006	Sub Kegiatan: Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO kepada pengambilan kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan kab/kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	225,000,000	PAD	Makassar	DPPPA
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.5.2 Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir														
	Program:													
	Kegiatan:													
1.02.05.2.0 1.01	Sub Kegiatan 1: Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah posyandu yang menerima bantuan biaya operasional	Posyandu	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	54,948,983,500.00	APBD	RAPPO CINI	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.0 2.01	Sub Kegiatan 2: Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat yang diselenggarakan	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	1,495,663,400.00	APBD	RAPPO CINI	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.0 2.27	Sub Kegiatan 3: Deteksi Dini Penyalahgunaan	Jumlah Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Kegiatan	-	-	3	3	3	3	3	101,071,000.00	APBD	RAPPO CINI	Dinas Kesehatan

	an NAPZA di Fasyankes dan Sekolah													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.a.1 Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun														
	Program:													
	Kegiatan:													
1.02.05.2.0 1.01	Sub Kegiatan: Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah posyandu yang menerima bantuan biaya operasional	Posyandu	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	54,948,983,500.00	APBD	RAPPO CINI	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.0 2.01	Sub Kegiatan 2: Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat yang diselenggarakan	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	1,495,663,400.00	APBD	RAPPO CINI	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan														
	Program:													
	Kegiatan:													
1.02.03.2.0 1.02	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan yang mendapat Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut	Persen	100	100	100	100	100	100	100	1,680,000,000.00	APBD	RAPPO CINI	Dinas Kesehatan

Tujuan SDGs 4: Pendidikan Berkualitas														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.1.2 Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/Sederajat dan SMP/ Sederajat														
1.1.01.02	Program: Pengelolaan Pendidikan													Dinas Pendidik an
1.1.01.02.2. 01	Kegiatan 1: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													Dinas Pendidik an
1.1.01.02.2. 01.25	Sub Kegiatan1:													Dinas Pendidik an
	Kegiatan 2: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													Dinas Pendidik an
	Sub Kegiatan1:													Dinas Pendidik an
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.1.2.(a) Angka anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun; usia 13-15 thun; dan usia 16-18 tahun														
1.1.01.02	Program: Pengelolaan Pendidikan													Dinas Pendidik an
1.1.01.02.2. 01	Kegiatan 1: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													Dinas Pendidik an
1.1.01.02.2. 01.25	Sub Kegiatan1:													Dinas Pendidik an
	Kegiatan 2: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													Dinas Pendidik an

	Sub Kegiatan 1:													Dinas Pendidikan
	Kegiatan 3: Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan													Dinas Pendidikan
	Sub Kegiatan 1:													Dinas Pendidikan
02.08.06	Program: Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	80,250,000	PAD	Makassar	DPPPA
2.08.06.2.02	Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	80,250,000	PAD	Makassar	DPPPA
2.08.06.2.02.0009	Sub Kegiatan: Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota yang mendapat pendampingan	Orang	100	100	100	100	100	100	100	80,250,000	PAD	Makassar	DPPPA
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.2.1 Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat														

02.08.06	Program: Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	80,250,000	PAD	Makassar	DPPPA
2.08.06.2.02	Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	80,250,000	PAD	Makassar	DPPPA
2.08.06.2.02.0009	Sub Kegiatan: Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota yang mendapat pendampingan	Orang	100	100	100	100	100	100	100	80,250,000	PAD	Makassar	DPPPA
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.2.2 Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) menurut jenis kelamin														
1.1.01.02	Program: Pengelolaan Pendidikan													Dinas Pendidikan
1.1.01.02.2.01	Kegiatan 1: Pengelolaan Pendidikan Anak Usi Dini (PAUD)													Dinas Pendidikan
1.1.01.02.2.01.25	Sub Kegiatan 1:													Dinas Pendidikan

02.08.06	Program : Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	80,250,000	PAD	Makassar	DPPPA
2.08.06.2.02	Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	80,250,000	PAD	Makassar	DPPPA
2.08.06.2.02.0009	Sub Kegiatan: Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota yang mendapat pendampingan	Orang	100	100	100	100	100	100	100	80,250,000	PAD	Makassar	DPPPA
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.3.1.(a) Angka partisipasi kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)														
1.1.01.02	Program: Pengelolaan Pendidikan													Dinas Pendidikan
	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan													Dinas Pendidikan
	Sub Kegiatan:													Dinas Pendidikan

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.4.1.(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)													
2.19.02	Program: Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Muda											Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.01	Kegiatan: Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.	Jumlah kegiatan Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda yang terlaksana											Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.01.0014	Sub Kegiatan: Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi											Dinas Pemuda dan Olahraga
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.5.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat													
1.1.01.02	Program: Pengelolaan Pendidikan												Dinas Pendidikan
1.1.01.02.2.01	Kegiatan 1: Pengelolaan												Dinas Pendidikan

	Pendidikan Sekolah Dasar													
1.1.01.02.2.01.38	Sub Kegiatan1:													Dinas Pendidikan
1.1.01.02.2.02	Kegiatan 2: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													Dinas Pendidikan
1.1.01.02.2.02.51	Sub Kegiatan 1:													Dinas Pendidikan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.6.1 Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin														
2.23.02	Program: Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	84.52%	84.60 %	84.60 %	84.63 %	84.66 %	84.69 %	84.72 %		APBD	KOTA MAKASAR	Dinas Perpustakaan
2.23.02.2.01	Kegiatan: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		APBD	KOTA MAKASAR	Dinas Perpustakaan
2.23.02.2.01.0020	Sub Kegiatan 1: Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Layanan (Kartu Perpustakaan)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	Rp50,018,500	APBD	KOTA MAKASAR	Dinas Perpustakaan
2.23.02.2.01.0004	Sub Kegiatan 2:Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	100	100	100	100	100	100	100	Rp265,670,000	APBD	KOTA MAKASAR	Dinas Perpustakaan

	Dasar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan													
2.23.02.2.02	Kegiatan 2: Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100		APBD	KOTA MAKASAR	Dinas Perpustakaan
														Dinas Perpustakaan
2.23.02.2.02.0009	Sub Kegiatan 1: Pemberian penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	0	30	30	30	30	30	30	Rp1,200,000,000	APBD	KOTA MAKASAR	Dinas Perpustakaan
2.23.02.2.02.0010	Sub Kegiatan 2: Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus	5	5	5	5	5	5	5	Rp2,532,088,000	APBD	KOTA MAKASAR	Dinas Perpustakaan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.														
2.22.02	Program: Pengembangan Kebudayaan													Dinas Kebudayaan
2.22.02.2.01	Kegiatan: Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat													Dinas Kebudayaan

	Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota													
2.22.02.2.0 1.0002	Sub Kegiatan: Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan													Dinas Kebudayaan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun														
1.1.01.02	Program: Pengelolaan Pendidikan													Dinas Pendidikan
1.1.01.02.2.04	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Nonformal/ Kesetaraan													Dinas Pendidikan
1.1.01.02.2.04.27	Sub Kegiatan: Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													Dinas Pendidikan
Tujuan SDGs 5: Kesetaraan Gender														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 5.1.1. Jumlah Kebijakan yang responsive gender mendukung pemberdayaan perempuan														
02.08.02	Program: Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) Pada Belanja Langsung APBD	Persen	71%	75%	75	80	85	90	95	465,888,500.00			DPPPA

	Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah kewenangan kab/kota												DPPPA
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan singkronisasi perumusan kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan singkronisasi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender kewenangan kab/kota												DPPPA
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan														
02.08.07	Program: Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar	Persen	100%	100%	100	100	100	100	100				DPPPA
2.08.07.2.0 2	Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah KabupatenKota a	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100				DPPPA
2.08.07.2.0 2.0008	Sub Kegiatan: Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	500	500	500	500	500	500	500				DPPPA

	Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:5.2.2 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.														
02.08.07	Program: Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar	Persen	100%	100%	100	100	100	100	100				DPPPA
2.08.07.2.02	Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100				DPPPA
2.08.07.2.02.0008	Sub Kegiatan: Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	500	500	500	500	500	500	500				DPPPA
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:5.2.2.a Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.														
02.08.07	Program: Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar	Persen	100%	100%	100	100	100	100	100				DPPPA

2.08.07.2.0 2	Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100				DPPPA
2.08.07.2.0 2.0008	Sub Kegiatan: Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	500	500	500	500	500	500	500				DPPPA
Tujuan SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 6.1.1. Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman														
01.03.03	Program: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan	%	3.75	4.12	4.12	4.28	4.45	4.61	4.77	133,495,02 3,200	APBD		DINAS PU
		Persentase Rumah Tangga Yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan	%	0.08	0.19	0.19	0.24	0.30	0.35	0.40				
1.03.03.2.1	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	133,495,02 3,200	APBD		DINAS PU

	Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten Kota													
1.03.03.2.1.0026	Sub Kegiatan 1: Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	7.2	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	26,387,173,600	APBD		DINAS PU
1.03.03.2.1.0028	Sub Kegiatan 2: Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	1.2	9.6	12	12	12	12	12	87,191,188,350	APBD		DINAS PU
1.03.03.2.1.0032	Sub Kegiatan 3: Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	396	200	200	200	200	200	200	19,916,661,250	APBD		DINAS PU
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 6.2.1. Persentase rumah tangga yang menggunakan (a) layanan sanitasi yang dikelola secara aman dan (b) fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun														
01.03.05	Program: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) akses aman	%	8.45	10.28	10.28	12.12	13.91	15.66	17.38	118,066,186,220	APBD		DINAS PU
		Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah	%	0.68	4.15	4.15	6.10	8.17	10.36	12.68				

		Domestik Terpusat (SPALD-T) akses aman												
1.03.05.2.01	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	%	99.86	100	100	100	100	100	100	118,066,186,220	APBD		DINAS PU
1.03.05.2.01.0025	Sub Kegiatan 1: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	M ³ /Hari	183.36	1000	480	480	480	480	480	117,287,547,480	APBD		DINAS PU
1.03.05.2.01.0033	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	1214	2000	1500	1500	1500	1500	1500	778,638,740	APBD		DINAS PU
01. 02. 05	Program: Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan													
1.02.05.2.02.01	Kegiatan: Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat													

	Daerah Kab/Kota													
	Sub Kegiatan 1: Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat yang diselenggarakan	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	1,495,663,400.00	APBD	RAPPO CINI	DINAS KESEHATAN
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 6.3.1.(a) Persentase Limbah Cair Industri yang Diolah Secara Aman														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 6.3.2.(a) Indeks Kualitas Air (IKA)														
	Program: Pengendalian Pencemaran dan /atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Skor	59.6	73.95	74.15	74.35	74.55	74.75	74.95		APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Kegiatan 1 : Pencegahan Pencemaran dan /atau kerusakan Lingkungan Hidup	Tersedianya Data Kualitas Air dan Udara	Dokumen	2	2							APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	Persentase			100	100	100	100	100		APBD		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	Sub Kegiatan 1: Koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air ,Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungah Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah,air,udara dan laut	Dokume n	2	2							APBD		DINAS LINGKU NGAN HIDUP
	Sub Kegiatan 2: Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah Pengujian yang Dilaksanakan oleh Laboratorium	Dokume n	1	1	1	1	1	1	1		APBD		DINAS LINGKU NGAN HIDUP
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 6.4.2.(a) Proporsi Pengambilan Air Baku Bersumber dari Air Permukaan terhadap Ketersediaannya														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 6.6.1.(a) Indeks Kualitas Lahan														
2.11.04	Progam : Program Pengelolaan Keanekaraga man Hayati	Indikator Program : Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan lahan	indeks	28.92								APBD		DINAS LINGKU NGAN HIDUP
2.11.04.2.0 1	Kegiatan : Pengelolaan keanekaragam an Hayati	Indikator kegiatan : Terkelolanya dan Tertatanya Taman Kota dan Taman jalur Hijau Kota	Titik	10								APBD		

	Kabupaten/Kota														
2.11.04.2 .01.0001	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaraga man Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati	Dokume n	2									APBD		
Tujuan SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau															
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 7.1.1. Rasio Elektrifikasi															
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 7.1.2.(b). Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga															
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 7.1.2.(c). Proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga															
Tujuan SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi															
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.1.1*. Laju pertumbuhan PDB per kapita															
05.01.03	Program Koordinasi dan	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Perangkar Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	3,725,794,0 00	APBD	Makassar	Bappeda

	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah													
5.01.03.2.0 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terlaksana	Persen	100	0	100	100	100	100	100	3,725,794,0 00	APBD	Makass ar	Bappeda
5.01.03.2.0 2.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokume n	2	2	1	1	1	1	2	3,725,794,0 00	APBD	Makass ar	Bappeda
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.1.1.(a). PDB per kapita														
05.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam Renja Perangkar Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	3,725,794,0 00	APBD	Makass ar	Bappeda
5.01.03.2.0 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terlaksana	Persen	100	0	100	100	100	100	100	3,725,794,0 00	APBD	Makass ar	Bappeda
5.01.03.2.0 2.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Dokume n	2	2	1	1	1	1	2	3,725,794,0 00	APBD	Makass ar	Bappeda

	Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	yang dikoordinir (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.2.1*. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun														
02.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Prioritas Yang Meningkatkan Produktivitasnya	Persen	20.49	21.21	21.21	22.22	23.21	24.29	25.40	3,546,310,600	APBD		
02.07.03.2.04	Kegiatan: Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	264	200	200	200	200	200	200	1,612,287,100	APBD		
02.07.03.2.04.0001	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	90	150	150	150	150	150	150	1,612,287,100	APBD		
02.07.03.2.05	Kegiatan: Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1,934,023,500	APBD		
02.07.03.2.05.0001	Sub Kegiatan: Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1,934,023,500	APBD		
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.3.1.(a). Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin														

02.07.04	Program: Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	Persen	60.05	61.00	61.00	62.00	63.00	64.00	65.00	2,075,946,5 00	APBD		
02.07.04.2. 01	Kegiatan: Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan, diberdayakan dan mendapatkan fasilitasi layanan	Orang	2601	2820	2820	2820	2820	2820	2820	1,816,604,5 00	APBD		
02.07.04.2. 01.0005	Sub Kegiatan: Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	183	140	140	140	140	140	140	1,816,604,5 00	APBD		
02.07.04.2. 04	Kegiatan: Pelindungan PMI Pra dan Purna Penempatan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan	Orang	40	20	20	20	20	20	20	259,342,00 0	APBD		
02.07.04.2. 04.0003	Sub Kegiatan: Pemberdayaa n Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	40	20	20	20	20	20	20	259,342,00 0	APBD		
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.5.1*. Upah rata-rata per jam pekerja														
02.07.05	Pogram Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, Lks Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta Bpjs Ketenagakerjaan)	Persen	40.26	41.00	41.00	41.50	42.00	42.50	43.00				
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.5.2*. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur														

02.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	Persen								453,510,500			
02.07.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja RTK	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	453,510,500			
02.07.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang	50	50	50	50	50	50	50	453,510,500			
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.6.1*. Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).														
02.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Prioritas Yang Meningkatkan Produktivitasnya	Persen	20.49	21.21	21.21	22.22	23.21	24.29	25.40	3,546,310,600	APBD		
02.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	4,232,610,500			
02.07.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	240	176	32	32	32	32	32	1,012,383,500			
02.07.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Orang	0	0	128	128	128	128	128	3,220,227,000			

	dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi													
02.07.03.2. 04	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusa aan	264	200	200	200	200	200	200	1,612,287,1 00	APBD		
02.07.03.2. 04.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusa aan	90	150	150	150	150	150	150	1,612,287,1 00	APBD		
02.07.03.2. 05	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokume n	1	1	1	1	1	1	1	1,934,023,5 00	APBD		
02.07.03.2. 05.0001	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokume n	1	1	1	1	1	1	1	1,934,023,5 00	APBD		
2.19.02	Program Pengembanga n Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Muda												

2.19.02.2.01	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.	Jumlah kegiatan Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda yang terlaksana												
2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.7.1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.9.1. Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB														
3.3.26.02	Program: Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	24.9	5.0	7.0	10.0	12.0	15.0	18.0	Rp336,582,500	APBD	Makassar	Dinas Pariwisata

3.3.26.02.2.04	Kegiatan: Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Yang Tersusun	Laporan	12	12	12	12	12	12	12		APBD	Makassar	Dinas Pariwisata
3.3.26.02.2.04.09	Sub-Kegiatan: Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12		APBD	Makassar	Dinas Pariwisata
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Presentase Kesenian Tradisional Yang dilestarikan dan dikembangkan	Persentase	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	1,655,232,20.00	APBD	-	Dinas Kebudayaan
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang masyarakat Pelakunya dalam Kota Makassar yang dibina	Persentase	%	%	%	%	%	%	%	1,655,232,20.00	APBD	-	Dinas Kebudayaan
2.22.02.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	275	275	315	315	315	315	315	112,617,000.00	APBD	-	Dinas Kebudayaan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.9.1.(a). Jumlah wisatawan mancanegara														

3.3.26.03	Program: Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persen	N/A	4	5.88	11.11	12.5	15.56	19.23	Rp2,355,96 7,000	APBD	Makassar	Dinas Pariwisata
3.3.26.03.2. 01	Kegiatan: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Tersusun	Laporan	12	12	12	12	12	12	12		APBD	Makassar	Dinas Pariwisata
3.3.26.03.2. 01.03	Sub-Kegiatan: Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2		APBD	Makassar	Dinas Pariwisata
2.2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persentase	1%	1,08 %	1,1 %	1,1 %	1,12 %	1,13 %	1,15 %	653,549,10 0.00	APBD	-	Dinas Kebudayaan
2.2.22.06.2. 01	Pengelolaan Museum Kab/Kota	Jumlah Museum Kota Makassar Yang dikelola	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	653,549,10 0.00	APBD	-	Dinas Kebudayaan
2.2.22.06.2. 01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Orang	59,303	59,303	60,303	61,303	62,303	63,303	64303	177,673,70 0.00	APBD	-	Dinas Kebudayaan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.10.1.(a).Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan														

2.17.07	Program : Program Pemberdayaa n Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari Informal ke Formal	%	10.45	15	15	20	20	30	40		APBD	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Meneng ah
2.17.07.2.0 1	Kegiatan : Pemberdayaa n Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan melalui Pendataan dengan para Pemangku Kepentingan	Unit Usaha	4000	2000	2000	2500	2500	2500	2500		APBD	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Meneng ah
2.17.07.2.0 1.0002	Sub Kegiatan : Pemberdayaa n Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	474	374	590	590	590	590	590	816,163,00 0	APBD	Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Meneng ah
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.10.2.(a). Jumlah rekening DPK perbankan per 1.000 penduduk dewasa													

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.10.2.(b). Jumlah rekening uang elektronik per 1.000 penduduk dewasa														
Tujuan SDGs 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 9.1.2.(a). Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi														
2.35.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkuta Jalan (LLAJ)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persen	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63		APBD		DISHUB
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 9.2.1. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 9.2.1.(a). Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 9.2.2. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur														

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 9.3.1. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri														
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota Makassar dari total	Persen	NA	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	488,181,200.00	APBD	Makassar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri KabupatenKota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	488,181,200.00	APBD	Makassar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar
3.31.02.2.01.02	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan dan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	488,181,200.00	APBD	Makassar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 9.5.1. Proporsi anggaran riset terhadap PDRB														
5.05.02	Program: Penelitian dan Pengembangan Daerah													

5.05.02.2.0 1	Kegiatan: Penelitian dan Pengembang an Bidang Penyelenggara an Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang diselenggarakan	Rekome ndasi	5	5									
5.05.02.2.0 1.01	Sub-Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembang an Bidang Penyelenggara an Otonomi Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	1	2									
5.05.02.2.0 1.12	Sub-Kegiatan: Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	2	2									
5.05.02.2.0 1.13	Sub-Kegiatan: Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang ditertibkan	Rekome ndasi	2	1									

5.05.02.2.02	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan sosial dan kependudukan yang dihasilkan	Dokumen	3	3									
5.05.02.2.02.01	Sub-Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	1									
5.05.02.2.02.03	Sub-Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	1									
5.05.02.2.02.10	Sub-Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	1	1									
5.05.02.2.03	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan yang dihasilkan	Dokumen	2	2									

5.05.02.2.0 3.01	Sub-Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	1									
5.05.02.2.0 3.09	Sub-Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1	1									
5.05.02.2.0 4	Kegiatan: Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen		1									
5.05.02.2.0 4.01	Sub-Kegiatan: Penelitian, Pengembangan dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen		1									
5.05.03	Program: Riset dan Inovasi Daerah													
5.05.03.2.0 1	Kegiatan: Penelitian Pengembangan Pengkajian dan Penerapan													
5.05.03.2.0 1.0001	Sub-Kegiatan: Pemantauan dan evaluasi penelitian pengembangan n pengkajian	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan			1	3	3	3	1	1,229,266,5 00.000	APBD	Makassar	BRIDA

	dan penerapan													
5.05.03.2.0 1.0002	Sub-Kegiatan: Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah			3	1	1	1	1	2,883,270,500.000	APBD	Makassar	BRIDA
5.05.03.2.0 1.0003	Sub-Kegiatan: Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan			10	10	10	10	10	4,469,129,500.000	APBD	Makassar	BRIDA
5.05.03.2.0 1.0004	Sub-Kegiatan: Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan			1	1	1	1	1	180,451,500.000	APBD	Makassar	BRIDA
5.05.03.2.0 1.0005	Sub-Kegiatan: Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan kerja sama	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pelatihan			2	2	2	2	2	901,311,000.000	APBD	Makassar	BRIDA

	pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan													
5.05.03.2.02	Kegiatan: Invensi dan Inovasi													
5.05.03.2.02.0001	Sub-Kegiatan: Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Laporan			1	1	1	1	1	769,470,500.000	APBD	Makassar	BRIDA
5.05.03.2.02.0002	Sub-Kegiatan: Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)	Laporan			1	1	1	1	1	291,425,000.000	APBD	Makassar	BRIDA
5.05.03.2.02.0009	Sub-Kegiatan: Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian pengembangan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Kegiatan			3	3	3	3	3	1,923,505,000.000	APBD	Makassar	BRIDA

	n pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembagapusat organisasi penelitian lainnya di daerah													
5.05.03.2.0 2.0019	Sub-Kegiatan: Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Naskah			1	1	1	1	1	718,848,00 0.000	APBD	Makassar	BRIDA
5.05.03.2.0 2.0026	Sub-Kegiatan: Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Laporan			1	1	1	1	1	174,294,00 0.000	APBD	Makassar	BRIDA
Tujuan SDGs 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 10.1.1.(a). Rasio gini														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 10.1.1.(b). Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur														

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 10.2.1. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 10.3.1.(d). Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 10.4.1.(b). Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan														
02.07.05	Program: Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Pp/Pkb, Lks Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta Bpjs Ketenagakerjaa)	PERSEN	40.26	41.00	41.00	41.50	42.00	42.50	43.00	38,282,661,300	APBD		
02.07.05.2.02	Kegiatan: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Perkara	264	200	200	200	200	200	200	38,282,661,300	APBD		

02.07.05.2. 02.0005	Sub Kegiatan: Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	34782	8146 6	8146 6	8146 6	8146 6	8146 6	8146 6	38,282,661, 300	APBD		
Tujuan SDGs: Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: : 11.1.1.(a) Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau														
01.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Warga Negara korban bencana dan relokasi program pemerintah kab/kota yang memperoleh Rumah Layak Huni												
01.04.02.05	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus yang terlaksana												
01.04.02.05 .0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Pengh uni Rumah Susun	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni Rumah Susun	3	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10,202,050, 000	APBD	Mariso, Biringk anaya	DPPKP
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: : 11.3.1.(a) Rasio Laju Perluasan Lahan Terbangun terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk														
2.14..02		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Persenta se	2.01	2.008	2.008	2.006	2.004	2.002	2	3,313,713,7 00	APBD		DPPKB

	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Persentase	18	17.6	17.6	17.2	16.8	16.4	16			Ujung Pandang	
2.14.02.2.01	Kegiatan: Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang terlaksana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	1,973,104,500	APBD	Ujung Pandang	DPPKB
2.14.02.201.0027	Sub Kegiatan: Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan n Jalur Formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS serta jalur nonformal dan informal	Jumlah Dokumen Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS serta jalur nonformal dan informal	Satuan Pendidikan	57	57	57	57	57	57	57	682,876,000	APBD	Ujung Pandang	DPPKB
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 11.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang														
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran	Laporan	12 Laporan	12	12	12	12	12	12		APBD	Kota Makassar	Dinas Pemadam Kebakar

	dalam Daerah Kabupaten/Kota	dalam Daerah Kabupaten/Kota												an dan Penyelamatan
1.05.04.2.0 1.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	12 Dokumen	12	12	12	12	12	12		APBD	Kota Makassar	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
01.05.03.	Program: Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana [SPM]	Orang	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4,972,839,000	APBD	15 Kecamatan Kota Makassar	BPBD
1.05.03.2.0 3	Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Yang Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	4,972,839,000	APBD	15 Kecamatan Kota Makassar	BPBD
1.05.03.2.0 3.04	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4,972,839,000	APBD	15 Kecamatan Kota Makassar	BPBD
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 11.6.1.(b) Persentase Sampah Nasional (Kota) yang Terkelola														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 11.6.2.(a) Rata-Rata Tahunan Materi Partikular Khusus PM 10														

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 11.6.2.(b) Indeks Kualitas Udara														
	Program: Pengendalian Pencemaran dan /atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Ko ta	Indikator Program: Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Indeks	81.51/ 74.94 (Rumu s IKU baru)								APBD		Dinas Lingkun gan Hidup
	Kegiatan 1: Pencegahan Pencemaran dan /atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Ko ta	Indikator Kegiatan: Tersedianya Data Kualitas Air dan Udara	Dokume n	2								APBD		Dinas Lingkun gan Hidup
	Sub Kegiatan 1: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indikator Sub Kegiatan 1: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, air, udara dan laut	Dokume n	2								APBD		Dinas Lingkun gan Hidup
	Sub Kegiatan 2: Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Indikator Sub Kegiatan 2: Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium	Dokume n	1								APBD		Dinas Lingkun gan Hidup

	Hidup Kabupaten/Ko ta													
Tujuan SDGs 12														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 11.7.1.(a) Proporsi Ruang Terbuka Perkotaan untuk Semua														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 11.7.2.(a) Proporsi Penduduk yang Mengalami Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir														
1 1.05 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketentraman Umum	Persentase Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	Rp126,179, 501,000	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Sat.pol.P P
1 1.05 02 2.01	Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase Jumlah Data Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	Rp121,252, 637,500	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Sat.pol.P P
1 1.05 02 2.01 15	Sub Kegiatan 1: Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dn Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diteksi Dini dan Cegah DIni, Pembinaan dan Penyuluhan,Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Laporan	100	300	100	100	100	100	100	Rp45,342,7 60,700	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Sat.pol.P P

	PelaksanaanP atrol, Pengamanan dan Pengawalan													
1 1.05 02 2.01 05	Sub Kegiatan 2: Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Azasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 352 Orang	Orang	100	352	100	100	100	100	100	Rp. 1.363.250.0 00	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Sat.pol.P P
Tujuan SDGs: Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 12.3.1.(a) Persentase Sisa Makanan														
	Program : Pengelolaan Persampahan	Indikator Program : 1. Terlaksananya pengelolaan sampah diwilayah Kota makassar 2. Prosentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3 R												
	kegiatan : Pengelolaan Sampah	Indikator Kegiatan: Jumlah Sampah yang dikelola												
	Sub Kegiatan : Pengurangan Sampah Melalui pendauran ulang Sampah	Indikator sub Kegiatan : Jumlah Sampah yang terdaur Ulang	ton											

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 12.4.1(a) Prosentase Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dari baseline 50 ton Pengguna Merkuri														
												APBD		Dinas Lingkungan Hidup
												APBD		Dinas Lingkungan Hidup
												APBD		Dinas Lingkungan Hidup
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 12.4.2. (a) Jumlah Limbah B3 per Kapita (b) Proporsi Limbah B3 yang Ditangani/Diolah Berdasarkan Jenis														
2.2.11.05	Program : Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun lainnya	Indikator Program : Prosentase bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang ditangani	Persen									APBD		Dinas Lingkungan Hidup
2.2.11.05.2.01	Kegiatan 2 : Penyimpanan sementara Limbah B3	Indikator Kegiatan : Jumlah Limbah B3 dalam Kota Makasar yang dikumpulkan	Ton									APBD		Dinas Lingkungan Hidup
2.2.11.05.2.01.01	Sub Kegiatan 1 : Fasilitas pemenuhan komitmen izin Penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitas persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dokumen									APBD		Dinas Lingkungan Hidup

	berusaha terintegrasi secara Elektronik													
2.2.11.05.2.01.02	Sub Kegiatan 2 : Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan kegiatan Verifikasi Lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin Penyimpanan Sementara dan pengumpulan Limbah B3	Laporan											
2.2.11.05	Program : Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun lainnya	Indikator Program : Prosentase bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang ditangani	persen									APBD		Dinas Lingkungan Hidup
2.2.11.05.2.02.	Kegiatan : Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : Jumlah Limbah B3 dalam Kota Makasar yang dikumpulkan	ton									APBD		Dinas Lingkungan Hidup

2.2.11.05.2.02.02	Sub Kegiatan 1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara Limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	dokumen										APBD		Dinas Lingkungan Hidup
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 12.5.1.(a) Jumlah Timbulan Sampah yang Didaur Ulang															
	Program : Pengelolaan Persampahan	Indikator Program : 1. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota Makassar 2. Prosentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3 R													
	kegiatan : Pengelolaan Sampah	Indikator Kegiatan: Jumlah Sampah yang dikelola													
	Sub Kegiatan : Pengurangan Sampah Melalui pendauran ulang Sampah	Indikator sub Kegiatan : Jumlah Sampah yang terdaur Ulang	ton												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 12.6.1. Jumlah Perusahaan yang Mempublikasi Laporan Keberlanjutan															
													APBD		Dinas Lingkungan Hidup
													APBD		Dinas Lingkungan

														gan Hidup
												APBD		Dinas Lingkun gan Hidup
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 12.6.1.(a) Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001														
												APBD		Dinas Lingkun gan Hidup
												APBD		Dinas Lingkun gan Hidup
												APBD		Dinas Lingkun gan Hidup
												APBD		Dinas Lingkun gan Hidup
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 12.8.1.(a) Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Lembaga/Komunitas Masyarakat Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup														
												APBD		Dinas Lingkun gan Hidup
												APBD		Dinas Lingkun gan Hidup
												APBD		Dinas Lingkun gan Hidup
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 12.b.1.(a) Jumlah Lokasi yang Menerapkan Pariwisata Berkelanjutan														
3.3.26.02	Program: Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	24.88	5	7	10	12	15	18	10,365,004, 500	APBD	Makass ar	Dinas Pariwisa ta

3.3.26.02.2.02	Kegiatan: Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Dikelola	Kawasan	1	1	1	1	1	1	1				
3.3.26.02.2.02.04	Sub Kegiatan: Pengadaan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	4	4	4	4	4	4	4				
Tujuan SDGs: Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 13.1.1 (a) Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang														
01.05.03.	Program: Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana [SPM]	Orang	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4,972,839,000	APBD	15 Kecamatan Kota Makassar	BPBD
1.05.03.2.03	Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Yang Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	4,972,839,000	APBD	15 Kecamatan Kota Makassar	BPBD
1.05.03.2.03.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Logistik Penyelamatan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4,972,839,000	APBD	15 Kecamatan Kota	BPBD

	dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													Makassar	
Tujuan SDGs: Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh															
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.1.1.(a) Jumlah Korban Kasus Kejahatan Pembunuhan pada Satu Tahun Terakhir															
1 1.05 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketentraman Umum	Persentase Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	Rp126,179,501,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Sat.pol.PP	
1 1.05 02 2.01	Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Data Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	Rp121,252,637,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Sat.pol.PP	
1 1.05 02 2.01 15	Sub Kegiatan 1: Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Laporan	100	300	100	100	100	100	100	Rp45,342,760,700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Sat.pol.PP	

	dan Pengawasan													
1 1.05 02 2.01 05	Sub Kegiatan 2: Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Azasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 352 Orang	Orang	100	352	100	100	100	100	100	Rp. 1.363.250.000	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Sat.pol.P P
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk														
1 1.05 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketentraman Umum	Persentase Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	Rp126,179,501,000	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Sat.pol.P P
1 1.05 02 2.01	Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Data Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	Rp121,252,637,500	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Sat.pol.P P

1 1.05 02 2.01 15	Sub Kegiatan 1: Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Laporan	100	300	100	100	100	100	100	Rp45,342,7 60,700	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Sat.pol.P P
1 1.05 02 2.01 05	Sub Kegiatan 2: Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Azasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 352 Orang	Orang	100	352	100	100	100	100	100	Rp. 1.363.250.0 00	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Sat.pol.P P
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir														
1 1.05 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan	Persentase Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	Rp126,179, 501,000	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Sat.pol.P P

	Ketenteraman Umum													
1 1.05 02 2.01	Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Data Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	Rp121,252,637,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Sat.pol.PP
1 1.05 02 2.01 15	Sub Kegiatan 1: Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Laporan	100	300	100	100	100	100	100	Rp45,342,760,700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Sat.pol.PP
1 1.05 02 2.01 05	Sub Kegiatan 2: Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 352 Orang	Orang	100	352	100	100	100	100	100	Rp. 1.363.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Sat.pol.PP

	Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Azasi Manusia													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.2.2 Angka korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan jenis eksploitasi														
1 1.05 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketentraman Umum	Persentase Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	Rp126,179,501,000	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Sat.pol.P P
1 1.05 02 2.01	Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Data Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	Rp121,252,637,500	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Sat.pol.P P
1 1.05 02 2.01 15	Sub Kegiatan 1: Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Laporan	100	300	100	100	100	100	100	Rp45,342,760,700	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Sat.pol.P P

	PelaksanaanP atrol, Pengamanan dan Pengawalan													
1 1.05 02 2.01 05	Sub Kegiatan 2: Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Azasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 352 Orang	Orang	100	352	100	100	100	100	100	Rp. 1.363.250.0 00	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Sat.pol.P P
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi														
1 1.05 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketentraman Umum	Persentase Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	Rp126,179, 501,000	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Sat.pol.P P
1 1.05 02 2.01	Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase Jumlah Data Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	Rp121,252, 637,500	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Sat.pol.P P

1 1.05 02 2.01 15	Sub Kegiatan 1: Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Laporan	100	300	100	100	100	100	100	Rp45,342,7 60,700	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Sat.pol.P P
1 1.05 02 2.01 05	Sub Kegiatan 2: Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Azasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 352 Orang	Orang	100	352	100	100	100	100	100	Rp. 1.363.250.0 00	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Sat.pol.P P
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.3.1.(b) Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi														

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)														
06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK-RI (Tahun N-1)	Persentase	76.21%	77.21%	78.21%	79.21%	80.21%	81.21%	82.21%	15,414,868,470.00	APBD	Rappocini	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang terlaksana	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14,341,111,970.00	APBD	Rappocini	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	374,625,000.00	APBD	Rappocini	Inspektorat Daerah
05.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	235,089,677,500.00	PAD	KOTA MAKASAR	BPKAD
5.02.02.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Dikoordinasikan dan Disusun	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	8,798,782,300.00	PAD	KOTA MAKASAR	BPKAD
5.02.02.2.03.0005	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2,126,430,000.00	PAD	KOTA MAKASAR	BPKAD

	Pelaksanaan APBD Kab/Kota													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B														
16.6.	Penataan Organisasi	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat												
16.6.1. (b)	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Instansi Pemerintah dengan skor SAKIP B	%	100	100	100	100	100	100	100		APBD	15 kecamatan	Bagian Organisasi
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B														
16.6.	Penataan Organisasi	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat												
16.6.1. (c)	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) B	%	100	100	100	100	100	100	100		APBD	15 Kecamatan	Bagian Organisasi
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.6.2.(a) Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik														
16.6.	Penataan Organisasi	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat												
16.6.2. (a)	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah instansi Pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1		APBD	15 Kecamatan	Bagian Organisasi
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)														

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)														
05.03.02	Program: Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	Persen	65%	73 %	73 %	74 %	75 %	76 %	77 %	21,436,719,000	APBD	UJUNG PANDA NG	BKPSDM D
5.03.02.2.01	Kegiatan: Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Yang Terlaksana	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	7,388,106,000	APBD	UJUNG PANDA NG	BKPSDM D
5.03.02.2.01.0002	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	778	4	4	4	4	4	4	1,254,487,000	APBD	UJUNG PANDA NG	BKPSDM D
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.9.1 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur														
2.12.03.2.01	Program: Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	1,942,141,400	APBD	15 kecamatan	dukcapil
2.12.03.2.01	Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	1,942,141,400	APBD	15 kecamatan	dukcapil
2.12.03.2.01.01	Sub Kegiatan: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	dukumen	12	12	12	12	12	12	12	1,942,141,400	APBD	15 kecamatan	dukcapil

	Peristiwa Penting													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah														
2.12.03.2.0 1	Program: Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	1,942,141,400	APBD	15 kecamatan	dukcapil
2.12.03.2.0 1	Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	1,942,141,400	APBD	15 kecamatan	dukcapil
2.12.03.2.0 1.01	Sub Kegiatan: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	dukumen	12	12	12	12	12	12	12	1,942,141,400	APBD	15 kecamatan	dukcapil
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun														
2.12.03.2.0 1	Program: Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	1,942,141,400	APBD	15 kecamatan	dukcapil
2.12.03.2.0 1	Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Yang Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	1,942,141,400	APBD	15 kecamatan	dukcapil
2.12.03.2.0 1.01	Sub Kegiatan: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	dukumen	12	12	12	12	12	12	12	1,942,141,400	APBD	15 kecamatan	dukcapil
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.10.2.(a) Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif														

16.6.	Penataan Organisasi	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat												
16.6.2. (a)	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah instansi Pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1		APBD	15 Kecamatan	Bagian Organisasi
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	N/A	75	75	77	79	81	83	81,254,326,900.00	APBD	Ujung Pandang	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi	%	100	100	100	100	100	100	100	81,254,326,900.00	APBD	Ujung Pandang	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	-	20	30	30	30	30	30	2,141,617,640.00	APBD	Ujung Pandang	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	-	300	-	-	-	-	-	80,780,960.00	APBD	Ujung Pandang	Dinas Komunikasi dan Informatika
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional														
Tujuan SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 17.1.1 Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya														

05.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	38.17	44.46	45.01	45.46	45.91	46.42	47.06	153,264,286,130	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Persen	81.61	100	100	100	100	100	100	153,264,286,130	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Badan Pendapatan Daerah
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen	50	50	50	56	62	68	74				
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persen	92.41	92.5	93	94	95	96	97				
5.02.04.2.01.0001	Sub Kegiatan 1: Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5,376,497,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0002	Sub Kegiatan 2: Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	5	3	3	3	3	3	3	4,533,507,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0003	Sub Kegiatan 3: Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	3	8	8	8	8	8	8	98,833,006,630	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0005	Sub Kegiatan 4: Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah, dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	5,724,247,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Badan Pendapatan Daerah

5.02.04.2.0 1.0006	Sub Kegiatan 5: Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	14	12	12	12	12	12	12	6,398,089,5 00	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Badan Pendapa tan Daerah
5.02.04.2.0 1.0007	Sub Kegiatan 6: Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	50300	5100 0	5100 0	5200 0	5300 0	5400 0	5500 0	16,814,001, 500	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Badan Pendapa tan Daerah
5.02.04.2.0 1.0009	Sub Kegiatan 7: Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	21600	2200 0	2250 0	2300 0	2350 0	2400 0	2500 0	3,950,487,0 00	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Badan Pendapa tan Daerah
5.02.04.2.0 1.00010	Sub Kegiatan 8: Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokume n	1620	12	12	12	12	12	12	407,912,00 0	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Badan Pendapa tan Daerah
5.02.04.2.0 1.00011	Sub Kegiatan 9: Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokume n	50	12	12	12	12	12	12	2,431,860,0 00	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Badan Pendapa tan Daerah
5.02.04.2.0 1.00013	Sub Kegiatan 10: Pengendalian Pemeriksaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokume n	6	12	12	12	12	12	12	8,362,954,5 00	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Badan Pendapa tan Daerah

	Pengawasan Pajak Daerah													
5.02.04.2.0 1.00015	Sub Kegiatan 11: Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	3	12	12	12	12	12	12	431,723,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Badan Pendapatan Daerah
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB														
05.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	38.17	44.46	45.01	45.46	45.91	46.42	47.06	153,264,286,130	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Persen	81.61	100	100	100	100	100	100	153,264,286,130	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Badan Pendapatan Daerah
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen	50	50	50	56	62	68	74				
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persen	92.41	92.5	93	94	95	96	97				
5.02.04.2.0 1.0001	Sub Kegiatan 1: Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5,376,497,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.0 1.0002	Sub Kegiatan 2: Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	5	3	3	3	3	3	3	4,533,507,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Badan Pendapatan Daerah

5.02.04.2.0 1.0003	Sub Kegiatan 3: Penyuluhan dan Penyebarnya n Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	3	8	8	8	8	8	8	98,833,006, 630	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Badan Pendapa tan Daerah
5.02.04.2.0 1.0005	Sub Kegiatan 4: Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah, dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	5,724,247,0 00	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Badan Pendapa tan Daerah
5.02.04.2.0 1.0006	Sub Kegiatan 5: Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	14	12	12	12	12	12	12	6,398,089,5 00	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Badan Pendapa tan Daerah
5.02.04.2.0 1.0007	Sub Kegiatan 6: Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	50300	5100 0	5100 0	5200 0	5300 0	5400 0	5500 0	16,814,001, 500	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Badan Pendapa tan Daerah
5.02.04.2.0 1.0009	Sub Kegiatan 7: Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	21600	2200 0	2250 0	2300 0	2350 0	2400 0	2500 0	3,950,487,0 00	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Badan Pendapa tan Daerah
5.02.04.2.0 1.00010	Sub Kegiatan 8: Penelitian dan Verifikasi Data	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokume n	1620	12	12	12	12	12	12	407,912,00 0	Penda patan Asli Daerah (PAD)	Kota Makass ar	Badan Pendapa tan Daerah

	Pelaporan Pajak Daerah													
5.02.04.2.0 1.00011	Sub Kegiatan 9: Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	50	12	12	12	12	12	12	2,431,860,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.0 1.00013	Sub Kegiatan 10: Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	6	12	12	12	12	12	12	8,362,954,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.0 1.00015	Sub Kegiatan 11: Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	3	12	12	12	12	12	12	431,723,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Badan Pendapatan Daerah
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 17.1.2 Proporsi Anggaran Domestik yang Didanai oleh Pajak Domestik														
05.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	235,089,677,500.00	PAD	KOTA MAKASSAR	BPKAD
5.02.02.2.0 3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Dikoordinasikan dan Disusun	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	8,798,782,300.00	PAD	KOTA MAKASSAR	BPKAD

5.02.02.2.0 3.0005	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Jumlah Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Dokume n	2	2	2	2	2	2	2	2,126,430,0 00.00	PAD	KOTA MAKAS SAR	BPKAD
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 17.6.1.(b) Persentase Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 17.8.1. Persentase Pengguna Internet														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 17.7.1.(a) Jumlah dokumen daftar rencana proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun														
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	%	6.89% (5.570 Arsip)	25.76 %	25.76 %	44.32 %	62.88 %	81.44 %	100%	1,818,038,6 00	APBD	Makass ar	DINAS KEARSIP AN
2.24.02.2.0 2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Yang Terlaksana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,818,038,6 00	APBD	Makass ar	DINAS KEARSIP AN

2.24.02.2.0 2.0004	Akuisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang mendapat Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Arsip	150	250	1000	1000	1000	1000	1000	1,818,038,6 00	APBD	Makassar	DINAS KEARSIP AN
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14,058,448, 621	APBD	Makassar	DPMPTSP
	Kegiatan: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Makassar yang dilayani	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14,058,448, 621	APBD	Makassar	DPMPTSP
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Indikator : Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelaku Usaha	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	7,819,060,9 88	APBD	Makassar	DPMPTSP

	Sub Kegiatan 2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Indikator : Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizina berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	764,695,431	APBD	Makassar	DPMPTSP
	Sub Kegiatan 3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan yang disediakan	Indikator : Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Orang	100	100	100	100	100	100	100	1,497,406,821	APBD	Makassar	DPMPTSP
	Sub Kegiatan 4 : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Indikator : Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Kegiatan Usaha	500	500	500	500	500	500	500	3,977,285,380	APBD	Makassar	DPMPTSP
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 17.7.1.(b) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)														
	Program: Promosi Penanaman Modal													

	Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Makassar yang diselenggarakan	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	14,508,744,657	APBD	Makassar	DPMPTSP
	Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kab/kota	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	12,050,295,888	APBD	Makassar	DPMPTSP
	Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kab/kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kab/kota	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	2,458,451,770	APBD	Makassar	DPMPTSP
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 17.7.1.(c) Jumlah nilai investasi proyek KPBU yang telah ditandatangani														
	Program: Promosi Penanaman Modal													
	Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Makassar yang diselenggarakan	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	14,508,744,657	APBD	Makassar	DPMPTSP

	Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kab/kota	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	12,050,295,888	APBD	Makassar	DPMPTSP
	Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kab/kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kab/kota	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	2,458,451,770	APBD	Makassar	DPMPTSP

Matriks 3

1. Yayasan Kasih Anak Kanker

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2024)	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Program Pemangku Kepentingan Lainnya													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 1 Tanpa Kemiskinan 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur													
Nama Program 1 : Berani Gundul													
Berani Gundul	Menggalan dana dalam skala besar untuk membantu biaya operasional Rumah Singgah pejuang kanker dan sosial edukasi seputar kanker pada anak	Orang		1000	1000	1000	1000	1000	1000	500,000,000	YKAKI	Mall (Vivo, MARI, dan Nipah)	YKAKI
Nama Program 2 : Sosial Edukasi Kanker pada Anak													
Sosial Edukasi Kanker pada Anak	Mengedukasi masyarakat, pemerhati kanker, perawat, dan dokter, instansi pemerintahan	Orang		2400	2400	2400	2400	2400	2400	72,000,000	YKAKI	RS, Mall, Keurahan, sekolah, dan kampus	YKAKI

	dll pelaksanaan 2x dalam sebulan												
Nama Program 3 : Pendidikan Berkualitas													
sekolah-ku	Memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak penderita kanker, tumor dan penyakit krosis lainnya selama masa pengobatan dan perawatan di RS Wahidin Sudirohusodo dengan tujuan agar anak tersebut tidak putus sekolah	Orang		500	500	500	500	500	500	500,000,000	YKAKI	RS Wahidin Sudirohusodo dan Rumah Kita YKAKI	YKAKI

2. Rumah Zakat

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
TUJUAN SDGs 1: TANPA KEMISKINAN												
Indikator 1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim												
Nama Program: Bantuan Kewirausahaan (BURSA)												

Nama Kegiatan: bantuan modal usaha, sarana usaha, dan pendampingan usaha	1.1 Jumlah peserta program yang mendapatkan bantuan modal usaha, sarana usaha, dan pendampingan usaha	Orang	45	10	14	20	27	38	54	600,000,000	ZIS & Donasi Program	Seluruh Jaringan Desa Berdaya Rumah Zakat Sulawesi Selatan	Rumah Zakat
	2.1 Jumlah peserta program yang mendapatkan bantuan modal usaha, sarana usaha, dan pendampingan usaha keluar dari Garis Kemiskinan	Orang	11	2	3	4	5	8	11				
Nama Program: Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMas)													
Nama Kegiatan: Akses permodalan dan usaha bersama	1.1 Jumlah anggota/peserta program BUMMAS	Orang	23	13	18	25	36	50	70	800,000,000	ZIS & Donasi Program	Seluruh Jaringan Desa Berdaya Rumah Zakat Sulawesi Selatan	Rumah Zakat
	1.2 Jumlah anggota/peserta program BUMMAS yang	Orang	12	3	4	6	8	12	16				

	keluar dari kemiskinan												
Indikator 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur													
Nama Program: Bantuan Kewirausahaan (BURSA)													
Nama Kegiatan: Pemberian bantuan sarana & modal usaha	1.1 Jumlah peserta program laki-laki yang mendapatkan bantuan sarana & modal usaha	Orang	21	1	1	2	3	4	5	600,000,000	ZIS & Donasi Program	Seluruh Jaringan Desa Berdaya a Rumah Zakat Sulawesi Selatan	Rumah Zakat
	1.2 Jumlah peserta program perempuan yang mendapatkan bantuan sarana & modal usaha	Orang	24	9	13	18	25	35	48				
	1.3 Persentase peserta program laki-laki yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Orang	12	1	1	2	3	4	5				
	1.4 Persentase peserta program perempuan	Orang	22	5	7	10	14	19	27				

	yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional												
Nama Program: Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMas)													
Nama Kegiatan: Akses permodalan dan usaha bersama	1.1 Jumlah anggota/peserta program BUMMAS laki-laki	Orang	3	9	13	18	25	35	48	800,000,000	ZIS & Donasi Program	Seluruh Jaringan Desa Berdaya Rumah Zakat Sulawesi Selatan	Rumah Zakat
	1.2 Jumlah anggota/peserta program BUMMAS perempuan	Orang	20	4	6	8	11	15	22				
	1.3 Persentase anggota/peserta program laki-laki yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Orang	3	6	8	12	16	23	32				
	1.4 Persentase anggota/peserta program perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Orang	8	2	3	4	5	8	11				

Indikator 1.2.2* Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional													
Nama Program: Bantuan Kewirausahaan (BURSA)													
Nama Kegiatan: Pemberian bantuan sarana & modal usaha	1.1 Jumlah peserta program laki-laki yang mendapatkan bantuan sarana & modal usaha	Orang	21	1	1	2	3	4	5	600,000,000	ZIS & Donasi Program	Seluruh Jaringan Desa Berdaya Rumah Zakat Sulawesi Selatan	Rumah Zakat
	1.2 Jumlah peserta program perempuan yang mendapatkan bantuan sarana & modal usaha	Orang	24	9	13	18	25	35	48				
	1.3 Persentase peserta program laki-laki yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Orang	12	1	1	2	3	4	5				
	1.4 Persentase peserta program perempuan yang hidup di bawah garis	Orang	22	5	7	10	14	19	27				

	kemiskinan nasional												
Nama Program: Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMas)													
Nama Kegiatan: Akses permodalan dan usaha bersama	1.1 Jumlah anggota/peserta program BUMMAS laki-laki	Orang	3	9	13	18	25	35	48	800,000,000	ZIS & Donasi Program	Seluruh Jaringan Desa Berdaya Rumah Zakat Sulawesi Selatan	Rumah Zakat
	1.2 Jumlah anggota/peserta program BUMMAS perempuan	Orang	20	4	6	8	11	15	22				
	1.3 Persentase anggota/peserta program laki-laki yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Orang	3	6	8	12	16	23	32				
	1.4 Persentase anggota/peserta program perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Orang	8	2	3	4	5	8	11				

Indikator 1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar													
Nama Program: Beasiswa Anak Juara													
Nama Kegiatan: Beasiswa Anak Juara	1.1 Jumlah peserta program Beasiswa Anak Juara SD	Orang	34	34	34	34	34	34	34	96,830,000.00	ZIS & Donasi Program	Seluruh Jaringan Desa Berdaya Rumah Zakat Sulawesi Selatan	Rumah Zakat
	1.2 Jumlah peserta program Beasiswa Anak Juara SMP	Orang	26	25	26	27	28	29	30				
	1.3 Jumlah peserta program Beasiswa Anak Juara SMA/SMK	Orang	16	15	15	17	17	20	20				
TUJUAN SDGs 2: TANPA KELAPARAN													
Indikator 2.1.1* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)													
Nama Program: Desa Bebas Stunting													

Nama Kegiatan 1: Pemberian PMT	1.1 Jumlah peserta program	Orang	13	13	13					135,000,000	ZIS & Donasi Program	Seluruh Jaringan Desa Berdaya Rumah Zakat Sulawesi Selatan	Rumah Zakat
Indikator 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan													
Nama Program: Superqurban													
Nama Kegiatan: Distribusi superqurban	1.1 Jumlah peserta program superqurban secara keseluruhan	Orang	2,827	2,948	2	2.1	2.2	2.3	2.4	15,000,000	ZIS & Donasi Program	Seluruh Jaringan Desa Berdaya Rumah Zakat Sulawesi Selatan	Rumah Zakat
	1.2 Jumlah peserta program dengan kerawanan pangan (masyarakat miskin atau pelosok desa yang membutuhkan)	Orang	2,827	2,948	1.6	1.7	1.8	1.9	2				

	1.3 Jumlah peserta program dengan kerawanan pangan (dilokasi bencana)	Orang	124	400	400	400	400	400	400				
Indikator 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita													
Nama Program: Desa Bebas Stunting													
Nama Kegiatan: Monitoring tumbuh kembang	1.1 Jumlah balita peserta program	Orang	13	13	13					135,000,000	ZIS & Donasi Program	Seluruh Jaringan Desa Berdaya Rumah Zakat Sulawesi Selatan	Rumah Zakat
	1.2 Jumlah balita peserta program yang mengalami stunting	Orang	13	13	13								
TUJUAN SDGs 3: KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA													
Indikator 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi													
Nama Program: Desa Ramah Lansia													

Nama Kegiatan: Pemeriksaan rutin	1.1 Jumlah peserta program lansia	Orang	252	304	356	408	460	512	564	325,000,000	ZIS & Donasi Program	Seluruh Jaringan Desa Berdaya Rumah Zakat Sulawesi Selatan	Rumah Zakat
TUJUAN SDGs 4: PENDIDIKAN BERKUALITAS													
Indikator 4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat													
Nama Program: Beasiswa Anak Juara													
Nama Kegiatan: Beasiswa Anak Juara	1.1 Jumlah penerima beasiswa yang telah lulus jenjang SD/MI	Orang	7	7	5	6	6	4	8	20,450,000	ZIS & Donasi Program	Seluruh Jaringan Desa Berdaya Rumah Zakat Sulawesi Selatan	Rumah Zakat
	1.2 Jumlah penerima beasiswa yang telah lulus jenjang SMP/MT's	Orang	9	5	8	11	8	12	6				
	1.3 Jumlah penerima beasiswa yang telah lulus jenjang SMA/SMK/MA	Orang	3	1	5	4	1	1	2				

TUJUAN SDGs 8: PEKERJAAN LAYAK & PERTUMBUHAN EKONOMI													
Indikator 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin													
Nama Program: Bantuan Kewirausahaan (BURSA)													
Nama Kegiatan: Pendampingan Usaha	1.1 Jumlah tenaga kerja yang terserap	Orang	45	10	14	20	27	38	54	600,000,000	ZIS & Donasi Program	Seluruh Jaringan Desa Berdaya Rumah Zakat Sulawesi Selatan	Rumah Zakat
Nama Program: Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMAs)													
Nama Kegiatan: Pendampingan Usaha	1.1 Jumlah tenaga kerja yang terserap	Orang	23	13	18	25	36	50	70	800,000,000	ZIS & Donasi Program	Seluruh Jaringan Desa Berdaya Rumah Zakat Sulawesi Selatan	Rumah Zakat
Indikator 8.3.1.(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan													
Nama Program: Bantuan Kewirausahaan (BURSA)													

Nama Kegiatan: Bantuan modal usaha	1.1 Jumlah peserta program yang mendapatkan bantuan modal usaha	Orang	45	10	14	20	27	38	54	600,000,000	ZIS & Donasi Program	Seluruh Jaringan Desa Berdaya Rumah Zakat Sulawesi Selatan	Rumah Zakat
Nama Program: Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMas)													
Nama Kegiatan: Bantuan modal usaha	1.1 Jumlah peserta program yang mendapatkan bantuan modal usaha	Orang	23	13	18	25	36	50	70	800,000,000	ZIS & Donasi Program	Seluruh Jaringan Desa Berdaya Rumah Zakat Sulawesi Selatan	Rumah Zakat

3. Yayasan Kalla

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2024)	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 1 Tanpa Kemiskinan 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur													

Nama Program 1: Berbagi Iftar													
Pembagian iftar	100 masjid terpilih sebagai penerima manfaat	unit		32500							Kalla	Kel. Jongaya, Kel. Kunjunga, Kel. Kena, dan Kel. Bontolana	IZI, YBM BRI, WIZ, LAZISNU, Zamrud Catering, Andalas Catering, Mahakam Catering, Salero Catering, 3Wise Catering
Program Pemangku Kepentingan Lainnya													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 4 Pendidikan Berkualitas 4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin. 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin													
Nama Program 2: Pemberdayaan Asnaf													
Pembinaan, pelatihan, dan pendampingan keagamaan	10 muallaf terbina agamanya, mengikuti pelatihan usaha, dan terdampingi usahanya	orang		10	8	8	8	8	8	Rp638,750,000	Kalla	Kel. Antang	IZI, DT Peduli, LAZISNU, dan RZ
Program Pemangku Kepentingan Lainnya													

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 1 Tanpa Kemiskinan 1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. 2 Tanpa Kelaparan 2.1.1* Prevalensi Ketidakhancuran Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).													
Nama Program 3: Idul Fitri Bahagia													
Pembagian sembako	60 Desa/Kelurahan terpilih	lokasi		85000	6800	6800	6800	6800	6800	Rp55,350,000,000	Kalla		Al-Azhar, DT Peduli, IZI, KT, LAZISNU, WIZ, YAKESMA Sultra, YBM BRI, dan YIM
	85000 paket sembako terbagi	unit									Kalla		
Program Pemangku Kepentingan Lainnya													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs													
Nama Program 4: Bantuan Air Bersih													
Re assessment dan survey lapangan	3 lokasi pembangunan sumber air bersih	lokasi		3							Kalla	Kel. Bangkala	DMC IKATEK/P DAM
Pembangunan sumber air bersih	10 mualaf terbina agamanya, mengikuti	orang		10							Kalla		

	pelatihan usaha, dan terdampingi usahanya												
Program Pemangku Kepentingan Lainnya													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 4 Pendidikan Berkualitas 4.3.1. (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).													
Nama Program 5: Beasiswa Kalla													
Pemberian beasiswa penerima lama	Telah menyalurkan kepada 248 penerima beasiswa	orang		248						Rp700,828,600	Kalla		ITB Kalla, Lontara Institute, dan ESQ
Pengabdian masyarakat	Sebanyak 40 mahasiswa yang mengikuti pengabdian untuk melakukan pengabdian masyarakat di 8 desa	orang									Kalla		
Magang Kalla Group	57 penerima Beasiswa Kalla mengikuti magang di Kalla Group	orang									Kalla		
Pelatihan kepemimpinan & kelas pengembangan diri	Pelatihan kepemimpinan terlaksana 1 kali dan target peserta sebanyak 65 orang	orang									Kalla		
	Kelas pengembangan	orang									Kalla		

	n diri terlaksana 3 kali dengan peserta 100 orang setiap pertemuan												
Program Pemangku Kepentingan Lainnya													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 4 Pendidikan Berkualitas 4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.													
Nama Program 6: Beasiswa Keluarga Kalla													
Pemberian beasiswa penerima lama	Pemberian beasiswa kepada 94 anak	orang		398							Kalla		
Pemberian beasiswa untuk penerima manfaat baru	Pemberian beasiswa kepada 108 penerima	orang									Kalla		
Program Pemangku Kepentingan Lainnya													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 4 Pendidikan Berkualitas 4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.													
Nama Program 7: Keluarga Tangguh													
Pelatihan, pendampingan, dan pembentukan Komunitas Keluarga Tangguh	Pelatihan manajemen Keluarga Tangguh dan pemanfaatan bahan domestik sebanyak 5 kali	orang		40							Kalla	Kel. Bunga Eja, Kel. Lembo, Kel. Panna mpu,	Rumah Zakat

	(40 peserta tiap titik), pemberian pendampingan selama 5 bulan, serta pembentukan Komunitas Keluarga Tangguh											dan Kel. Tallo	
Program Pemangku Kepentingan Lainnya													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja / Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun 4 Pendidikan Berkualitas 4.4.1. (a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).													
Nama Program 8: Kesiapan Magang ke Luar Negeri													
Pelatihan dan pendampingan persiapan magang ke Jepang	20 peserta terlatih Bahasa Jepang dan terdampingi selama 9 bulan	orang		20							Kalla	Kel. Kallukuan	Eksternal YHK

4. Baznas

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Program Pemangku Kepentingan Lainnya												

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 1 Tanpa Kemiskinan 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur													
Nama Program 1: Bantuan Bulanan													
Bantuan Bulanan	152 Penerima Manfaat	Orang	150	152	160					Rp1.080.000.000	Dana		BAZNAS
											BAZNAS	Kota	Kota
											Kota	Makassar	Makassar
											Makassar		
Program Pemangku Kepentingan Lainnya													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 1 Tanpa Kemiskinan 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur													
Nama Program 2: Bantuan Keluarga Prasejahtera													
Bantuan Berkah	1530	Orang	1530	1530						Rp612.000.000	Dana		BAZNAS
Ramadhan dan											BAZNAS	Kota	Kota
Keluarga											Kota	Makassar	Makassar
Prasejahtera											Makassar		
Program Pemangku Kepentingan Lainnya													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : Target 4.1: Menjamin semua anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, adil, dan berkualitas. Target 4.3: Memastikan akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki ke pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas.													
Nama Program 3: Beasiswa Santri													
Beasiswa Santri	100 Orang santri menerima bantuan setiap bulan	Orang	100	100						Rp1.200.000.000	Dana		BAZNAS
											BAZNAS	Kota	Kota

											Kota	Makassar	Makassar
											Makassar		
Program Pemangku Kepentingan Lainnya													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 1 Tanpa Kemiskinan 1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. 2 Tanpa Kelaparan 2.1.1* Prevalensi Ketidakhancuran Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).													
Nama Program 4: Bantuan Pekerja Rentan													
	5000 paket sembako	unit	5000	5000						Rp609.500.000	Dana		BAZNAS
Bantuan Pekerja											BAZNAS	Kota	Kota
Rentan											Kota	Makassar	Makassar
											Makassar		
Program Pemangku Kepentingan Lainnya													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 2. Tanpa Kelaparan Target 2.1: Mengakhiri kelaparan dan memastikan akses semua orang, terutama masyarakat miskin dan rentan, terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi sepanjang tahun. Target 2.2: Mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi.													
Nama Program 5: Bank Makanan													
Bank Makanan		Paket	7800	7800						Rp195.000.000	Dana		BAZNAS
											BAZNAS	Kota	Kota

	Pemberian paket makanan bergizi bagi masyarakat kurang mampu										Kota	Makassar	Makassar
											Makassar		
Program Pemangku Kepentingan Lainnya													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs :4 Pendidikan Berkualitas4.3.1. (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).													
Nama Program 6: Makassar Cerdas													
Bantuan	Telah menyalurkan kepada 248 penerima beasiswa	orang		110						Rp300.000.000	Dana	Kota	BAZNAS
Pendidikan											BAZNAS	Makassar	Kota
Tinggi											Kota		Makassar
Program Pemangku Kepentingan Lainnya													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : Target 2 Zero Hunger Target 2.2: Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target internasional untuk stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun.													
Nama Program 7: Bantuan Stunting													
	Pemberian paket Stunting	orang	100	60						60,000,000	Dana		BAZNAS
Bantuan Paket											BAZNAS	Kota	Kota
Ibu dan Anak											Kota	Makassar	Makassar
											Makassar		



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025**